

@ Daan Bronkhorst

**Menguak Masa Lalu, Merenda Hari Depan: Refleksi Atas Pengalaman Komisi Kebenaran di Berbagai Negara**

Judul Asli:

*Truth and Reconciliation, Obstacles and Opportunities for Human Rights*, Amnesty International Dutch Section, Amsterdam 1995

Penerjemah:

Tim Penerjemah ELSAM

Editor: Eddie Sius R. Laggut

Desain Sampul:

Layout:

Cetakan Pertama, Desember 2001

Hak terjemahan dalam bahasa Indonesia ada pada ELSAM

*Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.*

Penerbit

ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Jln. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510

Tlp.: (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs.: (021) 7919 2519

E-mail: [elsam@nusa.or.id](mailto:elsam@nusa.or.id), [advokasi@rad.net.id](mailto:advokasi@rad.net.id)

## Prakata Seri

Setelah lebih dari 32 tahun hidup di bawah kekuasaan pemerintahan yang otoriter dengan dukungan ideologi militerisme yang menindas, dan kembali memasuki era keterbukaan, reformasi dan demokrasi, bangsa Indonesia sepertinya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Bahkan perbincangan sistematis tentang upaya-upaya penyelesaian hukum dan politik belum menjadi agenda utama banyak kalangan, baik DPR maupun pemerintah. Kalaupun ada, orang cenderung bersikap pragmatis dan seadanya, sehingga mengabaikan prosedur dan sasaran yang sesungguhnya. Kita pun belum memiliki perangkat yang memadai untuk menangani berbagai dampak traumatik dari akibat pelanggaran HAM masa lalu. Sementara di sisi lain, dampak traumatik tersebut semakin kelihatan seperti dalam munculnya aksi-aksi kekerasan masyarakat, resistensi ataupun ketidakpatuhan (*social disobedience*), atau bahkan melalui keinginan dan upaya untuk melepaskan diri dari negara RI

Salah satu masalah penting yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu secara tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahasan mengenai penyelesaian pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu seyogianya berada di dalam bingkai wacana “*transitional justice*” karena momentum awal wacana penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tersebut adalah pergantian rezim dari rezim Orde Baru yang otoriter menuju rezim baru yang lebih demokratis. Lalu, apa sebenarnya *transitional justice*? Pertanyaan ini penting karena wacana *transitional justice* lebih luas daripada “sekadar” penyelesaian kasus demi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Landasan moralnya adalah pembentukan pemerintahan dan masyarakat yang menghormati martabat dan hak asasi manusia melalui langkah-langkah demokratis, tanpa kekerasan, dan mengacu ke tertib hukum, sehingga menjamin peristiwa serupa tidak akan terulang di masa depan.

Persoalannya adalah, apa dan bagaimana sikap kita terhadap tindakan pelanggaran HAM masa lalu tersebut? Apakah dengan menghukum atau memaafkan? Apakah yang harus dibuat untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Bagaimana dampaknya bila tidak terselesaikan? Bagaimana nasib para korban? Dan bagaimana kita dapat menjamin untuk menghindari terjadinya kekerasan atau pelanggaran HAM yang sama pada masa depan?

Banyaknya pertanyaan yang harus kita jawab bersama itulah yang menggugah kami, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menerbitkan buku seri *transitional justice* ini. Selama ini, debat wacana tentang masalah keadilan pada masa transisi selalu mengacu pada literatur negara lain yang nota bene terbatas penggunaannya sebagai bahan komparasi semata. Perkembangan literatur dan bahan bacaan tentang *transitional justice* dengan konteks Indonesia untuk keperluan konsumsi umum memang masih sangat terbatas. Untuk itulah, seri ini hadir. Untuk mengisi ruang kosong dalam wacana kajian umum tentang “bagaimana kita sebaiknya menyikapi masa lalu” yang selama ini seolah-olah terpinggirkan.

Kiranya perlu dicatat bahwa berbagai tawaran dalam seri kali ini bukanlah dimaksudkan sebagai semacam pedoman penyelesaian pelanggaran berat HAM di masa lalu. Seri ini diterbitkan dengan maksud untuk mengajak kita semua menyadari bahwa ada persoalan mendasar dan mendesak yang harus kita benahi dalam praktek bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. *Mendasar*, karena menyangkut harkat dan martabat manusia – yang menjadi korban kekerasan dan pelaku kekerasan itu sendiri. *Mendesak*, karena yang dipertaruhkan adalah pelurusan sejarah, eksistensi kekinian manusia, selain tentu saja masa depan kemanusiaan kita.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama adalah masalah kemanusiaan yang secara prinsip merupakan masalah universal, bukan melulu menjadi masalah kajian satu bidang ilmu tertentu. Itulah mengapa, kendatipun semua uraiannya menukik pada satu tema yang sama, namun pendekatan yang ditawarkan dalam seri ini sangat multidimensional dengan karakter komprehensionalitas bahasan yang cukup kental. Sekaligus hal ini menggambarkan bahwa betapa sangat rumitnya kekerasan masa lalu itu baik pada tataran teoritis maupun praktis. Tidak kurang di sini ada pendekatan filosofis yang mencoba menelusup jauh ke dalam wilayah kelam kekerasan itu. Ia mempertanyakan berbagai ide dasar, gagasan, konsep, keyakinan yang menjadi pembungkus wajah keras masa lalu itu, termasuk mempertanyakan pertanyaan tentang kekerasan itu sendiri. Ada pula pendekatan historis yang menawarkan penjelajahan ruang dan waktu dengan menampilkan berbagai pengalaman negeri lain dalam penyelesaian tindak kejahatan hak asasi manusia di masa lalu. Selain itu, ada pula yang membedahnya dengan pisau analitis – sebab bagaimanapun, karakter kekerasan itu sendiri sangat beragam – namun tetap dalam bingkai komprehensif. Itulah beberapa di antara berbagai pendekatan yang ditawarkan dalam seri ini.

Akhirnya, selamat membaca.

## Pengantar Penerbit

*Nulla poena sine lege*, tak ada hukuman tanpa hukum. Lagi, *nulla poena sine praevia lege poenali*, tak ada hukuman yang tidak didahului oleh hukum terlebih dahulu. Itulah prinsip hukum konvensional yang kita kenal selama ini. Prinsip ini dipertegas lagi oleh asas *non-retroactive*, undang-undang tidak berlaku surut (kendatipun bisa juga sebaliknya berdasarkan asas *retroactive*). Dengan begitu, suatu kejahatan tidak akan dikenai hukuman jika hukumnya tidak ada atau belum ada. Kalaupun kemudian hukumnya dibuat, *toh* ia tidak bisa diterapkan pada kejahatan sebelumnya itu – sesuai dengan asas *non-retroactive*.

Persoalannya, dalam konteks ke-Indonesia-an kita, dapatkah kita bersikap pura-pura tidak tahu atau bahkan sengaja tidak mau tahu dan dengan demikian tidak mau peduli terhadap ceceran darah, cabikan daging dan kulit, serakan tulang-belulang, erangan megap-megap asal terdalam jiwa nan traumatis dari setiap anak negeri yang menjadi korban praktek ketidakadilan dan kekerasan rezim otoriter di masa lalu? Hanya karena sebuah prinsip hukum? Atau, lebih *ngeri* lagi, karena hukum di negeri ini memang menghendaki demikian? Di mana setiap geliat dan riak-riak kehidupan menuju pantai pencerahan dimaknai sebagai pemberontakan terhadap kedaulatan hukum dan kekuasaan sah? Bukankah supremasi hukum yang berintikan “kepastian hukum” belaka tanpa “keadilan” adalah supremasi hukum yang “dikremasi” alias mati? Lebih tegas lagi, itu adalah hukum yang jahat.

Merenangi masa sekarang dan menjelang masa depan tanpa sempat merefleksikan dan bahkan menggugat masa lalu adalah suatu kenafian. Lebih lagi, itu merupakan pengkhianatan terhadap masa depan itu sendiri. Maka, tidak bisa tidak, harus ada jalan keluar. Harus ada jalan keluar untuk menyikapi sejarah kelam kekerasan, ketidakadilan, dan kejahatan masa lalu di negeri ini.

Adalah ide, konsep dan keyakinan akan “kebenaran dan rekonsiliasi” yang bisa kita harapkan untuk membawa kita keluar dari kemelut menipu sejarah. Konsep ini, yang di beberapa negara – semisal Afrika Selatan – diinstitusikan menjadi “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi” atau mirip-mirip itu, merupakan perkembangan lanjutan dari konsep hak asasi manusia dan *state responsibility* terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu. Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang hak asasi manusia (UU No. 39 tahun 1999) dan undang-undang pengadilan hak asasi manusia (UU No. 26 tahun 2000). Menurut undang-undang yang disebut kedua, terhadap kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu (dengan kriteria tertentu) berlaku asas *retroactive* dengan dibentuk pengadilan HAM *ad hoc*. Namun demikian, menyadari keterbatasan instrumen tersebut, ELSAM bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM berupaya mengetengahkan satu jalan alternatif yaitu membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

*Nah*, dalam rangka menyuburkan diseminasi gagasan tersebut (secara khusus) dan penyebarluasan gagasan tentang hak asasi manusia serta penumbuhkembangan kesadaran akan keadilan (secara umum) dalam nubari dan kepala setiap putra-putri bangsa ini, kami (ELSAM) menerbitkan beberapa buku yang berbicara tentang bagaimana sebaiknya sikap yang diambil terhadap sejarah ketidakadilan masa lalu di negeri ini. Semuanya kami rangkai dalam seri “Transitional Justice”.

Adapun buku yang ada di hadapan pembaca sekarang ini kiranya tidak perlu kami “dahului” dengan kata-kata yang berambisi mengajak pembaca untuk menikmatinya. Mengapa?

Karena buku ini memang datang menyapa Anda, berbicara dan berdialog dengan Anda, mempersilahkan Anda memasuki pelataran dan setiap lorong dan bilik di mana setiap perabotan uraiannya membahasakan kelugasan dan keluasan, kecermatan dan kejeniusan, kedalaman dan kearifan, khas seorang Daan Bronkhorst, seorang mantan Direktur Badan Amnesti Internasional yang telah menggeluti masalah hak asasi manusia selama belasan tahun.

Namun demikian, sekadar memberikan gambaran kasar tentang isi dan cakupan serta alasan mengapa buku ini ditulis, berikut ini kami gelarkan karpet menuju pintu masuk karangan ini. Setelah disambut dengan bagian prolog, kepada kita disajikan perbincangan dengan José Zalaquett – seorang pengacara Chili dan pejuang hak asasi manusia berkaliber dan berwawasan internasional dan pernah menjadi ketua komite eksekutif internasional untuk Amnesti Internasional – yang dengan fasih mengemukakan pandangan dan kritiknya yang luas dan tajam tentang pengalaman Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di berbagai negara yang pernah dikunjungi dan digelutinya.

Pada bab 2, Bronkhorst mengajak kita berbicara tentang topik utama buku ini dalam konteksnya, yaitu konteks era transisi. Era 1990-an merupakan era di mana banyak negara berada “dalam proses transisi menuju demokrasi”. Transisi itu sendiri memiliki tahapan perkembangan: *fase genesis*, *fase transformasi*, dan *fase penyesuaian kembali (readjustment)*. Selain itu juga dikemukakan jenis-jenis transisi dan upaya-upaya penegakan hak asasi manusia dalam konteks “transisi menuju demokrasi” tersebut. *Nah*, dalam upaya-upaya tersebut kita tidak bisa menghindar dari persoalan-persoalan moral yang tidak bisa tidak dipecahkan. Maka di dalam bab 3 kita disugahi pandangan para filsuf menyangkut persoalan moral ini. Persoalan moral ini diketengahkan bukan untuk membuat kita gentar, namun sebaliknya justru melecut kita untuk melakukan upaya uji coba. Dalam bab 4 diketengahkan aneka pengalaman di berbagai negara – semisal Spanyol, Jerman, Jepang, bahkan jauh hingga masa Athena-Yunanai Kuno dengan Solon sebagai “pahlawan”-nya – dalam hal menyelesaikan sejarah kelam masa lalunya.

Menyikapi masa lalu sungguh tidaklah mudah. Hampir tak ada satu pun model yang bisa diterima secara umum bagi pencarian “kebenaran” sejarah kekerasan sekaligus “re-konsiliasi” dengan masa lalu itu beserta para aktor atau *perpetrator*-nya. Maka di sini, dalam bab 5, Bronkhorst mengusulkan sebuah model yang dinamainya: “model konsiliasi”. Model ini terdiri dari empat unsur utama. *Pertama*, adanya unsur *investigasi*. Investigasi ini perlu dilakukan oleh lembaga independen, kredibel, dan kompeten demi menjamin akurasi, yang biasanya dilaksanakan oleh komisi khusus untuk itu. Dalam bab 8, disajikan uraian tentang komisi khusus tersebut yang lazim diistilahkan “komisi kebenaran”. Dalam bab 12, disajikan secara lebih jelas lagi fungsi investigasi yang dilakukan oleh Badan Hak Asasi Manusia yang resmi, sebagai manifestasi keprihatinan tanpa ujung terhadap permasalahan hak asasi manusia. *Kedua*, unsur *mediasi* yang mencakup semua upaya dialogis dengan pihak-pihak lawan dan badan-badan internasional. *Ketiga*, adanya unsur penyelesaian (*settlement*) menyangkut berbagai upaya penuntutan, amnesti, dan pemberian kompensasi – kesemuanya ini dibahas dalam bab 9.

Pada akhirnya, selain demi menjamin kepentingan masyarakat dan negara secara umum, penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu adalah demi menjamin kepentingan korban, survivor, dan keluarganya. Maka, selain para pelaku dituntut atau dihukum, kepada korban juga harus diberikan upaya restitusi atau pemulihan dan penghormatan dalam bentuk apa pun. Itulah yang menjadi pokok bahasan bab 10 dan 11. Demikianlah secara umum dan garis besar arah dan keprihatinan buku ini.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa kehadiran buku ini bisa membuat kita berpikir lebih jernih dan bersikap lebih arif dalam menyadari dan memandang persoalan kekerasan dan

ketidakadilan masa lalu negeri ini demi melapangkan jalan transisi menuju masa depan yang lebih adil, damai, dan demokratis. *Opus iustitiae pax*. Setiap karya keadilan pada akhirnya melahirkan perdamaian dan kedamaian. Selamat membaca.(\*)

# **Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Oleh: Abdul Hakim G Nusantara SH, LLM

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM membuka dua jalan (*avenue*) bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU tersebut. Yaitu melalui: a) Forum Pengadilan HAM *ad hoc*; dan b) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pasal 43 UU tentang Pengadilan HAM mengatur sebagai berikut:

- 1). Pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*.
- 2). Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- 3). Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan umum.

Selanjutnya Pasal 47 UU Pengadilan HAM menegaskan sebagai berikut:

- 1). Pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- 2). Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 47 menerangkan: “Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan di luar Pengadilan HAM.

Mencermati substansi Pasal 43 dan 47 UU tersebut di atas sampailah kita pada pengertian bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM dapat diselesaikan

melalui Pengadilan HAM *ad hoc* atau melalui forum KKR. UU tentang Pengadilan HAM tidak menetapkan syarat atau kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan kasus pelanggaran berat HAM mana yang akan diselesaikan melalui pengadilan HAM *ad hoc*, dan kasus pelanggaran berat HAM mana yang akan diselesaikan melalui forum KKR. Syarat, prosedur serta mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM melalui KKR akan diatur oleh UU KKR yang sampai saat ini belum ada (sedang dalam proses penyusunan draft). Oleh karena belum ada UU KKR berarti semua kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu akan diselesaikan melalui forum Pengadilan HAM *ad hoc* dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

\*\*\*

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bukanlah sesuatu yang baru atau hanya khas Afrika Selatan dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu. Beberapa negara seperti Uganda, Argentina, Chile, dan lain sebagainya pernah mempunyai pengalaman membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang fungsinya untuk menyelidiki dan mengumpulkan data-data tentang pelanggaran HAM di masa lalu serta mengumumkan hasilnya kepada publik. Data-data yang dikumpulkan Komisi yang memerlukan tindakan hukum lebih lanjut diserahkan ke pengadilan. Di situ kita lihat pengadilan masih menjadi ujung dan tumpuan untuk menyelesaikan secara adil kasus-kasus pelanggaran HAM. Data-data tentang pelanggaran HAM yang dilaporkan kepada Komisi merupakan data resmi yang diakui oleh Pemerintah.

Dengan model seperti itu, KKR di negara-negara tersebut bukanlah merupakan alternatif terhadap forum pengadilan, tetapi merupakan unit kerja tersendiri yang membantu proses penyelesaian kasus Pelanggaran HAM melalui pengadilan. Yang dinilai paling unik dan dianggap berhasil adalah KKR di Afrika Selatan. Dikatakan demikian, karena KKR di Afrika Selatan diberikan kewenangan untuk memberikan amnesti kepada pelaku pelanggaran HAM yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dasar falsafahnya adalah tidak ada maaf tanpa kebenaran. Hanya dengan kebenaran (*truth*) maaf diberikan. KKR juga mempunyai Sub-Komisi reparasi dan rehabilitasi yang berperan dalam perawatan, kompensasi serta rehabilitasi terhadap korban dan atau keluarganya. KKR model Afrika Selatan ini mengedepankan asas keadilan restoratif dengan bertumpu pada pengungkapan kebenaran,



pengakuan, permintaan dan permohonan maaf dan rekonsiliasi. Dengan demikian, KKR menjadi alternatif terhadap pengadilan. Selain itu, anggota KKR diusulkan oleh masyarakat, NGO, dan diangkat oleh Presiden. KKR hanya bersifat sementara yaitu untuk dua tahun.

\*\*\*

Mencermati RUU KKR Indonesia, saya sampai pada kesan bahwa model KKR yang hendak dibentuk tampak mengikuti model Afrika Selatan walaupun tidak sepenuhnya. Konsideran butir (a) RUU KKR Indonesia menyatakan sebagai berikut: “Bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pada era Orde Lama dan masa Orde Baru harus ditelusuri kembali untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran serta menegakkan keadilan dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan persatuan dan rekonsiliasi nasional.

Adapun pembentukan KKR Indonesia didasarkan pada asas-asas berikut di bawah ini:

1. Kemandirian;
2. Bebas tidak memihak;
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Keterbukaan; dan
6. Perdamaian.

KKR Indonesia mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran berat hak asasi manusia dan melaksanakan rekonsiliasi.

Untuk menjalankan fungsi publik tersebut KKR Indonesia mempunyai tugas:

- a. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban;
- b. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. Memberi rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti;
- d. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi;

- e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Untuk itu, KKR Indonesia mempunyai wewenang:

- a. Melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meminta keterangan kepada korban, pelaku, dan atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. Mendapatkan dokumen resmi milik instansi sipil atau militer serta badan-badan swasta, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti;
- e. Memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
- f. Memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi; dan
- g. Menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti apabila perkara sudah didaftar di Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sub Komisi Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi mempunyai wewenang:

- a. Membuat pedoman pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi bagi korban atau keluarganya;
- b. Melakukan klarifikasi kepada korban dan memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan dalam rangka pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban atau keluarganya;
- c. Mengusulkan kepada Komisi bentuk-bentuk pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang bersifat umum untuk memulihkan hak dan martabat korban dan atau keluarganya.

Sub Komisi Pertimbangan Amnesti mempunyai wewenang:

- a. Menerima pengakuan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru;

- b. Menyusun kriteria, syarat, dan tata cara permohonan amnesti untuk pelanggaran berat HAM; dan
- c. Melakukan klarifikasi kepada korban dan atau pelaku terhadap pengakuan atau pengingkaran pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Sub Komisi Penyelidikan dan Klarifikasi mempunyai wewenang:

- a. Menerima pengaduan, mengumpulkan informasi dan bukti-bukti mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dari korban atau pihak lain;
- b. Melakukan pencarian fakta dan bukti-bukti pelanggaran HAM yang berat;
- c. Mendapatkan dokumen resmi milik instansi sipil atau militer serta badan swasta, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri;
- d. Memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
- e. Mengklarifikasi seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban pelanggaran HAM yang berat;
- f. Menentukan kategori dan jenis pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam UU tentang Pengadilan HAM; dan
- g. Membentuk unit penyelidikan dan klarifikasi.

Dengan demikian KKR Indonesia mempunyai tiga Sub-Komisi yaitu Sub-Komisi Penyelidikan dan Klarifikasi, Sub-Komisi Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi, dan Sub-Komisi Pertimbangan Amnesti.

Mencermati ketentuan-ketentuan KKR tersebut di atas, KKR Indonesia memang didesain sebagai alternatif terhadap pelanggaran HAM. RUU KKR memberikan pula peluang *islah* yang sudah dilakukan antara pelaku pelanggaran HAM yang berat dengan korban pelanggaran HAM agar diakui oleh KKR dan merekomendasikan agar kepada pelaku diberikan amnesti. Pasal 27 KKR mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka Komisi dapat mempertimbangkan pemberian rekomendasi kepada presiden untuk memberikan amnesti”.

Dengan demikian, sejauh terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan oleh KKR, bila amnesti diberikan oleh presiden kepada pelaku maka terhadap pelaku tersebut tidak dapat dilakukan lagi tuntutan pidana maupun perdata.

Menurut RUU KKR, keanggotaan Komisi diperoleh berdasarkan seleksi dan pemilihan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dari suatu daftar nominasi yang diajukan oleh perorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan.

Panitia seleksi mengusulkan enam puluh orang calon yang telah memenuhi persyaratan kepada Komnas HAM. Kemudian, Komnas HAM memilih sebanyak tiga puluh orang dari enam puluh calon anggota Komisi yang diajukan oleh panitia seleksi. Ketigapuluh orang yang telah diseleksi tersebut diajukan Komnas HAM kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.

KKR bukanlah forum untuk memberikan *blank amnesty* atau *impunity* kepada para pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hanya para pelaku yang memenuhi syarat tertentu yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan amnesti, yaitu yang telah melakukan pengungkapan kebenaran, pengakuan bersalah, kesediaan meminta maaf, dan tentunya tergantung kondisi kasusnya itu sendiri. Untuk keberhasilan kerja KKR perlu dibuat pula UU Perlindungan Saksi. Sesungguhnya target makro yang hendak dicapai oleh KKR adalah likuidasi sistem yang menjadi sumber terjadinya pelanggaran HAM.

Menurut RUU KKR Indonesia, Pengadilah HAM *ad hoc* tidak berwenang menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang sudah diselesaikan oleh Komisi (Pasal 40). Selain itu, KKR bersifat temporal dan karena itu, menurut RUU-nya, KKR Indonesia melaksanakan tugas selama tiga tahun terhitung sejak tanggal keputusan presiden mengenai pengangkatan anggota Komisi dan dapat diperpanjang selama setahun.(\*)

## **Daftar Isi**

### **Prakata Seri**

### **Pengantar Penerbit**

### **Daftar Isi**

### **Kata Pengantar**

## **1 Membangun Kepedulian Terhadap Korban**

Pelanggaran Berat

Perorangan dan Kolektivitas Sebagai Korban

Masalah-Masalah Khusus yang Menarik Minat dan Perhatian

## **2 Perlindungan Terhadap Korban**

Norma-Norma Hak Asasi Manusia Internasional

Norma-Norma Dalam Hal Pencegahan Kejahatan dan Keadilan Pidana

Norma Hukum Humaniter Internasional

Tanggung Jawab Negara

## **3 Pandangan Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional**

Komite Hak Asasi Manusia

Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial

Komite Menentang Penyiksaan

Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Komisi Penyelidik yang Dibentuk Berdasarkan Konstitusi ILO

Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa

Mahkamah Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia

## **4 Hukum Nasional dan Prakteknya**

## **5 Impunitas dan Hak Korban Atas Reparasi**

## **6 Kompensasi Bagi Para Korban: Studi Kasus Terhadap Invasi Irak Atas Kuwait**

Dasar Hukum Bagi Kewajiban Irak untuk Membayar Kompensasi

Kerugian, Kerusakan Atau Cedera yang Diderita Dalam Hubungan Dengan

Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia

Pemerintah dan Pribadi Sebagai Subjek yang Mengajukan Klaim

Beberapa Komentar

## **7 Penutup: Kesimpulan, Rekomendasi, Prinsip Dasar dan Pedoman**

## SEPULUH TAHUN

### KEBENARAN DAN REKONSILIASI

#### Wawancara dengan pengacara Chili, José Zalaquett

“Kebanyakan orang, khususnya di dunia gerakan hak asasi manusia, dibingungkan oleh ide yang menyatakan bahwa Anda seharusnya juga mengkaji kembali kelayakan prinsip-prinsip yang Anda miliki. Di Chili, Presiden Aylwin, menyatakan dalam inaugurasinya, bahwa dia akan berjuang untuk *semua* kebenaran dan keadilan *sejauh memang memungkinkan*”.

José Zalaquett, biasa dipanggil Pepe, menggambarkan ide-idenya dengan disertai gerak isyarat yang ekspansif dan ekspresi muka yang penuh perasaan. Ide-idenya itu tumbuh dan berkembang dari dan dalam pengalamannya yang lama sebagai aktivis hak asasi manusia. Gerak isyarat dan ekspresi mukanya juga tampak lahir dari persentuhannya dengan kesenian. Di semua dinding rumahnya, bahkan di dapur sekalipun, bergantung karya-karya seni. Terutama karya seni pelukis muda Amerika Latin. Ia juga memiliki lemari buku yang menyimpan sejumlah koleksi kepustakaan Paul Klee – lebih dari 250 judul, yang saya yakin merupakan koleksi terbesar di negerinya. Ketika saya berbicara dengannya, suara musik opera Verdi mengalun sebagai latar belakang – atau sering sebagai latar depan – percakapan kami. Kadang Zalaquett berhenti sejenak pada pertengahan kalimat, bagian kalimat yang khusus, menaikkan volume memberikan kesempatan pada saya untuk mendengar betapa indahnya bagian-bagian yang lebih merdu melintas melalui *sound system* milik terbarunya.

Tahun 1990, Pepe dicalonkan menjadi salah satu dari delapan anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Chili. Sebuah komisi yang bertugas mendokumentasikan

kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama kediktatoran yang baru saja ditumbangkan. Keterlibatannya dalam komisi itu adalah peran yang sangat cocok baginya. Karena ia sudah memiliki pengalaman hampir dua puluh tahun mengkampanyekan hak-hak asasi manusia. Dan dalam tahun-tahun terakhir, ia telah memfokuskan diri di dalam penelitian mengenai upaya berbagai pemerintahan dalam menangani pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lampau.

### **Eksperimen-Eksperimen**

Pada waktu calon presiden Salvador Allende (seorang Marxis) memenangkan pemilihan tahun 1970, Pepe masih menjadi seorang pengacara baru dan merupakan pendukung keras golongan Kiri yang. “Itulah waktu untuk bereksperimen – dengan segala-galanya: politik, cinta dan persahabatan,” ujarnya. Setahun setelah Allende berkuasa, Pepe yang berumur 29 tahun kemudian diangkat sebagai kepala sebuah departemen yang bertanggung jawab dalam pengambilalihan kepemilikan dari para pemilik tanah. Tak lama kemudian ia juga menjadi Deputy Pembantu Rektor bidang Akademik di Universitas Katolik, Santiago. Namun ketika para perwira militer mengambil alih pimpinan universitas setelah peristiwa kup tanggal 11 September 1973, semua staf eksekutifnya mengundurkan diri. Sebulan setelah kup, Zalaquett kemudian mendirikan departemen hak-hak asasi manusia yang ada dalam sebuah Komite untuk Perdamaian yang berpangkalan di gereja. Komite ini kemudian dinamakan kembali dengan Vicaria de la Solidaridad dan merupakan organisasi hak-hak asasi manusia yang paling penting selama tahun-tahun berlangsungnya kediktatoran, yakni antara tahun 1973 sampai tahun 1990.

Pada tahun 1975, kerja Zalaquett mendapatkan pengakuan resmi: tiga bulan ia harus berada dalam penjara. Tahun berikutnya, sekali lagi ia ditahan dan dipaksa untuk diasingkan. Ia pindah ke Prancis dan kemudian ke Amerika Serikat; antara tahun 1979 dan 1982 ia menjadi ketua Komite Eksekutif Internasional dari Amnesti Internasional.

Sejak kembali ke Chili pada tahun 1986, ia banyak berperan sebagai penasihat bagi organisasi-organisasi internasional dan melakukan banyak perjalanan. Tugas yang dijalankannya di masa lampau dan sekarang di Chili, termasuk keanggotaannya dalam komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, selalu dilaksanakannya secara *pro deo*.

### **Kasus-Kasus Penghilangan Secara Paksa**

“Keterlibatan saya dalam soal keadilan dan rekonsiliasi bermula pada tahun 1984, ketika Amnesty mengutus saya mengadakan perjalanan ke Argentina, berkaitan dengan dibentuknya komisi investigasi terhadap tindak penghilangan di negeri ini. Komisi ini juga bertugas menjalankan pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan terhadap para jenderal di negeri itu. Kami memberikan nasihat yang berhati-hati mengenai metode-metode kerja bagi komisi yang sedang menghadapi perjuangan berat itu. Beberapa kelompok korban, termasuk *Madres de Plaza de Mayo* yang telah dikenal secara internasional (Para ibu dari Plaza de Mayo), menolak untuk bekerja sama selama proses investigasi, karena mereka tidak memiliki kepercayaan terhadap proses itu. Dan, di pihak lain, dari kalangan angkatan bersenjata, kerja sama hanya datang dari beberapa perwira junior. Tidak seorang pun dari para perwira senior mau bekerja sama. Dan dalam proses selanjutnya ketika investigasi itu sudah mengalami kemajuan, semakin terbuka mereka menyuarakan kritiknya. Pada akhirnya, Komisi melaporkan adanya hampir 9.000 kasus penghilangan yang berhasil didokumentasikan.”

Dalam pemeriksaan pengadilan yang dilaksanakan kemudian, sembilan orang dari pemimpin junta berhasil diadili; lima di antaranya telah dihukum penjara untuk jangka waktu yang lama. Saat Zalaquett melaporkan pemeriksaan pengadilan di Argentina itulah ia menemukan sebuah konsep bahwa kebenaran, paling tidak, sama pentingnya dengan keadilan. Konsep itulah yang sering ia tekankan berulang-ulang. “Sembilan terdakwa duduk di dek dengan ekspresi tanpa dosa. Orang-orang yang akan dinilai oleh sejarah. Jika rahasia-rahasia dari ‘perang kotor’ tetap disembunyikan dari pendapat publik di Argentina, dan juga dari para prajurit yang tidak pernah terpanggil



untuk mempertanggungjawabkan akibat dari kengerian-kengerian yang mereka perbuat, maka mungkin sembilan orang terdakwa itu dan antek-antek mereka akan diberikan pembenaran – tidak oleh sejarah, tetapi oleh kekurangan dari sejarah.”

Pada tahun yang sama Zalaquett pergi dengan misi Amnesti ke Guinea. Sebuah negara Afrika Barat yang baru mengguncang dirinya dengan kebebasan, terlepas dari rezim yang menakutkan menerapkan hukum “diet hitam” bagi lawan-lawannya: sebuah penahanan tanpa diberi makanan dan air. Paling tidak ada 2900 orang telah terbunuh dengan cara seperti itu. Misi itu diizinkan untuk mengunjungi sejumlah bekas kamp tahanan maupun kamp tahanan yang saat itu masih ada. Dalam laporannya kepada pemerintah Guinea, Zalaquett menegaskan bahwa para tahanan itu kini sudah diperlakukan dengan lebih baik. Pertanda yang memberi harapan lainnya adalah bahwa pemerintah baru telah membentuk sebuah komisi untuk menginvestigasi pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Meskipun demikian barulah pada sepuluh tahun kemudian Zalaquett mengakui bahwa komisi yang dibentuk pemerintah itu tidak pernah menerbitkan laporan, dan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah diadili kejahatannya.

Di negara Afrika berikutnya yang ia kunjungi, Uganda, barulah ia menemukan prospek yang lebih baik. Pada tahun 1987, ia menghimpun laporan bagi Menteri Kehakiman, di bawah namanya sendiri. Dalam memorandum itu, untuk pertama kalinya, ia mampu menyelesaikan sebuah jenis model yang tepat: “Saya menulis bahwa sebuah kebijakan yang didesain untuk menangani masa lalu seharusnya memiliki tiga tujuan: perbaikan, pencegahan, dan penyingkapan. Untuk tujuan perbaikan, meskipun tentu saja kompensasi bagi para korban merupakan hal yang penting, namun hal yang paling penting yang dapat Anda lakukan untuk rakyat sebenarnya adalah membawa perdamaian bagi mereka. Demi tujuan pencegahan, hukuman bisa berupa hukuman yang bersifat pencegahan, dan bisa juga berupa pemberian grasi (*clemency*). Lagi pula, tidak setiap hukuman harus berbentuk hukuman penjara. Pemerintah dapat dibenarkan untuk memberikan amnesti, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat *pertama* adalah bahwa kebenaran harus sudah

ditegakkan. *Kedua* adalah bahwa amnesti tidak dapat diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang melanggar kemanusiaan, termasuk pemusnahan suku bangsa. Syarat *ketiga* adalah bahwa amnesti harus sesuai dengan kemauan rakyat.” Kondisi yang final tersebut secara khusus telah mendatangkan banyak sekali kritik terhadap Zalaquett, sebagaimana akan kita lihat pada bagian selanjutnya.

Sementara itu, komisi resmi investigasi Uganda telah mulai bekerja dengan metode yang banyak diyakini kekuatannya. Namun Zalaquett dengan cepat dapat melihat tidak adanya harapan dalam metode itu. Metode itu tidak mencukupi untuk tugas yang demikian. Pada saat Komisi itu menjalankan kerjanya bagi penyelesaian kira-kira seratus kasus dalam setahun, masih akan terdapat para korban dari rezim-rezim Uganda sebelumnya di suatu tempat tertentu berjumlah antara seratus ribu dan setengah juta orang.

### **Amnesti Internasional**

Hingga akhir tahun 1980-an, Amnesti Internasional sedikit sekali membuat pernyataan mengenai upaya penanganan akibat buruk pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia; organisasi itu terlalu disibukan dengan kampanye menentang pelanggaran hak asasi yang sedang aktual. Namun demikian, Amnesti Internasional telah berusaha mengangkat beberapa prinsip dasar. Amnesti Internasional berkeputusan untuk tidak menerbitkan nama para algojo dan pelaku penyiksaan serta menentang setiap bentuk pemberian pengampunan yang dapat menghalangi pengungkapan kebenaran. Di banyak negara deklarasi pemberian pengampunan telah menjadi dalih bagi diakhirinya semua proses investigasi lebih lanjut. Oleh karenanya, berkaitan dengan hal ini Zalaquett diminta oleh Komite Eksekutif Internasional untuk meninjau kembali posisi Amnesti Internasional.

“Saya menjadi semakin yakin bahwa memang tidak mungkin untuk menyusun pedoman-pedoman yang ketat. Kita semua ingin bersandar pada daftar mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi dalam jenis situasi

yang seperti ini, hal itu tidaklah bisa dilaksanakan. Anda harus juga melihat keadaan-keadaan aktual yang dihadapi dalam kerja pemerintah yang baru terbentuk tersebut. Kadang dalam situasi tertentu, hal itu bisa merupakan suatu kemenangan total, sebagaimana yang terjadi di Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia. Dalam kasus tersebut, Anda dapat mengejar keadilan tanpa tangan Anda terikat. Sekalipun demikian, masih ada jenis situasi transisional yang lain, yakni suatu situasi transisional yang terbentuk ketika suatu rezim telah dikalahkan secara militer oleh kekuasaan asing sehingga mengakibatkan kekalahan politik di dalam negeri. Meskipun para anggota rezim militer yang mengundurkan diri masih tetap menguasai komando angkatan bersenjata. Ini terjadi di Yunani pada tahun 1975 dan di Argentina sepuluh tahun kemudian. Memang banyak sekali keadilan yang dapat dilaksanakan, tetapi tidak semuanya. Atau situasi di mana angkatan bersenjata ternyata mendikte jalannya proses transisi itu, sebagaimana di Uruguay. Hampir tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan di sana. Chili mirip situasinya dengan apa yang terjadi di Uruguay. Dan masih ada jenis yang lain, yakni transisi secara gradual, seperti di Spanyol setelah kematian Franco. Karena kejahatan-kejahatan yang paling buruk itu sudah berlangsung cukup lama, maka rakyat cenderung ingin melupakannya. Pada akhirnya, Anda juga masih dapat melihat situasi lain itu di negara-negara yang tidak satu pihak pun memperoleh kemenangan mutlak. Seperti yang terjadi di El Salvador atau di negara yang masih mengalami konflik .”

Zalaquett menekankan bahwa Amnesti Internasional seharusnya lebih mempromosikan prinsip-prinsip dasar dan tidak memberikan prosedur-prosedur pelaksanaan. Pendapatnya ini memicu perdebatan sengit antara pihak yang berpandangan “fleksibel” dengan “khusus”, baik di dalam maupun di luar tubuh Amnesti Internasional. Salah satu pengkritik Zalaquett yang paling blak-blakan adalah Aryeh Neier. Dia adalah direktur sebuah organisasi yang saat itu sedang berkembang pesat: *Human Rights Watch*. Neier percaya bahwa para pelaku kejahatan seharusnya memang dihukum. Ia menyatakan bahwa negara tidak memiliki hak untuk memaafkan para penjahat. Dalam sebuah diskusi ia menyatakan: “Jika Pepe memukul saya, saya

boleh memberi maaf padanya. Tetapi saya tidak harus menyetujui bahwa orang lain akan bisa memaafkannya bila mengalami kejadian yang sama.” Ia juga sangat berkeberatan bila pengampunan harus mencerminkan “kemauan rakyat”. “Apakah kemauan rakyat itu? Jika kita berpegang pada kasus jajak pendapat di Jerman setelah Perang Dunia Kedua, maka tentu saja mayoritas khalayak di sana lebih menyetujui dilakukannya pengampunan dan bukan penuntutan.”

Zalaquett percaya bahwa setelah lewat beberapa tahun, api pertentangan itu akan lenyap dalam perdebatan. “Pihak yang gencar menganjurkan penuntutan mulai menyadari bahwa keadaan-keadaan aktual sering memaksakan kecenderungan yang bertentangan. Di Amerika Latin, hal ini terjadi dengan agak sederhana: melalui penangkapan para diktator dan algojonya. Tetapi kemudian menyusul terjadinya transisi di Uni Soviet, Eropa Timur, serta Afrika Selatan. Kediktatoran telah berurat berakar di tempat-tempat itu selama empat puluh, enam puluh tahun. Dalam masa-masa itu, sejumlah besar masyarakat pernah menjadi anggota partai-partai Komunis atau Nasional, atau bahkan menjadi informan. Menuntut mereka semua tentu saja akan menjadi pekerjaan yang bukan saja tidak ringan tetapi bahkan mustahil.

## **Komisi**

Selama pertengahan tahun 1980-an menjadi jelas bahwa kediktatoran Chili tidak dapat berlangsung selamanya. Pada tahun 1988, Jenderal Pinochet mengizinkan dilakukannya referendum untuk menilai kinerja pemerintahannya, karena ia teramat yakin akan menang. Namun ternyata ia kalah. Lalu pada bulan Maret tahun 1990, Presiden Aylwin yang dipilih secara demokratis membentuk pemerintahan sipil. Selama upacara pelantikannya yang sarat nuansa emosional di stadium Santiago – tempat di mana pada saat kup tahun 1973 banyak sekali rakyat yang ditahan, disiksa dan dibunuh – Presiden Aylwin mengimbau 80.000 orang audiensnya, dan jutaan pemirsa televisi; sebuah imbauan bagi penemuan kebenaran dan upaya rekonsiliasi.

Sementara Presiden berbicara, semua nama-nama mereka yang dibunuh atau dihilangkan selama rezim Pinochet diproyeksikan satu demi satu ke layar stadium yang besar.

Kemudian, pada minggu yang sama, Zalaquett dipanggil melalui telepon. Presiden ingin membentuk komisi yang akan merefleksikan spektrum politik. “Saya membahas rencana-rencana untuk komisi tersebut dengan beliau dan Menteri Kehakiman. Keberatan utama saya terhadap rencana awal itu adalah bahwa nantinya nama-nama para pelaku kejahatan akan dinyatakan pada laporan akhir. Saya menentang rencana itu dengan alasan bahwa pada akhirnya tidak seorang pun yang dicap dengan cara-cara demikian dapat membela dirinya. Presiden, yang juga adalah seorang pengacara, menyetujui keberatan saya itu.”

Oleh karenanya, komisi itu kemudian dibentuk dengan delapan anggota: empat dari golongan Kiri serta empat lainnya dari golongan Kanan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dapat memaksakan keputusan. Kini, setelah bertahun-tahun peristiwa berlalu, Zalaquett masih membicarakan komisi itu dengan antusiasme yang besar.

“Jenis kelompok yang dilibatkan menjadi anggota komisi itu hanya dapat berfungsi jika keduanya mampu bersenyawa dengan bagus. Ketuanya adalah seorang pengacara tua yang sudah berpengalaman, dan saya tidak tahu berapa banyak jaksa negara, dan anggota yang memiliki prestise yang sangat besar. Ada sejarawan yang tua, seorang Katolik yang taat dan sangat konservatif, yang telah mendukung kup tetapi tidak dapat menyetujui pembunuhan-pembunuhan. Kemudian, ada pengacara perempuan yang telah mendukung rezim Pinochet, tetapi dengan cepat telah berbalik arah, ketika ia menyadari terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Anggota perempuan lainnya dalam komisi tersebut selama pertemuan-pertemuan sedikit sekali bicara, tetapi luar biasa bagus dalam berkomunikasi dengan para korban yang kami wawancara. Saya dijuluki ‘Robespierre’ oleh ketua, karena saya tidak suka membuang-buang waktu hanya untuk pembicaraan basa-basi – ‘Pak Ketua apakah kita bisa melanjutkan diskusi?’”

Bulan-bulan pertama berlangsung dengan tidak begitu kacau. Sistem-sistem arsip dan komputer telah dibentuk, diskusi-diskusi dengan semua partai politik, pihak gereja, serta serikat-serikat buruh, telah diadakan dan mulai dilakukan korespondensi dengan organisasi-organisasi internasional. Enam puluh orang tenaga asisten dikerahkan untuk menangani tugas-tugas praktis. “Mereka kebanyakan para pengacara dan para pekerja sosial. Suatu perkembangan yang luar biasa pun terjadi. Para pengacara dilibatkan dalam investigasi; para korban yang datang berduyun-duyun membuat kami menyerupai DINA, sebuah pelayanan rahasia. Mereka membagi tugas dalam cara yang sama, dengan mengikuti logika yang sama. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh cara yang paling cepat untuk mendapatkan fakta-fakta.”

Riset dilaksanakan dengan cermat sekali. “Kami tidak mau membiarkan diri kami melakukan kesalahan. Bayangkan: jika kami seharusnya menyatakan bahwa seseorang ‘telah dihilangkan’, namun ternyata yang bersangkutan hanya sedang berada di suatu tempat di luar negeri, tentu kami akan didamprat oleh angkatan bersenjata dan kesalahan itu akan dapat digunakan untuk mendiskreditkan segala yang telah kami lakukan. Kami memiliki akses yang luas ke penyimpanan arsip di Vicaria, tempat mereka menghimpun hak kesaksian selama masa kediktatoran. Informasi dari akses itu diharapkan cocok untuk setiap kasus yang sebenarnya terjadi. Disamping itu, kami juga memperoleh informasi dari sumber-sumber lain – bahkan dari Palang Merah, karena bagaimanapun, kami adalah komisi pemerintah.”

“Hambatan terbesar yang kami hadapi adalah bahwa kami tidak dapat memanggil para anggota angkatan bersenjata untuk menghadap sidang pengadilan, tidak seperti yang telah berhasil dilakukan oleh komisi Argentina. Alasannya terletak pada faktor legalitas: komisi Argentina diangkat oleh parlemen, sedangkan di Chili, untuk menghindari pemborosan waktu, komisi ditetapkan dengan dekrit presiden. Pihak militer sangat peduli dengan surat-surat yang kami kirimkan, dan mereka menjawabnya dengan baik, kendatipun tetap saja ada detail-detail informasi terbaru yang disembunyikan: ‘Sesuai dengan kebijakan hukum di negara kira, setelah lima tahun kemudian, semua hal-hal yang termasuk dalam kategori rahasia itu

dihancurkan,’ demikian ujar mereka. Namun demikian, kita dapat saja memaksa petugas-petugas sipil untuk bekerja sama. Melalui mereka kita bisa mendapatkan ratusan laporan medis yang kita perlukan. Pihak militer belum menghancurkan laporan-laporan tersebut – mereka tampaknya tidak begitu peduli dengan laporan-laporan seperti itu – dan semuanya bisa tetap dipelihara dengan baik sampai kini. Beberapa laporan bahkan masih disembunyikan ketika kami menerimanya. Dengan begitu, kami dapat menemukan fakta-fakta mengenai kematian Victor Jara (penyanyi pembangkang yang paling terkenal di Chili, DB). Tangan penyanyi itu tidaklah dicincang-cincang di Stadium, seperti yang diyakini banyak orang. Cerita bahwa ia masih bisa terus bernyanyi setelah peristiwa tragis itu, memang tidak dapat dibenarkan. Laporan autopsi menyingkapkan fakta yang sebelumnya tidak diketahui: ternyata ditemukan ada 44 lubang peluru seujur di badannya. Laporan autopsi itu menguraikan masing masing dengan: ‘peluru yang melintas di bagian tubuh yang ini, sebelumnya berusaha ditangkis...’ dan seterusnya. Rupanya, paling tidak dua senjata otomatis telah ditembakkan ke arahnya – sebuah tindakan agresi yang biadab.

### **Para Keluarga Korban**

Sekali dokumen telah berhasil dikumpulkan, maka Komisi Nasional Mengenai Kebenaran dan Rekonsiliasi mulai bekerja pada tahapan kedua. Para anggota komisi mengadakan perjalanan secara berpasangan ke seantero Chili, yang berjarak ribuan kilometer dari ujung ke ujung. “Kami akan melakukan sesi pembahasan di kantor gubernur, atau di balai kota. Pertemuan sengaja selalu dilakukan di lokasi yang resmi. Telegram-telegram dan pengumuman pers telah dikirim sebelumnya, sehingga setiap orang mengetahui bahwa kami akan melakukan kunjungan. *Pertama*, seorang anggota komisi menggunakan dua jam, dari jam sembilan sampai jam sebelas, untuk berbicara dengan para keluarga korban, dengan dihadiri kehidupan mereka dengan penekanan pada hal-hal seputar keluarga mereka “yang telah dihilangkan” atau dibunuh. Kami

mengundang mereka untuk membicarakan tentang diri mereka. Banyak orang yang merasa baru “membuka” pintu kantor itu untuk pertama kalinya. Sebelumnya, selama bertahun-tahun mereka berusaha mengetuk pintu itu, namun sia-sia. Mereka memandang bendera Chili di dinding, kertas yang betuliskan “Presiden Republik” tercetak di pucuknya, dan mereka di persilahkan duduk dan diberi secangkir kopi....

“Saya berbicara dengan ratusan anggota keluarga selama bulan-bulan itu. Beberapa dari mereka masih terlukis dalam ingatan saya. Dalam suatu kesempatan ketika saat makan siang, saya duduk sendirian di kantor; saya berada di balok catatan-catatan saya untuk dipilah-pilah. Terdengar ketukan di pintu dengan bunyi penuh ketakutan, kemudian masuklah seorang perempuan setengah baya – mempesonakan dan berpakaian rapi elegan. Ia meminta maaf karena tidak dapat datang tepat pada waktunya karena undangan itu terlambat diterimanya. Selama satu setengah jam ia berbicara dengan saya tentang kematian saudara laki-lakinya. Ia telah ditembak mati oleh regu tembak, setelah sekelompok prajurit melewati kota mereka. Mereka membawakan kepadanya sebuah peti mati, yang jelas baru saja dibuat dari kayu gergajian kasar. Darah masih merembes melalui celah sambungan-sambungan kayu peti itu. Mereka telah menuliskan nama saudara laki-laki perempuan itu pada penutup peti dengan bolpoin. Rincian benda-benda itu, khususnya bolpoin, tetap terbayang dalam pikirannya – betapa tidak ada penghargaan manusiawi sama sekali. Keesokan harinya, peti mati itu dikubur bersama sepasang peti mati yang lain. Tentara memberikan izin untuk melakukan pemakaman, tetapi hanya pada kondisi yang sama sekali tidak sedang berlangsung adanya kegiatan politik. Anda dapat memotong ketegangan itu dengan sebilah pisau Tiba-tiba seseorang mulai tersedu-sedu, dan menjerit pada tentara-tentara yang sedang berjaga berderet-deret beberapa meter jauhnya. Anda dapat mendengar alat pengancing pelatuk berbunyi klik pada senjata-senjata otomatis mereka. Perempuan yang berada di kantor saya ini saat itu berjalan menuju pasukan tentara itu dan merebahkan dirinya ke tanah, kemudian merangkul lutut seorang prajurit, dan memintanya untuk tidak mulai menembak. Dan itulah kisah yang ia ungkapkan kepada saya, 17 tahun kemudian.”



“Pada akhirnya, kami telah mengumpulkan empat ribu kasus. Kami kembali ke kantor kami di Santiago, dan para pembantu mengumpulkan ringkasan-ringkasan dari setiap kasus dengan disertai rekomendasi-rekomendasi. Kurir-kurir khusus mengantarnya ke rumah-rumah kami setiap hari antara di sekitar pukul 5.00 sore – antara 100 dan 200 kasus setiap hari. Kami membacanya mungkin sampai pukul 2.00 dini hari. Kemudian keesokan harinya, pagi-pagi benar kami mengadakan pertemuan untuk membahasnya dan mengungkapkan pendapat kami. Saya mengajukan sepuluh persen dari persoalan-persoalan. Para anggota lain juga mengajukan dalam jumlah yang sama. Banyak kasus harus dicoret. Misalnya, kasus seorang laki-laki yang tewas dalam kecelakaan di jalan raya dan keluarganya mendesak untuk diberikan kompensasi. Kasus seorang suami yang beberapa kali berhasil minggat dengan perempuan lain dan namanya muncul kembali dalam daftar pemilih di tempat yang jauh dari Santiago. Ada kasus-kasus lain yang menuntut banyak pemeriksaan silang: kasus seorang laki-laki yang sudah telah hilang selama 15 tahun. Namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih, padahal lelaki itu tidak tercatat melakukan perkawinan dan tidak sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Oleh karenanya, meskipun kami tidak memiliki bukti yang pasti bahwa ia telah ditahan, kami dapat menganggap bahwa ia telah ‘dihilangkan’. Hal ini bisa kami pastikan jika lelaki itu sebelumnya memang dikenal sebagai pembangkang politik, dan pada saat yang kira-kira bersamaan kawan-kawannya yang lain telah ditahan.”

“Kami akhirnya memutuskan bahwa kira-kira seribu kasus harus dicoret. Sisanya, kami menetapkan bahwa 2200 orang merupakan korban-korban dari negara (termasuk 957 orang ‘yang dihilangkan’), 90 orang adalah korban-korban dari kelompok-kelompok subversif, dan kira-kira 600 kasus tidak memiliki bukti yang cukup atau diperlukan tambahan waktu untuk mengadakan investigasi lebih lanjut. Sembilan puluh lima persen dari para korban berjenis kelamin laki-laki, dua per tiga di antaranya berumur dua puluh tahun hingga empat puluh tahun. Sebagian besar mereka adalah para buruh dan petani – dua kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah korban mahasiswa.

“Pada akhirnya, kami hanya memiliki waktu tiga puluh hari untuk menghimpun laporan. Kami membagi beban kerja di antara kami, dan tersusunlah laporan setebal 1800 halaman, termasuk deskripsi-deskripsi keseluruhan kasus. Pada awal bulan Februari 1991, sebelum presiden berangkat berlibur, kami secara formal menyajikan enam kopi laporan kami di hadapan kamera TV. Para penjudi buku pun sudah menunggu pada malam sebelumnya, namun mereka harus tinggal sepanjang malam karena kami belum menyelesaikan teks pada waktu yang telah ditentukan.

### **Keterkejutan**

Penyajian laporan pada tanggal 4 Maret 1991 itu ternyata memiliki kekuatan efek sebagai semacam *shock therapy*. Semua surat kabar besar mencetaknya secara penuh dalam serangkaian suplemen.

“Hal itu juga menimbulkan perselisihan historis. Dalam bagian pengantar laporan kami tertulis bahwa sistem demokratik Chili secara gradual telah dirusak, sebelum dan selama pemerintahan Allende. Pemerintahan itu, khususnya partai Allende sendiri, telah meningkatkan polarisasi di dalam negeri. Beberapa orang golongan Kiri tidak menyukai itu (tulisan kami itu), di lain pihak golongan Kanan bahkan merasa kurang berbahagia (puas) karena mereka menginginkan agar semua kesalahan ditimpakan pada golongan Kiri.”

Selama berminggu-minggu laporan itu menjadi berita di halaman depan surat kabar; tetapi kemudian datang pembunuh baru: “Para pembunuh itu adalah mereka yang termasuk dalam kelompok sayap kiri yang ekstrem, dan korbannya adalah Jaime Guzmán, seorang arsitek ideologi Pinochet, seorang figur yang sangat cerdas. Ia merupakan target yang jelas. Pembunuhan itu menjadi ancaman yang besar bagi proses rekonsiliasi. Rakyat mulai berpikir terbuka mengenai teka teki pembunuhan itu. Apakah pembunuhan itu merupakan akibat dari upaya-upaya kami untuk membuka kebenaran atau bukan.”

Arti penting laporan menyusut, meskipun kemajuan terhadap rekonsiliasi menahan terjadinya pembunuhan. Sebuah monumen telah dibangun di pemakaman utama Santiago. Sebuah tembok besar dengan di sisi kirinya bertuliskan nama-nama semua orang “yang dihilangkan” dan sisi kanannya nama-nama mereka yang telah dibunuh. Di tengah-tengahnya nama presiden yang juga telah dibunuh: Salvador Allende. Di tempat-tempat sisi lain tembok sisanya, disisihkan untuk tubuh mereka “yang dihilangkan”, namun masih harus ditemukan. Beberapa tempat monumen itu kini sudah digunakan. Sejak publikasi laporan Komisi di Chili itu, kurang lebih antara 20 dan 25 persen kasus-kasus penghilangan kini telah berhasil diselesaikan, terutama melalui investigasi forensik.

Para keluarga korban menerima kompensasi sekitar 400 dolar sebulan, yang dibebankan pada lebih dari 20 juta dolar anggaran negara setiap tahun. Penerima kompensasi yang lain di dalamnya termasuk bagi mereka yang dipecat dari pekerjaan publik atau dipaksa untuk diasingkan. Kata Zalaquett lebih lanjut: “Golongan Kanan menghendaki uang ini seharusnya dikumpulkan dari dana publik di Chili, karena pertanggungjawaban negara merupakan pertanggungjawaban setiap individu warga negara. Kami tidak menerima dana dari luar negeri untuk dana komisi maupun dana kompensasi.”

“Laporan itu secara umum telah disetujui, dengan perkecualian khusus oleh perseorangan, yakni Jenderal Manuel Contreras, mantan kepala dinas keamanan, DINA. Ia menolak semua laporan itu. Militer secara keseluruhan tidak mengingkari fakta-fakta itu, tetapi tetap mempertahankan bahwa ada perang yang sejati terjadi di Chili. Tentu saja ini omong kosong karena meskipun dalam keadaan terjadi perang, Anda pun tidak boleh membunuh rakyat dengan tanpa pandang bulu. Dalam hal ini, ternyata angkatan udara dan *carabineros* (*gendarmes*) berusaha membuat semacam apologi yang ambisius; sedangkan angkatan darat dan angkatan laut tidaklah demikian. Dan baru-baru ini Pinochet bahkan menyatakan bahwa bangsa seharusnya berterima kasih kepada apa yang dilakukan angkatan darat.”

“Keadilan terlihat menampakkan dirinya dalam semua kasus yang bermula semenjak tahun 1978 itu – tahun ketika angkatan bersenjata melakukan legislasi pengampunan diri mereka sendiri. Saya berpendapat bahwa para pemimpin DINA seperti Contreras, seharusnya dihukum. (Contreras dihukum pada bulan Juni 1995; lihat bab 10 – DB). Lebih dari itu, saya tidak melihat adanya hal yang bisa diperoleh dengan pendeklarasian tidak berlakunya hukum amnesti tahun 1978. Karena Mahkamah Agung telah memerintahkan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan. Sekalipun bisa dilakukan, sebagian besar dari kejahatan itu tak lebih hanya akan terlalu lama di bawah statuta pembatasan-pembatasan. Meskipun sebenarnya, di bawah hukum internasional, statuta pembatasan-pembatasan itu tidak bisa diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan melawan kemanusiaan, tetapi Mahkamah Agung Chili hampir sulit menerima pendapat ini.”

Dengan melihat proses kebenaran dan rekonsiliasi Chili, Zalaquett merasa bahwa itu dalam beberapa bidang telah gagal: “*Pertama*, tiadanya persetujuan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata telah berarti bahwa tatanan moral tidak sepenuhnya ditegakkan kembali.”

“*Kedua*, pihak pengadilan tidak sepenuhnya dapat menginvestigasi kejahatan-kejahatan yang bermula dari tahun sebelum tahun 1978. Pengadilan-pengadilan yang dilakukan ternyata menghadapi tembok batu. Munculah situasi yang asing di mana, dalam istilah-istilah yang legal, penghilangan-penghilangan yang tidak dijelaskan sejak sebelum waktu itu secara resmi masih dianggap sebagai kasus penculikan. Suatu kejahatan yang lebih dikenal sebagai kejahatan permanen. Jika personil militer secara terbuka ada yang mengaku telah melakukan pembunuhan, kasus mereka akan dilimpahkan ke Mahkamah Militer dan secara otomatis mereka akan berlindung di bawah pengampunan. Namun sepanjang hal itu masih saja berlaku, mereka masih dapat dikenai tuntutan. Penolakan angkatan bersenjata untuk bekerja sama tidak banyak timbul akibat ketakutan mereka terhadap hukum, namun lebih merupakan akibat ketakutan mereka terhadap terbongkarnya skandal yang mereka lakukan.

“*Ketiga*, Komisi Kebenaran mengusulkan hukum yang dapat memaksa rakyat menyadari pentingnya memajukan dan memberikan kesaksian mengenai ‘penghilangan-penghilangan’ dengan penuh keyakinan dan tanpa disertai ketakutan akan saksi. Hukum itu tidak diadopsi.”

Zalaquett menyebut Chili menerapkan apa yang dinamakan “demokrasi yang asing”; dan memang, sehari sebelum pertemuan kami, berita di TV saat itu menayangkan perayaan Hari Angkatan Bersenjata. Presiden Frei yang dipilih secara demokratik berdiri di podium di sebelah pemimpin kup dan mantan diktator Jenderal Pinochet – masih memberikan komando kepada angkatan bersenjata dan kedua orang itu minum dari tanduk sapi yang sama, pemberian selamat secara tradisional.

Peristiwa-peristiwa pada bulan Mei 1993 menunjukkan masih banyaknya hal yang harus diselesaikan. Pada saat presiden Aylwin keluar negeri tiba-tiba Angkatan Darat sekali lagi melakukan defile melalui jalan-jalan raya. Sejumlah menteri dalam pemerintahan panik dan ingin mendeklarasikan semacam “Punto Final”. Zalaquett: “Kami, para anggota Komisi, harus benar-benar membuat kehadiran kami terasa di media. Presiden meminta saya untuk bergabung dengan kelompok kerja pemerintah yang ditugaskan untuk memperkuat kembali kebijakan pemerintah mengenai hak-hak asasi manusia. Dalam wawancara-wawancara surat kabar, saya menekankan bahwa hal yang paling esensial adalah untuk mengetahui keberadaan mereka yang sudah mati dan pengakuan pertanggungjawaban angkatan bersenjata. Namun soal pencarian siapa sebenarnya penarik pelatuknya tidaklah begitu penting.

### **Penyebutan Nama-Nama Pelaku**

Sejak komisi Chili menyelesaikan pekerjaannya, Zalaquett tetap melanjutkan upaya untuk memberikan nasihat pada proyek-proyek lain yang serupa. Pada awal tahun 1992, kedua pihak yang sedang berperang di El Salvador menyetujui untuk meletakkan senjata mereka dan membentuk Komisi Kebenaran yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komisi ini tidak seperti yang ada di Chili karena dibentuk justru oleh

orang-orang asing. Zalaquett kembali mengadakan perjalanan ke El Salvador untuk sekali lagi menentang penyebutan nama para pelaku kejahatan dalam laporan final. Ia merekomendasikan agar identitas mereka disampaikan kepada pihak pengadilan seperti yang dilakukan di Chili. Sebagai sebuah Komisi baru, bagaimanapun, mereka tidak mau menerima nasihatnya. Mereka bahkan mendokumentasikan kira-kira 20.000 kasus dengan memberikan banyak di antaranya deskripsi yang terinci. Unit-unit angkatan darat dan para perwira yang terlibat di antaranya deskripsi-deskripsi yang terinci. Unit-unit angkatan darat dan para perwira yang terlibat disebutkan namanya. Di dalam lima hari dari publikasi laporan, pemerintah menyatakan amnesti umum. Zalaquett menolak untuk menuntut adanya hubungan langsung antara dua peristiwa itu: “Tetapi itu jelas bahwa sangat sedikit timbul simpati di lingkungan militer El Salvador terhadap komisi itu. Komisi itu dipandang sebagai hasil inisiatif asing. Kesan saya adalah bahwa para anggota komisi tidak secukupnya menyadari tentang apa yang menjadi konsekuensi pekerjaan mereka. Mereka lebih berpusat pada prinsip-prinsip ketimbang pada penerapannya yang praktis.”

Berkaitan dengan investigasi di El Salvador, ia menyebutkan faktor lain yang juga telah menjadi persoalan bagi komisi di negara-negara lain, yakni statistik. “Di El Salvador, angka yang selalu dibicarakan selalu berkisar di antara 70.000 dan 80.000 korban. Dan laporan PBB tetap menggunakan angka itu, meskipun dokumentasi tidak dapat mendukung lebih dari tiga puluh persen dari data yang disebutkan itu. Lingkaran-lingkaran hak asasi manusia di Argentina masih membicarakan angka sekitar 30.000 kasus penghilangan – hanya ada 9.000 kasus yang didokumentasikan, dan bahkan dalam daftar-daftar itu saya dapat melihat beberapa nama yang diulang-ulang. Di Chili disebutkan ada 3.000, padahal dalam beberapa tahun rakyat sudah berbicara 30.000 angka. Dua tahun yang lalu, ketika laporan komisi nasional Chili keluar, disebutkan bahwa ada 40.000 korban. Tetapi komisi itu ternyata tidak dapat mendokumentasikan lebih daripada 4.000. Banyak orang dengan mudah dapat mencantumkan kehidupan mereka sendiri. Bila ada seseorang yang mempertanyakannya, ia akan dipecat sebagai revisionis.”

Pada tahun 1994, Zalaquett dua kali mengunjungi Afrika Selatan. Sekali ia bersama-sama dengan Presiden Aylwin, untuk memberikan nasihat kepada pemerintahan yang baru mengenai Komisi Kebenaran. “Saya sangat terkesan dengan orang-orang Afrika Selatan. Mereka ditakdirkan untuk belajar dari seluruh pengalaman lampau yang mereka miliki. Tidak sekalipun saya mendengar ada seseorang yang mengusulkan penuntutan terhadap mereka yang menciptakan apartheid. Penuntutan itu tidak jelas-jelas dipandang sebagai bagian yang perlu untuk mengakhiri rezim lama. Tentu saja rakyat menuntut keadilan terhadap mereka yang berbuat kejahatan. Dalam undang-undang apartheid sendiri pun hal itu dibenarkan. Tentu saja orang diperbolehkan menuntut keadilan, semisal menuntut keadilan terhadap orang yang memukuli orang sampai mati di penjara, atau para teroris yang menyerang para pembangkang di luar negeri. Namun demikian, situasi sudah cukup rumit, karena periode represi di sana berlangsung lebih lama daripada di Chili, sehingga ada banyak orang yang dibunuh dan beraneka ragam kelompok yang terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan itu.” Ia tidak dapat meramalkan apakah proses di Afrika Selatan akan bisa berjalan sepanjang penuntutan dari individu-individu atau tidak. “Tetapi saya benar-benar yakin bahwa orang-orang Afrika Selatan akan bisa melangkah lebih jauh daripada kita. Mereka sekurang-kurangnya bisa menyadari angkatan bersenjata dan dinas rahasia di negaranya untuk mengakui bahwa apa yang telah mereka lakukan itu salah.”

### **Pilihan Moral**

Secara internasional, kebenaran dan rekonsiliasi tak pelak lagi menjadi isu yang sangat penting. Zalaquett telah mengunjungi Eropa timur, mengikuti dari dekat kegiatan-kegiatan pengadilan internasional untuk bekas negara Yugoslavia dan Rwanda, dan telah mendapatkan begitu banyak nasihat dari kejadian di lusinan negeri, terutama bangsa-bangsa Amerika Latin, di samping juga beberapa negara lain semisal Sri Lanka. Ia makin percaya mengenai pentingnya penerapan hukum internasional

secara konsisten: “Misalnya, Prinsip-Prinsip Nuremberg yang menyatakan bahwa para perwira yunior tidak dapat menggunakan pembelaan bahwa mereka mengikuti perintah-perintah dari otoritas yang lebih tinggi, kecuali ‘alternatif yang tidak dapat diterima secara moral’. Saya membawanya dalam diskusi mengenai penuntutan terhadap penjaga-penjaga perbatasan di Jerman Timur yang telah menembak para pengungsi. Ya, tentu saja mereka telah diperintahkan untuk menembak. Tetapi jika mereka menolak, maka hal yang paling buruk yang dapat terjadi pada mereka adalah terkena hukuman disipliner. Sehingga mereka tidak memiliki pilihan, dan memang benar bahwa mereka telah melakukan kesalahan.”

Berkenaan dengan Chili, ia tidak mempersiapkan untuk memberikan pertimbangan final pada situasi yang masih tetap berubah. Meskipun demikian, ia dapat menarik kesimpulan pribadi dalam pidato yang ia sampaikan di universitas Amerika pada tahun 1991: “Kembali dalam hari-hari yang penuh bahaya pada akhir tahun 1973, semua teman dan kolega saya dalam gerakan hak asasi manusia harus menghadapi bahaya pada setiap harinya. Tidak seorang pun dari mereka yang pernah mengklaim bahwa mereka telah diberkati dengan keberanian yang halus. Mereka menyadari bahwa keberanian tak lain hanya merupakan nama lain untuk mempelajari bagaimana cara bisa hidup dengan ketakutan-ketakutan Anda. Delapan belas tahun kemudian, kami semua menyadari bahwa di bawah keadaan-keadaan yang sedang berubah, maka bentuk yang kurang mencolok dari keberanian memang dikehendaki. Itulah keberanian untuk mendahului kebajikan yang ringan, untuk mempelajari bagaimana hidup dengan pembatasan-pembatasan kehidupan yang nyata, namun demikian, dengan upaya untuk memajukan nilai-nilai seseorang yang paling dihargai dari hari ke hari sampai taraf yang memungkinkan. Keras hati, bertanggung jawab.”



## MASA TRANSISI

### **Dunia di Era Tahun 1990-an**

Memasuki pertengahan tahun 1990-an, banyak negara dikatakan sebagai negara yang sedang berada “dalam proses transisi menuju ke demokrasi”.

Sejumlah negara ini memang merupakan negara-negara yang baru terbentuk. Sebelumnya, hanya dalam waktu yang singkat, peta Euro-Asia telah menunjukkan sedikit isyarat adanya 15 bangsa baru yang terbentuk setelah runtuhnya Uni Soviet. Di dalamnya termasuk negara-negara Baltik. Timbulnya negara-negara independen ini, seperti Republik Czech (Cehnya), Slovakia, Slovenia, Croasia dan Bosnia, memang tidak dapat terelakkan. Begitu pula penyatuan Jerman. Gagasan mengenai pembentukan Eritrea yang independen tampaknya tidak akan bisa terwujud. Meskipun benar bahwa konsep mengenai negara-negara ini tentu saja sudah ada dan hidup dalam pikiran dan aspirasi kelompok-kelompok etnik dan nasional yang mendiami wilayah-wilayah ini. Kadang-kadang sudah selama beberapa dasawarsa atau bahkan beberapa abad. Tetapi impian-impian ini hanya bisa terwujud dalam suatu periode sejarah yang unik akibat dari, atau bertepatan dengan, berakhirnya Perang Dingin.

Keunikan ini, tentu saja, tidak begitu banyak terletak dalam formasi dari negara-negara baru tersebut; sebuah tema yang berulang sepanjang sejarah. Unsur baru yang paling mencolok itu adalah bahwa kebanyakan dari negara-negara ini sedang membuat janji-janji, mudah pecah atau tak ditepati sebagaimana kadang telah dialami negara-negara ini sebelumnya, untuk membentuk diri mereka sendiri sebagai negara demokrasi. Mereka menyelenggarakan, atau bermaksud menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas; mereka melandaskan kekuasaan hukum pada konstitusi; mereka

mengizinkan adanya pers bebas atau paling tidak pers yang dikembangkan secara bebas. Mereka menyingkirkan para diktator dan para elite rezim sebelumnya. Mereka berbicara dengan bebas mengenai hak-hak dasar manusia, dan dalam banyak hal, mulai menunjukkan isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Namun, tidak hanya negara-negara baru saja yang sedang memulai transisi ini. Di banyak negara lain, negara-negara yang telah berdiri selama bertahun-tahun, represi dan kediktatoran pun juga sedang diguncang.

Di Eropa, di samping negara-negara yang baru dibentuk, semua negara Eropa Timur yang sudah lama berdiri juga sedang memasuki tahap transisi dari “sosialisme negara”, – umumnya berbentuk rezim otoritarian kalau bukan rezim diktatorial – ke perekonomian yang didasarkan pada perekonomian bebas dengan struktur masyarakat demokratik dan dibentuk melalui pemilihan umum yang bebas. Semua ini terjadi dalam periode yang kurang dari dua tahun, yakni antara tahun 1989 dan 1991.

Sebelum tahun 1990, negara-negara Afrika Sub-Sahara masih tidak lebih dari sekadar sekumpulan negara yang diperintah di bawah sistem multi-partai. Dan hanya satu atau dua saja dari negara-negara ini yang dapat dianggap telah memberikan fungsi bagi berjalannya demokrasi. Sedangkan negara lainnya, sebagian besar, masih didominasi oleh satu partai atau satu pemimpin. Tiba-tiba, di dalam periode dua tahun saja, lebih dari dua puluh negara lain di kawasan ini telah memperkenalkan sistem multi-partai atau terlibat dalam negosiasi-negosiasi bagi dilaksanakannya pemilihan umum yang bebas. Bahkan negara-negara yang masih dalam keadaan mati-matian menghadapi peperangan sipil ataupun kekerasan politik yang masih tersebar luas pada saat itu pun, mulai membentuk pemerintahan “transisional” atau pemerintahan interim (sementara). Pada akhir tahun 1994, gelombang demokrasi sebenarnya sudah menjalar ke semua negara Afrika Sub-Sahara. Meskipun, sayangnya, gelombang itu masih mengalir di beberapa negara “batu” saja – negara-negara di mana represi dan peperangan secara signifikan masih belum mereda.

Beberapa tahun sebelumnya di Amerika Latin, hal-hal tersebut sudah mulai berubah. Pergantian kediktatoran-kediktatoran sayap kanan di Cone Selatan banyak terjadi selama tahun 1980-an. Di antaranya terjadi di Uruguay, Brasil, Argentina dan akhirnya Chili. Pada akhir pertengahan dasawarsa itu, negara-negara seperti Guatemala dan El Salvador mengadakan pemilihan umum yang pertama dalam beberapa tahun terakhir dengan tidak mengalami kecurangan, serta mengizinkan partisipasi partai-partai oposisi. Pada tahun 1995, hanya tinggal satu negara Amerika Latin yang belum melakukan pemilihan umum yang bebas: Kuba.

Banyak negara Asia masih dikuasai oleh kediktatoran komunis atau kediktatoran lain. Kediktatoran ini sudah berurat akar selama beberapa dasawarsa di antaranya di negara Cina, Mianmar, dan Korea Utara. Sementara Kamboja, bagaimanapun juga, telah terbuka bagi berlangsungnya proses demokratisasi. Dan negara-negara seperti Nepal, Korea Selatan, Sri Lanka serta Vietnam telah menunjukkan tanda-tanda adanya pelunakan secara jelas bentuk-bentuk penindasan. Situasi di Filipina telah menjadi suatu konflik bersenjata berskala besar. Ini merupakan kelanjutan penindasan yang sudah terjadi sejak jatuhnya pemerintahan Marcos pada tahun 1985; Namun setelah tahun 1992, di negeri itu sudah muncul peningkatan nyata untuk mematuhi hak-hak asasi manusia.

Transisi juga terjadi di negara-negara Timur Tengah. Yordania menghapuskan keadaan perang pada tahun 1992. Hal ini merupakan yang pertama kalinya terjadi sejak tahun 1939. Yaman telah mengadakan pemilihan umum yang pertama sebagai negara yang bersatu pada bulan April 1993 – namun, secara tragis diikuti dengan terjadinya perang sipil. Suatu gerakan menuju demokratisasi di Kuwait setelah akhir Perang Teluk macet. Pada akhir tahun 1991 dan 1994, Maroko membebaskan sejumlah besar tahanan politik yang telah disekap dalam tahanan rahasia, kadang dengan masa tahanan lebih dari dua puluh tahun, meskipun dalam hal ini sudah ada jaminan kekuasaan hukum. Pembicaraan perdamaian Palestina-Israel sudah mulai membawa hasil yang signifikan pada akhir tahun 1993.

Saya telah menggunakan contoh-contoh di atas untuk menunjukkan bahwa dalam upaya melihat kembali periode perubahan yang eksplosif dan mencoba untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang mungkin berguna dari perubahan yang terus-menerus itu, kami dihadapkan pada berbagai keadaan yang membingungkan serta solusi-solusi, aspirasi-aspirasi, keberhasilan-keberhasilan maupun kegagalan-kegagalan. Apakah faktor-faktor umum yang dapat ditemukan dalam semua situasi transisional itu dan faktor-faktor apakah yang menentukan perbedaan di antara situasi transisional itu?

### **Tahap-Tahap Transisi**

Guna mencapai tujuan kami, suatu proses transisi politik dapat dibagi ke dalam tiga fase yang saya tetapkan sebagai fase genesis, fase transformasi, dan fase penyesuaian kembali.

Dalam *fase genesis*, situasi atau keadaan biasanya ditandai dengan adanya konflik bersenjata internal, represi, perang internasional atau kolonisasi. Sektor-sektor yang ada di dalam populasi hanya memiliki sedikit partisipasi nyata dalam urusan dan keputusan-keputusan otoritas pusat. Ini berlaku dengan tanpa menghiraukan apakah ideologi yang berkuasa itu “sosialisme negara”, “kapitalisme liberal” atau yang didasarkan pada kediktatoran. Hal ini terlihat, misalnya pada apa yang terjadi pada pembagian suku-suku. Batas-batas bangsa dipenetrasi oleh aktor-aktor asing semacam pihak-pihak yang mendukung faksi yang sedang berperang, para pedagang senjata, para diplomat, para agen bantuan dan pembangunan. Tetapi sebagian besar penetrasi ini dikonsentrasikan di beberapa tempat, seperti halnya di kota-kota besar – atau di medan pertempuran. Begitu pula, proporsi perdagangan total atau bantuan (termasuk bantuan militer) yang lebih besar biasanya mengalir ke pemerintah, dinas keamanan dan elite – tidak mengalir ke populasi yang sedang mengalami penderitaan.

Selama *fase transformasi*, situasi ditandai dengan adanya upaya-upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi. Kelompok-kelompok oposisi bersenjata diintegrasikan

–baik secara cepat maupun secara gradual – atau ditransformasikan ke dalam partai-partai politik. Demikian juga halnya dengan beberapa bekas pejuang kebebasan dan para pembangkang kemudian diangkat menjadi pejabat pemerintah. Keterbukaan negara baru menarik bagi munculnya inisiatif-inisiatif, kadang menjadi arena perebutan yang tidak pantas, oleh berbagai aktor. Salah satu aktornya adalah pemerintah nasional, yang mencoba untuk menegaskan pengaruhnya atau mengimplementasikan rencana-rencananya dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Para aktor lainnya bisa muncul dari “dunia luar”. Mereka mungkin tertarik dengan perdagangan, koperasi, proyek-proyek pembangunan, ataupun kedudukan politik. Kini jauh lebih mudah bagi dunia luar untuk membangun kontrak-kontrak langsung dengan “populasi” baik melalui perusahaan-perusahaan swasta atau organisasi-organisasi non-pemerintah. Fase transformasi tampaknya juga ditandai oleh adanya “kebebasan bagi semua kekuatan” atau setidaknya kekuatan yang sedang memperebutkan pengaruh, dalam semua bidang. Jelas terdapat kreativitas yang berjalan seiring dengannya di berbagai bidang, misalnya dalam bidang kebudayaan dan pendidikan.

Dan apakah yang akan terjadi pada tahap akhir proses transisi, dalam fase *penyesuaian kembali*? Mungkin, setelah suatu masa berlalu, akan menjadi jelas bahwa “transisi” semata-mata merupakan interval. Mungkin hanya kekerasan dan penindasan yang akan berkembang lebih lanjut dari kekacauan tersebut.

Dalam skenario kasus yang paling baik, hasilnya adalah suatu masyarakat demokratik yang terbuka, di mana hak-hak asasi manusia dan keamanan, partisipasi demokratik dan kebutuhan-kebutuhan dasar dijamin. Sekalipun ini memerlukan penyesuaian kembali; tetap ada ancaman dan tantangan di dalamnya.

Soal-soal mengenai hak-hak asasi manusia dan keamanan tetap merupakan isu-isu pokok dalam fase ini. Pertama sekali, ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia “yang diwarisi” dari rezim sebelumnya dan harus dipertanggungjawabkan. Berkurangnya kontrol negara dapat juga memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia “lokal” sehingga pertanggungjawabannya sering sukar untuk ditelusuri. Ada risiko peningkatan kekerasan etnik dan sosial, bersamaan dengan

ledakan secara terbuka penindasan (penutupan) dendam berkepanjangan. Keresahan dan disintegrasi sosial dapat memberikan kontribusi bagi timbulnya kejahatan dan kekerasan jalanan. Kadang bisa berwujud kejahatan terorganisir untuk mengancam. Semua kesukaran-kesukaran ini mungkin dilipatgandakan lebih lanjut oleh pemulangan para pengungsi secara masif atau pemasukan para pencari suaka.

Dalam bidang partisipasi dan demokrasi, sering dirasakan kurang adanya tradisi dan pendidikan demokratik. Ketakutan baik yang muncul dari kebiasaan maupun sebagai akibat dari situasi yang sekarang, serta apati politik dapat mempengaruhi sektor-sektor utama yang ada dalam populasi. Sering timbul rasa kebingungan; sesuatu yang dapat menjadi makanan empuk bagi gerakan-gerakan radikal nasionalistik ataupun yang bernuansa agama.

Peningkatan harapan populasi terhadap pemenuhan kebutuhan itu dapat menimbulkan frustrasi, ketika mereka dihadapkan dengan adanya pengangguran, pembangunan ekonomi yang tidak merata, dan penurunan produksi (temporer). Hal ini dapat terjadi bila isu mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar juga ikut dipertimbangkan. Munculnya pasar-pasar baru, atau eksploitasi oleh kaum oportunistis yang memandang negara sebagai pasar baru bagi kekuatan-kekuatan luar. Dan hal ini bisa mengancam susunan sosial dan khususnya posisi kelompok-kelompok yang lebih lemah, terutama kaum perempuan. Fase penyesuaian kembali menuntut adanya langkah besar berupa “bentuk keberanian baru yang tidak begitu kentara” seperti dibicarakan oleh Jose Zalaquett dalam bab sebelumnya.

Saya percaya bahwa hal itu sangat penting untuk memperluas ide kami mengenai “transisi” dan memasukan fase final ini ke dalam cakupannya. Satu fase yang ternyata dapat berlangsung bertahun-tahun. Adalah terlalu mudah untuk menggunakan kata “transisi” bila hanya mencakup fase pertengahan belaka – sebuah periode transfer kekuasaan dan liberalisasi politik yang relatif singkat.

Dalam buku ini, relatif sedikit hal yang bisa dikatakan berkaitan dengan fase genesis. Konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistematis dan sudah menjadi karakteristik fase ini di banyak negara telah didokumentasikan

dengan baik dalam laporan-laporan Amnesty Internasional serta kelompok-kelompok pembela hak-hak asasi manusia lainnya. Penekanan dalam bab-bab berikut akan lebih diberikan pada fase transformasi – dilema-dilema dalam menegakkan kebenaran, keadilan dan kerja bagi proses rekonsiliasi. Semua kegiatan semacam ini dimasukkan ke dalam fase penyesuaian kembali, dengan isu pokok mencegah terjadinya penyalahgunaan politik lebih lanjut. Bab 13 secara khusus akan membahas fase ini.

### **Jenis-Jenis Transisi**

Dengan telah ditemukannya metode untuk mengamati proses transisional dan fase-fasenya, maka kami dapat menggunakannya sebagai basis untuk mengklasifikasikan banyak jenis transisi yang berbeda. Saya tidak mengusulkan model analisis proses transisi yang lengkap – namun hanya berupa cara cara untuk membedakan antara berbagai jenis transisi saja, agar kita dapat memandang lebih cermat pada tema utama dari buku ini – yakni kebenaran dan rekonsiliasi.

Oleh karena itu, saya hanya akan memfokuskan pada “proses transisi menuju demokrasi”; hal ini berarti saya akan mengabaikan dua jenis transisi yang tidak masuk dalam kriteria. Jenis pertama adalah modernisasi tanpa demokratisasi. Jenis semacam ini dapat ditetapkan sebagai proses kemajuan material saja yang kadang disertai oleh “pembebasan pasar”, tetapi dengan tidak disertai pemberdayaan politik bagi rakyat. Contoh-contohnya dapat ditemukan di beberapa negara di Asia Timur, seperti halnya Cina, Vietnam, dan Korea Selatan. Untuk tujuan kami, maka kami juga mengesampingkan situasi-situasi tragis di mana “transisi” telah terbukti menjadi tidak lebih dari sekadar jeda sementara antara satu situasi perang dengan situasi perang berikutnya, represi atau kediktatoran dengan situasi serupa berikutnya. Ini adalah kasus yang terjadi, bermula pada awal tahun 1990-an, di negara-negara seperti Angola, Tazikistan dan Somalia.

Sebagaimana telah kita lihat dalam bab sebelumnya, pengacara hak-hak asasi manusia Chili, Joze Zalaquett telah menguraikan satu tipologi transisi. Tipologi yang lebih banyak ditentukan oleh posisi dinas keamanan atau tingkat kontrol yang dilakukan terhadap kekuasaan militer. Analisisnya ini dimulai sejak tahun 1988, sebelum periode transisi yang mendadak di Eropa Timur dan Afrika dan karena itu perlu dilakukan modifikasi. Saya mengusulkan tipologi yang lebih didasarkan pada sifat yang menandai dua fase awal dari transisi – fase genesis dan fase transformasi.

- \* Fase genesis menyajikan kepada kita sebuah pembagian analitis yang dapat dengan segera kita lihat: transisi dapat bermula baik dari *kediktatoran militer*, ataupun *negara satu partai*. Perbedaan ini cenderung saling melengkapi, karena sebuah partai tunggal yang mendominasi sebuah negara, sering menggunakan kesatuan tempur militer yang sangat banyak dan dukungan polisi untuk melindungi kekuasaannya. Karena itu kita menetapkan rezim militer sebagai pemerintahan yang kekuasaannya diperoleh melalui bentuk kudeta, dan negara satu partai sebagai sebuah pemerintahan yang semula dibentuk melalui pemilihan umum atau sesuatu yang mirip dengan ungkapan berdasarkan “kemauan rakyat” lalu sesudah itu dimiliterisasikan.
  
- \* Fase transformasi memberikan pembagian analitis yang lebih luas karena di dalamnya terdapat empat jenis utama. Transformasi aktual dapat berbentuk: *kemenangan militer* atau pengambilalihan, proses damai namun disertai dengan *lompatan tiba-tiba*, *perubahan gradual* dari kekuasaan lama ke kekuasaan baru, maupun sejenis *gencatan senjata* atau adanya keseimbangan antara pemerintah lama (secara lebih khusus merupakan bagian-bagian yang setia dari angkatan darat) dengan pihak-pihak oposisi (atau para perwira angkatan darat yang sudah menyeberang).



Beberapa contoh di bawah ini akan menunjukkan bagaimana fase-fase tersebut berlangsung:

	Kemenangan militer	Lompatan tiba-tiba	Perubahan gradual	Gencatan senjata
Kediktator-an militer	Uganda (1979), Kamboja (1979), Etiopia (1992)	Yunani (1975) Argentina (1983)	Portugal (1975), Brasil (1985), Chili (1990)	Uganda (1986), El Salvador (1992)
Kekuasaan satu partai		Sebagian besar negara di Eropa Timur, banyak negara Afrika (1989-1990)	Hongaria (1989), Tanzania (1990), Afrika Selatan (1994)	Rusia dan bekas negara-negara USSR (1990), Kamboja (1992) Mozambik (1992)

### **Upaya Penegakan Hak-Hak Asasi Manusia**

Dalam bab-bab selanjutnya, dengan mempertimbangkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian rekonsiliasi serta isu-isu di sekitar komisi-komisi kebenaran, penuntutan para pelaku kejahatan dan pembersihan para kolaborator, akan

menjadi jelas bagaimana pengaruh berbagai jenis transisi tersebut di atas. Dua pengamatan awal dapat dibuat di sini berkaitan dengan salah satu isu paling menarik berkaitan dengan proses transisi: yakni penuntutan para pelaku kejahatan pelanggaran berat hak-hak asasi manusia.

Mengenai dimensi vertikal dari skema di atas, isu pertanggungjawaban sering lebih jelas muncul dalam sebuah transisi dari kediktatoran militer dibandingkan dengan negara satu partai. Hal ini karena akan lebih mudah untuk menunjuk orang-orang tertentu. Khususnya mereka yang bertanggung jawab mengenai terjadinya kup serta pembentukan rezim militer. Orang-orang yang bertanggung jawab telah melakukan kejahatan paling buruk. Dalam hal ini, membawa orang-orang semacam itu ke pemeriksaan pengadilan bisa lebih memuaskan dibandingkan bila kasusnya terjadi dalam negara satu partai. Di dalam negara satu partai seluruh segmen masyarakat dapat merasa bahwa mereka (atau para tetangga mereka) juga ikut bertanggung jawab terhadap represi yang baru saja terjadi. Kita juga akan melihat lebih banyak dilaksanakannya pemeriksaan pengadilan hak asasi manusia di negara-negara yang berasal dari jajaran yang lebih atas bila dibandingkan di negara-negara dari jajaran di bawahnya.

Mengenai dimensi horizontal kecepatan transisi, kita juga akan melihat bahwa semakin cepat transisi berlangsung, akan semakin besar pula kemungkinan dilakukannya pemeriksaan pengadilan, pembersihan dalam skala besar, penyingkapan, akuntabilitas individu, dan lain-lain. Negara-negara yang mengalami perubahan gradual, relatif telah berhasil melakukan beberapa pemeriksaan pengadilan terhadap para pelanggar hak-hak asasi manusia. Dalam situasi “gencatan senjata”, kesempatan-kesempatan untuk akuntabilitas semacam itu tentu saja minim.

## PERSOALAN-PERSOALAN MORAL

### Pragmatisme Aristoteles

Pada bulan Maret tahun 404 SM, orang-orang Sparta mengepung kota Athena, guna mengakhiri Perang Peloponnesian dengan penyerahan tak bersyarat orang-orang Athena. Ini juga menandakan adanya tujuan temporer ke arah demokrasi radikal di Athena. Orang-orang Sparta kemudian mengangkat Kelompok Tiga Puluh untuk memerintah kota; kemudian mereka menugaskan Kelompok Sebelas untuk mengadakan pembersihan umum dengan dibantu tiga ratus prajurit. Para anggota oposisi demokratik dan banyak pengikutnya dibunuh. Menurut Aristoteles, yang menulis tentang peristiwa ini lima puluh tahun kemudian, ada 1.500 orang yang telah dibunuh dalam jangka waktu delapan bulan. Ia menyatakan bahwa rakyat merasa “gembira” karena pembunuhan-pembunuhan ini dinilai dilakukan demi melayani kebaikan umum. Kemudian pemerintah baru mulai berkuasa, dan sebuah komisi dibawa masuk dari Sparta untuk menyusun perjanjian perdamaian. Kaum demokrat diizinkan kembali ke Athena, asalkan mereka tidak melakukan tekanan pada pihak pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai tindak pembunuhan dan membawanya ke pengadilan, atau menuntut kembali barang-barang mereka yang disita.

Ini merupakan saat pertama dalam sejarah dideklarasikannya hukum *amnestia* (secara harfiah berarti “untuk melupakan”). Aristoteles menyepakati hukum ini. Ia memberi orang-orang Athena pujian khusus, sebagai penghargaan karena mereka cukup bijaksana dan pragmatik dengan bersedia mengikat diri dengan janji-janji semacam itu. Mereka bahkan menggunakan kekerasan dengan batas-batas tertentu. Umpamanya dalam menuntut orang Athena yang kembali jika mereka tidak

menghiraukan perjanjian itu dan meminta agar kejahatan yang ditutupi oleh hukum amnesti dibawa ke peradilan.

Saya sengaja mengutip penilaian Aristoteles mengenai situasi di mana hukuman, amnesti, dan rekonsiliasi merupakan isu-isu utama, karena saya merasa penilaiannya itu mengandung berbagai unsur yang secara etis juga relevan dalam zaman kita. Zaman ketika kita sudah dihadapkan pada tumbuhnya persoalan-persoalan moral dan filosofis, yang muncul dalam situasi-situasi di mana represi yang paling buruk telah lewat, dan langkah awal dapat dibuat untuk mengadakan rekonstruksi dan rekonsiliasi. Karena itu, kita seharusnya bertanya kepada diri kita sendiri: apakah sebenarnya makna rekonsiliasi, keadilan, serta pengampunan itu?

## **Rekonsiliasi**

Pertanyaan pertama mengenai makna rekonsiliasi membangkitkan berbagai macam jawaban. Rekonsiliasi sudah merupakan subjek yang integral dalam semua tradisi agama dan filosofis. Secara lebih khusus, mayoritas berbagai tradisi itu secara jelas menempatkan posisi rekonsiliasi di atas “keadilan” Berdasarkan *Torah* (Kitab Suci Yahudi), hukum Yahudi menggunakan istilah “*tsedaka*”, keadilan secara esensial terbentuk dari kapasitas kelompok-kelompok untuk mencapai rekonsiliasi. Hukum adat Jerman lebih didasarkan pada konsep-konsep mengenai penggantian kerugian dan cara-cara lain untuk mencapai penyelesaian, dibanding dengan gagasan-gagasan mengenai hukuman. Dalam *History of the Franks*, yang ditulis pada abad keenam, Uskup Gregory dari Tours berpendapat bahwa permusuhan berdarah merupakan sesuatu yang berbahaya. Ia juga menyatakan bahwa pemberian tempat perlindungan dapat menjadi instrumen rekonsiliasi. Dalam tradisi Rusia, sebuah dewan sesepuh atau *veche*, dibandingkan dengan para jaksa profesional, dianggap lebih dapat menyelesaikan kasus-kasus ketidakadilan. Meskipun di Cina, sebuah sistem yang mengatur penerapan hukuman-hukuman yang ketat sudah dikodifikasikan bersamaan

waktunya dengan dinasti pertama, namun baru sejumlah kecil hukuman formal saja berhasil disahkan: sebaliknya penuduh dan tertuduh diharapkan untuk menyelesaikan di luar pengadilan (dan sering kedua pihak dikurung sampai mereka mencapai kesepakatan).

Besar kemungkinan bahwa hanya ada satu sistem hukum yang menempatkan rekonsiliasi bukan sebagai faktor dominan dalam proses transisi: yaitu sistem hukum yang ada di Romawi. Hukum Romawi menuntut adanya pengadilan formal (ini merupakan pertumbuhan yurisprudensi yang berkelanjutan), dan didasarkan pada pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan. Sebuah pengakuan dipandang sebagai bukti yang paling kuat – tak heran bila penerapan penyiksaan berkembang secara luas. Hal yang jarang digunakan semata-mata hanya untuk tujuan-tujuan investigatif sebagaimana dalam sistem-sistem hukm yang lain, seperti halnya sistem hukum Jerman dan Cina. Spirit hukum Romawi tampaknya juga berlaku dalam zaman modern, mulai di Chili sampai di Sri Lanka, dari Estonia hingga di Afrika Selatan.

Dengan timbulnya pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, maka telah dilakukan upaya-upaya untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi lama dan asli di banyak negara. Tetapi seberapa pun besar manfaat yang bisa diperoleh dari tradisi ritual lokal Budhis, dewan sesepuh Afrika, atau permohonan tempat-tempat perlindungan di Eropa Utara (di Amerika Utara lebih dikenal sebagai *sanctuary*), namun upaya-upaya semacam itu masih tetap bersifat marjinal di hadapan proses-proses politik dan yudisial yang makin luas. Ada juga alasan lain mengapa tradisi-tradisi yang tidak berasal dari hukum Romawi gagal memberikan alternatif yang memuaskan: artinya bahwa tradisi-tradisi yang memberi prioritas kepada “rekonsiliasi” dan berdasarkan pemeriksaan yang lebih ketat sekalipun, terbukti tidak cukup lunak dan adil sebagaimana pada awal kemunculan tradisi-tradisi itu. Selama lebih dari dua ribu tahun, karakter “non-kriminal” dari sistem hukum Cina, yang lebih menekankan konsiliasi daripada penuntutan dan hukuman, merupakan alat yang mujarab untuk menindas setiap bentuk pembangkangan dan bahkan setiap bentuk inisiatif. Kita menemukan bentuk modern dari hal ini dalam negara berbentuk

Republik Rakyat. Sejumlah “komite” yang menggantikan proses yudisial formal biasanya digunakan sebagai perpanjangan mesin negara yang represif, khususnya sebelum tahun 1980-an (Cina tidak mengadopsi kode formal mengenai hukum kriminal sampai tahun itu).

Meskipun demikian, keberatan-keberatan ini tidak menyatakan bahwa kita seharusnya meninggalkan rekonsiliasi sebagai prinsip yang terlalu ketinggalan zaman untuk dihadapkan secara kuat dengan sistem-sistem hukum modern. Filosof pragmatik Amerika, Richard Rorty telah meluncurkan model kontemporer mengenai rekonsiliasi. Ia membuktikan bahwa tidak ada sistem politik, bahkan yang paling demokratis sekalipun, yang kini dapat ditemukan di dunia, dapat didasarkan pada sesuatu yang lain selain rekonsiliasi; dasar yang dalam praktek telah terbukti baik dan kuat. Inilah yang disebut sebagai pendirian yang relativistik. Tetapi Rorty menantang pandangan bahwa jenis relativisme ini merusak semua nilai. Sebaliknya, menurut Rorty, fakta bahwa pengalaman (demokrasi) kita telah mengajarkan tentang berapa besar keuntungan yang bisa kita peroleh dari demokrasi, memungkinkan kita untuk membela alternatif-alternatif yang menentang tersebut. Demokrasi, atau begitulah yang dapat kita interpretasikan dari argumen Rorty, merupakan sebuah sistem yang secara fundamental bersifat merekonsiliasikan. Kelompok mayoritas menerima hak mereka, tetapi pada saat yang sama kepentingan-kepentingan minoritas tidak diinjak-injak. Keadilan dilaksanakan pada “jalan tengah yang baik”, dan juga melalui prinsip-prinsip yang lebih radikal; misalnya, oposisi tidak bersyarat terhadap dilakukannya penyiksaan, pembunuhan politik dan kekerasan lain yang sewenang-wenang oleh “kekuasaan-kekuasaan yang ada”. Dalam hal yang terakhir ini, demokrasi secara jelas berbeda dengan model radikal yang digambarkan Aristoteles: ia hanya kebaikan di pertengahan jalan saja, dan karena itu dapat membenarkan dilakukannya pembunuhan massal jika hal itu dipandang akan menghindarkan kejahatan yang lebih besar.

## **Keadilan**

Bisakah terjadi rekonsiliasi tanpa keadilan? Mayoritas rakyat tidak perlu memahami atau membaca pemikiran para filosof agar mereka dapat mempertahankan beberapa ide dasar tentang keadilan. Hampir semuanya dapat menyatakan bahwa kejahatan pantas untuk dihukum, apa pun sifat pelanggaran itu. Sebagian besar orang juga berpendapat bahwa jenis dan kerasnya hukuman yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan keadaan-keadaan yang menjadi latar belakang terjadinya kejahatan itu. Jika seseorang membunuh seseorang yang telah berulang mengancam atau mengintimidasi mereka, maka mereka seharusnya tidak dihukum sebagaimana hukuman bagi seseorang yang telah membunuh dengan darah dingin untuk mendapatkan uang. Ini dapat dikatakan sebagai *argumen mengenai keadaan*.

Sebagian besar juga setuju bahwa tingkat hukuman seharusnya berkaitan dengan tingkat keterlibatan pelaku kejahatan. Seseorang yang telah membantu dalam perampokan dengan cara mengawasi, seharusnya tidak dihukum sama kerasnya dengan orang yang telah membunuh selama terjadinya perampokan itu. Ini dapat dikatakan sebagai *argumen mengenai keterlibatan*.

Argumen-argumen mengenai keadaan dan keterlibatan juga relevan dalam menangani mereka yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia. Banyak orang yang berpendapat bahwa para pejabat pemerintah yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran serius seharusnya dihukum. Memang, impunitas (pembebasan dari hukuman) dipandang sebagai salah satu alasan utama mengapa pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia masih terus berlangsung. Membebaskan para pelaku kejahatan, dan mereka yang memerintahkan untuk melakukan kejahatan, serta mereka yang memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran semacam itu, dari sasaran penuntutan akan membiarkan seluruh populasi dihadapkan pada bahaya-bahaya yang memperburuk moral publik.

Apakah akan muncul persoalan-persoalan yang gawat ketika dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan dengan keras prinsip penuntutan? Berkenaan dengan

argumen mengenai keadaan: sampai tingkat apa para pelaku kejahatan seharusnya dianggap bertanggung jawab secara langsung? Apakah mereka hanya mengikuti perintah dan apakah yang akan terjadi jika mereka tidak mematuhi? Apakah mereka yang memberi perintah benar-benar memiliki maksud kriminal, ataukah mereka meyakini bahwa mereka bertindak demi sebuah alasan yang baik, mencoba untuk menangkai kejahatan yang lebih besar, atau apakah mereka percaya bahwa mereka mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat? Berkenaan dengan argumen mengenai keterlibatan: siapa yang memikul pertanggungjawaban, dan untuk apa? Penyiksa dan pembunuh dapat dimintai tanggung jawab atas terjadinya perbuatan aktual. Tetapi bagaimana dengan dokter yang “merawat” para tahanan, atau bagaimana dengan jaksa yang duduk dalam pengadilan militer, ataupun juga pengawas penjara?

Ada juga pertanyaan mengenai konsekuensi-konsekuensi keadilan: apakah yang harus dilakukan dalam situasi-situasi di mana tindakan membawa para pelaku kejahatan dalam pemeriksaan pengadilan dapat membahayakan keseimbangan baru antara hukum dan ketertiban yang ternyata masih rapuh? Meskipun ada beberapa jawaban yang mudah untuk pertanyaan mengenai apa keadilan itu, hal tersebut juga memunculkan beberapa isu yang menyulitkan. Kita akan membahas aspek-aspek pragmatik dari hal ini dalam bab 10, mengenai hukum dan amnesti.

### **Pemberian Pengampunan**

Kebutuhan dan cara pemberian pengampunan, pertanyaan ketiga yang timbul dalam periode transisi, memiliki akar historis yang berbeda dengan rekonsiliasi. Dalam tradisi Barat, istilah ini memiliki nuansa Kristen yang kuat. “Kemurahan hati dan kebenaran dipertemukan bersama; kebajikan dan perdamaian telah berciuman satu sama lain,” bunyi Mazmur 85. Pemberian pengampunan adalah tindakan Tuhan dalam tradisi Kristen. Paul menekankan bahwa orang-orang hanya dapat mengampuni satu sama lain oleh kebajikan mandat dari kebesaran Tuhan, dan bahwa esensi dari pengampunan



terletak dalam rekonsiliasi antara Tuhan dan manusia. Baru-baru ini, dalam *Ensiklik No. XIV*, Paus Yohanes Paulus II sekali lagi menekankan prioritas pengampunan: “Perintah untuk mengampuni tidak mendahului tuntutan-tuntutan objektif mengenai keadilan, tetapi keadilan dalam pengertiannya yang tepat secara aktual merupakan tujuan terakhir dari pengampunan.” Dengan praktek-praktek yang keras dari hukum Romawi yang begitu berpengaruh di Barat, maka pengampunan telah menjadi sebuahimbangan berat yang dapat diterima. Namun, di sini juga, dengan adanya kemiripan makna toleransi dan kerelaan, sering terdapat kecenderungan tersembunyi untuk mengabaikan berbagai praktek dan tindak kejahatan. Menurut gereja, musuh-musuh seharusnya diampuni, sebagaimana juga para penindas dan bahkan inkuisisi. Di Nederduits Gereformeerde Kerk (Gereja Reformasi Belanda) di Afrika Selatan, yang semula mendukung apartheid, seruan untuk mengampuni para penindas (orang-orang Kristen Afrika) bergema di mana-mana. Dan sering sekali, gereja-gereja konservatif di Amerika Latin menyatakan pengampunan kepada sebagian besar pelanggar berat hak asasi manusia.

Filosof Yahudi berdarah campuran Amerika-Jerman, Hannah Arendt, telah berusaha keras memberikan konsep pengampunan dengan makna yang berbeda, dengan tidak mengabaikan pelanggaran-pelanggaran. Sang wanita jenius ini menulis dalam *The Human Condition* pada tahun 1958: “Tanpa diampuni ..... terbebas dari konsekuensi-konsekuensi perbuatan yang telah kita lakukan, kapasitas kita untuk bertindak, bagaimanapun, akan terbatas oleh satu-satunya perbuatan, yang dari perbuatan itu kita tidak pernah pulih; kita akan tetap menjadi korban dari konsekuensi-konsekuensi itu untuk selamanya.” Alternatif untuk pengampunan, katanya, tetapi sama sekali bukan antitesisnya, adalah hukuman. Apa yang dimiliki oleh kedua hal itu secara bersamaan adalah kenyataan bahwa keduanya berupaya untuk mengakhiri sesuatu yang berlanjut tanpa akhir, jika tidak ada intervensi. Ia selanjutnya mengatakan dengan ringkas: “Orang-orang tidak dapat mengampuni apa yang tidak dapat mereka hukum.” Pengampunan seharusnya tidak merupakan tindakan ketidakberdayaan, *testimonium paupertatis*.

## **Masyarakat yang Baik**

Saya percaya bahwa kesan-kesan filosofis yang kita dapat mengenai *rekonsiliasi*, *keadilan* dan *pengampunan* ini menunjukkan bahwa tidak ada model khusus yang dapat dibebankan pada sebuah negara yang sedang berada dalam periode “transisi” tertentu mana pun. Dari sudut pandang hukum, model semacam itu tidak akan dapat bekerja sebagai sistem hukum nasional (bahkan yang paling demokratis) yang dapat dibedakan, dan hukum internasional telah membiarkannya begitu terbuka. Sebuah model tidak akan bekerja secara sosial, karena tidak ada masyarakat yang dapat mengabaikan kekuatan nilai-nilai kultural tradisional. Juga tidak ada basis filosofis untuk mempertahankan sebuah model yang seragam: jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan moral tidaklah hitam dan putih, tetapi memperlihatkan jangkauan nuansa-nuansa yang tidak ada habis-habisnya. Dalam sebuah masyarakat dengan para jaksa dan para pengacara yang sangat terdidik, proses untuk menerangkan masa lalu sangat berbeda dengan yang terjadi di dalam sebuah masyarakat yang secara total telah dikacaukan oleh peperangan, penindasan atau kolonialisme. Di Chili pada tahun 1990-an memang layak dan adil untuk menganggap bahwa sampai tingkatan yang luas, setiap korban dan pelanggar akan menerima atau dibawa ke peradilan. Di Rwanda pada tahun 1995, hal ini secara praktis tidak memungkinkan. Afrika Selatan berada di antara dua kutub ini.

Tetapi meskipun tidak ada model yang mutlak, namun di dalamnya bisa ditemukan adanya prinsip-prinsip tertentu. Aristoteles, filosof yang mengemukakan teori mengenai “masyarakat yang baik”, secara terus terang masih dapat bersikap antusias berkaitan dengan sebuah solusi yang diharapkan bisa menciptakan keseimbangan tertentu. Meskipun hal ini disertai oleh adanya kekuasaan Kelompok Sebelas yang bersifat tiranis dengan pasukan penembak matinya. Solusi tersebut berupa pemberian amnesti yang tidak pandang bulu dan pengangkatan pemerintah

yang tidak demokratis. Dewasa ini, prasyarat bagi masyarakat yang baik memiliki landasan yang jauh lebih baik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Masyarakat seharusnya bersikap demokratis, memberikan hukuman terhadap kejahatan-kejahatan (meskipun dalam praktek ini tidak selalu dapat dilaksanakan) dan mencari sejenis rekonsiliasi yang tidak mengabaikan begitu saja pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi.

Pemerintahan-pemerintahan yang memiliki sejarah represi atau peperangan belakangan ini akan menemukan bahwa pandangan Aristoteles tersebut keliru. Warisan masa lampau yang represif tidak dapat hanya diselesaikan dengan menunjukkan adanya kekuatan dalam bidang *Realpolitik*. Karena warisan tersebut akan tetap memburu mereka, sebagaimana Oedipus diburu oleh Furies.

## UPAYA UJI COBA

### Contoh-Contoh Historis Tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi

#### **Pendekatan Solon**

Sebagaimana telah kita lihat pada bab sebelumnya, ide mengenai rekonsiliasi banyak dilandaskan pada tradisi-tradisi besar kemanusiaan. Tetapi bagaimana kenyataannya dalam praktek? Contoh-contoh historis apakah yang telah disumbangkan oleh sejumlah pemerintahan yang sejak tahun 1980-an telah mencoba memberikan substansi bagi proses kebenaran dan rekonsiliasi melalui komite-komite resmi, pengadilan-pengadilan, undang-undang dan kebijakan-kebijakan mereka?

Yang jelas, mereka mengambil sebagian besar inspirasi mereka dari sejarah terkini. Tetapi sebelum saya mengacu kepada sejumlah contoh dari era pasca 1945, saya ingin membahas negarawan Yunani yang secara pasti memberikan contoh sempurna mengenai upaya rekonsiliasi yang berani: Solon dari Athena.

Solon hidup kira-kira dari tahun 624 sampai tahun 560 SM. Di sekitar tahun 595, ia diberi tanggung jawab untuk mengadakan revisi drastis terhadap sistem sosial, ekonomi, dan politik Athena. Ia membagi populasi ke dalam berbagai kelas dan mengorganisasikan bantuan hutang umum yang dikenal sebagai “upaya peringanan beban”. Ia membatasi kekuasaan kepala-kepala rumah tangga, dan melarang penjualan anak-anak. Lagi pula, ia melembagakan majelis rakyat dan memperkenalkan pemeriksaan pengadilan yang dilakukan oleh juri. Ia memaksa orang-orang Athena bersumpah bahwa mereka akan menjaga undang-undang ini tidak berubah selama

seratus tahun. Meskipun ketika ia kembali ke Athena setelah keputusan absennya selama sepuluh tahun, ternyata telah diundangkan undang-undang baru.

Solon bukanlah orang yang tidak tegas. Di bawah undang-undangnya, orang-orang yang memilih tidak bekerja dihukum karena kemalasannya, dan para perempuan hanya diizinkan keluar rumah pada malam hari dengan syarat-syarat yang ketat. Namun demikian, undang-undangnya tetap memancarkan rasa keadilan. Plutarch, seorang sejarawan Romawi dan penulis biografi Solon, di balik kekritisannya ia tak bisa mengelak untuk mengakui pancaran rasa keadilan itu. Tidak akan ada kontras yang lebih besar, tulis Plutarch, dibandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh Draco, pendahulu Solon: “Di bawah kode hukum Draconian, hampir setiap jenis pelanggaran bisa dikenakan hukuman mati. Akibatnya mereka yang dihukum hanya karena kemalasan bisa dikenakan eksekusi. Dan mereka yang mencuri buah-buahan atau sayur-sayuran harus menjalani hukuman yang sama dengan mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dianggap suci atau bahkan sama dengan hukuman bagi para pembunuh. Inilah alasan di balik keterkenalan Demades di zaman berikutnya. Ia terkenal karena menyatakan bahwa kode hukum Draco itu ditulis tidak dengan tinta, tetapi dengan darah. Draco sendiri, ketika ditanya mengapa ia mendekritkan hukuman mati bagi sebagian besar pelanggar, menjawab bahwa ia menganggap segolongan kecil orang memang pantas menerimanya. Oleh karenanya, tidak ada hukuman lain yang lebih berat bisa menjadi perkecualian bagi segolongan besar orang.”

Sebenarnya, Solon melihat dirinya sendiri lebih sebagai seorang penengah. Solon bukanlah sosok yang revolusioner: ia ternyata juga menginginkan rekonsiliasi. Diungkapkannya dalam sajak berikut ini:

*Kepada massa rakyat, saya memberikan kekuasaan yang mereka butuhkan,  
Tidak merendahkan martabat mereka, ataupun tidak terlalu banyak  
mengekangnya:*

*Bagi mereka yang sudah memiliki kekuasaan besar dan kekayaan,  
Saya menjaganya agar kepentingan-kepentingan mereka tidak dirugikan.  
Saya menempatkan pengawal dengan perlindungan luas di hadapan kedua  
golongan*

*Dan mencegah salah satu dari mereka memenangkan secara tidak adil.*

Di sisi lain, Solon adalah seorang pencetus hukum yang aneh, hukum yang memaksa warga-negaranya untuk berpihak dalam peristiwa revolusi. Plutarch menulis: “Maksud Solon sebenarnya adalah bahwa orang-orang seharusnya tidak terus tidak berbeda atau tidak mengawetkan sikap apatis terhadap kepentingan publik dan hanya melindungi urusan pribadi mereka, berucap selamat kepada diri mereka sendiri karena tidak berurusan dengan kekacauan dan kemalangan yang sedang menimpa negeri mereka; sebaliknya, ia justru mendorong mereka untuk mengikatkan diri secara serentak pada maksud yang lebih baik, sama-sama menanggung bahayanya, dan memberikan dukungan, tidak hanya duduk di belakang mencari selamat, menunggu untuk melihat pihak mana yang akan menang.”

Ada berbagai unsur dalam kebijakan dan tindakan Solon yang mencerminkan cara-cara pemerintahan modern dalam mencoba untuk mengadakan rekonsiliasi dengan masa lampau. Pada tingkat *pertama*, berkaitan dengan masalah pemberian “perlindungan yang besar” bagi populasi penduduk. Langkah-langkah yang dilakukan Solon memberikan dasar bagi apa yang kini kita namakan sebagai *kekuasaan hukum*, termasuk instrumen-instrumen demokratis dari majelis rakyat dan pemeriksaan pengadilan yang adil. Di samping itu, juga terdapat perlindungan terhadap hak pihak-pihak yang paling lemah, misalnya anak-anak.

*Kedua*, masyarakat baru memerlukan tatanan sosial baru. Sebagaimana akan kita lihat berikut ini, misalnya di Jerman dan Jepang, pihak Sekutu yang menang

mencoba untuk meletakkan dasar bagi hal ini, melalui pembersihan-pembersihan, propaganda, menghimpun kesadaran dan pembaruan sosial.

*Ketiga*, berkaitan dengan penanganan masa lampau, adalah salah untuk menghina pihak-pihak yang dulu kaya dan sangat berkuasa. Penghinaan dapat dengan mudah menimbulkan serangan balasan dan upaya elite ekonomi atau militer sebelumnya untuk memperoleh kembali kekuasaan mereka. Lagi pula, di sebagian negara-negara yang sedang menjalankan proses “transisi”, pengetahuan dan sumber-sumber daya dari elite terdahulu merupakan bahan-bahan yang esensial dalam proses rekonstruksi.

*Keempat*, mungkin penegasan Solon untuk melakukan pemihakan bukan merupakan hal yang sama sekali tidak beralasan. Dalam praktek, penegasan ini tidak berbeda halnya dengan tuntutan rakyat untuk mengadakan “pembersihan”. Pada prinsipnya, setiap warga negara memang dipaksa untuk berpihak: apakah mendukung otoritas atau melakukan perlawanan terhadapnya. Namun demikian, biasanya pembersihan-pembersihan modern tidaklah berpengaruh bagi mereka yang hanya mengakomodasikan diri dengan situasi dibandingkan dengan mereka yang memang secara aktif berkolaborasi dengan penindas. Apakah benar keinginan Solon untuk melakukan pembersihan besar-besaran tersebut merupakan sesuatu yang berkaitan dengan soal prinsip? Hal itu tampaknya tidak sejalan dengan pendiriannya yang halus berkaitan dengan isu-isu yang paling menonjolkan sifat politisnya. Dan tentu saja ia, sebagaimana juga dirasakan oleh para pembersih modern lainnya, akan melihat hal itu sebagai sebuah ketidakmungkinan praktis. Saya cenderung menganggap Solon mengartikan lain di sini: pembersihan itu merupakan proses penyadaran bahwa seseorang tetap tidak dapat benar-benar netral dalam situasi-situasi krisis yang besar. Ini sebenarnya bukanlah tujuan dari dilakukannya pembersihan-pembersihan resmi. Namun hal ini banyak menjadi titik perdebatan moral dan politik di negara-negara pasca transisi. Setelah peristiwa-peristiwa itu berlalu, perasaan janggal akan menghingapi mereka yang tidak berpihak meliputi masyarakat, paling tidak, sebesar mereka yang melakukan.

Terdapat sebuah aspek transisi yang tidak dihadapi oleh Solon: yakni pemeriksaan pengadilan terhadap para pemimpin sebelumnya. Dalam beberapa contoh pasca 1945 yang digambarkan di bawah ini, sebagaimana halnya Jerman, maka ide mengenai pemeriksaan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat pokok, dan dalam kenyataannya hal ini mengaburkan keberlangsungan proses rekonsiliasi yang lebih luas. Dalam reaksi mereka, negara-negara yang mencoba melakukan rekonsiliasi pada masa sesudahnya, ternyata lebih cenderung menghindar untuk menonjolkan aspek judicial ini.

Dalam era yang tidak lama sesudah peperangan, proses penanganan masa lampau memiliki banyak faset. Di dalamnya terdapat pemeriksaan pengadilan terhadap individu-individu yang telah melakukan kejahatan hak-hak asasi manusia, serta telah merusak Konvensi Jenewa. Tetapi hal yang tak kalah pentingnya adalah berlangsungnya perubahan dalam kesadaran bangsa-bangsa mengenai masa lampainya. Berikut ini adalah contoh-contohnya.

### **Jerman: Opini Publik Mengenai De-Nazifikasi**

Pemeriksaan pengadilan Nuremberg memanggil dua puluh satu orang Sosialis Nasional terkemuka untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan. Pemeriksaan ini bermula pada musim gugur tahun 1945 dan berlangsung selama hampir setahun. Masyarakat Jerman mengikuti pemeriksaan pengadilan tersebut dengan saksama: dalam sebuah jajak pendapat, 93 persen dari mereka menyatakan menyadari arti pemeriksaan pengadilan itu. Hanya 4 atau 6 persen yang merasa bahwa pemeriksaan pengadilan itu tidak adil. Meskipun pada awalnya 65 persen dan kemudian 87 persen menyatakan bahwa mereka telah mempelajari sesuatu (tentang kamp-kamp konsentrasi dan pembunuhan massal terhadap orang-orang Yahudi) dari pemeriksaan pengadilan itu, namun, pada tahun 1945, sembilan puluh dua persen menolak ide mengenai kesalahan kolektif.



Pada bulan Nopember 1945, ketika pemeriksaan pengadilan Nuremberg dimulai, 53 persen warga masyarakat setuju dengan pernyataan “Sosialisme Nasional dalam prinsip merupakan ide yang baik, namun dalam prakteknya jelek”. Pada tahun 1945, ketika sifat dari kejahatan-kejahatan itu sudah dapat terbongkar, persetujuan itu jatuh hanya menjadi rata-rata 40 persen.

Di Jerman Barat, penduduknya mampu memahami masa lampau gerakan Nazi, sebagai reaksi-reaksi atas pertunjukan anti-Semitisme. Prosentase mereka yang merasa bahwa anti-Semitisme merupakan sesuatu yang tidak dapat dihukum, jatuh dari 43 persen (1948) menjadi 20 persen dalam sepuluh tahun. Dalam buku-buku teks sekolah, penyajian penyiksaan terhadap orang-orang Yahudi mengalami perkembangan selama beberapa tahun, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Khususnya setelah pertengahan tahun 1960-an, informasi tentang penyiksaan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang Yahudi meningkat, dan pada akhir tahun 1970-an hampir semua buku-buku teks yang diterbitkan memuat informasi yang lengkap dan akurat. Tetapi serial televisi komersial Amerika-lah, berjudul *Holocaust*, yang benar-benar mengubah kesadaran tersebut. Hal ini terjadi setelah pemutaran pertama serial itu pada tahun 1979. Sebelum serial itu ditayangkan, separuh masyarakat Jerman Barat masih merasa bahwa statuta pembatasan itu tidak perlu dilanjutkan, sedangkan sepertiga sisanya tidak memiliki pendapat apa-apa. Setelah penayangan berlangsung, mereka yang meyakini bahwa kejahatan-kejahatan Nazi seharusnya dituntut mengalami peningkatan dari 15 menjadi 39 persen, melebihi jumlah mereka yang berpikir bahwa sebaiknya kejahatan-kejahatan itu dibiarkan saja berlalu (35 persen).

Pada tahun 1946, hampir dua per tiga masyarakat Jerman Barat peserta polling merasakan dalam tingkat tertentu adanya tanggung jawab bersama. Dalam lima belas tahun, antara tahun 1951 hingga 1967, jumlah responden yang berpikir bahwa Jerman merupakan satu-satunya negara yang harus bertanggung jawab terhadap Perang Dunia Kedua naik dari satu per tiga menjadi dua per tiga. Pertanyaan lain yang diajukan dalam jajak pendapat itu adalah: “Jika partai Sosialis Nasional Baru mencoba untuk menduduki kekuasaan, bagaimana tanggapan Anda ?” Dari tahun 1953 sampai tahun

1972, mereka yang menjawab: “Saya akan melakukan apa pun untuk dapat mencegahnya”, naik dari 25 menjadi 40 persen.

### **Jepang: Perubahan Sebuah Negeri**

Pada tahun 1945, Jepang ditaklukkan oleh Sekutu tanpa syarat. Mereka memasuki Jepang dengan dua tujuan: untuk mengadakan demiliterisasi dan kedua, melakukan demokratisasi negara itu. Demiliterisasi cukup cepat diimplementasikan oleh pemerintah Jepang. Selama proses ini, Komandan Tertinggi pihak Sekutu (SCAP) memprakarsai proses demokratisasi negeri itu. Pada tanggal 4 Oktober 1945, pemerintah Jepang diperintahkan untuk mengakhiri semua pengekangan atas kebebasan-kebebasan sipil, dan menghapuskan semua dinas kepolisian yang menjalankan pengekangan-pengekangan ini, semacam “polisi pikiran”. Pemerintah Jepang juga diperintahkan untuk membebaskan semua tahanan politik, dan memulihkan hak-hak penuh mereka. Kaum perempuan diberikan hak-hak yang setara, termasuk hak untuk memberikan suara. Hak pilih universal diperluas pemberiannya bagi setiap orang yang telah berumur di atas dua puluh tahun.

Berbagai komisi militer yang tergabung dalam pihak Sekutu menuntut sejumlah 5.500 orang Jepang atas kejahatan-kejahatan perang konvensional yang mereka lakukan. Lebih dari 900 orang dari jumlah itu dihukum mati dan sekitar 3.500 orang dihukum penjara dengan waktu yang beragam. Dua puluh delapan orang pemimpin Jepang dihadapkan pada Pengadilan Militer Internasional di Tokyo. Tujuh orang dari mereka dihukum mati dan enam belas orang lainnya dihukum penjara seumur hidup. Pemerintahan Sekutu hanya mengadili para pemimpin Jepang atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap personil Sekutu dan perdamaian internasional saja. Kedua belah pihak sengaja tidak membongkar dan menghukum tindakan-tindakan yang telah bertentangan dengan hukum negara Jepang dan hak-hak

asasi manusia, kejahatan yang dilakukan serdadu Jepang terhadap warga negara mereka sendiri dan masyarakat negara jajahannya.

Pada tanggal 30 Oktober 1945, SCAP memerintahkan dilakukannya pembersihan terhadap semua guru dan administrator pendukung ultra-nasionalisme dan militerisme. Komite-komite lokal menyaring 1.300.000 pendidik dan memindahkan 7.000 orang dari pos mereka. Pada awal Januari 1946 dikeluarkan pedoman-pedoman bagi “Pemindahan dan Pengeluaran Personil yang Tidak Diinginkan dari Jabatan Publik”. Keputusan-keputusan mengenai upaya pembersihan terhadap individu-individu dibuat oleh pemerintah yang diangkat oleh komite-komite penyaring melalui sebuah prosedur yang lebih bersifat administratif daripada yudisial. Umumnya hal ini didasarkan pada jawaban individu-individu tersebut seperti yang dinyatakan dalam kuesioner. Selama berlangsungnya program pembersihan ini, tepatnya sebanyak 2.308.863 kuesioner berhasil diisi. Pada akhirnya sebanyak 202.000 orang berhasil diproses. Dari jumlah ini, mayoritas terbesar (193.180) dikenakan pembersihan sementara. Dari 5.588 orang yang harus kehilangan pekerjaan, sejumlah 2.042 orang merupakan para perwira karier dalam Angkatan Darat. Sisanya, 3.546 orang merupakan orang-orang sipil yang dipecat. Hanya 153 orang kehilangan pekerjaan mereka di lapangan media komunikasi.

### **Pasca-Pendudukan: Proses Penuntutan dan Kelanjutannya**

Di negeri Belanda, pada akhir Perang Dunia Kedua, sekitar 150.000 orang (kira-kira 1,6 persen dari populasi) ditahan secara mendadak. Dari jumlah ini, sejumlah 60.000 orang kemudian dihukum: 40 dari 152 hukuman mati yang disahkan, sudah dilaksanakan. Memorandum pemerintah menjelaskan: “Pertanyaan tentang apakah penduduk akan mentolerir dilakukannya sejumlah besar eksekusi masih merupakan hal yang masih menjadi tanda tanya.” Namun terhadap pertanyaan jajak pendapat publik pada tahun 1947 “Apakah Anda pikir seharusnya dilakukan hukuman mati?”,

63 persen menjawab “Tembak mereka sekarang”. Hanya 22 persen yang merasa bahwa pengampunan memang layak diberikan.

Sepuluh tahun setelah perang berakhir, makna dalam melakukan peringatan terhadap berakhirnya perang tersebut telah menyusut di negeri Belanda. Tanggal 5 Mei yang merupakan Hari Pembebasan bahkan tidak menjadi hari libur umum pada tahun 1955. Namun selama tahun 1960-an makna peringatan itu kemudian berkembang. Pada tanggal 5 Mei 1995, peringatan berakhirnya perang tersebut ditandai dengan terbitnya banyak sekali volume publikasi dan dilakukannya kegiatan kegiatan.

Pemerintah Belanda relatif sedikit melakukan eksekusi terhadap penjahat perang. Di Norwegia, 48.000 penjahat politik dihukum, dan sejumlah 37 orang dieksekusi. Di Denmark sekitar 34.000 orang ditahan atas tuduhan mengadakan kolaborasi, 14.000 penjahat politik dihukum dan diumumkan bahwa akan dilakukan eksekusi terhadap 46 orang di antaranya. Di Belgia, 100.000 orang dituntut dan 2.940 divonis dengan hukuman mati , 212 di antaranya sudah dilaksanakan. Di Prancis sekitar 400.000 dikenai pembersihan dengan berbagai cara: hampir 90.000 pelanggar politik dihukum dan 797 di antaranya dieksekusi. Jumlah keseluruhan eksekusi yang tidak resmi, terutama dilaksanakan oleh kaum Komunis Prancis, diperkirakan mencapai 10.000. Di Italia, sebuah Komisi Tertinggi Anti Fasisme dibentuk dengan tanggung jawab untuk menuntut dan melakukan pembersihan terhadap para mantan Fasis. Pada bulan Juni 1946, setelah dilakukan pemrosesan ribuan kasus, dideklarasikan adanya pengampunan.

### **Portugal dan Yunani**

Jatuhnya pemerintahan sementara sebanyak lima kali secara berturut-turut semenjak terjadinya *Captain's Revolution* pada bulan April 1974 hingga akhir 1975 di Portugal, memicu munculnya perebutan kekuasaan yang terus berlanjut antara kelompok kiri dan kelompok kanan di negeri itu. Setelah ”musim panas yang panas” pada tahun 1975,

yang telah membawa Portugal pada akhir sebuah perang sipil dan berpuncak dengan terjadinya penindasan terhadap upaya kup kelompok sayap kiri pada bulan November, sebuah pemerintahan yang lebih moderat berhasil memegang kendali kekuasaan. Pada akhir 1975, pemerintahan yang keenam ini menunda dilakukannya pembersihan bagi sekitar 20.000 warga negara yang terbukti terlibat. Kemudian antara tahun 1976 dan awal tahun 1980-an, terjadi tindakan pembalikan *saneamentos* (sanitisasi) berupa penghapusan pembersihan-pembersihan politik dan ideologis pada tahun 1974-75.

Pada tanggal 23 Juli 1974, kediktatoran militer yang sudah berlangsung selama tujuh tahun di Yunani berakhir dengan tiba-tiba. Pemicu munculnya ketakutan dan keruntuhan rezim kediktatoran itu adalah terjadinya intervensi militer di Siprus. Dengan demikian Turki kemudian memiliki alasan untuk merampas sebagian besar pulau itu dan membuat posisi para diktator Yunani tak dapat dipertahankan lagi. Pemerintah baru secara cepat mengimplementasikan sebuah program “dejuntafikasi”. Semua tahanan politik dibebaskan, dan kamp konsentrasi di Gyaros ditutup. Amnesti diberikan bagi semua kejahatan politik. Kecuali kejahatan politik yang dilakukan oleh para diktator itu sendiri. Mereka yang telah kehilangan pekerjaan dinyatakan diterima kembali. Demikian juga bagi mereka yang karena sikap oposan mereka, telah mengalami diskriminasi di bawah kediktatoran tersebut. Pada pertengahan Januari 1975, sekitar 108.000 pejabat sipil dan pejabat lainnya serta para pegawai dipecat, dipindahkan, atau sebaliknya ditertibkan. Sejumlah 3.000 arsip yang dikumpulkan oleh polisi militer (ESA) dihancurkan. Dalam enam bulan, diprakarsai dilakukannya pemeriksaan terhadap lebih dari kejahatan seratus orang mantan pejabat. Yakni, mereka yang terlibat dalam kup tahun 1967 dan penyiksaan terhadap para tahanan. Pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh polisi militer mendapatkan perhatian publik paling banyak. Pemerintah Yunani melaporkan bahwa pada bulan Desember tahun 1976 telah diselenggarakan lebih dari 400 pemeriksaan pengadilan semacam itu di seluruh negeri.

Pada bulan Desember tahun 1990, pemerintah mengumumkan bahwa mereka bermaksud membebaskan tiga mantan pemimpin junta “atas dasar kemanusiaan”.

Pembebasan itu juga termasuk bagi sepuluh perwira militer yang telah menjalani lima belas tahun hukuman penjara serta mereka yang telah dijatuhi hukuman penjara dua puluh tahun dan hukuman seumur hidup. Badai protes dari publik memaksa pemerintah untuk membatalkan rencana itu.

### **Spain: Transisi Bertahap**

Di Spanyol, kediktatoran tidak dapat diberantas dengan sekali pukul. Tidak adanya pembaruan politik total memungkinkan figur-figur terkemuka rezim sebelumnya memainkan peran yang besar dalam membentuk struktur politik yang baru. Setelah kematian Franco di tahun 1975, selama beberapa tahun institusi kepolisian, pengadilan, birokrasi, dan pendidikan di negeri ini masih dipegang oleh orang-orang yang diangkat Franco.

Selama masa *booming* antara tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an, kaum kapitalis Spanyol lebih berperan sebagai kekuatan yang melakukan liberalisasi dibandingkan sebagai kekuatan yang secara politik bersifat represif. Sebuah peran yang tidak mungkin bisa searah dengan rezim yang lebih bersifat sebagai sebuah rezim yang kejam (*dictadura*) dan tidak fleksibel.

Pada tahun 1973, ketika *booming* itu untuk pertama kalinya dipertanyakan, Spanyol telah berkembang menjadi negara maju yang makmur sekalipun masih agak tidak merata dibandingkan masa lima belas tahun sebelumnya. Pendorong yang paling signifikan dari kemajuan itu adalah peran yang telah disumbangkan turisme dalam memperkuat pemerintah Franco untuk melakukan pengekangan politik. Jutaan orang memadati kota-kota Spanyol dan pantai negeri itu. Hal ini berpengaruh besar terhadap kehidupan orang Spanyol. Turisme memicu penurunan brutalitas polisi pada tahun 1960-an, penurunan jumlah penahanan politik, pengurangan hukuman, dan diakhirinya “keadaan-keadaan darurat” dan pelaksanaan metode-metode yang biasa digunakan dalam keadaan perang lainnya.

Pada bulan Februari 1981, dalam sehari penuh, sekelompok prajurit ultra-kanan menguasai seluruh parlemen dan kabinet dengan ancaman senjata. Mereka memperoleh cukup banyak dukungan pasif dari angkatan darat untuk mencegah pemerintah mengambil langkah-langkah balasan yang radikal. Meskipun pada akhirnya beberapa anggota militer tersebut berhasil ditahan.

Para korban rezim Franco harus menunggu waktu lama untuk mendapatkan kompensasi. Kompensasi ini baru mulai diberikan setelah tahun 1990 kepada beberapa orang saja.

## **Kesimpulan**

Situasi-situasi yang digambarkan di atas ditulis berdasarkan penelitian-penelitian para sejarawan terkemuka. Hal itu menunjukkan bahwa tidak satu pun dari negara-negara tersebut tampak bisa memberikan contoh penanganan pengalaman masa lampau yang bisa diterapkan di tempat lain. Dalam sebagian besar kasus di atas, sifat fase “genesis” dan fase transisi atau “transformasi” sangat berbeda untuk kasus-kasus di tempat lain. Sebaliknya, di negara-negara non-Eropa di mana masa peralihan itu baru terjadi setelah pertengahan tahun 1980-an, ditemukan bahwa hanya sedikit yang bisa diambil dari contoh pengalaman orang Eropa dan Jepang. Hal ini karena tidak banyak dilakukan penetapan standar-standar dalam penanganan masa lampau di dua negara tersebut. Meskipun di sana terdapat aspirasi-aspirasi yang tinggi dari pengadilan militer di Nuremberg (Jerman) dan Tokyo (Jepang). Di kedua negara ini memang “dilakukan pemeriksaan pengadilan” oleh para pemenang. Namun demikian, perbedaan yang bisa kita temukan di kedua negara tersebut adalah: di Nuremberg pemeriksaan pengadilan difokuskan pada kejahatan melawan kemanusiaan di seluruh daratan Eropa yang diduduki. Sedangkan di Tokyo penekanannya adalah pemeriksaan pengadilan terhadap tindakan agresi militeristik terencana Jepang.

Dalam bab 9, kita akan melihat bagaimana kesamaan yang ada di mata rakyat antara pemeriksaan pengadilan di negara-negara seperti Argentina dan Rumania dengan yang terjadi di Nuremberg. Namun demikian, terlepas dari satu atau dua prinsip dasar hukum internasional, dua negara ini merasa hanya menemukan sedikit pelajaran dari pengadilan Nuremberg. Dalam sejarah dunia pasca 1945, mereka hanya melihat bahwa upaya-upaya komprehensif untuk membersihkan mereka yang bertanggung jawab bagi tindakan-tindakan rezim yang represif itu ternyata berhenti tanpa hasil. Di Jerman, Jepang, negeri Belanda dan sejumlah negara lainnya, memang dilakukan penahanan dan pembersihan terhadap sejumlah besar “penjahat”. Tetapi di semua negara ini hanya beberapa orang saja yang dihukum penjara dalam waktu yang lama, dan dikenakan pengasingan publik yang terus-menerus. Sanitasi di Portugal dan Yunani pada pertengahan tahun 1970-an berakhir serupa.

Namun demikian, negara-negara yang sedang berada dalam tahap transisi dewasa ini dapat memetik satu pelajaran historis: bahwa rekonsiliasi merupakan suatu proses yang panjang. Pada tahun 1995, lima puluh tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, di Jerman dan Negeri Belanda terbit lebih banyak buku-buku dan dokumentasi-dokumentasi televisi mengenai proses transisi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kini bila seorang jurnalis atau periset menemukan seseorang yang dengan masa lampaunya yang tersembunyi bisa berperan sebagai seorang kolaborator, maka ia masih dapat mengharapkan publisitas yang luas sekali di sebagian besar negara Eropa. Di Jepang, paada tahun-tahun belakangan ini, telah muncul peningkatan kesadaran bahwa masa lampau ternyata tidak akan bisa hilang begitu saja, dan pengakuan kesalahan serta kebutuhan mengenai perlunya kompensasi maupun penyajian fakta-fakta yang lebih akurat dalam buku-buku sejarah bangsa, kini juga sudah lebih meningkat dari masa sebelumnya. Pengalaman-pengalaman ini seharusnya dapat dijadikan pelajaran bagi pemerintah-pemerintah yang sedang menjalani proses transisi itu. Tak ketinggalan juga bagi masyarakat luas, mereka butuh untuk secepatnya bisa melupakan pengalaman pahit di masa lalu. Mereka berharap proses rekonsiliasi akan segera menghapuskan ingatan menyakitkan yang membebani mereka.



Sejarah, sebagaimana pernah dikatakan Henry Ford, tidak lebih dari sekadar munculnya fakta demi fakta yang tidak akurat. Mungkin ada sesuatu yang lebih permanen dan abadi dalam sejarah, yakni upaya yang terus-menerus untuk menghadapi trauma-trauma. Pada akhirnya, fakta-fakta sejarah tampaknya tidak akan pernah bisa hilang, meskipun seluruh generasi lebih memilih untuk melupakannya.

## MODEL KONSILIASI

### **Tanggung Jawab Pemerintah**

Rekonsiliasi melibatkan tidak hanya spekulasi filosofis, oportunisme politik ataupun kelicikan yudisial. Rekonsiliasi juga harus didasarkan pada fakta: adanya pengakuan atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, perubahan sifat transisi masa lampau yang keras ke arah sifat masa kini yang agak lunak, tradisi-tradisi negara, pertimbangan-pertimbangan politik nasional, internasional dan lain sebagainya. Sebagaimana telah kita lihat, tidak ada model yang bisa diterima secara umum bagi keseluruhan proses “kebenaran dan rekonsiliasi”. Dan sebagaimana akan ditunjukkan dalam bab-bab berikutnya, memang tidak mudah untuk menetapkan sebuah model yang bisa diterima secara umum. Negara-negara yang memulai proses ini harus juga menangani sejarah dan sistem hukum mereka sendiri serta realitas politik dewasa ini. Namun demikian, di sini saya ingin memperkenalkan sebuah model. Model yang secara murni bisa berfungsi sebagai sebuah “alat heuristik” – sebuah cara mengidentifikasi masalah-masalah utama dengan pemecahan-pemecahannya. Dengan meringkaskan berbagai opsi dan instrumen-instrumen yang ada, memungkinkan kita bisa lebih baik dalam mempertimbangkan dan menilai jangkauan dari tindakan yang diusahakan oleh pemerintah serta keseimbangan antara pilihan-pilihan yang akan dibuat.

## **Empat Unsur Konsiliasi**

*Encyclopedia of the Social Sciences*, sebuah karya otoritatif yang diterbitkan pada tahun 1968, memuat sebuah artikel mengenai “Konsiliasi Industrial”. Artikel ini menganalisis empat instrumen utama yang dimiliki golongan-golongan yang siap membantu memecahkan konflik para pekerja. Instrumen-instrumen tersebut adalah investigasi, mediasi, arbitrase, dan keputusan pengadilan. Tidak sulit untuk menjabarkan kategori-kategori ini ke dalam syarat-syarat mengenai apa yang dapat dilakukan dan harus dilakukan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia warisan masa lampau. Hasilnya adalah semacam kerangka heuristik yang saya rasa bermanfaat.

*Investigasi* mencakup semua upaya pemerintah untuk mengadakan riset dan menerbitkan fakta-fakta mengenai eksekusi-eksekusi yang tidak sah. Ini secara normal melibatkan pernyataan resmi mengenai peristiwa-peristiwa itu sendiri, penyingkapan-penyingkapan beberapa fakta dan pengungkapan identitas-identitas mereka yang bertanggung jawab. Dalam beberapa kasus, individu atau badan-badan resmi dapat ditunjuk untuk mengusahakan investigasi khusus terhadap berbagai tindakan penyelewengan di masa lampau. Kadang-kadang, suatu pemerintahan membentuk sebuah komisi khusus untuk tujuan itu. Bab 8 akan menyajikan bahasan tentang “komisi-komisi kebenaran” ini secara lebih mendalam. Terlepas dari pembentukan komisi-komisi semacam itu, masih terdapat banyak contoh investigasi-investigasi dengan arti yang lebih sempit lainnya. Saya akan menyajikan investigasi-investigasi dari berbagai jenis Badan Hak-Hak Asasi Manusia yang resmi dalam bab 12.

*Mediasi* mencakup semua upaya untuk mendorong dilakukannya dialog dengan pihak-pihak lawan dan badan-badan internasional. Pemerintah dapat memulai pembicaraan dengan kelompok-kelompok oposisi, yang para anggotanya telah

dieksekusi secara tidak sah. Mereka dapat menanggapi laporan dan permohonan organisasi-organisasi hak asasi manusia nasional maupun internasional. Mereka juga dapat membahas soal-soal ini di organisasi-organisasi yang ada dalam tubuh pemerintah sendiri serta mengizinkan mereka untuk melakukan investigasi terhadap persoalan-persoalan tersebut. Mediasi bisa juga berupa penyerahan resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misalnya, pada tahun 1990, Kelompok Kerja PBB untuk Tindak Penghilangan dan Pelapor Khusus untuk Tindak Penyiksaan diundang secara resmi untuk melakukan investigasi secara khusus di Filipina. Pemerintah dapat menyetujui secara resmi dilakukannya kunjungan-kunjungan oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Afghanistan pada tahun 1989 dan Namibia pada tahun 1990 meminta bantuan dari ICRC untuk menginvestigasi orang-orang yang hilang. Pemerintah juga dapat mengambil bagian dalam pembicaraan langsung dengan kelompok oposisi (atau kelompok-kelompok korban). Pembicaraan-pembicaraan semacam itu telah diprakarsai di Kamboja, El Salvador dan Mozambik di bawah pengawasan PBB. Contoh-contoh mengenai mediasi internasional akan diberikan dalam bab 12.

Istilah lain “arbitrasi” dalam kosa kata hak asasi manusia adalah *penyelesaian (settlement)*. Dalam konsiliasi industrial, arbitrasi menyatakan adanya sebuah penyelesaian di luar pengadilan. Negosiasi-negosiasi dapat melibatkan pihak ketiga, tidak perlu yudisial; namun demikian, semua pihak menyetujui bahwa keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat dalam negosiasi tersebut bersifat mengikat. Penggunaan istilah ini mencakup semua upaya pemerintah dalam mencoba menebus atau mengganti kerugian akibat dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, sebuah jalan pintas yudisial terhadap para pelaku kejahatan. Hal ini mencakup baik ketentuan pemberian kompensasi material bagi beban dan kerugian para korban maupun langkah-langkah disipliner terhadap para perwira militer dan polisi. Bab 9 akan merujuk pada kasus-kasus semacam itu.

*Keputusan hakim (adjudication)* melibatkan mekanisme yudisial untuk mengadili atau menuntut pengakuan para pelaku kejahatan dengan hukuman-hukuman yang dijatuhkan pada tingkat penanggung jawab paling tinggi (bagi para anggota junta), dan pada tingkat pertanggungjawaban langsung (bagi pihak atau mereka yang telah menjadi pemicu?). Persoalan kriminal dan keadilan sipil terhadap para pelaku kejahatan pelanggaran berat hak asasi manusia akan dikemukakan dalam bab 9.

### **Tingkat Nilai Konsiliasi**

Seberapa seringkah pemerintah menggunakan empat unsur konsiliasi ini? Ketika mempersiapkan konferensi Amnesti Internasional mengenai pembunuhan-pembunuhan politik dan “penghilangan-penghilangan” pada tahun 1992, saya telah menganalisis berbagai Laporan Tahunan Amnesti Internasional tahun 1989 – 1990. Saya membatasi jangkauan survei itu hanya pada sejumlah negara yang di dalam laporan tersebut disebutkan adanya kasus dilaksanakannya “eksekusi-eksekusi ekstrayudisial”, kasus “pembunuhan yang tidak sah”, kasus “pembunuhan” “penghilangan”, “kematian tahanan dalam penjara” dan acuan-acuan serupa yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah ketika negara sedang mengalami “perselisihan”. Semuanya ada 76 negara. Dari jumlah ini, 19 negara menunjukkan tidak adanya instansi yang menangani konsiliasi. “Investigasi” telah dilakukan di 34 negara, “mediasi” di 37 negara, “arbitrasi” di 19 negara, dan “keputusan hakim” di 20 negara. Kategori yang terakhir meliputi negara-negara di mana para pelaku kejahatan telah dituduh, ditahan atau diadili, meskipun ini menyangkut hanya minoritas kecil dari kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia.

Negara-negara di Amerika Latin memiliki tingkat nilai konsiliasi yang lebih tinggi dalam semua kategori serta dalam kombinasi-kombinasi berbagai kategori tersebut dibandingkan dengan negara-negara di Afrika, Asia, ataupun Timur Tengah. Tiga negara Amerika Latin yang secara khusus memiliki rekor buruk berkaitan dengan

dilakukannya eksekusi-eksekusi ekstrajudisial dan telah menunjukkan upaya-upaya konsiliasi dalam keempat kategori tersebut adalah: Colombia, El Salvador dan Guatemala.

Dua negara yang menonjol berkaitan dengan dilakukannya sejumlah besar eksekusi ekstrajudisial dan sama sekali tidak ada bentuk upaya-upaya konsiliasi adalah: Cina dan Irak. Dari negara-negara yang disaring, 25 persen menunjukkan tidak adanya catatan mengenai konsiliasi, 65 persen melakukan dua kategori atau kurang. Dengan adanya fakta bahwa tingkat-tingkat nilai ini sering melibatkan lebih sedikit dibandingkan dengan instansi-instansi yang terisolasi, maka tampaknya sebagian besar negara dengan pola eksekusi-eksekusi ekstrajudisial menunjukkan adanya sedikit upaya konsiliasi yang serius.

Sebagaimana akan ditunjukkan dalam bab-bab selanjutnya, upaya-upaya konsiliasi tampak memiliki signifikansi yang lebih besar dalam tahun-tahun belakangan ini. Dalam kategori investigasi, pembentukan komisi kebenaran yang menangani masa lampau merupakan sebuah perkembangan baru seperti halnya berbagai kemunculan jenis instansi-instansi nasional yang memantau dan mengganti kerugian akibat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Mengenai mediasi, sebelum tahun 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa hampir tidak melakukan aktivitas-aktivitas dalam bidang ini; namun kemudian badan penasihat hak asasi manusia telah diikutsertakan dalam sejumlah operasi PBB. Dalam kategori penyelesaian, kita dapat mencatat bahwa kompensasi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia, meskipun relatif jarang, namun akhir-akhir ini telah lebih sering diberikan. Pada akhirnya, kategori-kategori tersebut masih merupakan perkecualian dan bukan putusan untuk membawa para pelaku kejahatan ke pemeriksaan pengadilan. Meski demikian, situasi itu tentu saja lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu; bisa kita saksikan dilakukannya pemeriksaan pengadilan di Amerika Latin dan Eropa Timur, dan pengadilan-pengadilan *ad hoc* internasional yang kini diselenggarakan di bekas Yugoslavia dan Rwanda.

## INVESTIGASI HAK-HAK ASASI MANUSIA DI TINGKAT AKAR RUMPUT

### **LSM Dalam Memonitor Hak Asasi Manusia**

Di banyak negara, pekerjaan investigatif dilakukan oleh para keluarga korban, organisasi hak asasi manusia setempat, tim forensik, para profesional atau praktisi hukum dan individu-individu pribadi lainnya, sekalipun sering dengan risiko personal yang sangat besar. Kesemuanya itu digolongkan dalam kelompok investigasi tidak resmi, dan itulah yang akan dibahas dalam bab ini.

Organisasi *Task Force Detainees* di Filipina (disingkat TFDP) semula dibentuk dalam lingkaran Gereja progresif dan telah berjalan selama kira-kira dua puluh tahun. Pada masa pemerintahan rezim Marcos dan kemudian Aquino, TFDP secara sistematis telah memantau terjadinya ribuan penahanan dan ratusan kasus orang hilang maupun kasus pembunuhan setiap tahunnya. Organisasi ini juga mengunjungi dan memberi dukungan kepada para tahanan politik dalam usaha mereka mendapatkan kembali hak-haknya serta menyelenggarakan pendidikan hak asasi manusia.

Kerja organisasi ini tidak begitu banyak mengalami penurunan, sekalipun lebih terfokus pada saat pemilihan Presiden Ramos tahun 1992. Pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia telah berkurang, seperti halnya kasus pembunuhan dan orang hilang, meskipun demikian organisasi itu masih mampu mengkonsentrasikan diri pada bidang-bidang lain yang masih berkait erat dengan hak asasi manusia. Dalam laporan tahunannya pada tahun 1994, TFDP menyatakan bahwa “semenjak Juni 1992, di bawah pemerintahan Ramos, hak sipil dan politik lebih dari seperempat juta orang telah dilanggar”. Para pelaku kejahatan tersebut melibatkan baik agen negara seperti militer, polisi dan kelompok paramiliter (semi militer), maupun orang perorangan yang

bertindak atas nama negara, misalnya para pembunuh bayaran dan orang-orang fanatik agamis. Orang-orang yang terusir dari kampung halaman mereka merupakan kelompok korban terbesar. Pada tahun 1994, 199 orang dilaporkan telah dibunuh, dan 22 orang telah “dihilangkan”. Dari kira-kira 2.000 tahanan, hanya enam puluh orang yang ditahan dengan disertai surat perintah legal.

Dalam sebuah seminar mengenai “pencarian fakta (*fact-finding*) dan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia”, yang diselenggarakan oleh TFDP dan kelompok-kelompok hak asasi manusia Filipina lainnya pada bulan September 1992, disusun suatu pendekatan investigasi yang sistematis:

*Pencarian-fakta*: mengumpulkan fakta-fakta guna menentukan apakah sebuah pelanggaran telah terjadinya atau belum.

*Pemantauan*: untuk mengumpulkan informasi secara sistematis selama jangka waktu tertentu guna mengadakan pengamatan terus-menerus terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran.

*Riset*: untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang terkumpul dalam rangka menyusun kecenderungan dan pola-pola yang diterapkan.

Obyek dari pendekatan ini sering langsung bersifat yudisial: petisi-petisi untuk hak diperiksa di depan hakim (*habeas corpus*), pembebanan uang tanggungan, identifikasi orang-orang hilang, maupun proses peradilan. Pendekatan sistematis ini juga dapat diarahkan bagi kampanye-kampanye publik, upaya lobi, pendidikan, dan publisitas.

Di Argentina dari tahun 1975 sampai tahun 1983, *Asamblea Permanente por los Derechos Humanos* (Majelis Tetap Hak Asasi Manusia) menerbitkan pengaduan-pengaduan mengenai kasus-kasus “orang hilang” yang terjadi selama masa rezim militer – total berjumlah 5.566 kasus. Kemudian daftar ini hampir secara keseluruhan digabungkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh komisi resmi untuk investigasi kasus-kasus orang hilang (CONADEP), sebagaimana yang dapat kita lihat dalam bab 8, tercatat terjadi hampir 9.000 kasus orang hilang. Di bawah junta saat itu, Majelis Tetap Hak Asasi Manusia membawa kasus-kasus tersebut hingga sampai pada



proses peradilan dan sekaligus menerbitkan iklan-iklan. Lembaga lain yang didirikan pada tahun 1978, *Centro de Estudios Legales y Sociales* (CELS = Pusat Penelitian Dokumen Legal dan Sosial) sudah sejak awal berkecimpung dalam melakukan riset mengenai berbagai macam masalah sosial. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan juga lembaga ini memfokuskan diri pada kasus-kasus “orang hilang”. Hal ini terbukti, lembaga tersebut berhasil membawa serangkaian kasus besar sampai ke meja pengadilan. Beberapa di antaranya telah memperoleh tanggapan sangat positif dari para jaksa. Sekitar 100.000 dokumen telah dihimpun pada sebuah mikrofilm, yang secara khusus berguna bagi kegiatan-kegiatan dari CONADEP. Pada tahun 1979, CELS menerbitkan daftar nama-nama dari 191 pengacara yang telah hilang. Sebuah tindakan yang sangat membantu dalam usaha menggugah kesadaran dunia internasional tentang terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Argentina. Pada tahun 1979, Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika juga mengunjungi Argentina. Laporan komisi ini secara khusus sangat pedas dan tajam. CELS memesan 500 lembar kopi, dan membuat 1.000 lembar foto kopi tambahan guna didistribusikan ke seluruh negara.

Di dalam Lembaga Dokumentasi dan Arsip Vicaria (*Foundation for documentation and archives of the Vicaria*) di Santiago, Chili, yang saya kunjungi pada akhir 1994, terdapat kira-kira dua puluh sertifikat penghargaan internasional. Terlintas dalam pikiran saya, mungkin hanya satu yang tampaknya belum melengkapinya yakni Hadiah Nobel. Carmen Garreton, yang pertama datang di Vicaria pada tahun 1979, sebagai salah satu dari tujuh puluh yuris dan delapan puluh staf tambahan, mengantar saya berkeliling melihat-lihat kantor lembaga ini yang sederhana. Pada Desember 1992, semenjak Vicaria mulai tidak berfungsi, sekarang hanya tinggal tiga orang saja yang bekerja di tempat tersebut.

Ia menjelaskan bahwa, lima tahun setelah jatuhnya kediktatoran, orang-orang masih datang ke kantor tersebut untuk melaporkan kasus-kasusnya. Mereka kadang-kadang tidak menyadari bahwa Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi telah mengeluarkan laporannya pada tahun 1991: “Semua informasi yang

dikumpulkan Vicaria, kemudian oleh Komisi Nasional disimpan di sini. Secara keseluruhan terdapat sekitar 45.000 arsip, berkaitan dengan kasus-kasus pembunuhan, 'penghilangan', penyiksaan, pengasingan, ancaman-ancaman, maupun pemecatan. Dalam rentang waktu tak terbatas, arsip-arsip tersebut terbukti sangat bermanfaat: berdasarkan pada pengaduan atau hal-hal lain, tercatat masih ada sekitar seratus kasus yang mengalami penundaan. Dari seratus kasus 'penghilangan' yang gagal ditangani Komisi Nasional, pada saat bersamaan kami sebaliknya telah berhasil membongkar seratus lebih kasus serupa.”

“Vicaria mulai melakukan dokumentasi secara sistematis pada masa-masa awal diterapkannya sistem kediktatoran. Pada saat itu, banyak orang merasa agak ragu-ragu terhadap pekerjaan kami. Mereka mengatakan bahwa para sejarawan di masa mendatang hanyalah kumpulan orang-orang yang mencari keuntungan pribadi. Akan tetapi, setelah sistem kediktatoran tumbang, keadaan pun berbicara lain. Setiap orang akhirnya menyadari betapa signifikannya dokumentasi tersebut. Di Argentina, misalnya, catatan mengenai kasus-kasus yang terjadi pada masa kediktatoran sangatlah kurang sekali, karena tidak adanya organisasi sentral pada saat itu. Para pemimpin Gereja mendukung para diktator, dan dengan demikian, pengumpulan informasi pun dilakukan secara selektif oleh komite-komite yang ditunjuk para keluarga maupun mereka yang menjadi tanggungan para korban bersangkutan.”

Carmen Garreton menjelaskan bagaimana proses penyimpanan arsip-arsip itu pada tahun-tahun awal dilakukan. “Pada tahun 1970-an, kami mengembangkan sebuah sistem yang dinamakan 'komputer manual'. Sistem ini mencakup penggunaan kartu-kartu dengan serangkaian lubang-lubang kode di dalamnya. Setiap lubang berisikan jenis pelanggaran hak asasi manusia, jenis kelamin korban, propinsi, dan lain sebagainya. Hanya satu yang harus Anda lakukan yaitu menusukkan jarum rajut ke dalam tumpukan kartu-kartu yang Anda harapkan akan keluar. Untuk alasan keamanan, kemudian kami membuat salinan keseluruhan data guna dimasukkan ke dalam mikrofilm. Selanjutnya data-data tersebut dititipkan pada Dewan Gereja Dunia di Jenewa dan Universitas Notre Dame di Amerika Serikat.”

Carmen Garreton menunjukkan kepada saya tiga kamar di lantai atas yang terbuka untuk publik. Ketiga kamar tersebut hingga ke langit-langit dipadati oleh tumpukan dokumen-dokumen: jurnal-jurnal, kliping-kliping koran, laporan-laporan tahunan, arsip-arsip yang berisikan semua kasus militer dan sipil, praktek-praktek *habeas corpus*, dan sejumlah besar catatan-catatan mengenai kasus orang-orang yang dibunuh atau dihilangkan. Sedang untuk rekapitulasi akhir diterbitkan oleh Komisi Nasional. Catatan-catatan individual secara lengkap juga disusun dalam sebuah buku yang terdiri atas tiga belas jilid. Dan baru dua ratus kopi saja yang dicetak, antara lain disimpan di Amnesty Internasional dan Palang Merah.

“Suatu hari nanti, kami berharap dapat mentransfer semua informasi pada sebuah pusat arsip, bersama dengan seluruh data yang tersimpan di Gereja dan pemerintah. Mungkin dengan cara seperti itu kami dapat mendirikan museum nasional mengenai masalah-masalah represi. Tetapi di sisi lain, pihak Gereja masih dihinggapi keragu-raguan untuk melepaskan dokumen-dokumennya. Mereka merasa, sebagian besar data yang diberikan secara rahasia tersebut, seharusnya tidak disebarluaskan secara terbuka.”

Banyak sekali organisasi non-pemerintah yang selama bertahun-tahun telah berperan aktif di Afrika Selatan; di antaranya banyak kelompok nasional dan lokal membawa amanat untuk mengumandangkan dengan nyaring hak-hak asasi manusia. Di dalam banyak kesempatan, mereka telah bekerja bahu-membahu, tetapi pada saat lain mereka juga terpaksa harus saling bersaing di antara mereka sendiri. Ini menunjukkan fakta bahwa persaingan tersebut biasanya terjadi karena dipicu oleh suatu keadaan, di mana LSM hak asasi manusia umumnya masih bergantung pada donor-donor dari luar negeri. Masing-masing organisasi kadang kala saling menyangkal angka-angka yang dilaporkan oleh kelompok lain.

Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee – HRC*) adalah sebuah LSM independen yang sejak tahun 1988 telah memantau dan melaporkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan politik. Komite (atau biasa disebut Komisi, sebutan sebelum pemerintah mengumumkan Komisi Hak Asasi Manusia)

berasal dari sebuah organisasi yang dibentuk oleh para keluarga tahanan untuk memantau berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Keberadaan komite (atau komisi) tersebut sangat dilarang oleh pemerintah Afrika Selatan, dan kemudian mendorong beberapa anggotanya untuk mendirikan komite baru.

HRC menerbitkan secara mendetail berbagai macam laporan baik mingguan, bulanan maupun laporan tahunan. Kekerasan politik mencapai puncaknya antara tahun 1990 dan 1993: selama rentang tahun-tahun tersebut HRC mencatat lebih dari 9.300 korban tewas, atau rata-rata terjadi 8,5 persen kematian dalam sehari. Dalam periode ini, HRC juga menerbitkan informasi mengenai 61 kasus “pembantaian besar-besaran”. Setelah pemilihan bulan April tahun 1994, HRC mencatat penurunan yang tajam dalam hal jumlah korban tewas akibat kekerasan: dari 500 lebih kasus kematian pada bulan saat dilakukan pemilihan, menjadi kurang dari 100 kasus serupa dalam bulan Maret 1995.

Kantor-kantor HRC regional berlokasi di semua kota besar. Ketika saya berkunjung ke kantor Cape Town pada akhir tahun 1994, saya melakukan wawancara dengan seorang wanita yang menjabat sebagai kepala bagian, tetapi dering telpon terus-menerus menginterupsi percakapan kami. Ia menjelaskan telah menerima informasi baru dan pertanyaan-pertanyaan yang menyangsikan tentang adanya “*perang taksi*”. Pada saat-saat awal, banyak orang-orang yang menjadi korban aksi pembunuhan. Dinas keamanan, pasukan antihuru-hara, kelompok sayap kanan maupun kelompok-kelompok dengan plafon kemiliteran merupakan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas semua aksi tersebut – khususnya mereka yang berafiliasi dengan partai Zulu Inkatha dan tindakan mereka pun sering kali dimaafkan apabila dianggap secara aktif tidak didukung oleh pihak keamanan. Perang-perang taksi yang kini terjadi, di lain pihak, melibatkan kelompok-kelompok dengan latar belakang kriminal dan politik, yang berusaha keras untuk dapat mengontrol penyediaan transportasi dari atau ke tempat kerja bagi warga. Pada akhir pekan saya di sana, empat belas orang tewas dibunuh di pangkalan-pangkalan taksi, atau selama berkendara bis baik ketika sedang melintasi pusat Cape Town maupun daerah pinggiran kota.

Sebagian besar LSM yang terlibat dalam pemantauan pelanggaran hak asasi manusia sangat menaruh perhatian dengan kejadian-kejadian di masa sekarang dan sedikit mengabaikan hal-hal serupa yang terjadi di masa lampau. Tetapi di beberapa negara, represi memiliki semacam sejarah panjang, sehingga para peneliti dipaksa untuk mempelajari beberapa dasa warsa sebelumnya. Di bekas negara Uni Soviet, sebuah organisasi semi-klandestin para sukarelawan yang mulai bekerja pada tahun 1987 dikenal dengan nama *Memorial*. Dalam kenyataannya, organisasi ini merupakan sebuah koleksi arsip anak sekolah tentang orang-orang “tertindas” selama masa bercokolnya kekuasaan Stalin, dan kemudian membentuk pijakan pola kerja organisasi tersebut. Tujuan Memorial adalah untuk mendokumentasikan korban-korban penindasan politik, khususnya pada periode antara 1930-an sampai 1950-an. Pada akhir tahun 1980-an Presiden Mikhail Gorbachev berjanji: “Tidak akan terjadi lagi manipulasi dalam sejarah Uni Soviet.” Seiring dengan itu, makin banyak pula arsip-arsip dibuka untuk kepentingan akademis maupun untuk memenuhi kebutuhan rasa ingin tahu (*interest*) personal. Memorial diakui secara resmi pada tahun 1991. Pada waktu itu, Memorial telah mampu mengumpulkan lebih dari 30.000 dokumen beserta salinannya, untuk kemudian diselamatkan dan dititipkan pada sebuah institut di Amsterdam karena alasan keamanan.

Kini, Memorial memiliki lebih dari 200 unit lokal yang tersebar di seluruh negara-negara bekas USSR. Siapa saja boleh mengunjungi kantor setempat untuk mencari arsip-arsip mengenai orang-orang yang ditahan, dan kadang-kadang juga memuat daftar para tahanan lebih dari enam puluh tahun yang lalu, seperti “teroris negara”, “gelandangan”, “penderita schizofrenia”, “sampah masyarakat”, maupun “para pengangguran”. Memorial juga mencatat pernyataan-pernyataan lisan. Hal ini dilakukan karena sejumlah besar bahan dokumenter telah dihancurkan baik saat para korban ditahan, selama penahanan, maupun sesudahnya. Biasanya dilakukan oleh kawan maupun pihak keluarga sendiri yang dihinggapi rasa takut yang akut. Organisasi tersebut telah berhasil mewawancarai beberapa orang yang selamat maupun para keluarganya, selain itu juga mengirimkan kuesioner-kuesioner, meskipun perkiraan

jumlah korban penindasan para pendukung Stalin secara menyeluruh masih berubah-ubah, antara 20 dan 60 juta. Apa yang telah dilakukan Memorial merupakan alat pendorong guna memaksa pemerintah Rusia untuk melakukan revisi secara terus-menerus terhadap sejarah masa lampau Soviet, sekaligus berusaha merehabilitasi dan mengganti kerugian yang diderita para korban. Selain itu, Memorial juga telah mendirikan sebuah pusat hak asasi manusia guna memantau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di seluruh bekas negara Uni Soviet.

### **Investigasi Forensik**

Suatu pagi di bulan Oktober 1994 di Buenos Aires, saya berbicara dengan Luis Fondeblider salah seorang anggota *Equipo Argentino de Antropologia Forense* (EAAF), Tim Antropologi Forensik Argentina. Ia masih muda, di bawah tiga puluh tahun, seperti halnya sebagian besar anggota tim.

“Kami mulai melakukan pekerjaan tersebut tak lama setelah jatuhnya junta pada tahun 1983. Pihak militer telah melakukan penenyapan terhadap sekitar sembilan ribu orang – tetapi di mana mereka? Banyak yang telah dibuang ke laut, mati atau diracuni, tetapi banyak juga yang dikubur di berbagai makam, bahkan beberapa di antara mereka ditandai dengan batu nisan berinisial N.N – ‘tidak dikenal’. Kami memiliki cukup data forensik mengenai ribuan orang hingga memungkinkan dilakukannya identifikasi terhadap mayat tersebut. Tetapi kami belum mendekati jumlah bilangan di atas. Lima tahun lalu, di Avellaneda, setengah jam perjalanan dari ibu kota ditemukan kuburan massal yang berisi 340 mayat. Tim kami telah bekerja di sana selama beberapa tahun, tetapi sampai kini hanya mampu mengidentifikasi delapan tengkorak. Secara keseluruhan di negeri ini telah ditemukan lima ratus tengkorak, enam puluh buah telah diidentifikasi. Mengapa jumlahnya begitu sedikit? Salah satu kemungkinan logis adalah segera setelah mencapai kekuasaan, cara yang paling baik, pemerintah demokratik baru melakukan pembongkaran terhadap

kuburan-kuburan tersebut dengan menggunakan bulldozer. Oleh karena itu tak mengherankan jika sebagian besar bukti telah hilang. Kemungkinan lain, karena jumlah korban sangat besar. Campo de Mayo, misalnya, sebuah kamp konsentrasi di dekat Buenos Aires dihuni oleh kira-kira dua ribu tahanan, di antaranya hanya sepuluh tahanan yang hidup. Dan kemungkinan lainnya lagi, banyak mayat yang terbenam di laut.”

Ia kemudian terus mengarahkan pengamatan kepada fenomena khusus yang juga telah menjadi perhatian banyak negara: ada semacam hubungan menakutkan antara kerahasiaan tindakan bengis yang dilakukan negara dengan dokumen rahasia tentang tindakan-tindakan kejahatan yang paling mengerikan – perhatikan pusat-pusat penyiksaan di Kamboja, arsip-arsip polisi yang ditemukan di Chad, peristiwa-peristiwa yang terjadi di stadion Chili, maupun kamp-kamp konsentrasi di Argentina. Apa yang menjadi motif pelaku pembunuhan mungkin bukanlah terutama, ataupun bukan hanya, karena dorongan sadistik belaka. Akan tetapi, dengan menyitir kata-kata Hannah Arendt yang sangat terkenal, ia merasa yakin akan kebanalan (kebiasaan atau kelumrahan) dari kejahatan seperti itu.

Fondeblider: “Jika memang benar belum dihancurkan, kami sangat yakin, pasti ada segudang informasi yang disimpan di suatu tempat. Mesin pembunuh melibatkan birokrasi yang masif. Setiap tindakan pembunuhan dan bahkan mungkin juga tempat pembuangan mayat pun musti didaftar. Akan tetapi daftar-daftar tersebut tidak pernah dipublikasikan untuk umum. Karena itu, dalam setiap upaya pencarian dan identifikasi, kita harus memformulasikan hipotesis kita sendiri, kecuali jika kita ingin seperti mencari sebuah jarum dalam tumpukan rumput kering.”

Fondeblider menggambarkan beberapa situasi yang ganjil, seperti halnya temuan mengerikan di pemakaman Buenos Aires. Wali kota baru telah menemukan dokumen rahasia beserta nama-nama keempat puluh orang “teroris yang dibunuh dalam sebuah penggerebegan”. Ia sangat terkejut ketika melihat sebuah keluarga dengan tiga orang anak berada dalam daftar tersebut. Dengan dihadiri kakek-nenek dan para pengacara, jenazah itu pun kemudian digali. Ayah-ibu dan dua orang anak yang

berumur empat dan lima tahun diidentifikasi. Tetapi untuk peti kelima yang berisi seorang bayi, hanya ditemukan tulang-tulang dan sebuah boneka anak. Tulang-tulang itu kemudian dikenali sebagai tulang orang dewasa. Rupanya, bayi itu telah diculik, jadi kemungkinan besar dia masih hidup. Organisasi para nenek di Argentina, *Abuelas de Plaza de Mayo* dengan gigih mencari cucu yang mereka duga telah diculik selama terjadi penggrebegan terhadap rumah para penduduk, atau mungkin dilarikan dari kamp-kamp konsentrasi, dan kemudian diadopsi oleh para kerabat personil militer maupun oleh teman mereka. Para ahli antropologi Argentina membantu mengidentifikasi anak-anak para “tahanan yang hilang”. Riset ilmiah mampu mengungkap hubungan genetik antara anak-anak dan kakek-nenek mereka; dalam sejumlah kasus para nenek tersebut berhasil menuntut agar anak-anak itu dikembalikan.

Fondeblider menjelaskan mengapa proses identifikasi setiap korban yang tewas akibat kekerasan di Argentina lebih mudah dibandingkan di negara-negara lain. Sekaligus ia menjelaskan alasan masih perlu dilanjutkannya penggalian-penggalian tersebut. “Di Argentina, para korban kelas menengah memiliki proporsi yang besar. Ini lebih berarti bahwa secara relatif tersedia lebih banyak data. Di daerah-daerah pedesaan Guatemala, misalnya, praktis tidak mungkin dilakukan identifikasi terhadap individu masyarakat. Bila ditemukan mayat di daerah-daerah tersebut, sering kemudian oleh komunitas lokal mayat tersebut dikuburkan bersama di kuburan massal disertai upacara kolektif. Anda akan menemukan jenis upacara-upacara seperti yang dilakukan di Kurdistan Irak, Ethiopia, dan El Salvador. Tetapi ritual-ritual semacam ini tidaklah dikenal di Argentina. Di Argentina misalnya, komite Ibu-Ibu Plaza de Mayo akan mendampingi keluarga-keluarga ketika dilakukan penggalian mayat-mayat itu, dan direncanakan upacara penguburan kembali mayat mayat itu.”

Fondeblider menyatakan bahwa orang-orang Argentina tampaknya lebih tertarik dengan sejarah Nazi dibandingkan dengan pembongkaran kuburan-kuburan massal yang tengah berlangsung di sepanjang jalan negeri itu. “Itulah yang digandrungi orang-orang Argentina, dan mereka dengan senang hati akan membeli



buku tentang kejahatan NAZI tersebut dan dengan penuh minat menyaksikan dokumenter-dokumenter TV. Oleh karenanya, sulit untuk mengumpulkan dana di negara kami. Kami masih sangat bergantung pada dana-dana asing. Dalam kenyataannya, kini kami dapat memberikan pelayanan khusus semacam itu. Separuh dari tugas-tugas kami datang dari luar negeri. Kita telah aktif terlibat di lebih lima belas negara. Akhir-akhir ini, menteri luar negeri Rumania meminta kami untuk bekerja sehubungan dengan ditemukannya sebuah kuburan massal yang menjadi kuburan mayat-mayat dengan jangka waktu mulai tahun 1949 sampai tahun 1953. Tahun-tahun yang paling buruk dalam kediktatoran Stalinis. Para penggali sebelumnya telah menghancurkan lebih dari apa yang dapat mereka temukan.”

Sekarang ini, di seluruh dunia, penggunaan metode-metode investigasi forensik untuk mengidentifikasi para korban represi negara, telah diterima secara luas. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan para ahli forensik dengan alasan keteraturan. Dari tahun 1992, komite PBB yang dipimpin oleh seorang yuris Belanda, Frits Kalshoven (kemudian diganti oleh Cherif Bassiouni) mengorganisir pengujian-pengujian terhadap kuburan-kuburan massal dekat Vukovar di bekas negara Yugoslavia. Sebuah tempat dilangsungkannya eksekusi 300 orang Kroasia pada tahun 1991. Tim itu terdiri dari 33 personil angkatan darat Belanda, bersama dengan para anggota dari organisasi Dokter Bagi Hak Asasi Manusia, sebuah kelompok dokter yang mengkhususkan diri dalam riset forensik. Investigasi tersebut diorganisir untuk memberikan bukti bagi pengadilan internasional mengenai bekas Yugoslavia. Investigasi forensik juga bekerja untuk pengadilan internasional dalam kasus yang terjadi di Rwanda.

Bukti fisik semacam itu menjadi semakin penting dalam riset hak asasi manusia. Paling tidak, beberapa kasus kekerasan dan kekejaman pemerintah dan kelompok bersenjata, yang telah menimbulkan kematian bagi lebih dari sejuta orang pada akhir dasa warsa ini, kini dapat juga terdokumentasikan melalui fakta-fakta yang keras hasil penerapan ilmu pengetahuan. Dan ini telah memberikan secercah cahaya harapan kepada para keluarga korban, bahwa nasib dan identitas orang-orang yang

mereka cintai, yang telah dikubur dalam kuburan massal, atau telah dibuang di tempat-tempat sampah, mungkin suatu hari akan dapat ditemukan.

## SUATU MALAM DI PRETORIA

Malam itu merupakan malam musim semi yang sejuk, suatu malam di awal November 1994 di Pretoria, sebuah kota yang paling maju dan aman di Afrika Selatan. Bersama tiga ratus orang lainnya di Holiday Inn, saya menghadiri sebuah forum yang membahas tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Orang-orang yang ada di dalam forum itu adalah mereka yang dengan alasan masing-masing telah saling membenci keberanian yang mereka miliki; mereka sedang berbicara secara terang-terangan tentang pengalaman-pengalaman mereka dan berusaha keras untuk mencapai suatu kesepakatan yang bersifat kolektif.

Di meja pembicara forum itu telah duduk berturut-turut seorang laki-laki kulit hitam, seorang laki-laki kulit berwarna dan seorang laki-laki kulit putih. Yang pertama bernama Chris Ribeiro. Ia adalah salah satu korban pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya adalah Kader Asmal. Lelaki ini selama beberapa tahun telah berperan sebagai kekuatan pendorong gerakan hak asasi manusia dan kini ia menjabat menteri dalam pemerintahan. Yang ketiga, Constand Viljoen, seseorang yang merangkum pencerminan keduanya sebagai seorang Afrika berkulit putih. Viljoen berusia sekitar enam puluh tahun. Penampilannya lebih mencerminkan seorang manajer bank daripada seorang jenderal. Ia pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat Afrika Selatan selama awal tahun 1980-an. Ia juga pernah memimpin operasi-operasi di Angola. Ia memiliki catatan dinas yang gemilang dalam operasi-operasi militer dan, oleh karenanya, sangat dihormati dalam tubuh Angkatan Darat. Meskipun ia telah mengundurkan diri dan berkecimpung dalam bidang pertanian, sebagai anggota parlemen ia tetap berpartisipasi dan hadir selama pemilihan-pemilihan untuk menggunakan haknya. Ia pernah menyatakan bahwa dialah “orang yang

memungkinkan dilaksanakannya pemilihan umum”. Sebuah pernyataan yang tidak berlebihan tentunya; hanya seminggu sebelum pemilihan dilaksanakan, ia secara terbuka menyatakan penolakannya untuk mendukung upaya kudeta. Sebuah upaya kudeta yang pada saat itu memiliki peluang keberhasilan. Selain itu, masih ada segi lain yang menarik dalam karakternya. Berkat saudara laki-lakinya, seorang teolog liberal, ia pernah menjalin hubungan dengan Nelson Mandela. Dua orang yang sama-sama telah berjuang selama tiga puluh tahun ini, telah mengadakan pembicaraan selama beberapa jam dan saling menaruh penghargaan satu sama lain. Seperti terbukti pada malam itu di Holiday Inn, Viljoen sangat meyakini pendapat yang ia utarakan.

Chris menjadi pembicara pertama dalam forum itu. Sebenarnya istilah “pembicara” merupakan istilah yang kurang cocok baginya. Karena selama dua puluh menit itu ia hanya meneteskan air mata dan setiap kalimatnya dipenuhi kemarahan. Bila peristiwa ini menimpa orang lain, pasti orang lain itu akan berhenti setelah beberapa menit saja. Namun ia tetap tidak berhenti; ia merasa kisahnya harus diceritakan. Delapan tahun yang lalu, ayahnya sebagai seorang aktivis moderat, ketika membuka bagasi mobilnya, tiba-tiba mobil itu meledak berkeping-keping akibat dipasang bom mobil. Seminggu kemudian, Chris mendengar keributan di depan rumahnya. Ibunya mencoba keluar, namun dihadang oleh dua orang kulit hitam dan seorang kulit putih bersenjata; mereka lalu menembak ibunya hingga mati seketika. Chris mencoba bersembunyi di dalam sebuah mobil. Tapi ia diseret dari mobil itu dan ditembak. Untungnya ia bisa meloloskan diri. Rumah sakit menolak untuk merawatnya. Namun kemudian polisi, pada saat sebelum penembakan, terbukti telah membantu para pembunuh itu dengan menutup lingkungan itu.

Chris dengan jujur mengungkapkan perasaannya. “Saya tahu apa yang saya rasakan. Saya ingin agar orang-orang yang membunuh ayah dan ibu saya digantung. Mandela dapat mengampuni orang-orang yang telah memenjarakannya selama 27 tahun, tetapi saya tidak dapat mengampuni mereka. Saya ingin pemeriksaan pengadilan Nuremberg diselenggarakan di Afrika Selatan. Saya sebenarnya ingin berdamai dengan apa yang telah terjadi. Tapi, apa yang harus saya sepakati? Dengan

siapa saya harus mencapai kata sepakat? Kemarahan saya tertuju pada orang-orang yang tak punya malu, orang-orang yang berkedok. Tidak ada sesuatu yang konkret. Saya ingin adanya Komisi Kebenaran, karena saya ingin mengetahui *mengapa* itu terjadi. Orang-orang yang menentang adanya Komisi, seperti Viljoen, tidak memahami apa yang kami rasakan. Haruskah saya mengarahkan kemarahan kepadanya?” Chris kemudian duduk, mukanya ditutup dengan kedua telapak tangan dan pundaknya berguncang.

Kader Asmal menyusul menuju ke mimbar; sejenak ia termangu. Kemudian disertai gerak isyarat yang ekspansif dan ketepatannya yang luar biasa dalam memilih kata-kata, membuat ide-idenya mengalir keluar dengan lancar. “Dalam tiga tahun belakangan ini, saya telah belajar untuk tidak menjadi seorang yang dogmatik. Saya memang berasal dari latar belakang Indo-Eropa dengan tradisi balas dendamnya. Namun di dalam diri saya, saya telah belajar untuk menjadi orang Afrika Selatan. Kami telah menciptakan keajaiban, terima kasih karena itu semua merupakan buah kemurahan hati para korban.”

Asmal kemudian mengacu pada cara “Eropa” menangani masa lampau mereka. Di Prancis, 10.000 orang digantung setelah perang tanpa melalui pemeriksaan pengadilan. Negeri Belanda mempraktekan kembali hukuman mati. Saat ini tengah berlangsung pembersihan dalam skala besar di Republik Cehnya, bekas Jerman Timur, dan negara-negara Eropa Timur lainnya. “Reaksi tipikal Eropa terhadap penyakit kekerasan adalah berupa pembuktian diri sendiri bahwa mereka tidak bersalah. Orang yang berteriak lantang mengenai keadilan pada akhirnya memang tidak perlu memberikan pertanggungjawaban. Sebaliknya, di Afrika Selatan sejak dilaksanakannya pemilihan umum tidak terjadi pengejaran bagi mereka yang telah melakukan kejahatan. Tidak ada orang yang membalas dendam, meskipun nama-nama pembunuh apartheid diketahui publik.”

Lalu Viljoen pun mengambil giliran berbicara. “Kultur-kultur kita saling terpisah bermil-mil jauhnya..... Oleh karenanya, adalah suatu ilusi bila dalam masyarakat pelangi yang baru, segala-galanya akan menjadi serta merta berbeda.”

Kepada Chris, korban, ia berkata: “Anda tahu secara pasti apa yang terjadi, dan kita juga tidak ingin terjadi lebih banyak korban. Kita memerlukan kedua belah pihak untuk bisa ‘menari’ dalam masyarakat pelangi yang baru itu.” Ia lalu menggambarkan masa lampau sebagai “perang yang tidak menentu dengan metode-metode yang juga tidak menentu bagi kedua belah pihak”. Kedua belah pihak diyakinkan mengenai alasan-alasan keadilan yang mereka pegang masing-masing.

Viljoen menyatakan bahwa ia bukanlah penentang rekonsiliasi, sebaliknya ia hanyalah seorang yang memilih tetap tinggal di lahan pertaniannya. Namun ia menilai bahwa metode yang diterapkan oleh komisi itu keliru. “Komunitas-komunitas, kelompok-kelompok seharusnya direkonsiliasi satu sama lain. Masa lampau mestinya diperiksa dalam kerangka keseluruhannya yang lebih besar. Anda tidak dapat memahami konflik hanya atas dasar korban-korban individu. Kita harus memahami mengapa Afrika Selatan mengalami ‘perkembangan yang terpisah’ dari berbagai kelompok populasi lain.”

Kemudian pidatonya terdengar menjadi kurang toleran. Sebuah komisi seperti itu pasti akan membutuhkan biaya miliaran, bila semua korban minta untuk mendapatkan ganti rugi. Keluarga para korban “pembunuhan-pembunuhan kalung”, orang-orang yang ditembak oleh para aktivis kulit hitam, mereka seharusnya juga menerima keadilan. Dua tahun pasti tidak akan cukup bagi sebuah komisi semacam itu. Selama beberapa tahun, pers pasaran akan menyerang dan menelannya mentah-mentah, sekalipun orang-orang telah dijanjikan akan diberikan amnesti. Moral sudah begitu rendah dalam tubuh kepolisian dan angkatan darat; ini hanya akan menjadikan semuanya lebih buruk. Lalu ia menambahkan catatan yang lebih mengancam: “di sini saya punya enam nama anggota kabinet, dari semua golongan, yang secara serius terlibat.”

Viljoen berkeyakinan bahwa Tuhan-lah jaksa yang tepat; ia kemudian beralih dari bahasa Inggris ke bahasa Afrika, agar dapat mengatakan sesuatu yang sangat dekat dengan hatinya: “*God is die finale wraaknemer. Dit is nou tyd om mekaar aan te*

*neem.*” (‘Tuhan adalah penuntut balas terakhir. Kini saatnya untuk menerima satu sama lain.’)

Ia juga memaparkan usulan konstruktif lainnya: membiarkan parlemen menyusun rekonsiliasi. Bagaimanapun, mereka adalah para wakil yang dipilih dari “kelompok-kelompok populasi”. Karena itu, biarkan mereka menyandang lumpur satu sama lain. Dan biarkan parlemen itu menetapkan “hari rekonsiliasi” tahunan, dan kemudian untuk merefleksikan apa yang telah dicapai hingga saat itu.

Pertemuan itu kemudian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dengan tanpa jeda istirahat sebelumnya. Karena tampaknya tidak seorang pun ingin menggunakan waktu istirahat tersebut. Penanya pertama menanyakan tentang kasus penghilangan, dengan menyebutkan bahwa saudara laki-laki dan saudara sepupunya juga telah menjadi korban yang dihilangkan. Penanya pertama itu adalah anak perempuan seorang pemimpin ANC yang terbunuh. Penanya kedua adalah janda seorang aktivis yang mati dalam penjara. Para penanya lain tidak menyebutkan keterlibatan personal seperti kedua penanya sebelumnya; mereka kesemuanya berusaha untuk disiplin dalam mengajukan pertanyaan supaya jelas dan tidak menghabiskan waktu. Apa yang bisa kita lakukan berkaitan dengan penderitaan emosional keluarga-keluarga yang telah kehilangan sanak saudaranya? Bagaimana kita dapat mencegah Angkatan Darat melakukan praktek-praktek keji semacam itu sekali lagi? Apa makna bagi mereka yang telah menamakan Afrika Selatan sebagai negara yang paling religius di dunia? Seorang kulit putih yang sudah tua, yang telah meninggalkan Partai Nasional 39 tahun yang lalu, dan sejak itu tetap berada “dalam hutan belantara politik”, berkomentar bahwa ia menganggapnya cukup naif untuk percaya bahwa masyarakat akan bisa dipuaskan bila berurusan dengan soal kebenaran. Ia tetap khawatir dengan akan adanya hari pembalasan dan hal ini akan menentang komisi.

Asmal dan Viljoen menjawab semua pertanyaan dengan sangat cermat. Asmal berkata bahwa sementara rencana-rencana sedang disusun, ia sebenarnya telah mengumpulkan sepuluh alasan yang mendukung komisi itu dan empat belas alasan lain yang bersifat menentang. Ia percaya bahwa komisi seharusnya cepat-cepat bekerja: “Di

Chili, mereka bekerja delapan belas jam sehari; kita juga dapat melakukan hal yang sama.” Ia pikir bahwa tidak seorang pun, bahkan Viljoen sekalipun, dapat berbicara mewakili “satu kelompok populasi tertentu”. Berkaitan dengan biaya, ia dengan cermat membandingkan bahwa untuk biaya bom atom saja Afrika Selatan telah menyediakan biaya sebesar enam miliar.

Viljoen mengatakan bahwa sebuah komisi yang dibentuk itu hanya akan mampu menghimpun file dari arsip-arsip yang kemudian akan terbengkelai di rak-rak tertimbun debu. Ia secara aktual pro komisi. Ia menyatakan bahwa, di bawah kepemimpinannya, Angkatan Darat tidak pernah terlibat dengan operasi-operasi yang kotor (sampai tingkat tertentu fakta-fakta memang menunjangnya).

Pada titik ini pertemuan berakhir. Para peserta kulit putih dan kulit hitam mengambil biskuit-biskuit dan kopi di ruangan itu. Saya mendapatkan tumpangan untuk kembali ke Johannesburg dari seorang teolog tua dan isterinya. Mereka berdua tampak terkesan dengan forum itu. Mereka telah mendapatkan bagian yang adil dalam hal gangguan dan penahanan. Mereka berpikir betapa situasi damai yang terjadi sejak diadakannya pemilihan itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Dan mereka percaya bahwa tradisi religius di negeri itu, untuk sebagian, memang sangat berperan. Dan setelah malam itu mereka bahkan semakin yakin bahwa rekonsiliasi akan berhasil.



## KOMISI-KOMISI INVESTIGASI RESMI

Komisi-komisi nasional yang dibentuk untuk melaksanakan investigasi resmi terhadap masa lampau, secara komparatif masih merupakan fenomena yang baru. Seperti yang akan ditunjukkan pada tabel di akhir bab ini, sebagian besar komisi penyelidikan semacam ini baru dimulai dari tahun 1991, tahun ketika Komisi Mengenai Kebenaran dan Rekonsiliasi Chili mengumumkan laporannya. Jenis komisi ini merupakan hasil langsung perubahan-perubahan yang melanda negara-negara dunia ketiga dan Eropa Timur di masa-masa sebelumnya. Berapa jumlah negara yang telah mendirikan komisi-komisi penyelidikan semacam ini? Apa yang secara pasti telah mereka investigasi? Apakah hasil-hasil dari investigasi, dan bagaimana hasil-hasil tersebut diterbitkan? Saya akan menguraikan beberapa di antaranya secara terinci, dan di dalamnya termasuk mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Dapatkah komisi ini digambarkan sebagai langkah maju dalam model pembangunan internasional?

### **Contoh-Contoh Hingga Tahun 1991**

Setelah terjadinya pembunuhan terhadap ratusan orang sipil di kamp-kamp pengungsi Sabra dan Chatila di Beirut Barat pada bulan September 1982, pemerintah Israel kemudian membentuk sebuah komisi yudisial untuk menentukan apakah penguasa militer Israel mau tidak mau harus bertanggung jawab terhadap peristiwa itu atau tidak. Pada bulan Februari 1983, Komisi Penyelidikan Kahan ini menyimpulkan bahwa tentara-tentara Israel “secara mutlak memang tidak memiliki tanggung jawab

langsung” terhadap terjadinya pembantaian besar-besaran tersebut. Tetapi tentu saja para pejabat Israel seharusnya telah dapat menduganya, dan mereka telah gagal untuk mengambil tindakan-tindakan segera dan berani.

Presiden Sekou Touré dari Guinea meninggal pada tahun 1984, sesudah angkatan bersenjata berhasil merebut kekuasaan dan membentuk pemerintah baru yang dikenal dengan nama *Comite militeire de redressement national*. Sebuah komisi penyelidikan resmi kemudian dibentuk untuk menginvestigasi nasib para tahanan yang telah dibunuh atau dihilangkan. Ada 60 menteri dan keluarga mantan presiden ditahan, tetapi banyak yang kemudian dibebaskan. Pembebasan itu tampaknya dilakukan setelah mereka dibuktikan tidak bersalah oleh komisi penyelidikan tersebut. Temuan-temuan komisi periode tahun 1958-1984 tidak pernah diterbitkan. Selama periode ini, tidak seorang pun yang pernah dilaporkan dibawa ke pemeriksaan pengadilan karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia

Presiden Amin dari Uganda membentuk Komisi Penyelidikan untuk Kasus-Kasus Penghilangan pada tahun 1974. Laporan setebal 1.000 halaman dari komisi ini diumumkan pada tahun 1975. Di dalamnya tercantum nama 308 orang yang telah dihilangkan dan bahkan bisa dikatakan lebih dari jumlah itu. Meskipun rezim presiden Amin sudah runtuh pada tahun 1978, namun komisi itu belum memulai kerjanya hingga pada saat Presiden Museveni menduduki jabatan pada awal tahun 1986, ia berhasil membentuk komisi penyelidikan lebih lanjut. Komisi ini dikepalai oleh hakim pengadilan tinggi dan dibentuk untuk menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak kemerdekaan tahun 1962. Kemudian pada tahun 1986, dilakukan tuntutan terhadap beberapa menteri dan pejabat pemerintah rezim sebelumnya. Pada tahun 1994, komisi ini mengajukan sebuah laporan final yang terdiri dari 1.500 halaman kepada pemerintah, dan diumumkan kepada publik pada tahun berikutnya.

Di Argentina, Presiden terpilih Raúl Alfonsín dilantik pada bulan Desember 1983. Sebelum akhir tahun, pemerintahan presiden itu telah berhasil membentuk sebuah Komisi Nasional untuk Orang-Orang yang Dihilangkan (CONADEP). Pada

akhir tahun 1983, dilakukan penggalian 1.186 mayat dari kuburan tak dikenal di pemakaman-pemakaman seluruh negeri. CONADEP menyajikan temuan-temuannya pada bulan September 1984 dalam sebuah laporan berjudul *Nunca más*. Laporan ini memuat katalog 8.960 kasus “penghilangan” yang belum diselesaikan, sembari memperingatkan bahwa angka yang sebenarnya bisa lebih dari itu. Laporan ini juga memuat daftar 340 pusat penahanan klandestin. Dari kasus yang ada, lebih dari 1.080 kasus berhasil diajukan ke pengadilan sipil. CONADEP kemudian dibubarkan dan dibentuk sebuah biro hak asasi manusia baru oleh Menteri Dalam Negeri. Biro ini khususnya bertugas mencari anak dari orang-orang “yang telah dihilangkan”. Pada akhir tahun 1988, 48 anak semacam itu telah ditemukan, sementara sekitar 150 anak lain tidak diketahui identitasnya. Sejak saat itu, pengadilan-pengadilan hanya membuat sangat sedikit kemajuan dalam membereskan kasus-kasus yang tertinggal.

Komisi Nasional Mengenai Kebenaran dan Rekonsiliasi Chili mulai bekerja pada tahun 1990. Dalam presentasi laporan resminya pada tanggal 4 Maret 1991, Presiden Aylwin menjelaskan bahwa laporan ini tidaklah mencerminkan “kebenaran resmi... Negara tidak memiliki hak untuk “memaksakan” suatu kebenaran. Ia menekankan bahwa orang tidak serta merta dapat menyembunyikan kebenaran hanya dengan mengimbuai dilaksanakannya perang internal dengan tanpa disertai bukti atau hanya dengan melakukan perlawanan terhadap terorisme demi kebutuhan membela tanah air. “Perang juga memiliki hukumnya sendiri. Tidak ada yang membenarkan penyiksaan dan eksekusi para tahanan atau melakukan penghilangan tubuh para tahanan.” Ia menunjukkan bahwa karena agen pemerintah telah menjadi penyebab timbulnya penderitaan ini, dan tidak ada reaksi publik yang telah mencegah dan menghukumnya, maka negara dan seluruh masyarakat ikut memikul tanggung jawab, baik karena telah melakukan tindakan maupun karena mengabaikannya. Ia juga menyatakan komisi tidak dapat menetapkan keputusan mengenai siapa yang mesti bertanggung jawab. Karena dekrit yang digunakan untuk membentuk komisi itu tidak memberikannya wewenang bagi komisi untuk melakukan hal tersebut.

Laporan komisi Chili itu terdiri dari 1.094 halaman berisi deskripsi kronologis dari semua kasus pembunuhan dan “penghilangan”. Di dalamnya termasuk “penghilangan dan pembunuhan yang dilakukan dengan dalih-dalih politik”. Semisal pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok oposisi. Dari total 3.500 kasus yang dipelajari, komisi menyimpulkan bahwa 1.068 orang dibunuh oleh militer dan polisi, 957 orang “dihilangkan” oleh tangan-tangan agen negara, dan 90 orang dibunuh “dengan alasan-alasan” yang dilakukan oleh kelompok-kelompok oposisi. Komisi menyatakan bahwa ada 641 kasus yang belum dapat diberikan kesimpulan yang pasti, dan menyerahkannya bagi investigasi lebih lanjut. Laporan ini membahas lebih dari 2.100 kasus secara rinci.

Laporan Chili ini juga memuat 74 halaman yang membahas masalah “pemulihan”. Di dalamnya terkandung ratusan saran mengenai upaya implementasi proses pemulihan ini. Bagian ini terbagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama bertajuk *Reparation*. Kategori ini berisi rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan rehabilitasi publik bagi para korban. Misalnya rehabilitasi publik ini diberikan melalui pembangunan monumen atau taman publik, pemberian sertifikat kematian bagi mereka “yang dihilangkan”, pemberian pensiun standar bagi semua keluarganya, perawatan medis dan perlengkapan pendidikan, perumahan, dan sebagainya. Kategori kedua, bertajuk *Prevention* lebih khusus mencakup rekomendasi-rekomendasi dalam bidang yudisial: dilakukannya ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional, ketersediaan bank data mengenai penahanan-penahanan yang sudah terkomputerisasi dan dapat diakses secara bebas. Dengan demikian, diharapkan bagi siapa saja melakukan penyembunyian informasi orang-orang “yang dihilangkan”, dan sejenisnya dapat dikenai hukuman. Di dalamnya juga terdapat rekomendasi-rekomendasi perlu dimasukkannya pendidikan hak-hak asasi manusia di semua tingkat pendidikan. Mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Bab terakhir laporan ini, bertajuk *Truth, Justice and Reconciliation*, lebih membahas persoalan-persoalan keadilan yang terjadi semisal saat dilakukan pengadilan para pelaku kejahatan. Komisi ini menyatakan bahwa di antara “mereka

yang diminta konsultasinya” (sekitar 2.000 LSM, organisasi-organisasi resmi dan individu-individu di dalam dan di luar negeri) ternyata memiliki opini yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya menganggap bahwa pemberlakuan sanksi merupakan cara yang sangat diperlukan bagi pemulihan dan pencegahan. Namun demikian, sebagian lain dari mereka menganggap bahwa dalam suatu periode transisi tertentu pemeriksaan pengadilan dapat memberikan efek sebaliknya dari yang dimaksudkan.

Pada bulan Januari 1992 disetujui sebuah undang-undang untuk membentuk sebuah Badan Hukum Nasional Bagi Pemulihan dan Rekonsiliasi dengan periode dua tahun (jangka waktu itu kemudian diperpanjang). Organisasi ini dibentuk untuk mengkoordinir, mengadakan implementasi dan mempromosikan tindakan yang terdapat dalam rekomendasi-rekomendasi Komisi Nasional. Salah satu tugas Badan Hukum ini adalah menemukan tempat keberadaan orang “yang dihilangkan”, dan melakukan investigasi terhadap kasus-kasus yang gagal ditangani oleh Komisi Nasional serta kasus-kasus yang timbul setelah Komisi Nasional tersebut dibubarkan. Badan Hukum ini tidak diberi wewenang menangani pertanggungjawaban kriminal yang dilakukan oleh individu-individu; informasi yang relevan harus diserahkan ke pengadilan.

Pada akhir tahun 1994 secara resmi diakui bahwa jumlah keseluruhan orang yang dibunuh atau “yang dihilangkan” selama pemerintahan militer mencapai tiga ribu.

### **Contoh-Contoh yang Ada Sejak Tahun 1991**

Di Chad, diterbitkan sebuah laporan pada tahun 1992. Laporan itu berjudul *Report of the Commission of Inquiry into the crimes and irregular activities perpetrated by ex-president Habré or his accomplices*. Laporan itu secara singkat menggambarkan kekuasaan teror yang dilakukan oleh Habre. Sebagian besar orang yang dipenjarakan mati

karena kelaparan: paling lama mereka hanya dapat bertahan beberapa bulan. Para tahanan lain ditembak mati atau ditusuk dengan bayonet. Juga terdapat jenis-jenis penyiksaan lainnya. Laporan itu mencakup lampiran yang terinci, disertai ilustrasi foto dan gambar-gambar. Diperkirakan jumlah orang yang dibunuh selama jangka waktu delapan tahun sekitar 40.000. Korban-korban yang mati di luar ibu kota N'Djaména, biasanya hanya namanya saja yang dicatat. Laporan juga memuat nama para pembunuh dan penyiksa, serta foto-foto mereka muncul dalam lampiran.

Investigasi tersebut dipimpin oleh Mahamat Abakar. Saya bertemu dengannya pada tahun 1992 dalam sebuah konferensi tentang komisi kebenaran yang diselenggarakan di Carter Center di Atlanta. Mahamat Abakar dalam konferensi saat itu tampak terkejut dan sangat senang atas perhatian yang ditunjukkan terhadap laporannya. Sebelumnya, ia hampir tidak menyangka bila jenis investigasi semacam itu juga ada di negara-negara lain. Laporannya, yang ia tulis dalam bahasa Prancis, merupakan kumpulan foto kopi berjilid dengan kualitas jelek. “Negara memberikan anggaran yang sangat tidak cukup bagi kami untuk pekerjaan seperti ini. Sangat sulit bagi kami untuk bisa menggunakan mobil guna mengunjungi kuburan massal. Para saksi pun menjadi ragu-ragu untuk tampil dan membeberkan kesaksian mereka. Di Afrika Utara, berbeda dengan situasi di Amerika Latin, adalah tidak lazim bagi Anda untuk membicarakan pengalaman-pengalaman personal. Juga, di sini ada ketakutan yang sangat nyata: Hissein Habré memang benar telah dikirim ke pembuangan pada bulan Desember 1990, tak lama sesudah berlangsungnya kekuasaan teror selama delapan tahun, namun sebenarnya ia sudah mengalami pengasingan itu sebelumnya dan hanya untuk kembali lagi. Dan kroni-kroninya masih aktif di beberapa bagian negeri. Di kota, kami kesulitan untuk mendapatkan tempat sebagai kantor. Hal ini menimbulkan akibat yang sangat ironis bagi kami: kami terpaksa menempati kantor pusat kami di bangunan yang dulu dijadikan penjara paling mengerikan oleh rezim Habré. Sehingga dapat dipahami bila untuk membuat pernyataan-pernyataan di tempat itu, merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi mereka yang dulu pernah menghuni penjara itu.”

Dalam laporannya, Abakar juga memberikan daftar rincian yang tak terhitung banyaknya. Sebagian besar mayat-mayat itu diangkut dengan sebuah bis – dengan nomor registrasi: RT 1247 AP – ke sebuah tempat yang dituju di dekat sebuah jalan utama dan melemparkannya di sana. Selain kuburan masal ini, komisi penyelidikan juga menemukan dan menggali dua kuburan lain. Menurut laporan, Habré terlibat dalam pembuatan keputusan pelaksanaan penahanan-penahanan tiap harinya dan dia juga memutuskan siapa yang harus dieksekusi. Sebuah pusat penahanan rahasia paling terkenal terletak berdekatan dengan kantor PBB dan menghadap kantor USAID, sebuah lembaga bantuan Amerika. Ada bukti bahwa para perwira Amerika Serikat sering terlihat berada di dalam penjara tersebut dan secara reguler melatih militer Chad hingga hari terakhir pemerintahan Habré. Memang harus diakui bahwa hal itu sudah lama diketahui dan telah dimintakan perhatian dari Sekretaris Negara Amerika Serikat oleh Amnesti Internasional serta kelompok-kelompok hak asasi manusia lainnya. Namun demikian, ia belum memberikan reaksi dan menolak soal itu dengan menyatakan sebagai sesuatu yang bersifat “rahasia”.

Berkaitan dengan perkiraan adanya 40.000 orang yang telah dibunuh, Abakar mengatakan: “Jumlah itu lebih besar dari jumlah yang diduga orang, bahkan jauh melebihi jumlah yang saya pikirkan saat saya memulai pekerjaan ini. Dalam sebuah laci di sebuah kantor dinas rahasia itu, saya menemukan sebuah dokumen tebal mengenai pembunuhan seorang perwira militer senior terkemuka yang telah berbalik melawan Habré, lengkap dengan foto mayatnya. Mungkin kepala polisi yang melakukan pembunuhan itu ingin membuktikan bahwa ia telah melaksanakan perintah-perintahnya, mungkin ia diilhami oleh sadisme murni – siapa tahu?”

Komisi itu telah menemukan nama-nama serta kuburan dari 4.000 korban. Sebagian besar tubuh mereka dibuang ke dalam kuburan massal. Tiga di antaranya telah digali kembali oleh polisi. Di Chad, laporan itu menarik perhatian publik yang sangat besar. Sebagian besar bukan akibat publikasi laporan itu sendiri karena mayoritas penduduk masih buta huruf dan terlalu miskin untuk membeli buku. Tapi

lebih merupakan akibat dilakukannya pemutaran melalui dokumenter TV dan dilaksanakannya pameran yang didasarkan pada temuan-temuan dalam laporan.

Pada bulan Maret, laporan Komisi Kebenaran *De la locura a la esperanza* (Dari Kegilaan ke Harapan) diterbitkan di El Salvador. Komisi ini dibentuk setelah dilaksanakannya perjanjian-perjanjian perdamaian tahun 1991. Komisi ini dibentuk untuk menyelidiki sebuah kuburan korban pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh pasukan pemerintah maupun oleh gerakan oposisi FMLN sejak tahun 1980. Komisi itu juga diinstruksikan untuk membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai bagaimana mencegah berulangnya tindakan-tindakan semacam itu. Dalam persetujuan-persetujuan perdamaian yang mereka lakukan, kedua belah pihak secara formal sepakat untuk mematuhi rekomendasi-rekomendasi ini.

Laporan komisi itu menegaskan bahwa angkatan darat, polisi dan kelompok-kelompok paramiliter harus bertanggung jawab atas terjadinya pembantaian besar-besaran, pembunuhan, penyiksaan dan “penghilangan” dalam skala yang besar. Laporan itu juga menyimpulkan bahwa regu-regu pencabut nyawa itu telah menjalin hubungan dengan badan-badan pemerintah yang secara reguler melakukan pembersihan terhadap lawan-lawan politik. Di samping itu dinyatakan pula bahwa otoritas-otoritas hukum di negeri itu mesti bertanggung jawab, karena ternyata pelanggaran-pelanggaran itu telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan keduanya sengaja tidak dihukum. Dari seluruh pelanggaran yang dilaporkan pada komisi, 95 persen dikaitkan dengan keterlibatan pasukan pemerintah atau regu-regu pencabut nyawa; namun demikian, FMLN juga telah terbukti bersalah atas terjadinya pembunuhan dan penculikan yang tak terhitung jumlahnya. Komite ini menyajikan temuan-temuannya pada 32 kasus yang telah diseleksi untuk diadakan riset yang terinci, di samping 22.000 kasus lain yang dilaporkan. Komite ini juga membuat banyak rekomendasi, termasuk dilakukannya pemecatan dan penghapusan terhadap fungsionaris legal dan anggota FMLN yang disebutkan dalam laporan dari jabatan militer mereka, diberikannya kompensasi bagi para korban dan keluarganya, dilaksanakannya investigasi segera terhadap regu-regu pencabut nyawa, dilakukannya



reformasi-reformasi hukum dan implementasi rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh komisi pengamat PBB, ONUSAL. Dua kelompok yang paling banyak mendapat kritik, yakni angkatan darat dan pihak pengadilan, menolak rekomendasi-rekomendasi yang dibuat komisi itu dan menuduh bahwa komisi itu telah berprasangka dan melakukan fitnah. Seminggu setelah laporan itu diterbitkan, pemerintah mensahkan proposal dari presiden yang memberikan amnesti umum bagi semua orang yang terlibat.

Patricia Valdez, kepala tim investigasi bagi komisi kebenaran, mengatakan kepada saya (di Buenos Aires, di mana ia kini memimpin sebuah organisasi untuk hak-hak sipil) bahwa stafnya telah bekerja pada proyek itu selama enam sampai delapan bulan. Selama waktu itu mereka selalu bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, dan sering harus juga bekerja di akhir pekan. Tiga anggota dari komisi itu hanya datang ke San Salvador selama empat hari setiap bulannya. Ketiganya adalah orang-orang asing yang memiliki status politik yang tinggi.

Komisi itu memperkirakan jumlah keseluruhan korban paling tidak ada 60.000 orang. Valdez mengakui bahwa ia tidak mampu membuat dokumentasi bagi seluruh kelompok. “Laporan-laporan kami hanya mencakup kasus-kasus yang dapat kami dokumentasikan. Selama periode 82 hari, kami mewawancarai para saksi di kantor-kantor yang ada di San Salvador serta tiga kota lainnya. Tetapi kami terhambat sistem hukum yang ada. Proses perdamaian belum dikonsolidasikan secara jelas. FMLN dan angkatan darat masih sibuk mengadakan demobilisasi dan di mana-mana muncul kegelisahan umum. Kami juga mewawancarai sejumlah kira-kira 200 personil militer. Kami memiliki otoritas untuk mencatat pernyataan-pernyataan militer (komisi di Chili misalnya, tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal ini) namun hal ini ternyata menjadi salah satu tugas kami yang paling sulit. Pada bulan-bulan terakhir, ketika laporan itu telah diselesaikan, saya menelepon kedutaan-kedutaan di seluruh dunia, tempat para perwira tinggi militer telah dipindahkan, untuk mendapatkan informasi dari mereka.”

Ketika ditanya mengapa komisinya memberikan nama-nama para pelaku kejahatan, Valdez menjawab: “Kami merasa penyebutan nama-nama itu merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan dan esensial. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan tidak bekerjanya sistem hukum di El Salvador. Laporan hanya merupakan cara agar mereka mendapatkan malu dihadapan publik.”

Di kantornya di daerah pinggiran ibu kota Guatemala, ketika ditanya mengenai Komisi Kebenaran yang telah diusulkan dalam persetujuan-persetujuan perdamaian tahun 1994 yang dilakukan oleh pemerintah dan gerakan gerilya, Ninath Garcia tidak bisa untuk bersikap tidak emosional. Wanita ini adalah anggota pendiri *Grupo de Apoyo Mutuo*, Sebuah Kelompok Dukungan Bersama yang diorganisir oleh para keluarga orang-orang “yang telah dihilangkan”. Di Amerika Tengah, kelompoknya ini setidaknya sama terkenalnya dengan organisasi Ibu-Ibu Plaza de Mayo dari Argentina serta komite-komite lain yang akan saya gambarkan dalam bab 11. Nineth mendirikan kelompok itu lebih dari sepuluh tahun yang lalu, tak lama setelah suaminya diculik. Sejak saat itu, ia telah menerima sejumlah ancaman kematian dan telah dipaksa untuk mengambil tindakan pencegahan sewaktu-waktu. Ketika ia pergi bekerja (ia mengajar di sebuah sekolah dasar), ia sering dikawal oleh anggota Bridgade Perdamaian Internasional, sebuah organisasi yang mengirimkan para anggotanya ke luar negeri untuk memberikan perlindungan dalam jenis situasi yang seperti ini.

“Kini hanya beberapa orang saja yang masih ingat bahwa kami telah memiliki tiga komisi semacam itu. Komisi pertama didirikan pada tahun 1984. Komisi ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, yang mendeklarasikan bahwa tidak hanya satu orang saja ‘yang telah dihilangkan’ di Guatemala. Pada saat itu, jumlah korban ‘penghilangan’ yang sudah didaftar berkisar lebih dari 40.000 orang. Kemudian muncul inisiatif kedua pada tahun 1987. Dalam komisi kedua ini terdapat seorang anggota yang berasal dari komisi hak asasi manusia di parlementer. Setelah dilakukan pertimbangan mendalam selama beberapa bulan, mereka mengadakan kontak dengan beberapa keluarga untuk menyatakan kepada mereka bahwa pemerintah akan memberikan dukungan ekonomi. Hal ini dilakukan atas dasar kondisi bahwa mereka

akan tetap diam dan menerima saja kenyataan bahwa orang-orang yang mereka cintai telah meninggal. Dan upaya terakhir dilakukan pada tahun 1991, sebuah komisi didirikan oleh Ramiro de Leon Carpio. Seorang yang kemudian menjadi Penuntut Hak-Hak Asasi Manusia dan kini menjadi presiden. Kami tidak pernah mendengar satu kata pun mengenai hasil-hasil investigasi mereka.”

Namun demikian, Nineth García tidak hilang harapan; GAM dan kelompok-kelompok hak asasi manusia lainnya telah menyusun rencana daftar tuntutan-tuntutan bersama. “Hal yang paling mendasar adalah bahwa para anggota komisi harus tidak berpihak dalam menjalankan tugasnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dilibatkan, seiring dengan upaya mereka memfasilitasi proses perdamaian. Kami ingin melihat gereja juga terwakili di dalam komisi itu, dan kami menekankan bahwa para pengacara, dokter dan kaum profesional seharusnya diizinkan untuk memberi kontribusi keahlian mereka.”

Ia tidak bermaksud bahwa komisi itu harus menyebutkan nama-nama para pelaku kejahatan. “Apa yang paling penting adalah bahwa mereka mengklasifikasikan kejahatan-kejahatan dalam kerangka legal yang tepat agar kejahatan-kejahatan itu dapat dituntut. Ini berarti komisi itu harus bekerja keras sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam waktu sembilan bulan atau setahun.”

Pada tahun 1993 saat dilakukan pemilihan presiden di Honduras, dua partai utama negeri itu mencoba saling menyalahkan berkaitan dengan terjadinya lebih dari 100 “penghilangan” selama tahun 1980-an. Pertentangan-pertentangan ini berakhir ketika Komisaris Nasional untuk Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia mengumumkan bahwa pada akhir tahun ia akan mengeluarkan laporan mengenai orang-orang yang telah “dihilangkan”. Laporan yang kemudian diterbitkan pada bulan Desember 1993 ini menuduh militer terdahulu dan sekarang serta para fungsionaris sipil telah merencanakan “penghilangan-penghilangan secara sistematis, melanggar hukum dan penghilangan terorganisir terhadap 184 orang selama tahun 1980. Di antara orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap kejahatan-kejahatan itu adalah dua mantan presiden dan kepala angkatan bersenjata yang sekarang. Laporan itu juga

menyatakan bahwa para penasihat militer dari Amerika Serikat dan Argentina juga terlibat dalam kejahatan-kejahatan ini. Pada bulan Desember 1994, sebuah investigasi legal mulai memasuki salah satu dari 184 penghilangan yang dicatat dalam laporan, menyusul penggalian kuburan dan identifikasi tubuh seorang pengacara yang “dihilangkan” pada bulan Februari 1982. Ketika itu ia masih berada dalam penjara.

Di Srilanka, sebuah komisi yang dibentuk oleh presiden melaksanakan investigasi terhadap kasus-kasus ‘penghilangan’ sejak tanggal 11 Januari 1991 hingga 11 Januari 1993. Laporan-laporan komisi ini tidak diumumkan kepada publik. Para pejabat regional ditunjuk untuk melaporkan keluhan-keluhan mengenai adanya kasus “penghilangan” kepada komite. Setelah terjadi pergantian pemerintahan pada bulan Agustus 1994, dilakukan pembongkaran dan penyingkapan terhadap dua belas kuburan rahasia. Kuburan ini diduga telah digunakan untuk mengubur mayat orang-orang yang telah diculik oleh pasukan keamanan dan mayat mereka yang dilaporkan telah hilang antara tahun 1988 dan tahun 1990. Delapan anggota militer dan seorang kepala sekolah dituduh telah melakukan penculikan dengan maksud untuk membunuh. Lima orang kepala penjara dituntut berkenaan dengan kasus kematian lima orang tahanan pada tahun 1993. Pemerintah baru tersebut membentuk tiga komisi untuk menginvestigasi kasus-kasus “penghilangan” dan eksekusi ilegal yang telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1988. Belum ada satu pun komisi yang telah diberi mandat untuk menginvestigasi sekitar tujuh ratus kasus “penghilangan” yang terjadi antara tahun 1984 dan tahun 1987.

Hingga akhir tahun 1994, nasib serta lokasi keberadaan 39 orang yang hilang di Thailand sejak bulan Mei 1992 tidak berhasil diketahui dengan pasti. Mereka hilang selama terjadinya tindakan kekerasan oleh dinas keamanan ketika menghadapi demonstrasi-demonstrasi yang menuntut demokrasi yang lebih luas. Meskipun pernah disampaikan kepada pemerintah pada bulan Juli dalam tahun yang sama, hasil selengkapnya dari investigasi yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan terhadap peran angkatan darat selama bulan Mei 1992 tidak diumumkan kepada publik. Pada bulan Mei 1994, Menteri Dalam Negeri memberikan perintah kepada para gubernur propinsi

untuk bekerja sama dengan kantor tertinggi penuntutan publik serta pihak pengadilan hukum, agar dapat menyusun daftar resmi dari mereka yang masih hilang. Hal ini dianggap penting berkaitan dengan persoalan pembayaran kompensasi kepada para keluarga yang terlibat.

### **“Lustrasi” di Eropa Timur**

Proses mengenai “kebenaran dan rekonsiliasi” yang berkembang di bekas negara-negara komunis di Eropa Timur dalam banyak hal sangat berbeda dengan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga. Terkecuali di Jerman. Di negeri ini, tidak ada upaya-upaya untuk membentuk jenis komisi kebenaran yang resmi seperti yang terlihat di negara-negara Amerika Latin, Filipina dan beberapa negara Afrika. Penekanannya lebih diletakkan pada adanya penjelasan (atau pengaduan) individu-individu, dengan menggunakan banyak sekali arsip yang dihimpun oleh dinas-dinas keamanan sebelumnya.

Rangkaian pembersihan di negara-negara pasca-komunis dimulai dengan membuka 6 juta arsip Stasi di Republik Demokratik Jerman yang dulu (GDR). Republik Cehnya (yang masih merupakan bagian dari bekas Cekoslovakia) melaksanakan paling banyak “lustrasi”. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, *lustrare*, yang berarti “menyucikan dengan api” atau bisa juga berarti “menjernihkan sesuatu dengan membawanya ke dalam cahaya”. Bulgaria, Latvia dan Estonia juga telah mengadakan “lustrasi”, sekalipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Pemerintah Hungaria telah mengusulkan statuta lustrasi, meskipun terdapat perlawanan dari partai-partai oposisi. Rancangan undang-undang mengenai lustrasi juga sudah dibahas dalam parlemen Rusia pada tahun 1991. Tetapi tidak ada hal yang substantif di dalamnya. Di Polandia pada tahun 1992, Menteri Dalam Negeri menegaskan mengenai latar belakang dilakukannya penyaringan terhadap para pejabat terpilih dan diberikan daftar hitam bagi 64 nama. Sekalipun demikian, rupanya ada motif-motif politik yang

tersembunyi di balik penegasan itu. Kontroversi yang muncul kemudian banyak yang malah mendiskreditkan dilakukannya proses itu, yang pada akhirnya merupakan pemicu jatuhnya pemerintah.

Seorang Jurnalis Polandia dan sekaligus mantan pembangkang, Adam Michnik, menyatakan bahwa ia akan lebih suka “membiarkan para bajingan tidak dihukum daripada menghukum sejumlah besar orang yang tidak bersalah”. Ia menggambarkan sebuah skenario mimpi buruk yang mengerikan di mana semua orang komunis akan dikirim ke Siberia; pada akhirnya yang akan tersisa hanyalah komunisme tanpa orang-orang komunis. Dalam praktek, tidak ada pengejaran besar terhadap para penjahat berkembang di Eropa Timur. Dalam beberapa tahun tampaknya terjadi penurunan sebagian besar kepentingan resmi dan publik terhadap lustrasi.

Dalam bab akhir buku ini, saya akan kembali kepada kelebihan dan kekurangan sistem lustrasi yang diindividualisasikan ini, dibandingkan dengan model-model lain yang digunakan untuk menangani masa lampau. Di sini, saya akan mempertimbangkan proses lustrasi beberapa negara dengan lebih mendetail.

Jerman merupakan satu-satunya negara Eropa Timur yang telah membentuk Komisi Kebenaran. Kenyataannya, negara ini memiliki dua buah komisi semacam ini. Keduanya menangani warisan masalah yang ditinggalkan bekas Partai Persatuan Sosialis (SED) di Republik Demokratik Jerman. Komisi yang pertama bernama “komisi penelusuran sejarah dan akibat-akibat kediktatoran SED”, yang didirikan pada tahun 1992. Komisi itu meneliti jaringan Stasi yang represif, dan penggunaan yudisial yang represif serta penerapan sistem penjara. Di dalamnya terdapat 16 anggota komite penyelidikan dari parlemen federal. Beberapa pemeriksaan diselenggarakan di seksi Jerman Timur dan banyak “subkelompok hasil komisi ini” masih mengadakan pertemuan di berbagai kota untuk mendiskusikan masalah yang ditinggalkan SED. Sejumlah besar bahan, mencapai 150.000 halaman, telah berhasil dikumpulkan oleh komisi ini dan telah diterbitkan sebuah laporan resmi. Sebuah *Enquête-Kommission* baru kemudian dibentuk pada bulan Mei 1995, yang dipercaya bisa “mengatasi dampak-dampak kediktatoran SED dalam proses unifikasi Jerman”. Syarat-syarat

acuan komisi ini mencakup tiga isu utama: pengaruh ideologis SED, militersasi terhadap masyarakat dan penetrasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh jaringan keamanan Stasi.

Di Jerman, sebelum arsip-arsip Stasi secara resmi dibuka, terdapat pasar gelap bagi arsip yang dicuri oleh agen-agen Stasi terdahulu, atau yang disuplai oleh bekas jaringan keamanan soviet, KGB (yang memiliki banyak sekali kopian arsip itu). Arsip-arsip ini digunakan untuk memeras, dan memunculkan gangguan-gangguan publik. Bahkan di antaranya terdapat daftar harga untuk arsip-arsip ini; pihak media merupakan salah satu pembeli yang paling tertarik.

Joachim Gauck, mantan menteri Protestan di Jerman Timur diangkat menduduki pos Komisi Federal arsip-arsip Stasi di Jerman bersatu yang baru. Disahkan sebuah produk hukum khusus yang memungkinkan individu-individu untuk mendapatkan informasi mengenai mereka apa yang telah berhasil dikumpulkan (dan dicatat). Sebanyak 3.000 orang dipekerjakan di kantor-kantor arsip; dua juta orang tercatat telah meminta informasi. Pekerjaan itu semakin menjadi sulit berkaitan dengan kenyataan bahwa Stasi memiliki banyak sekali pegawai “informal”. Jumlahnya hampir mencapai satu persen dari populasi. Sering mereka tidak tahu musti didapatkan informasi yang mereka kumpulkan itu. Lagi pula, berkaitan dengan aplikasinya oleh individu, kantor Gauck juga menyusun sejarah analitis mengenai GDR. Pada tahun 1995, sejarah ini sudah tersusun mencapai 15.000 halaman dan masih akan terus berkembang.

Dalam sebuah konferensi di Afrika Selatan, Gauck menjelaskan bahwa sistem lustrasi Jerman adalah sebagai berikut: “Hukum memungkinkan individu-individu untuk mendapatkan informasi mengenai mereka dalam arsip-arsip itu. Kita telah menerima sekitar 700.000 permohonan individual-individu, dan sisanya dari para penuntut publik, parlemen, dan pelayan-pelayanan sipil penyaring pelamar pekerjaan.”

“Alasan di balik tipisnya isi tulisan, bukan karena dinas rahasia Jerman Timur tidak lebih brutal dibandingkan para Nazi pendahulunya, tetapi karena dinas rahasia itu bergerak selangkah lebih jauh dalam birokratisasi proses represi, dan pembelengguan birokratik terhadap masyarakat secara keseluruhan.”

“Selama periode pemerintahan transisional dalam tubuh GDB, mantan Menteri Dalam Negeri kembali memegang posisi sebagai wakil presiden. Sebagian besar arsip berada di bawah kontrolnya, dan tidak ada transparansi dalam lingkungan ini. Memang diyakini – dan saya juga setuju – bahwa beberapa dari arsip itu telah dihancurkan. Arsip-arsip baru mengenai lawan-lawan politik masa sekarang atau masa depan bermunculan, dan kini tampaknya tidak mungkin untuk menyandarkan pada arsip-arsip tersebut atau apa yang tertinggal darinya.”

“Purifikasi” yang dilakukan terhadap para mantan komunis setelah hancurnya Republik Demokratik Jerman memiliki dampak yang luas. Misalnya, enam puluh persen dari para pejabat pendidikan dan guru Saxony telah dipecat dari jabatan mereka.

Di Republik Cehnya, Presiden Vaclav Havel menegaskan bahwa masalah-masalah yang dihadapi pemerintahan barunya bukan lagi soal “memilih antara sosialisme dan kapitalisme, tetapi lebih merupakan masalah kebenaran: bagaimana membersihkan masyarakat dari kebohongan masa lampau dan membangun kembali keyakinan rakyat sebagai manusia yang otonom, integral dan bermartabat”. “Hukum Lustrasi” disahkan pada bulan Oktober 1991, yang melarang para mantan pejabat rezim sebelumnya memegang posisi-posisi menentukan selama kurun waktu lima tahun. Pemimpin Partai Demokratik Kristen Cehnya memperkirakan bahwa total sejumlah 300.000 orang dengan kadar masing-masing telah terlibat dalam sistem represi yang telah berlangsung itu. Mekanisme seleksi yang agak kabur dari 140.000 nama arsip-arsip polisi rahasia kemudian dikembangkan. Sejak itu, 200.000 permohonan untuk mendapatkan sertifikat telah diterima oleh Komisi Parlementer – sertifikat ini merupakan tanda deklarasi bahwa seseorang tidak pernah berkolaborasi dengan *StB*, Dinas Keamanan Negara.

Hukum Ceko slovakia yang mengatur masalah lustrasi mengacu kepada sejumlah daftar mengenai pejabat negara dan swasta yang ada, posisi-posisi, dan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikenakan larangan itu. Larangan tersebut bisa dikenakan pada mereka yang antara bulan Februari tahun 1948 dan bulan November 1989, memegang posisi tertentu di pemerintahan atau dalam partai komunis, termasuk



mereka yang secara sadar telah melakukan “kolaborasi” dengan polisi dinas rahasia. Terdapat sebuah prosedur pembersihan bagi mereka yang diduga sebagai “para kolaborator sadar”, di dalamnya termasuk sertifikat izin dari Menteri Dalam Negeri atau putusan tribunal administratif khusus. Undang-undang itu dan diskualifikasi yang timbul di dalamnya, berlaku sampai tanggal 31 Desember 1996. Sampai dengan tahun 1993, sebanyak 198 pejabat telah dituntut atas penyalahgunaan yang mereka lakukan selama berlangsungnya rezim komunis.

Pada tahun 1993, Menteri Dalam Negeri di Republik Cehnya, Ian Ruml, mempertimbangkan perlu tidaknya dilakukan publikasi dokumen-dokumen rahasia mengenai StB yang sangat kontroversial. Menurut Ruml, alasan utama mengapa dokumen ini tidak dipublikasikan adalah tiadanya keuangan. Para ahli memperkirakan bahwa publikasi itu akan memakan biaya mencapai kira-kira 150 juta kronen Cehnya (6 juta dolar US). Sebagian besar biaya itu akan diberikan kepada para pengacara dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab melakukan supervisi proses pembuatan dokumen-dokumen itu agar dapat diketahui oleh publik. Menurut juru bicara kementerian, dokumen-dokumen dinas rahasia ini memuat rujukan bagi golongan-golongan ketiga yang seharusnya dilenyapkan.

Namun demikian, pada awal tahun 1995, lebih dari lima tahun setelah jatuhnya rezim komunis di Cekoslovakia, diputuskan bahwa orang Cehnya dan Slovakia mestinya memiliki peluang untuk memeriksa dokumen-dokumen yang disusun oleh StB. Haruskah seseorang menuntut hal itu, yakni identitas seseorang yang menyusun laporan memuat perihal orang-orang tersebut atau siapa saja yang disebutkan dengan nama kode dalam dokumen itu, maka akan bisa terungkap di dalamnya. Hukum itu, yang telah disetujui oleh pemerintah dalam bentuk rancangan, dan akan masih terus menjadi perdebatan (*in-force*) sampai tahun 2001. Ada 100.000 dokumen StB dalam arsip-arsip Menteri Dalam Negeri. Arsip-arsip itu hanya memuat sebagian dari seluruh informasi rahasia yang berhasil dikumpulkan oleh polisi komunis, yang telah berencana membakar sejumlah besar dokumen itu tak lama setelah terjadinya “Revolusi Beludru” pada tahun 1989.

Pemerintah Rumania tidak membentuk jenis komisi apa pun dengan tugas melakukan investigasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lampau. Badan pembuat undang-undang kemudian membentuk komisi-komisi investigasi setelah terjadinya kekerasan etnis di Tirgu Mures pada bulan Maret 1990 serta kerusuhan disertai kekerasan di Bucharest pada bulan Juni dalam tahun yang sama. Meski demikian, laporan komisi-komisi itu tidak menunjukkan adanya pertanggungjawaban yang jelas. Karena laporan itu mengandung kesimpulan-kesimpulan yang searah dengan garis partai-partai, dan tidak banyak berpengaruh untuk mencegah terjadinya insiden-insiden kekerasan selanjutnya.

Sebagian besar personil yang bekerja untuk dinas rahasia *Securitate* diberhentikan ketika dibentuknya Dinas Informasi Rumania (SRI) untuk menggantikan Biro Sekretaris Negara. Meski demikian, selama masa transisi itu tidak ada penjelasan publik mengenai apa yang terjadi pada agen-agen yang telah diberhentikan tersebut – apakah mungkin mereka bekerja dalam dinas yang baru dibentuk tersebut? Tidak ada nama-nama atau arsip-arsip *Securitate* yang telah dipublikasikan, meskipun SRI berulang-ulang berjanji untuk melakukannya.

Hukum Panev, yang disetujui atau diadopsi pada bulan Desember 1992 di Bulgaria, membutuhkan individu-individu yang memiliki posisi-posisi terkemuka dalam institusi-institusi akademik, untuk memberikan pernyataan tertulis mengenai pekerjaan mereka dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan partai komunis di masa lampau. Jika seorang individu terbukti memegang posisi khusus di dalam partai komunis, memegang mekanisme keamanan negara atau institusi pendidikan partai, atau kursus-kursus yang diajarkan dalam bidang sejarah dan ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan kaum komunis tertentu, maka ia (laki-laki atau perempuan) akan dipecat. Pada tahun 1994, diperkirakan sekitar 9.000 manajer puncak dari berbagai perusahaan, 14.000 perwira dalam dinas keamanan negara, 90 persen para administrator pemerintah, dan sepertiga dari seluruh diplomat telah diberhentikan di bawah hukum Panev. Pemerintah dan politisi sama-sama mengekspresikan

keprihatinan bahwa proses diskualifikasi telah diperburuk ke dalam perjuangan kekuasaan politik di Bulgaria.

Pada bulan Januari 1993, sebuah amandemen Undang-undang Hukum Pidana menutup akses bagi data-data arsip personal dengan alasan demi keamanan nasional, dan membebaskan hukuman kriminal bagi pelaku penyebaran informasi arsip-arsip tersebut.

Sebuah komisi khusus dibentuk di Albania untuk menyusun identitas orang-orang dari distrik Shkodër dan distrik-distrik di sekitarnya. Mereka, selama berlangsungnya kekuasaan komunis dari tahun 1944 sampai tahun 1991, telah dilikuidasi karena alasan-alasan politik oleh dinas-dinas keamanan. Laporan ini mengeluarkan temuan-temuan pertamanya pada bulan Oktober 1992. Dikatakan bahwa sebegitu jauh komisi tersebut telah membongkar enam kuburan massal di Shkodër dan telah menyusun identitas empat puluh korban. Namun demikian, mereka mencurigai bahwa jumlah keseluruhan korban mencapai sekitar dua ribu orang.

### **Afrika Selatan: Langkah Terobosan yang Berbeda?**

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sudah dalam masa persiapan di Afrika Selatan sejak pertengahan tahun 1994, memiliki beberapa komisi awalan. Sebuah komisi hukum dengan ketua Richard Goldstone, hakim dalam Pengadilan Banding, sudah menginvestigasi insiden dan kasus yang berhubungan dengan kekerasan politik. Komisi penyelidikan Goldstone mengenai sebab-sebab terjadinya kekerasan, dibentuk dalam Persetujuan Perdamaian Nasional pada tahun 1991. Salah satu dari hal-hal yang diungkap oleh komisi tersebut adalah adanya kegiatan regu kematian di dalam tubuh angkatan kepolisian KwaZulu. Komisi Goldstone juga mengeluarkan laporan atau mengadakan investigasi terhadap sejumlah insiden kekerasan lainnya. Beberapa dari laporan ini, khususnya yang menginvestigasi dinas-dinas keamanan, dikritik dengan

sengit karena gagal dalam menentukan titik kesalahan yang menjadi sebab-sebab terjadinya kekerasan tersebut.

Pada tahun 1992, Kongres Nasional Afrika (ANC) membentuk Komisi Internal Skweyiya untuk menangani keluhan-keluhan dari orang-orang yang pernah dipenjarakan oleh ANC. Pada tahun 1993, ANC mendirikan komisi eksternal Motsuenyane untuk menginvestigasi laporan-laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1980-an yang dilakukan oleh para fungsionaris ANC di pengasingan. Laporan komisi ini menyimpulkan bahwa para anggota ANC telah bersalah dengan melakukan penyiksaan dan pembunuhan dan juga telah menyingkapkan identitas-identitas dari orang yang dicurigai. Para pemimpin ANC menyetujui temuan-temuan ini, dan sebagai sebuah organisasi, dapat menerima beban pertanggungjawaban mengenai pelanggaran-pelanggaran itu. Namun demikian, mereka menolak untuk mendisiplinkan para pelaku kejahatan atau memecatnya dari pos-pos senior dalam tubuh ANC. Malahan, mereka meminta agar pemerintah membentuk Komisi Kebenaran untuk menginvestigasi *semua* pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua golongan.

*The Promotion of National Unity and Reconciliation Act*, merupakan rancangan undang-undang yang diajukan ke Parlemen pada akhir tahun 1994 bagi dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Tindakan-tindakan politik yang dapat diberi amnesti adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi politik atau anggota dinas keamanan di dalam bidang kewajiban-kewajiban dan kewenangannya. Di dalamnya tidak termasuk tindakan yang dilakukan demi keuntungan pribadi, kedengkian, atau di mana tidak ada hubungan yang masuk akal antara tindakan dan tujuan. Penilaian mengenai karakter “politik” akan tergantung pada motif, konteks, kegawatan, dan apakah tindakan itu diperintahkan atau disetujui dari atas atau tidak.

- Para korban adalah mereka yang karena akibat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia telah mengalami luka-luka, penderitaan, kerugian keuangan, atau perusakan hak asasi manusia. Hal ini mencakup juga para keluarga mereka dan orang-orang yang telah menjadi korban intervensi.
- Komisi akan berurusan dengan masalah pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia: pembunuhan, percobaan pembunuhan, penculikan, perlakuan yang sangat menyakitkan atau penyiksaan, terhitung sejak tanggal 1 Maret 1960 sampai tanggal 5 Desember 1993, yang dilakukan oleh agen negara, organisasi politik, atau orang tertentu dengan motif politik. Akan ada antara 11 dan 15 anggota dalam komisi, yang diangkat oleh presiden atas rekomendasi komite bersama dari parlemen. Mereka tidak akan memiliki profil politik dan akan menjadi wakil representatif yang luas dari keseluruhan penduduk. Komisi akan memegang jabatan untuk 12 bulan atau periode yang lebih panjang, jika pemerintah dapat menentukan, dan tidak lebih dari enam bulan.
- Komisi dapat memanggil orang-orang, merampas dokumentasi-dokumentasi dan artikel-artikel, dan memaksa mereka mengambil sumpah. Orang-orang yang dipanggil akan diwajibkan untuk menjawab, sekalipun jawaban itu dapat memberatkan mereka.
- Akan ada tiga subkomite:
  - Committee on Human Rights Violations* akan berusaha menyusun identitas para korban dan membuat proposal-proposal untuk upaya pemulihannya. *Committee on Amnesty*, dengan (mantan) Hakim Mahkamah Agung sebagai ketua, dapat memutuskan pemberian amnesti atau ganti kerugian dengan syarat dilakukannya penyingkapan yang lengkap, dan ada sebuah tujuan politik dalam tindakan pemberian itu. Presiden akan menerbitkan dalam *Gazette*, nama-nama dari orang-orang yang diberikan amnesti. *Committee on Reparation and Rehabilitation* akan memungkinkan bagi para korban pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia untuk menceritakan bagaimana mereka telah dikorbankan.

Para korban pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dapat mengajukan kompensasi, yang akan dibayar namun tergantung pada adanya dana yang dibentuk oleh presiden.

Komisi Afrika Selatan, sebagaimana telah saya katakan, muncul sebagai komisi yang paling siap dalam segala hal. Tetapi pada pertengahan tahun 1995, jelas kelihatan bahwa proses pembentukan komisi itu telah ditunda, dan bahwa dalam banyak hal, rencana itu gagal memiliki sifat yang dikehendaki sebagaimana yang dicontohkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Chili.

Dalam mensahkan rancangan undang-undang ini, salah satu masalah yang paling sulit dan berbahaya adalah bagaimana menghadapi parlemen. Semakin lama hal itu terjadi, semakin keras tuntutan dari berbagai golongan untuk mendapatkan perwakilan dalam komisi (atau untuk benar-benar mengakhiri terbentuknya komisi itu). Memang, hukum itu sendiri tidak sepenuhnya jelas. Jika amnesti hanya dapat diberikan bagi tindakan-tindakan dengan tujuan politik, dan yang tidak merupakan sifat yang eksekutif, tidakkah itu berarti bahwa semua penyiksaan dan pembunuhan yang telah menimbulkan kengerian yang tak terkatakan juga dapat diampuni? MP di Johannesburg menjelaskan kepada saya di akhir tahun 1994 bahwa hal ini merupakan persoalan hukum yang secara intensional hanya mendapat sedikit perhatian dalam perdebatan parlemen sekarang.

Dan bagaimana tepatnya subkomite itu berfungsi? Brian Currin, direktur para Pengacara Hak Asasi Manusia, yang sedari awal telah terlibat dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut, tidak melihat adanya persoalan dalam definisi yang agak kabur mengenai tugas-tugas itu. "Ide itu adalah untuk menciptakan peluang sebanyak mungkin bagi pengungkapan masa lampau. Saya dapat membayangkan bahwa akan ada puluhan dari ribuan korban yang ingin menceritakan kisah mereka, katakanlah dalam waktu satu setengah atau dua tahun ini. Hal ini akan merupakan proses pembersihan yang penting." André du Toit, seorang profesor ilmu-ilmu sosial di Cape Town, mengatakan kepada saya alasan lain mengenai pengambilan jangka waktu

yang panjang oleh komisi kebenaran itu: “Komisi semestinya membuat penulisan sejarah yang bisa dipercaya.”

Tetapi bagaimana kenyataannya mengenai adanya bahaya sensasionalisme dan tuduhan-tuduhan palsu? Apakah memang seharusnya proses keseluruhan merupakan sebuah proses publik? Apakah jika orang-orang ingin mengakui tindakan-tindakan mereka, tetapi sesungguhnya mereka hanya takut membuat pernyataan-pernyataan, baik karena mereka merasa terancam, atau karena mereka tidak dapat mengatasinya secara emosional – apakah kemudian kesempatan mereka untuk mendapatkan amnesti terbuang? Tidakkah jangka waktu yang digunakan komisi itu dan merupakan perhatiannya – yakni selama 23 tahun – dan keanekaragaman masalah hak-hak asasi manusia yang diurusinya, adalah terlalu luas dan bermacam-macam?

Sampai bulan Juli 1995, ketika rancangan undang-undang ditandatangani oleh Presiden Mandela, tidak ada rancangan undang-undang lain yang menyedot begitu banyak perhatian selain ketika terjadi perdebatan di Parlemen Afrika Selatan.

Komisi Afrika Selatan, sebagaimana diuraikan dalam rancangan undang-undang, memiliki kombinasi karakteristik-karakteristik yang unik (mengenai hal ini saya akan membahasnya kembali dalam bab terakhir). Ini mencakup laporan-laporan resmi dengan sifat yang mencakup semuanya, akuntabilitas individu dan proses umum dari rekonsiliasi sosial. Ketika periode persiapan diperpanjang, menjadi semakin jelas bahwa tujuan komprehensif ini terlalu ambisius. Sejak pertama kali dibentuknya komisi utama semacam ini – CONADEP di Argentina pada tahun 1984 – tidak ada negara yang telah menemukan prosedur yang seimbang mengenai komisi-komisi kebenaran.

### **Contoh Komisi-Komisi Penyelidikan Resmi yang Dibentuk Tahun 1971-1995**

Negara	Komisi	Hasil
Bangladesh	Komisi mengenai kejahatan- kejahatan	30.000 orang didakwa setelah amnesti

1971	perang	umum diberikan pada tahun 1973
Uganda 1974	Komisi penyelidikan mengenai penghilangan-penghilangan	diterbitkan laporan 1.000 halaman, tetapi tidak termasuk detail kasus-kasus individual
Bolivia 1982-1984	Komisi penyelidikan mengenai penghilangan-penghilangan	Tidak ada laporan
Israel 1982-1983	Komisi penyelidikan mengenai pembunuhan-pembunuhan di Sabra dan Chatila	Laporan menyatakan “tidak ada pertanggungjawaban” langsung, tetapi diusahakan langkah-langkah penuntutan terhadap para pejabat tertentu.
Argentina 1983-1985	Komisi mengenai penghilangan orang-orang	Laporan <i>Nunca más</i> didokumentasikan, hampir 9.000 orang yang di hilangkan, dilakukan analisis terhadap aparatus represi
Guinea 1985	Komisi penyelidikan	Tidak ada laporan
Uruguay 1985	Komisi investigatif parlementer mengenai orang-orang yang “dihilangkan”	Laporan diterbitkan; tidak ada rincian mengenai kasus-kasus individual
Zimbabwe 1985	Komisi penyelidikan	Laporan disimpan secara konfidensial
Uganda 1986-1994	Komisi penyelidikan mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia	Laporan diselesaikan pada tahun 1994, dipublikasikan pada tahun 1995
Filipina 1986-1987	Komite presidensial mengenai hak hak asasi manusia	Laporan tidak diselesaikan
Chili 1990-1991	Komisi nasional mengenai kebenaran dan rekonsiliasi	Laporan ekstensif mendokumentasikan 2.100 kasus, dilakukan analisis terhadap jaring-jaring represi, banyak rekomendasi untuk pemulihan dan rehabilitasi
Chad 1991-1992	Komisi penyelidikan mengenai kejahatan-kejahatan oleh Habre c.s.	Laporan menyatakan 40.000 dibunuh rincian mengenai kasus-kasus; nama para pelaku kejahatan
Republik	Komisi parlementer mengenai hukum	Sekitar 200.000 individual meminta



Cehnya 1991	lustrasi	sertifikat 'catatan bersih'
Sri Lanka 1991	Komisi penyelidikan presidensial	Tidak ada laporan yang diterbitkan
Jerman 1992, 1995	Komisi-komisi penyelidikan parlementer untuk mempelajari efek-efek dari partai komunis ideologi dan aparatus keamanan	Sejarah analitik yang terdiri dari 150.000 halaman arsip-arsip terbuka bagi permintaan-permintaan dari individu
Polandia 1992	Penyelidikan oleh Menteri Dalam Negeri	Daftar rahasia mengenai 64 nama dibocorkan ke pers kemudian didiskreditkan
Bulgaria 1992	Komisi penyelidikan temporer mengenai partai Komunis	Tidak ada laporan
Rumania 1992	Komisi penyelidikan parlementer	Dua laporan diterbitkan
Albania 1992	Komisi mengenai berbagai pembunuhan oleh aparat keamanan di Shkoder pada tahun 1944-1991	Enam kuburan massal ditemukan dan 2.000 korban dilaporkan
Chili 1992	Korporasi nasional untuk pemulihan dan rehabilitasi	Investigasi diteruskan terhadap kasus-kasus pembunuhan dan penghilangan
El Salvador 1992	Komisi <i>ad hoc</i> mengenai militer	Laporan konfidensial merekomendasikan pemecatan terhadap 100 orang perwira militer karena pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia
El Salvador 1992-1993	Komisi PBB mengenai kebenaran	Laporan menyatakan 60.000 dibunuh 5% di antaranya dilakukan oleh oposisi; nama para pelaku kejahatan dicantumkan
Brazilia 1992	Dewan hak-hak asasi manusia	Dinyatakan bahwa 111 tahanan di Sao Paulo dengan sengaja dibunuh oleh polisi militer pada tahun 1992
Meksiko 1992	Komisi nasional hak-hak asasi manusia	Dilaporkan mengenai berbagai kasus penghilangan
Nikaragua 1992	Komisi tripartit	Dilaporkan mengenai kematian 10 anggota dari oposisi yang dulu

Togo 1992	Komisi nasional hak-hak asasi manusia	Dinas-dinas pemerintah dinyatakan bertanggung jawab bagi 1991 pembunuhan
Nigeria 1992 – 1993	Komisi hak-hak asasi manusia konferensi nasional	Hanya beberapa kasus korupsi yang diinvestigasi
Ethiopia 1992	Penuntut publik khusus	Belum ada laporan yang diterbitkan, tetapi banyak pelaku kejahatan yang didakwa pada awal tahun 1995
Sudan 1992-1994	Komisi penyelidikan	Laporan belum diterbitkan insiden-insiden di Juba
Thailand 1992	Penyelidikan Menteri Pertahanan terhadap berbagai tindak pembunuhan dan penghilangan selama demonstrasi pada bulan Mei 1992	Laporan tidak dipublikasikan
El Salvador 1993-1994	Komite investigasi bersama mengenai kelompok-kelompok bersenjata ilegal	Dinyatakan bahwa banyak pembunuhan memiliki latar belakang politik; para pelaku kejahatan disebutkan dalam lampiran konfidensial
Zimbabwe 1993	Komisi hak-hak asasi manusia untuk menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran di bawah pemerintahan yang sekarang dan sebelumnya	Sedang dipersiapkan
Ghana 1993-1994	Komisi mengenai hak-hak asasi manusia dan peradilan administratif	Investigasi yang gagal terhadap pembunuhan-pembunuhan pada awal tahun 1980-an
Burundi 1993	Komisi untuk menginvestigasi pembunuhan-pembunuhan dan percobaan kup pada tahun 1993	Komisi tampaknya tidak pernah bekerja
Honduras 1993	Komisioner nasional untuk perlindungan hak-hak asasi manusia	Laporan menyebut nama-nama mereka yang bertanggung jawab terhadap 184 penghilangan
Honduras 1994	Kantor penuntut umum	Bekerja melakukan penuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penghilangan-penghilangan

Malawi 1994	Komisi penyelidikan terhadap pembunuhan-pembunuhan politik pada awal tahun 1980-an	Sedang dipersiapkan
Sri Lanka 1994	Tiga komisi untuk menginvestigasi pembunuhan-pembunuhan dan penghilangan sejak tahun 1988	Sedang dipersiapkan
Afrika Selatan 1995	Komisi kebenaran dan rekonsiliasi	Akan menginvestigasi 30 tahun masa rezim Apartheid
Guatemala 1995	Komisi penjelasan	Akan menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan tindakan-tindakan kekerasan

## **PENUNTUTAN, AMNESTI, DAN PEMBERIAN KOMPENSASI**

### **Kewajiban Melakukan Tuntutan**

Kalau masyarakat ditanya apakah para pelaku kejahatan serius atau kejahatan berat seharusnya dihukum? Maka, 99 persen akan menjawab “Ya”. Itulah sebabnya mengapa banyak negara memiliki peraturan-peraturan hukum kriminal. Dan tentu saja yang lebih nyata, sekalipun tidak begitu banyak diketahui, adalah bahwa sebenarnya hukum internasional sudah mengandung beberapa peraturan khusus yang berkaitan dengan upaya penuntutan dan pemberian hukuman. Ada persetujuan yang meluas di kalangan para ahli dan organisasi-organisasi hak asasi manusia bahwa kewajiban untuk melakukan penuntutan secara alamiah di dasarkan pada putusan-putusan yang ada dalam hukum internasional, tetapi hal ini tampaknya masih jauh dari yang semestinya.

Apa yang dinyatakan dalam hukum internasional mengenai penuntutan dan hukuman? Prinsip-prinsip Nuremberg mengenai Pengadilan Militer tahun 1945-1946 terhadap para penjahat perang Nazi menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diadili dalam pengadilan internasional, karena pada dasarnya mereka telah melanggar kemanusiaan itu sendiri. Dalam Pasal 4 Konvensi Genosida (1948) dinyatakan bahwa kejahatan genosida atau pemusnahan suku bangsa merupakan kejahatan yang dapat dihukum. Konvensi Apartheid pada tahun 1973 menggolongkan apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengadakan penuntutan bagi mereka yang bersalah dalam kejahatan ini melalui pengadilan di salah satu dari negara-negara yang terlibat, atau di sebuah pengadilan kriminal internasional. Konvensi Anti Penyiksaan (1985) menyatakan bahwa negara-negara mengajukan

kasus mereka kepada otoritas-otoritas yang kompeten untuk tujuan dilakukannya penuntutan, tetapi bukan penuntutan aktual itu yang terjadi. Konvensi itu menyatakan bahwa para pelaku kejahatan yang sewaktu ditemukan berada di luar negara mereka, tunduk kepada yurisdiksi universal, dan karena itu seharusnya diekstradisi atau diadili di tempat mereka ditangkap.

Konvensi Jenewa keempat menyatakan dalam Pasal 146 bahwa “negara-negara peserta akan membawa orang-orang yang diduga telah melakukan pelanggaran-pelanggaran serius ke hadapan pengadilan di negara mereka sendiri, atau menyerahkan mereka kepada negara peserta yang, berdasarkan perjanjian atau konvensi, merupakan negara peserta tingkat tinggi (*High Contracting Party*). Pelanggaran-pelanggaran ini mengacu kepada pembunuhan terencana (*wilful killing*), penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi yang disengaja”.

### **Pelaksanaan Penuntutan**

Hal ini lebih merupakan pengecualian dibandingkan dengan kaidah untuk menuntut mereka yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran serius atau kekerasan terhadap hak asasi manusia. Lagi pula mereka yang tertuduh sering mendapatkan perlakuan menguntungkan berupa amnesti, atau pengampunan, ataupun pembebasan awal dari penjara. Meskipun demikian, ada tanda-tanda peningkatan sejumlah tuntutan bagi pelanggaran-pelanggaran yang berat.

Kita bisa menyaksikan kasus-kasus dilakukannya penuntutan terhadap para pengekskusi dan penyiksa di Amerika Latin dan Eropa Timur, dan yang lebih belakangan (meskipun pada tingkat yang lebih terbatas ) di Afrika.

Di Argentina, para keluarga dan teman korban telah mengajukan sekitar 2.000 pengaduan tindak pidana militer pada pertengahan tahun 1984. Pada bulan Desember 1985, tiga anggota junta telah dihukum penjara seumur hidup. Sedangkan tiga anggota lainnya dihukum antara empat setengah tahun hingga belasan tahun, sementara tiga

anggotanya lagi dibebaskan. Pada akhir tahun 1985, dua orang jenderal dihukum antara 14 dan 25 tahun; dua orang perwira junior menerima hukuman empat dan enam tahun penjara. Pada bulan Desember 1986, pemerintah mengusulkan *Punto Final*, sebuah statuta pembatasan mengenai pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan yang akan dilakukan 60 hari setelah pengumuman undang-undang itu. Hal ini telah disetujui oleh parlemen Argentina. Pada bulan Juni 1987, dengan dilakukannya pengesahan undang-undang yang mengatur masalah kepatuhan, investigasi-investigasi terhadap kasus “orang yang dihilangkan secara paksa” menjadi benar-benar macet. Undang-undang ini secara ketat membatasi dilakukannya pemeriksaan-pemeriksaan terhadap personil militer dan polisi yang dituduh melakukan kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia antara tahun 1976 dan 1983. Undang-undang kepatuhan ini menduga bahwa para perwira tingkat bawah dan tingkat menengah, maupun sebagian besar perwira tingkat yang lebih tinggi, telah bertindak di bawah perintah-perintah paksaan. Dan oleh karena itu, seharusnya tidak dituntut atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang telah mereka lakukan. Akibatnya, sebagian besar terdakwa dalam penahanan pra-pemeriksaan pengadilan selanjutnya dibebaskan.

Sementara itu, terjadi serangkaian pemberontakan militer. Salah satunya terjadi pada bulan Desember 1990 yang mengakibatkan 20 orang meninggal. Pada tahun 1989, 39 perwira militer senior mendapatkan pengampunan dari Presiden Menem sebelum mereka dijatuhi hukuman. Pada akhir tahun itu, hanya seorang perwira yang masih menunggu pemeriksaan pengadilan. Perwira ini dan para pemimpin junta yang dipenjara kemudian diberi pengampunan dan dibebaskan pada bulan Desember 1990.

Dalam sebuah artikel pada tahun 1990, pengacara Argentina Jaime Malamud-Goti menulis: “Saya yakin bahwa mengadili para perwira militer memang merupakan sebuah tindakan moral yang imperatif. Meskipun demikian harus dibuat pembedaan secara jelas di antara para perwira itu. Sehingga jumlah mereka yang menjalani pemeriksaan pengadilan tidak akan membahayakan pengawasan pemerintah terhadap angkatan bersenjata. Perlawanan yang kuat terhadap

pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan tidak hanya berasal dari militer, tetapi juga dari orang-orang sipil sayap kanan. Di pihak lain, pemerintahan mungkin gagal untuk memilih kriteria yang secara politik paling baik dalam mempertimbangkan anggapan mengenai asal pertanggungjawaban kriminal tersebut..... Jika ia (Presiden, DB ) telah memerintahkan pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan terhadap enam puluh, delapan puluh atau seratus perwira terkenal, dan bukan hanya terhadap dua belas perwira saja, maka secara umum rakyat akan beranggapan bahwa pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan itu dilakukan dengan lebih serius, dan bahwa pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan akan menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kredibilitas demokrasi.

Ternyata, tahun 1990 tidak dapat dilihat sebagai akhir berbagai pemeriksaan pengadilan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, pada bulan Juli 1994, tiga polisi dihukum selama sebelas tahun penjara, karena melakukan eksekusi ilegal pada bulan Mei 1987 terhadap tiga orang pemuda di propinsi Buenos Aires.

Di Buenos Aires, saya berbicara dengan Julio Cesar Strassera, *the Fiscal*, atau penuntut publik dalam pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan yang dilakukan terhadap junta. Ia di rekam pada film video selama seratus jam, yang disimpan di Argentina dan parlemen Norwegia. “Bagaimanapun, Anda tidak pernah bisa mengungkapkannya,” katanya menunjuk kepada langkah keamanan. Strassera mengatakan bahwa ia tidak pernah berada di bawah tekanan; presiden berkata kepadanya bahwa ia harus mengikuti kesadarannya sendiri. Ia tidak merasakannya sebagai tugas yang tidak mungkin. Karena para jenderal telah kehilangan wibawa di Argentina selama perang Malvinas/Falklands dan sangat tidak dihormati di luar negeri. Tidak, katanya, ia tidak harus mencari preseden-preseden yang rumit dalam hukum internasional, karena setiap perundang-undangan kriminal menjatuhkan hukuman-hukuman terhadap tindak pembunuhan, penculikan dan penyiksaan.

Saya mengajukan pertanyaan mengenai laporan yang dihasilkan oleh komisi investigasi resmi, *Nunca más*, dan menanyakan kepadanya apakah ia pikir bahwa penindasan semacam ini dapat diakhiri? Ia mengangkat bahunya. Anda tidak pernah bisa mengatakannya demikian. Sebuah sistem legal baru tidaklah menolong, selama

apa yang dilakukan para jenderal sepenuhnya melawan konstitusi yang kemudian berlaku. Saya menanyakan pendapatnya mengenai jenis pengadilan kriminal yang kini sedang dibentuk oleh PBB. Ia pesimistik. Jika sebuah pengadilan internasional diisi oleh seorang hakim Prancis, seorang jaksa agung Amerika dan seorang pengacara Argentina, maka mereka tidak akan memahami satu sama lain, karena mereka datang dari latar belakang dan tradisi hukum yang sama sekali berbeda.

Dalam sebuah tayangan televisi pada akhir bulan April 1995, Jenderal Martin Balza, panglima komando angkatan darat Argentina, secara formal mengakui bahwa antara tahun 1976 dan 1983, angkatan darat telah menggunakan “metode-metode ilegal, termasuk membunuh, agar dapat mengumpulkan keterangan rahasia”. Hal ini berhasil memecahkan cara diam-diam yang dilakukan secara resmi dalam dua puluh tahun, meskipun sejauh itu ia tidak “menyebutkan nama-nama”. Pengakuan jenderal Balza mengenai kejahatan-kejahatan angkatan darat keluar setelah bekas sersan Victor Ibanez mengakui secara terbuka bahwa antara tahun 1976 dan 1978 ia telah membantu menenggelamkan para tahanan politik dengan cara melemparkan mereka dari pesawat terbang yang terbang rendah di atas lautan Atlantik atau Rio de la Plata. Sebulan sebelumnya, mantan perwira angkatan laut Adolfo Skilinogo menjadi orang yang pertama kali mengakui keterlibatannya, dengan menyatakan bahwa 2.000 tahanan politik telah dijatuhkan ke dalam laut dari pesawat terbang militer – secara hidup-hidup, telanjang, dan mabuk berat.

Pemerintah demokratik baru di Chili dihadapkan dengan persoalan undang-undang yang tidak dapat diubah. Undang-undang itu mencakup penjatuhan hukuman mati terhadap tiga lusin kejahatan, dan *leyes de amarre* (secara harfiah, undang-undang yang mengikat) yang disahkan oleh rezim militer dalam bulan-bulan terakhir kekuasaan mereka. Undang-Undang ini menempatkan personil polisi keamanan, catatan-catatan keamanan dan sejumlah properti negara, termasuk tempat-tempat yang dulu digunakan untuk penyiksaan, di luar kontrol administrasi sipil yang baru masuk. Meski demikian, Presiden Aylwin membuatnya jelas bahwa secara aktual ia berharap akan adanya *justicia en lo posible*, keadilan yang



seadil-adilnya. Pembunuhan terhadap Orlando Letelier pada tahun 1976 dan sopirnya telah secara nyata dikesampingkan dari undang-undang amnesti pada tahun 1978; hal yang menarik, investigasi telah dihapuskan dari pengadilan-pengadilan militer dan dipercayakan kepada peradilan Mahkamah Agung. Untuk jangka waktu yang panjang, ini hanya merupakan kasus yang dimulai dari periode militer yang para tersangkanya telah dipersalahkan dan dijatuhi hukuman.

Pada tahun 1994, paling sedikit 18 orang, kebanyakan para pejabat publik, telah dihukum oleh pengadilan-pengadilan hukum sipil karena melakukan berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia di bawah kekuasaan militer. Ini terjadi dengan mengesampingkan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan militer masih menuntut hak untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan masih terus menangani kasus-kasus yang termasuk dalam lingkup undang-undang amnesti tahun 1978. Pada bulan Maret 1994, seorang hakim dalam persidangan kasus sipil menjatuhkan hukuman terhadap 18 orang karena melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap tiga anggota partai komunis pada tahun 1985. Di antara mereka ini, 16 orang merupakan personil polisi yang masih dinas aktif.

Pada tahun 1995, setelah beberapa tahun melakukan perjuangan legal, Manuel Contreras, salah seorang perwira militer yang paling dibenci dalam era Pinochet, telah dijatuhi hukuman karena melakukan berbagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Tetapi pada bulan Juli 1995, dalam “rumah sakit” pribadinya di sebelah selatan negeri itu, yang dijaga oleh orang-orangnya sendiri, mantan kepala dinas keamanan Chili itu dinyatakan “sakit parah” dan tidak mungkin untuk memulai menjalani hukuman penjara enam tahunnya.

Di Bolivia, Mahkamah Agung mencapai kesimpulan-kesimpulan mereka dalam “pemeriksaan pengadilan pertanggungjawaban” yang mereka lakukan dalam bulan April 1993. Mantan Presiden Luis Garcia Meza, menteri dalam negerinya, dan 54 orang lainnya dituduh melakukan berbagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, serta berbagai kejahatan lainnya. Pada awalnya, semua diadili secara *in absentia*; 11 orang ditahan sebelum hukumannya diumumkan. Dalam sebuah kasus

yang unik dalam sejarah Bolivia, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman terhadap 47 orang tertuduh. Enam orang dibebaskan (*acquitted*) karena berbagai tindak pidana keuangan yang ringan; tiga orang meninggal selama periode antara permulaan pemeriksaan pengadilan pada tahun 1986 dan kesimpulannya pada tahun 1993. Mantan Presiden Luis Garcia Meza dijatuhi hukuman *in absentia* sampai tiga puluh tahun hukuman penjara tanpa hak untuk banding, sementara 46 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara yang berbeda-beda mulai satu sampai tiga puluh tahun. Para tertuduh dihukum karena berbagai pelanggaran, termasuk pembunuhan dan penyiksaan terhadap mereka yang menentang pemerintah selama periode kekuasaan militer antara bulan Juli 1980 dan bulan Agustus 1981. Luis Garcia Meza ditahan di Sao Paulo, Brasil, pada bulan Maret 1994 dan diekstradisi pada awal tahun 1995.

Dari tahun 1993, bukti material yang ekstensif berhasil dikeluarkan dari arsip-arsip kepolisian di Paraguay. Bukti-bukti yang menegaskan adanya pelanggaran-pelanggaran yang meluas terhadap hak-hak asasi manusia, baik oleh militer maupun oleh kepolisian di bawah rezim Jenderal Stroessner (1954-1989). Bukti-bukti material ini telah disita oleh Menteri Kehakiman pada bulan Desember 1992. Bukti arsip material ini mengandung laporan-laporan yang tepat mengenai bagaimana para tahanan politik ditahan, disiksa, dan dibunuh. Juga menunjukkan bahwa polisi terus menerus menyaring kegiatan-kegiatan para pemimpin oposisi setelah Jenderal Stroessner diusir pada tahun 1989. Pada awal tahun 1993, lebih banyak material arsip yang ditemukan di departemen-departemen lain dari dinas keamanan, termasuk Biro Teknis untuk penindasan komunisme, yang menjadi bagian dari Menteri Dalam Negeri. Surat perintah penahanan dikeluarkan terhadap staf Biro Teknis. Informasi yang ditemukan digunakan untuk menyusun tuduhan-tuduhan resmi terhadap para anggota terkemuka dari bekas pemerintahan Stroessner. Pada bulan November 1994 tuduhan-tuduhan lebih suka ditujukan terhadap mantan kepala polisi bagian investigasi, mantan Menteri Dalam Negeri dan dua mantan fungsionaris departemen investigasi kepolisian dalam hubungan dengan terjadinya penyiksaan dan

kematian para tahanan pada tahun 1976. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang berkisar dari 5 sampai 25 tahun.

Pada bulan Januari 1992, pemeriksaan pengadilan pertama terhadap empat orang mantan penjaga perbatasan Jerman Timur berhasil disimpulkan. Mereka dituduh melakukan pembunuhan dengan menembak seseorang pada bulan Februari 1989 di Tembok Berlin, sementara orang itu mencoba untuk melarikan diri ke Berlin Barat. Salah seorang dari mantan penjaga-penjaga itu dijatuhi hukuman oleh pengadilan Distrik Berlin selama tiga setengah tahun penjara. Yang seorang lainnya diberikan hukuman yang ditunda selama dua tahun, sedangkan dua penjaga lainnya dibebaskan. Pada bulan November tahun itu, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk dilakukan bagi mantan kepala negara Jerman Timur, Erich Honecker. Pada bulan Juli, Honecker diekstradisi ke Jerman setelah mengalami tujuh setengah bulan dalam suaka politik di kedutaan Chili di Moskow. Ia dituduh berkaitan dengan terjadinya kematian 13 pengungsi di daerah perbatasan Jerman Timur. Pada tahun 1993, pemeriksaan pengadilan dihentikan karena keadaan kesehatan Honecker memburuk (ia meninggal dunia di Chili tahun berikutnya). Tiga orang mantan penjaga yang berkedudukan tinggi di Jerman Timur, termasuk Menteri Pertahanan dihukum penjara yang berkisar antara empat setengah tahun sampai tujuh setengah tahun, karena peran mereka dalam penembakan dan pembunuhan terhadap para pengungsi di daerah perbatasan antara dua Jerman itu. Pada bulan Maret 1995, seorang hakim tua berusia 77 tahun dijatuhi hukuman penjara lima tahun karena menghukum mati orang-orang pada tahun 1950-an, dengan tuduhan “melanggar hukum Jerman Timur”.

Di Rumania, menyusul setelah pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi terhadap Presiden Ceausescu dan isterinya pada akhir Desember 1989, pengadilan militer mengadili pasangan empat penguasa politik yang berkomplot: Wakil Presiden dari Dewan Negara, Menteri Dalam Negeri, Deputy Pertama Perdana Menteri, dan salah seorang dari Sekretaris Komite Sentral Partai Komunis Rumania. Empat pejabat ini diadili dan dihukum atas tuduhan melakukan kejahatan genosida (pemusnahan suku bangsa).

Dua puluh satu anggota Politbiro ditahan setelah berakhirnya revolusi dan dibawa ke pengadilan pada bulan Juli 1990. Pemeriksaan pengadilan itu memancing perhatian yang sangat besar dan harapan-harapan yang kuat akan adanya – “Nuremberg baru” – tetapi ketika waktu berlalu, perhatian itu menyusut dan tuduhan-tuduhan berkaitan dengan “keterlibatan pemusnahan suku bangsa” berkurang menjadi sekadar tuduhan melakukan kelalaian dan pelanggaran-pelanggaran kecil lainnya. Para pejabat dihukum pada bulan Maret 1991, tetapi hukuman-hukuman mereka ditetapkan sebaliknya menyusul adanya banding pada bulan Desember. Akhirnya, pada bulan April 1992, Mahkamah Agung membalikkan pembebasan itu dan menjatuhkan hukuman terhadap 21 orang anggota Politbiro tersebut, yang berkisar antara delapan sampai enam belas tahun penjara. Pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan lainnya melibatkan sepuluh jenderal Rumania yang dituduh telah melakukan penahanan secara ilegal terhadap 1.200 orang. Para jenderal ini menerima hukuman yang berkisar dari dua sampai enam tahun. Di antara mereka yang menjalani pemeriksaan pengadilan dan dijatuhi hukuman adalah kepala Dinas Keamanan Negara Rumania, yang juga diadili karena keterlibatan dalam pemusnahan suku bangsa. Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan pada tahun 1994, hampir 1.700 arsip telah diinvestigasi di Rumania, dalam upaya untuk mengumpulkan keterangan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya represi selama masa pemerintahan Ceausescu.

Dalam sebuah pemeriksaan pengadilan yang dibuat sebagai Kasus No. 1, mantan presiden di Bulgaria, Todor Zhivkov dihukum karena melakukan penggelapan, dan dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun pada tahun 1992. Ia diadili untuk kedua kalinya pada tahun 1994 karena perannya dalam kampanye asimilasi yang dipaksakan melawan minoritas Turki. Beberapa investigasi juga telah dilakukan mengenai peran Zhivkov dalam kamp-kamp penjara, serta dalam pembunuhan terhadap seorang pembangkang Bulgaria di London pada tahun 1978. Zhivkov telah menyatakan bahwa pemeriksaan pengadilan tersebut lebih didasarkan pada tuduhan-tuduhan moral dan politik, dan karena itu tidak berlaku. Perhatian publik terhadap pemeriksaan

pengadilan pertama sangat besar; meski demikian, pada tahun 1992, penduduk tampaknya sudah sangat acuh tak acuh terhadap nasib dari mantan pemimpin komunis itu.

Dari tahun 1992 sampai tahun 1994, berbagai upaya dilakukan di Albania untuk membawa mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dan kekejaman yang dilakukan oleh rezim komunis; tuntutan agar rezim tersebut harus mempertanggungjawabkan kejahatannya telah memunculkan pengajuan tuduhan terhadap lebih daripada tujuh puluh pejabat dan tokoh-tokoh terkemuka. Nexmijhe Hoxha, istri dari diktator terakhir, dihukum penjara 11 tahun karena penyelewengan dana-dana negara. Seorang pengawal perbatasan dihukum sepuluh tahun karena pembunuhan terhadap orang-orang yang mencoba meninggalkan negara itu.

Dalam sebuah pemeriksaan pengadilan massal dan terbuka pada bulan Mei 1994, 10 mantan pejabat puncak – termasuk presiden komunis terakhir, mantan perdana menteri, tiga mantan menteri dalam negeri, seorang mantan ketua Mahkamah Agung dan seorang mantan jaksa agung – didakwa dalam kaitannya dengan penyalahgunaan properti negara, pelaksanaan deportasi selama beberapa tahun terhadap ribuan orang Albania, pelaksanaan eksekusi tanpa pemeriksaan pengadilan terhadap 22 orang pada tahun 1951, pelarangan aktivitas agama pada tahun 1967 dan pengeluaran kebijakan dilakukannya pembunuhan-pembunuhan di perbatasan. Pada bulan Juli, mantan Presiden dan sembilan pejabat lainnya tersebut dihukum penjara dengan jangka waktu antara 3 sampai 9 tahun.

Mayat ribuan orang yang telah “dihilangkan” atau dibunuh selama pemerintahan Mengistu di Ethiopia, berhasil ditemukan. Menyusul kejatuhan pemerintahan itu pada tahun 1991, dilakukan penggalian untuk kemudian dilakukan pemakaman sebagaimana yang semestinya terhadap mayat-mayat tersebut. Di antara mayat-mayat itu terdapat mayat kaisar Haile Selassie, yang telah dibunuh di istananya pada tahun 1975. Mayat-mayat ribuan mahasiswa, buruh dan petani, yang dibunuh selama “teror merah” pada akhir tahun 1970-an, juga ditemukan dan digali. Pada bulan Oktober 1994, Penuntut Khusus senior mengajukan tuduhan mengenai adanya

kejahatan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap 45 dari 1.315 mantan pejabat pemerintahan presiden Mengistu Haile-Mariam, dinas keamanan dan partai yang berkuasa. Kejahatan-kejahatan tersebut dikenai hukuman mati. Komplotan selanjutnya terdiri dari 22 orang yang dituntut dengan tanpa kehadiran mereka di pengadilan (*in absentia*). Di antara mereka adalah mantan presiden, yang saat itu hidup dalam pengasingan di Zimbabwe. Pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan itu, dibuka di Mahkamah Agung Pusat pada tanggal 13 Desember, ditunda agar dapat memberi kesempatan para pengacara untuk mempersiapkan kasus-kasus mereka dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Mereka melanjutkan pengadilan itu pada bulan Maret 1995; pada saat itu, 106 orang telah dikenai tuntutan. Amnesti Internasional menyambut baik acara kerja pengadilan yang terbuka dan benar itu, dengan hak untuk pembelaan dan naik banding di dalamnya; Meskipun demikian, organisasi itu merasa prihatin bahwa hukuman mati tidak bisa dihindari untuk dijatuhkan.

Sejak tahun 1994, sejumlah besar orang yang dicurigai telah melakukan pembunuhan-pembunuhan atas dasar motivasi politik, telah dibawa ke pemeriksaan pengadilan di Afrika Selatan, kendatipun lampiran konstitusi sementara memuat ketentuan umum untuk pemberian amnesti yang luas. Pada bulan Maret tahun itu, seorang sersan angkatan darat dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun, karena membunuh seseorang yang telah ditahan menyusul adanya insiden penembakan. Pada bulan Mei, temuan-temuan seorang hakim dalam pemeriksaan terhadap aktivitas Matthew Goniwe dan tiga orang lainnya pada tahun 1985 memperkuat dugaan bahwa mereka dibunuh oleh dinas keamanan. Namun demikian, pembunuh yang sebenarnya tidak teridentifikasi secara meyakinkan dan konklusif. Pada bulan November tiga anggota yang diduga sebagai regu pemukul dinyatakan bersalah atas tuduhan-tuduhan pembunuhan dan upaya melakukan pembunuhan, yang melibatkan polisi KwaZulu. Sebuah laporan yang ditulis oleh komisi Goldstone, yang dikeluarkan pada bulan Maret 1994, memicu dilakukannya pemeriksaan pengadilan yang sangat luas terhadap Kolonel Eugene de Kock. Ia dituduh melakukan 121 kejahatan, termasuk delapan kejahatan menyangkut pembunuhan. Bukti menunjukkan adanya jaringan konspirasi

yang melibatkan dinas keamanan, yang memiliki hubungan dengan pejabat teras polisi serta organisasi rahasia yang bekerja di dalam angkatan darat dan dinas keamanan.

### **Ke Arah Pengadilan Kriminal Internasional**

Pembentukan “Pengadilan Militer Internasional Bagi Upaya Penuntutan Terhadap Kejahatan-Kejahatan Perang yang Besar untuk Kancan Eropa di Nuremberg” yang didasarkan pada Persetujuan London pada bulan Agustus 1945 dan “Pengadilan Militer Internasional untuk Kawasan Timur Jauh” yang didasarkan pada Persetujuan Tokyo pada tahun 1946, merupakan titik-titik balik bagi kepentingan komunitas dunia guna membentuk sebuah pengadilan kriminal internasional yang permanen. Pasal 5 Konvensi Genosida, yang diadopsi pada tahun 1948, menetapkan pembentukan yurisdiksi kriminal internasional yang berbeda dengan 316 instrumen internasional lain mengenai hukum kriminal yang telah diciptakan sejak tahun 1915. Pada tahun 1947, Komisi Hukum Kriminal Internasional PBB diminta untuk membuat sebuah Undang-Undang Kriminal Internasional, yang pada akhirnya mengadopsi sebuah draf undang-undang tahun 1954. Meskipun demikian, Majelis Umum PBB memunculkan masalah mengenai definisi agresi; konsensus mengenai definisi ini masih belum bisa dicapai sampai tahun 1974. Majelis Umum tidak mengadopsi tafsiran draf undang-undang tersebut hingga akhir tahun 1991. Profesor M. Cherif Bassiouni, ketua Asosiasi Hukum Pidana Internasional yang mempersiapkan dan merumuskan undang-undang itu selama 25 tahun, dalam kaitannya dengan hal ini mengatakan: “Banyak ahli lain dengan tanpa lelah telah mengerjakan ide semacam ini hampir seabad.”

Pada saat itu tafsiran pertama telah diadopsi, sebuah “Komisi Pertanggungjawaban Bagi Para Pencetus Perang dan Penegakan Hukuman” telah mengusulkan pembentukan pengadilan tinggi, guna menerapkan “prinsip-prinsip mengenai hukum bangsa-bangsa sebagai hukum yang dihasilkan dari penerapannya di

kalangan rakyat beradab, dari hukum-hukum kemanusiaan dan dari diktat-diktat kesadaran publik”.

Statuta Pengadilan Internasional diadopsi oleh Dewan Keamanan pada tanggal 25 Mei 1993. Pengadilan ini diotorisasikan untuk menghadapi “otoritas-otoritas sipil atau militer, yang dimiliki negara-negara musuh, tanpa memandang posisi mereka, perbedaan pangkat, termasuk kepala-kepala negara yang memerintahkan atau dengan sepengetahuan darinya dan dengan kekuasaan untuk campur tangan, telah tidak berusaha mencegah atau menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum dan adat istiadat perang”. Statuta mengajukan daftar kejahatan-kejahatan berikut untuk dituntut: pelanggaran-pelanggaran yang berat terhadap berbagai Konvensi Jenewa tahun 1949; pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan adat-istiadat perang; kejahatan genosida; dan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 7.3 Statuta ini dinyatakan bahwa sebuah tindakan yang telah dilakukan oleh seorang bawahan tidak “membebaskan atasan dari pertanggungjawaban kriminal jika ia mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya itu mempunyai rencana dan niat untuk melakukan sebuah tindak kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Statuta, atau bawahan tersebut telah melakukan tindakan tersebut dan atasan gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan layak untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan itu, atau (lalu) menghukum para pelaku kejahatan itu”.

### **Pengadilan *Ad Hoc* Internasional**

Sementara sebuah pengadilan kejahatan internasional masih dalam persiapan pembentukannya, dua pengadilan *ad hoc* telah bekerja berdasarkan Bab VII Piagam PBB, yang mengacu kepada “perdamaian dan keamanan umat manusia”.

Pada tanggal 19 Februari 1993, Dewan Keamanan dengan suara bulat memutuskan untuk membentuk pengadilan internasional untuk penuntutan terhadap



orang-orang yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hukum humanitarian yang dilakukan dalam wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991. Pengadilan ini berpangkalan di The Hague (Den Haag, Negeri Belanda). Pada tanggal 8 November 1994, tuduhan-tuduhan yang pertama kali dibuat terhadap para eksekusioner di kamp Serbia-Bosnia. Salah seorang di antaranya adalah Dusan Tadic, yang diekstradisi dari Jerman pada bulan April 1995. Tadic, pemilik kafe dan kepala sekolah karate di Kozarak, dikenal sebagai Tukang Jagal dari Omarska. Dalam kamp konsentrasi yang reputasi buruknya sangat terkenal itu, yang terletak di sebelah barat laut distrik Prijedor, ribuan orang Muslim dibunuh secara brutal. Tadic ditemukan di Jerman oleh pekerja TV dan dikenali oleh salah seorang dari korban-korbannya. “Tadic memerintahkan saya untuk menggigit biji-biji pelir dari Jasko H., Emir K., dan Emo A. Seluruh kamp harus memandang bagaimana saya mengebiri mereka dengan gigi saya. Bibir mereka dijahit, namun mereka masih bisa meraung. Kejadian ini berlangsung tiga jam. “Tadic menghancurkan tengkorak para tahanan lain dengan ujung senapan”.

Pada tanggal 13 Pebruari 1995, pengadilan mengajukan dakwaan terhadap Zelhko Meakic atas tuduhan melakukan pemusnahan terhadap suku bangsa atau kejahatan genosida; ini merupakan tuduhan pertama di antara ratusan tuduhan semacam itu dari bekas Yugoslavia yang harus dibawa di hadapan pengadilan. Meakic adalah salah seorang dari 22 orang Serbia-Bosnia yang dituduh melakukan pembunuhan, pemukulan, perkosaan dan penganiayaan terhadap para tahanan di kamp Omarska, di mana sekitar 3.000 kaum Muslim dan Kroasia disekap pada pertengahan tahun 1992.

Pada tanggal 8 November 1994, Dewan Keamanan membentuk pengadilan serupa di Rwanda untuk menghadapi kejahatan-kejahatan yang dilakukan sepanjang tahun 1994. Pengadilan ini akan dilokasikan di Arusha, Tanzania. Pada akhir tahun 1994, lebih dari 10.000 orang telah disekap di berbagai pusat penahanan di Rwanda, yang dituduh terlibat dalam pemusnahan suku bangsa pada awal tahun itu; sebagian besar tidak secara formal didakwa. Sejumlah orang rupanya disekap dalam

rumah-rumah pribadi dan kamp-kamp militer di mana para otoritas yudisial tidak dapat mengawasi. Menurut beberapa laporan, orang-orang yang berada dalam tahanan telah disiksa atau dianiaya secara keji, dan ada juga beberapa “penghilangan”. Penuntut umum untuk pengadilan internasional, Richard Goldstone, mengunjungi Rwanda pada bulan April 1995. Ia mengumumkan bahwa ia akan mengeluarkan dakwaan-dakwaan yang pertama mengenai kejahatan-kejahatan di Rwanda pada akhir tahun itu.

### **Amnesti dan Pemberian Pengampunan**

Sekalipun sedikit banyak standar-standar internasional harus mengatakan tentang penuntutan, namun ketentuan-ketentuan ini memiliki imbangannya dalam ketentuan-ketentuan mengenai amnesti. Praktek amnesti memiliki sejarah yang panjang, sebagaimana telah kita lihat dalam teks Aristoteles yang dikutip dalam bab 4. Ini juga ditanamkan dalam hukum internasional yang sekarang. Misalnya, protokol kedua dari konvensi-konvensi Jenewa menyatakan dalam Pasal 6.5 bahwa “pada akhir permusuhan-permusuhan, maka otoritas-otoritas akan berusaha memberikan amnesti yang seluas mungkin”.

Amnesti merupakan tindakan kemurahan hati atau untuk melupakan, menurut kamus. Lebih tepat, dalam terminologi yudisial, sering digunakan untuk membedakan antara amnesti dan pengampunan. Yang pertama dimaksudkan untuk menghapuskan semua memori legal mengenai pelanggaran, sedangkan pengampunan hanya melepaskan dari hukuman. Prakteknya berbeda: pengampunan-pengampunan digunakan untuk menutup penuntutan-penuntutan, dan amnesti-amnesti telah mencakup orang-orang yang sudah menjalani hukuman penjara.

Posisi dari Amnesti Internasional mengenai pengampunan-pengampunan dan amnesti-amnesti adalah bahwa “impunitas meniadakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dan menimbulkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut”. Dalam sebuah surat kepada Presiden Nelson Mandela pada bulan Juni 1994, Amnesti

Internasional menyatakan bahwa korban-korban dan keluarga-keluarga mereka memiliki hak, yang diakui di bawah perjanjian-perjanjian mengenai hak asasi manusia PBB, untuk mengadakan investigasi yang sepenuhnya dan ganti rugi. Organisasi merasa prihatin bahwa pengampunan-pengampunan seharusnya diberikan hanya setelah para pelaku kejahatan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dibawa ke pengadilan. Sekalipun diberikan pengampunan-pengampunan, namun orang-orang yang telah dinyatakan bersalah harus dilarang dalam memegang posisi masa depan yang menyangkut otoritas terhadap para tahanan, atau yang memiliki pertanggungjawaban mengenai keputusan dalam penggunaan kekuatan.

Sebuah pemerintahan yang terpilih mengambil kedudukan di Uruguay pada bulan Maret 1985, setelah 11 tahun di bawah kekuasaan militer. Pada bulan Desember 1986, sebuah undang-undang disahkan yang memberikan pembebasan dari hukuman bagi semua personil militer dan polisi yang bertanggung jawab mengenai berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan sebelum bulan Maret 1985, jika tindakan-tindakan semacam itu dilaksanakan karena motif-motif politik, atau dalam memenuhi perintah-perintah. Pada akhir tahun 1987, para penentang undang-undang amnesti telah mengumpulkan tandatangan-tandatangan secukupnya – 643.000 – untuk mengadakan referendum mengenai isu ini. Dalam referendum pada bulan April 1989, para penentang undang-undang amnesti hanya memperoleh 42 persen dari keseluruhan suara peserta referendum. Bukti baru menghubungkan para pejabat senior dengan “penghilangan-penghilangan” selama rezim militer, terbuka pada tahun 1990: akan tetapi, presiden mengumumkan secara resmi agar tidak lagi dibiarkan upaya hukum ataupun penggalangan opini publik yang bermaksud untuk mengadakan investigasi kembali terhadap masa lampau.

Pada tahun 1992, Mahkamah Antar-Amerika menyatakan bahwa kegagalan negara untuk melakukan investigasi-investigasi yang serius berarti melanggar Konvensi Amerika. Ini berarti adanya kutukan terhadap undang-undang amnesti yang menyebarluas di Argentina dan Uruguay. “Bilamana negara membiarkan

pelanggaran-pelanggaran tidak dihukum, ini mengabaikan kewajiban untuk menegakkan hak-hak dari subjeknya (pemilik hak).”

Pada tanggal 18 April 1978, pemerintah Chili mengeluarkan Dekrit Undang-Undang 2191 yang menyediakan “amnesti bagi orang-orang yang telah berperan sebagai pencetus, para kaki tangan atau para kaki tangan tambahan yang telah terlibat dalam kejahatan-kejahatan selama keadaan perang, sejauh mereka sedang tidak menjalani pemeriksaan pengadilan atau telah dihukum”. Periode keadaan perang adalah dari tanggal 11 September 1973 sampai tanggal 10 Maret 1978.

Namun demikian, ini bukanlah akhir dari cerita itu. Selama saya tinggal di Santiago dalam bulan September 1994, tidak sedikit dari empat halaman muncul dalam *El Mercurio* edisi Minggu, sebuah surat kabar nasional, yang menekuni pernyataan dari pengadilan. Seorang hakim dalam Majelis Ketiga dari Pengadilan. Banding telah menyatakan bahwa Undang-Undang Amnesti pada tahun 1978 tidak berlaku. Pada tahun 1973, junta Chili telah menyatakan keadaan perang. Ini berarti bahwa konvensi-konvensi Jenewa diterapkan; dan bahwa pelanggaran terhadap ini, misalnya melalui penyiksaan, penculikan dan eksekusi yang cepat, dapat dihukum. Menurut hukum internasional, statuta-statuta mengenai pembatasan tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan perang. Pertimbangan ini menjadi cukup jelas bahwa aparat dan perangkat hukum tidak bisa diharapkan untuk membawa mereka yang telah melanggar hak asasi manusia ke pemeriksaan pengadilan.

Pada bulan Oktober 1994, pengadilan banding menghukum dua orang mantan polisi dan seorang sipil karena telah melakukan penculikan dan “penghilangan” pada tahun 1974 terhadap dua orang Indian Mapuche di lingkungan Temuco. Pengadilan memutuskan bahwa Undang-Undang Amnesti tahun 1978 tidak bisa diterapkan karena kejahatan yang menyebabkan seseorang “hilang” tidak berakhir, tetapi berlanjut terus untuk tetap berlaku sampai tempat di mana korban dihilangkan telah ditetapkan.

Pada bulan Oktober 1994, Majelis Nasional Haiti sebenarnya dengan suara bulat telah memutuskan untuk memberikan amnesti politik bagi para anggota rezim Jenderal Cedras yang telah dipecat. Menurut sumber-sumber PBB, sekitar 3.000 orang

telah dibunuh selama tiga tahun kekuasaannya. Majelis menyatakan bahwa memang diinginkan “untuk mendamaikan diri sendiri suatu bangsa dengan cara melupakan secara legal seluruh fakta-fakta politik yang telah mengganggu kehidupan nasional” dan memuji “hukum kasus Amerika mengenai pengampunan-pengampunan yang membolehkan kembalinya demokrasi di Chili, El Salvador dan Honduras”. Akan tetapi, para anggota parlemen Haiti mengusulkan untuk membentuk sebuah komisi mengenai kebenaran dalam menghadapi fakta-fakta dan pertanggungjawaban dari kup pada tahun 1991.

Pada tanggal 16 Juni 1995, hukum amnesti yang berjangkauan luas diberlakukan di Peru. Orang-orang yang dicurigai telah dibebaskan, termasuk seorang jenderal dari angkatan darat yang telah dinyatakan bersalah dan dihukum penjara karena melakukan sejumlah pembunuhan, dan telah dituduh melakukan pembunuhan-pembunuhan lainnya. Pada hari yang sama, seorang hakim menyatakan bahwa investigasi yudisial seharusnya dilanjutkan terhadap pembantaian besar-besaran pada bulan November 1991. Dalam mengambil putusannya, hakim itu mengacu kepada konstitusi Peruvian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Amerika Mengenai Hak Asasi Manusia.

Kasus Velásquez Rodríguez di Honduras, dibawa ke hadapan Pengadilan Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia, telah menghasilkan putusan akhir yang paling termasyhur di dunia mengenai impunitas dan amnesti. Menurut dokumen-dokumen pengadilan, Rodríguez, seorang mahasiswa universitas “ditahan dengan kekerasan tanpa surat perintah mengenai penahanannya oleh para anggota dari DNI dan G-2 dari Angkatan Bersenjata Honduras” pada tanggal 12 September 1981, di Tegucigalpa. Di stasiun Dinas Keamanan Publik No. 2, ia “menjalani interogasi yang kasar dan penyiksaan yang kejam”. Lima hari kemudian ia dipindahkan ke Batalion Infantri Pertama, meskipun polisi dan dinas keamanan mengingkari bahwa ia ditahan. Ia selanjutnya dihilangkan.

Pada bulan Oktober 1987, Pengadilan memeriksa Florencio Caballero, yang kemudian tinggal di Canada, seorang mantan anggota “316”, unit intelijen dari

Angkatan Bersenjata Honduras. Caballero telah menjalani interogasi di Amerika Serikat, dan setelah itu ia dipromosikan dari kopral menjadi sersan.

Ia memberikan kesaksian: “Itu merupakan unit bawah tanah. Tujuannya adalah untuk memberantas lalu lintas senjata dan subversi, lebih daripada yang lain.... ketika kami menjadi anggota, kami mengetahuinya sebagai Skuadron Kematian.” Ada kelompok penculikan dalam Seksi Operasi 316. Mereka memiliki penjara tersembunyi di sebuah bangunan yang dimiliki oleh Pusat Industri Militer. “Kami dari kelompok penculikan dan interogasi tidur di sana”. Ada juga rumah di pedalaman desa yang dimiliki oleh seorang kolonel, yang lain dimiliki oleh seorang kapten, dan rumah-rumah perlindungan untuk mengadakan kontak-kontak bagi unit-unit pengawasan dan operasi. Dalam sel-sel yang dimiliki Dinas Keamanan Publik “kami menggunakan lantai kedua untuk orang yang dihilangkan”.

Penahanan-penahanan dilakukan oleh “para personil berbaju sipil, dengan topeng-topeng, penyamaran-penyamaran dengan menggunakan rambut-rambut palsu, jenggot, dan kumis. Kadang-kadang seseorang memakai baju seperti seorang perempuan.” Kelompok eksekusi berada “di bawah Komando Juan Ramón Peña Paz, dengan nama samaran ‘Mata’”. Sementara *Matar* sendiri adalah bahasa Spanyol yang artinya “membunuh”.

Dalam keputusannya yang disampaikan pada tanggal 29 Juli 1988, Mahkamah menyatakan bahwa negara Honduras telah melanggar kewajiban-kewajibannya untuk menghormati dan menjamin hak-hak dari Angel Manfredo Velásquez Rodríguez. Sebagai konsekuensinya, Mahkamah tersebut menetapkan bahwa amnesti secara penuh tidak pernah diizinkan. Kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia, menurut pandangan Mahkamah, “mengisyaratkan adanya kewajiban Negara untuk mencegah, mengadakan investigasi dan menghukum” pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, dan jika memungkinkan, “untuk berupaya memulihkan hak yang dilanggar dan memberikan jaminan kompensasi karena kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran”.

## **Prinsip dan Pelaksanaan Pemberian Kompensasi**

Dalam *“Disappearances” and political killings: A manual for action*, Amnesty Internasional menyatakan bahwa para korban dari pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia dan orang-orang yang ditanggung mereka seharusnya diuntungkan dengan adanya beberapa bentuk ganti-rugi. Ini termasuk rehabilitasi imaterial maupun kompensasi finansial. Menurut laporan PBB tahun 1993 yang disiapkan oleh Theo van Boven, seorang ahli hak asasi manusia Belanda, “hak yang dapat ditegakkan untuk kompensasi” terwujud dalam standar-standar internasional, seperti halnya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti-Penyiksaan, Konvensi Eropa Mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan–Kebebasan Dasar, dan Konvensi Amerika Mengenai Hak Asasi Manusia. Empat Konvensi Jenewa menyatakan bahwa tidak ada pihak “yang akan diizinkan untuk membebaskan dirinya sendiri dari suatu pertanggungjawaban” dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang berat terhadap konvensi-konvensi tersebut.

Parlemen Argentina telah mengesahkan sebuah undang-undang pada bulan Desember 1994 yang mengakui hak kompensasi untuk famili-famili terdekat dari mereka yang “dihilangkan” dalam “perang yang kotor” antara tahun 1976 dan 1983. Sebelumnya, dalam penyelesaian di hadapan Pengadilan Antar-Amerika, pemerintah Argentina telah berjanji untuk membayar keseluruhan US\$ 5,6 juta kepada 140 orang yang telah disekap dalam tahanan “yang tidak sah”. Kompensasi itu didasarkan gaji administratif tingkat tinggi per hari; kompensasi tersebut tidak akan dibayarkan dalam tunai, tetapi dalam bentuk surat obligasi pemerintah.

Pada tahun 1990 di Uruguay, beberapa keluarga dari para korban eksekusi ekstrajudisial yang dilaksanakan selama rezim militer (1973-1985) menerima kompensasi dari negara yang menyusul adanya pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan sipil, sementara yudisiari atau proses penuntutan pengadilan mencapai tahap

penyelesaian, khususnya untuk kasus enam orang Uruguay yang ditahan dan disiksa di Buenos Aires, yang kemudian dipenjarakan di Uruguay.

Mengenai Honduras, Pengadilan Antar-Amerika mencapai keputusan-keputusan dalam tiga kasus yang melibatkan “penghilangan-penghilangan” yang dikaitkan dengan dinas-dinas bersenjata dan keamanan di Honduras. Keputusan-keputusan ini meliputi kewajiban untuk membayar kompensasi, penetapan imbalan ganti kerugian, dan persoalan dalam menindaklanjuti dan memantau. Dalam dua dari kasus-kasus itu, Pengadilan memutuskan adanya kompensasi sebesar US\$ 350.000 seharusnya dibayarkan untuk setiap keluarga.

Pemerintah Aylwin di Chili mengusulkan berbagai langkah untuk kompensasi. Sembilan ratus mahasiswa yang berhubungan dengan orang-orang yang dibunuh atau “dihilangkan” di bawah kediktatoran, kini menerima beasiswa untuk pendidikan yang lebih tinggi. Dalam pendidikan menengah ada 22.000 siswa semacam itu. Pemerintah telah mengusulkan bahwa para janda diberikan pensiun setiap bulan sejumlah 160.000 pesos (US\$ 450), yang berada di atas pensiun rata-rata nasional 60.000 pesos. Anak-anak yatim menerima dukungan finansial sampai mereka berusia 25 tahun. Ada juga undang-undang yang menyatakan bahwa para eks-fungsionaris seharusnya diberikan kompensasi karena kehilangan pekerjaan di bawah kediktatoran. Bagaimanapun, menurut organisasi-organisasi hak asasi manusia, implementasi dari undang-undang ini, khususnya pada saat belakangan ini tidak bekerja secara semestinya. Dari 30.000 permohonan yang diajukan, hanya 6.000 yang telah diurus dan 2.000 dikabulkan. Para penuntut harus mengajukan bukti dalam bentuk dokumen-dokumen, yang sebagian besar dari mereka tidak pernah memiliki, atau telah lama hilang. Dalam beberapa kasus arsip-arsip dari organisasi Vicaria telah terbukti dapat menolong.

Pada bulan Maret 1994, 18 polisi dan para perwira keamanan dijatuhi hukuman penjara karena pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan di bawah rezim Pinochet. Tambahan pula, mereka semua yang dihukum diperintahkan untuk membayar



kompensasi kepada keluarga para korban. Uang itu harus dibayarkan sebagai dana-dana publik.

Di Filipina, sebuah undang-undang disahkan oleh pemerintahan Ramos pada tahun 1993 mengenai kompensasi bagi keluarga dari para tahanan “yang dihilangkan”. Rekomendasi-rekomendasi dibuat melalui sebuah komisi nasional hak asasi manusia. Jika orang-orang dipenuhi dengan kompensasi dan setuju untuk tidak mengusahakan tindakan-tindakan yang lebih lanjut, mereka dapat meminta dana yang berjumlah 1,4 juta pesos (US\$ 35.000). Beberapa keluarga kini menerima pembayaran masing-masing sejumlah rata-rata US\$ 500.

Persatuan Jerman telah juga mengusahakan untuk memberikan paling tidak kompensasi finansial yang bagi orang-orang yang ditahan, dipukul dan disiksa oleh rezim komunis dari Republik Demokratik Jerman. Kira-kira 189.000 korban dari sistem hukum Jerman Timur berharap untuk menerima suatu bentuk kompensasi melalui program ini. Seluruh proses diharapkan berlangsung antara 10 dan 30 tahun. Di Leipzig saja, 23.000 tuntutan restitusi telah terdaftar.

Di Hungaria, undang-undang telah diberlakukan untuk menghapuskan hukuman-hukuman bagi para tahanan politik, dan memberikan kompensasi bagi para korban dari penahanan yang tidak sah, dan keluarga-keluarga dari mereka yang dieksekusi. Pada tahun 1992, hampir satu juta orang (sekitar 10 persen dari populasi) telah mengajukan kompensasi semacam itu.

### **Gugatan-Gugatan Sipil**

Hukum sipil dari kebanyakan negara membolehkan para pejabat publik digugat karena kerugian-kerugian yang terjadi akibat adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, meskipun kadang-kadang kemungkinan ini telah dibatasi di bawah ukuran-ukuran imunitas atau indennitas, sebagaimana disebutkan di atas dalam pembahasan mengenai impunitas. Sering gugatan-gugatan sipil hanya merupakan

pertolongan yang ditinggalkan, ketika penuntutan kriminal telah dihalangi. Misalnya di Uruguay pada tahun 1990, beberapa keluarga dari orang-orang yang dibunuh atau “dihilangkan” memperoleh kompensasi dari negara yang menyusul putusan-putusan pengadilan sipil.

Yang cukup menarik, telah ada gugatan-gugatan sipil – terutama di Amerika Serikat untuk melawan para pelaku kejahatan yang melakukan eksekusi-eksekusi secara ekstrajudisial dan penyiksaan di negara-negara asing, dalam kasus Filártiga melawan Peña-Irala pada tahun 1979, keluarga-keluarga dari korban penyiksaan Paraguay menggugat penyiksa, yang mereka temukan telah menjadi residen atau penduduk di Amerika Serikat. Pengadilan Banding Amerika Serikat menyimpulkan bahwa penyiksaan “resmi” seperti itu (penyiksaan yang dilakukan oleh aparat negara) melanggar hukum internasional, dan mendeskripsikan bahwa ada hukum adat internasional (*international customary law*) yang bersifat universal; hukum yang telah menjadi bagian dari hukum adat federal dalam tindakan-tindakan sipil yang dilakukan oleh orang-orang asing. Tanpa menghiraukan nasionalitas dari pihak-pihak yang bersangkutan, pengadilan mengakui sebuah tuntutan yang didasarkan pada apa yang dikenal sebagai “hukum bangsa-bangsa” (*law of nations*), yang melarang tindakan-tindakan penyiksaan aparat.

Gugatan-gugatan sipil lainnya yang dibawa di hadapan pengadilan-pengadilan Amerika Serikat mencakup kasus-kasus dalam menghadapi mantan komandan Korps Angkatan Darat Pertama di Argentina, karena pemenjaraan yang ilegal, penculikan, penyiksaan dan “penghilangan”, dan dalam menghadapi Presiden Marcos yang telah dipecat dari Filipina, karena kekejaman-kekejaman yang dilakukan di bawah rezimnya. Seorang mantan Menteri Pertahanan Guatemala telah dituduh karena merencanakan, memerintahkan, mengimplementasikan dan mengarahkan program pembantaian secara besar-besaran, pembunuhan-pembunuhan, penyiksaan yang meluas dan penahanan yang sewenang-wenang, yang dikenal di seluruh Amerika Selatan sebagai “Solusi Guatemala”. Seorang mantan Komandan Keamanan Ethiopia telah dituduh karena mengawasi dan berpartisipasi dalam penyiksaan dan pemenjaraan

yang ilegal pada akhir tahun 1970-an. Dalam kasus melawan Marcos, dana-dana yang sangat besar dari modal pribadinya disediakan untuk orang-orang Filipina yang dapat mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai korban-korban dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, selama periode Marcos. Dalam mengikuti gugatan hukum yang berhasil melawan penyiksa Ethiopia pada tahun 1993, maka Penuntut Khusus Ethiopia meminta ekstradisinya dari Amerika Serikat.

Gugatan dalam melawan jenderal Guatemala diajukan di bawah *Alien Tort Claims Act*. Dalam sebuah keputusan yang diambil pada tahun 1984, pengadilan Amerika menemukan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab mengenai penyiksaan di luar Amerika Serikat dapat digugat di pengadilan-pengadilan Amerika Serikat, karena kerugian-kerugian yang diakibatkan dari luka-luka pribadi. Pada bulan April 1995, jenderal Guatemala diperintahkan oleh pengadilan federal di Amerika Serikat untuk membayar US\$ 47,5 juta kepada para penggugat. Ia didapatkan bertanggung jawab mengenai kampanye pelanggaran-pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia di Guatemala.

## KORBAN, SURVIVOR, DAN KELUARGANYA

### Mencatat Dengan Hati

Menurut Anna-Karin Gauding, kata *record* (Inggris) dan *recordar* (Spanyol = “mengingat”) berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti “mencatat dengan hati”. Ini merupakan tugas yang telah ia tetapkan sendiri dengan aktivitas yang berpusat di pinggiran kota Santiago yang tenang. Bertindak atas keyakinannya bahwa para korban harus diberikan peluang memulihkan trauma dari pengalaman mereka, Gauding mendirikan *Red Latinoamericano de Acogida e Intercambio* (Jaringan Pertolongan dan Pertukaran) pada tahun 1992.

Gauding sebelumnya bekerja untuk berbagai organisasi yang dijalankan gereja. Ia berusaha untuk bersikap realistis berkaitan dengan signifikansi pekerjaan itu. “Gereja memang juru selamat kehidupan, meskipun kita tidak pernah yakin berapa banyak yang bisa diselamatkannya. Tetapi dengan semua kematian yang telah terjadi, akan menjadi mengerikan untuk menyatakan bahwa hak asasi manusia telah meraih kemenangan besar di Amerika Latin. Tak satu pun upaya perbaikan sosial telah dapat memecahkan masalah hingga ke akarnya”.

Hingga kini ia telah mempekerjakan empat puluh orang dari berbagai negara Amerika Latin. Programnya terdiri dari berbagai lokakarya. Berkaitan dengan “hak asasi manusia dan kehidupan sehari-hari” penekanannya terletak pada ekspresi, kreativitas dan kapasitas yang sederhana untuk menikmati program tersebut. Para pemimpinnya terdiri dari para aktor, ahli terapi tubuh, psikolog, antropolog, artis dan

pengacara. Lokakarya lainnya secara spesifik diorganisasikan untuk keluarga dari orang-orang yang “dihilangkan” atau dibunuh. Menurut Gauding: “Anggota keluarga tersebut merasa bagai ditinggalkan sendirian dengan hilangnya keluarga mereka dan mengalami kerusakan emosional yang sangat besar. Mereka merasa diabaikan ketika mayoritas penduduk tidak lagi menunjukkan perhatian pada masa lampau.”

Saya mendapatkan sesuatu yang berharga dari lokakarya itu. Dalam kelompok “*Telling stories*” (Bertutur-kisah), para partisipan diajarkan bagaimana membangun sebuah kisah, dengan menggunakan teknik dramatik dan improvisasi. Seorang perempuan menceritakan kisah cintanya; ia berjuang untuk menuangkan kegelisahannya dalam kata-kata. Sementara partisipan lain memerankan dialog antara orang yang mati dan yang hidup. Lokakarya “*Masks*” (Topeng-Topeng) menggunakan wajah individu sebagai titik tolak. Pembimbingnya menunjukkan cara berekspresi kepada para partisipan. Mereka berlatih untuk tampil di depan publik di jalanan, atau berpidato pada saat demonstrasi. Lokakarya “*Bodywork*” (Gerak Tubuh) telah direkam di video untuk menyajikan metodenya. Para partisipan pertama-pertama memerankan ketakutan dengan gerakan kejang. Kemudian gerakan-gerakan mereka lebih luluh.

Gauding mengatakan bahwa masalah-masalah politik, sosial dan personal tidak dapat dipisah-pisahkan. “Kaum perempuan secara khusus dibiasakan untuk tidak menghiraukan diri mereka sendiri, tidak meminta sesuatu untuk dirinya. Para partisipan kami datang dalam waktu tiga bulan hingga satu tahun, agar dapat pulih, mengembangkan rasa aman serta mempelajari hal-hal yang baru.”

Yessie Macchi bergabung dengan gerakan gerilya Tupamaros di Uruguay pada tahun 1967. Ia pertama kali dipenjara pada tahun 1969, selanjutnya melarikan diri bersama 36 perempuan lain melalui saluran pembuangan air. Pada bulan Juni 1972, ia ditangkap kembali. Selama pertempuran bersenjata, dalam tahanan ia tertembak di pahanya; teman laki-lakinya mati akibat terluka. Yessie dijatuhi hukuman penjara selama 47 tahun. Ia meringkuk dalam penjara sampai tanggal 12 Maret 1985, ketika pemerintahan sipil berkuasa kembali di Uruguay.

Pada bulan Februari 1994, sembilan tahun setelah pembebasannya, Yessie dan sejumlah perempuan lain mendirikan pusat informasi untuk dan tentang kaum perempuan, yang dipenjara karena keyakinan politik mereka. Pusat ini dinamakan *Mujer y Memoria* (Perempuan dan Memori).

“Menjadi seorang perempuan yang keluar dari penjara dengan umur empat puluh tahun, memang sangat berbeda dengan ketika seorang laki-laki berumur empat puluh dibebaskan. Kami semua harus mengatasi dunia yang telah berubah banyak. Kami harus terbiasa untuk menghadapi kenyataan bahwa kami dapat berjalan lebih jauh beberapa meter; kesehatan kami memburuk. Sering Anda perlu menyesuaikan mata untuk bisa melihat lebih jauh. Semua hal telah terlupakan di penjara. Laki-laki memiliki istri atau keluarga yang menanti mereka. Tetapi seorang perempuan harus kembali merawat keluarganya ketika ia dibebaskan.”

“Ketika kami mencari di dalam arsip organisasi hak asasi manusia, tak satu pun yang mengungkap kisah perempuan. Hanya kisah laki-laki yang didokumentasikan. Dari sudut itu kami memutuskan bahwa saatnya kami mengumpulkan informasi tentang diri kami. Kami mencoba untuk menelusuri kaum perempuan yang pernah dipenjara. Kami ingin merekonstruksi kisah kaum perempuan yang telah mati. Semua yang kami kumpulkan adalah informasi lisan; sering kali sulit bagi kaum perempuan untuk menceritakan pengalaman mereka. Ada juga perempuan yang menelpon kami ketika mereka ingat tentang *compañera* yang ada di penjara; mereka ingin mengetahui apakah kami memiliki informasi lebih banyak. Muncul semakin banyak pertanyaan-pertanyaan.”

Ruth Bhengu adalah ibu dari enam anak yang bekerja di lingkungan kulit hitam di Pietermaritzburg, Afrika Selatan. Ia menjalankan pusat kegiatan bagi kaum muda yang mengalami trauma. “Hal pertama yang mendorong saya untuk melakukan ini adalah ketika saya mengetahui bahwa anak saya yang berumur tiga tahun mulai memainkan permainan yang tidak normal. Misalnya, ia (perempuan) menembak bonekanya dan mengadakan penguburan yang rumit. Yang kedua adalah ketika seorang anak laki-laki tiba-tiba menjerit-jerit pada sebuah pemakaman yang saya

hadiri. Saya bertanya kepada perempuan di samping saya mengapa anak itu menjerit. Ia berkata: ‘Jelas sekali Anda tidak pernah berada di kamp untuk orang-orang yang terlantar. Tetapi saya pernah bekerja di salah satu dari kamp tersebut! Saya membagikan makanan dan selimut di sana. Saya tidak pernah menyadari betapa besar trauma itu’.”

“Anak-anak memiliki pengalaman yang mengerikan. Mereka mungkin telah dilibatkan dalam operasi kalung. Hingga mereka tidak dapat tidur lagi, kecuali di sekolah karena mereka merasa aman di sana. Meskipun beberapa anak membawa senjata ke sekolah. Bagaimana para guru harus menghadapi ini? Kami banyak mencurahkan perhatian kami kepada para guru dan orang tua.”

“Untuk mendukung citra diri mereka, kami mengajarkan kaum muda bagaimana melatih ketrampilan, misalnya bagaimana memasang pipa air ledeng atau sesuatu yang berhubungan dengan bangunan. Kami juga menyelenggarakan kelas-kelas kreatif untuk melatih penulisan dan teater. Kami mengirimkan mereka ke pedesaan untuk beberapa saat, di mana mereka dapat belajar pertanian. Pengetahuan itu mungkin tidak banyak berguna bagi mereka ketika mereka kembali ke kota, tetapi dapat membekali mereka untuk menjadi pengawas dalam pusat rehabilitasi. Kami harus memastikan bahwa anak-anak yang memiliki trauma serius dapat berkonsultasi dengan dokter secara pribadi. Ini harus dilakukan dengan yakin, jika tidak, hal itu bisa menyebabkan adanya peluang terjadinya distigmatisasi.”

“Dari 15.000 pemuda di berbagai kota, riset menunjukkan bahwa 75% telah mengalami kekerasan secara langsung. Riset saya sendiri telah mengungkapkan bahwa 55% dari orang-orang itu telah kehilangan seorang anggota keluarga karena dibunuh. Masih ada enam atau tujuh orang ‘prajurit’ muda dalam setiap kelas. Mereka adalah orang-orang yang bersenjata. Anda tidak dapat menyebutnya tersebut sebagai stres pasca-traumatik, karena trauma itu masih ada.”

Ruth Bhengu mengatakan bahwa terapi kelompok memang merupakan pilihan yang lebih banyak disukai di Afrika Selatan, alasan yang mendasar adalah karena kurangnya terapis profesional. Mereka harus saling menyembuhkan. “Saya tidak

memiliki pelatihan teoretis. Teori-teori dipikirkan oleh mereka yang duduk dan berpikir. Yang saya lakukan adalah meniru apa yang terjadi pada demonstrasi. Warga yang terlibat dalam sebuah demonstrasi tersebut melakukan *toi-toi* (menari-nari), sembari melemparkan batu-batu. Kami meniru hal ini dalam lokakarya drama, melemparkan batu-batu ke dinding, membiarkan tubuh kami diguncang dengan ketakutan dan kemarahan.”

### **Trauma dan Upaya Pemulihan**

Selama kurun waktu kurang lebih 15 tahun, gangguan stres pasca-traumatik telah menjadi istilah yang dipakai secara umum untuk menandai trauma psikologis yang disebabkan oleh penderitaan berkepanjangan dan intimidasi. Para prajurit, orang yang berhasil selamat dari kamp konsentrasi, yang terlibat dalam peperangan dan korban *incest* menunjukkan gejala yang sama.

Dalam *Trauma and Recovery* (1992), Judith Lewis Herman menulis: “Gangguan stres pasca-traumatik kronis merupakan akibat dari sejarah ketertindasan dari sebuah kontrol totaliterian dalam periode yang lama (bulanan hingga tahunan)”. Kondisi ini menimbulkan perubahan dalam pola emosional (kemarahan, depresi), kesadaran (hilangnya *sense* tentang realitas, cenderung meniadakan realitas tersebut), serta perubahan persepsi diri (malu, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri dan putus asa). Para korban dengan mudah mengembangkan persepsi yang tidak realistis terhadap pelaku kejahatan; mereka mungkin melakukan balas dendam, atau sebaliknya, mendukung kekuasaan mutlak pelaku kejahatan atau bahkan mengidealkannya. Namun, tidak setiap orang menderita gangguan stres pasca-traumatik. Beberapa orang bahkan menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam mengatasi situasi yang mengancam kehidupannya, suatu kesadaran yang kuat mengenai hubungan antarmanusia, dan penguasaan sendiri yang memungkinkannya untuk tetap tenang dan mempertahankan penilaian dan kesadaran moral mereka.



Pemulihan, menurut Herman, terbagi dalam tiga tingkatan: membentuk lingkungan yang aman, pengungkapan kenangan dan duka cita, dan berhasil kembali pada kehidupan yang selayaknya. Tingkat yang terakhir mencakup hal-hal seperti “belajar untuk berjuang”, “rekonsiliasi dengan diri sendiri”, “menemukan misi survivor” dan “mencapai komunalitas”.

Herman juga berkomentar bahwa kita tidak seharusnya secara otomatis menganggap bahwa para korban dapat menerima simpati. “Adalah sangat menggoda untuk berada pada posisi pelaku kejahatan. Yang diinginkan pelaku kejahatan adalah agar pengamat tidak melakukan apa pun. Ia meminta keinginan universal untuk melihat, mendengar, dan tidak menfitnah. Sebaliknya, korban meminta pengamat untuk menanggung bersama beban penderitaannya. Korban menuntut adanya tindakan.”

Ada tujuh puluh pusat kegiatan untuk korban penyiksaan yang kini didirikan di seluruh dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah *Centre for Rehabilitation of Torture Victims* di Kopenhagen. Menurut perkiraan, satu dari tiga pengungsi di Denmark merupakan korban penyiksaan. Sejumlah 100 pengungsi menderita gangguan stres pasca-traumatik, baik anak-anak maupun orang dewasa. Pusat kegiatan itu didirikan pada permulaan tahun tujuh puluhan oleh para anggota Amnesty Internasional. Pendirian pusat kegiatan bagi orang Denmark itu terutama difokuskan dan diperuntukkan bagi korban-korban yang mengalami siksaan secara langsung, yang biasanya adalah orang dewasa. Pada bulan Juni 1994 organisasi itu menjadi organisasi pertama yang meluncurkan program khusus anak bagi kaum muda yang mengalami penyiksaan baik langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan untuk memperlakukan para korban penyiksaan di pusat-pusat khusus berlangsung bukan tanpa tantangan. Di antara para korban, ada yang berpendapat bahwa “trauma-trauma” tidak harus dipisahkan dari konteks politik, baik di bawah rezim yang represif maupun rezim yang sekarang. Penyembuhan seharusnya tidak dipandang dalam hal hubungan personal, tetapi dalam kerangka idealitas politik di mana banyak korban yang memperjuangkannya. Saya pernah berjumpa dengan

orang yang baru kembali dari pengasingan, di Chili, dan ia mengatakan: “Penyembuhan saya yang paling penting bukan berasal dari perawatan sebagai korban di sebuah klinik, tetapi dari keinginan untuk terus hidup sebagai warga negara yang bebas di negara saya sendiri.”

### **Komite Keluarga Korban**

Organisasi dari keluarga orang “yang dihilangkan” atau para korban pembunuhan politik sering kali muncul secara spontan. Para ibu, istri, saudara perempuan dan keluarga lainnya mengunjungi pos-pos polisi, barak-barak tentara dan kantor-kantor pemerintah untuk menanyakan tentang anggota keluarganya yang hilang; di sana mereka bertemu dengan keluarga lain yang berada dengan keadaan serupa, kemudian saling bertukar pengalaman, mendiskusikan masalah mereka dan pada akhirnya memutuskan untuk bertindak bersama.

Memang tidak mudah mengumpulkan data tentang komite tersebut. Beberapa keluarga mengupayakan publisitas secara aktif dan memiliki organisasi formal, sementara yang lainnya menghindari sorotan dan tidak memiliki organisasi semacam itu demi alasan keamanan. Selama beberapa tahun, kurang lebih 15 negara telah melaporkan pembentukan komite semacam itu – Argentina, Chili, Peru, Bolivia, Colombia, Suriname, Guatemala, El Salvador, Honduras, Sri Lanka, Filipina, Chad, Maroko, Eritrea, Ethiopia dan Kroasia. Komite baru masih tetap bermunculan. Pada bulan Mei 1995, misalnya, ibu dari para korban eksekusi ekstrajudisial dan “penghilangan” membentuk sebuah kelompok di Turki, yang dinamakan *Mothers’ Appeal*. Pada bulan Juni 1995, sebuah kelompok mulai didirikan di Cina oleh para ibu yang kehilangan anak-anaknya dalam pembantaian besar-besaran di Lapangan Tian’anmen, Peking, enam tahun sebelumnya.

Komite keluarga korban di Amerika Latin merupakan organisasi yang terbaik; secara bersama-sama mereka membentuk Federasi Keluarga Korban, FEDEFAM,

yang berpusat di Venezuela. Ada juga organisasi yang menaungi organisasi regional lainnya, seperti halnya *Central American Association of Relatives of Disappeared Prisoners* (Asosiasi Amerika Tengah untuk Keluarga Tahanan yang Dihilangkan), yang berpangkalan di Costa Rica.

Pada tanggal 30 April 1977, *Mothers of the Plaza de Mayo* di Argentina, memberanikan diri untuk pertama kalinya mengadakan pertemuan di lapangan Buenos Aires. Pada mulanya, mereka merupakan kelompok yang terdiri dari 14 orang perempuan yang tidak tahu harus berbuat apa. Salah seorang pendirinya, Renee Epelbaum, menjelaskan: "Ketika pertama kali kami bertemu di Plaza, kami adalah kelompok yang tak berdaya. Orang-orang menertawakan kami. Ketika turun hujan kami tampak seperti kepala-kepala yang ditutupi saputangan putih yang sangat besar."

Seorang ibu dari Argentina menguraikan bagaimana ia menerima perlakuan yang lebih baik dibanding suaminya ketika ia datang ke pos-pos militer untuk mencari anaknya: "Mereka biasanya menyambut dan berkata: 'Mari, Anda *kan* ibunya, silakan masuk. Saya tidak tahu kenapa, barangkali mereka berpikir bahwa perempuan akan lebih mudah dikelabui.... Saat itulah kami mulai menunjukkan kekuatan kami."

Ketika pemerintah Argentina menyadari adanya kekuatan ini, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan. Pada tanggal 8 Desember 1977, para ibu mengadakan pertemuan di gereja untuk membuat surat yang akan dipublikasikan. Ketika pertemuan usai, sembilan perempuan, termasuk seorang biarawati Prancis, ditangkap oleh beberapa laki-laki di Ford Falcons. Dua hari kemudian, seorang biarawati Prancis yang lain dan salah satu pendiri Mothers of Plaza de Mayo juga hilang. Para biarawati itu kemudian dikenal sebagai "biarawati terbang", karena mereka dibunuh dengan dilemparkan ke laut dari sebuah helikopter. Mereka disiksa. Setelah ada seruan internasional, perempuan yang selamat akhirnya dibebaskan – kecuali pimpinan para ibu tersebut, Azucena Villaflor, yang tetap hilang.

Pada tahun 1992, para ibu menyatakan bahwa anggotanya telah mencapai 2.500 perempuan. Akan tetapi, pada saat itu, publik berangsur-angsur kurang berminat terhadap permintaan dan tuntutan keluarga mereka.

Sejak itu para ibu terbagi dalam dua “barisan” atau kelompok. Kelompok yang bernama “*Madres de Plaza de Mayo*”, bersikap radikal dengan menuntut bahwa “mereka yang diambil hidup-hidup, harus dikembalikan kepada kami dalam keadaan hidup pula”. Mereka menentang penggalian kuburan dan investigasi forensik terhadap kuburan yang tidak dikenal, dan biasanya menghindari kolaborasi dengan kelompok hak asasi manusia lainnya. Kelompok lainnya dinamakan “*Madres de Plaza de Mayo-Linea Fundadora*”; slogan mereka adalah: “Mereka diambil dalam keadaan hidup – di mana mereka?” Sebagian besar dari ibu-ibu ini menerima kenyataan bahwa anak-anak mereka tidak akan kembali dalam keadaan hidup. Mereka mendukung dilakukannya penggalian kuburan dan menolong keluarga korban untuk mengatasi kesedihannya. Mereka memiliki banyak kontak dengan kelompok hak asasi manusia Argentina, gereja dan serikat buruh. Orientasi mereka bukan politik.

Seorang anggota dari kelompok yang kedua, Mathilde Mellibovsky, menulis buku tentang para ibu tersebut berjudul *A Circle of Love Around Death*. Judul itu mengacu kepada lingkaran di mana para ibu berdemonstrasi di Plaza de Mayo. Dalam epilog, ia meringkas pengalaman tersebut seperti berikut: “Saya tidak membayangkan neraka sebagai tempat tidur dengan belunggu di mana orang yang dikutuk harus berbaring di sana, tetapi agaknya lebih sebagai sepasang kursi malas di mana orang dapat duduk dengan nyaman dan menunggu tukang pos membawa berita – yang tak akan kunjung datang.”

Di Chili, komite keluarga korban dinamakan *Agrupación de Familiares*; komite ini berpangkalan di sebuah bangsal kayu yang dimiliki oleh kelompok hak asasi manusia berbasis gereja, yang bernama FASIC, *Foundation for Social Assistance of the Christian Churches* (Yayasan Bantuan Sosial dari Gereja-Gereja Kristen).

Setelah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional mempublikasikan laporan pada tahun 1991, para keluarga dari korban di Chili menyimpulkan bahwa pemberian pengampunan adalah pemenangnya: para penyiksa dan pengeksekusi tidak ditahan atau dikenai tuduhan karena undang-undang amnesti yang ditetapkan oleh

beberapa rezim Amerika Latin baik yang dulu maupun yang sekarang, mencegah adanya penuntutan terhadap beberapa atau semua pelaku kejahatan.

Ketika saya bertemu dengan dua orang ibu korban, Amanda dan Mariana, di tempat perlindungan mereka di Santiago, Amanda berkata: “Memiliki bangunan yang layak adalah harapan terindah kami. Kami memiliki banyak sekali dokumentasi, foto, tanda mata, kliping koran, yang akan kami tunjukkan pada para pengunjung, atau menjadikan bangunan tersebut sebagai sebuah museum.”

Saya bertanya apakah mereka melihat bahwa rekonsiliasi di Chili berhasil. “Tidak, karena tidak ada keadilan. Hampir tak seorang pun dinyatakan bersalah, militer masih menduduki posisi mereka dan hidup enak dalam kedudukannya. Minggu yang lalu kami baru saja ke pengadilan bersama salah seorang anggota kami, karena ia (perempuan) harus menghadapi tuduhan ‘menghina’ militer.”

Di dinding tempat perlindungan tersebut tergantung sebuah grafik besar yang dibuat oleh organisasi payung Amerika Latin Internasional dari komite keluarga korban, FEDEFAM. Mariana kemudian menjelaskan angka yang ada pada grafik tersebut: “98 orang yang dihilangkan kini telah digali kuburannya. Kami tidak tahu di mana yang lainnya. Kami hanya mendengar tentang mereka secara kebetulan.” Dan ia menunjukkan angka-angka yang mengejutkan. “Ada 1.100 orang yang dihilangkan di Chili, 30.000 orang di Argentina, kini 12.000 orang di Haiti.”

FEDEFAM telah menyatakan bahwa minggu terakhir bulan Mei sebagai minggu dari orang yang dihilangkan. Di Chili, berbagai peristiwa diorganisir di berbagai lokasi: dalam sebuah forum atau prosesi memorial, ataupun peristiwa yang melibatkan para artis. Jika memungkinkan, dua delegasi Chili selalu menghadiri majelis internasional tahunan dari FEDEFAM, meskipun hal ini tergantung pada dana yang tersedia. Para ibu di Chili menerima uang dari organisasi berbasis gereja dari negara seperti Swedia dan Belanda. Tetapi, kata Mariana, kini kurang sekali minat untuk memberikan bantuan. Chili semakin dipandang sebagai sebuah negara yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan luar negeri.

Di Sri Lanka, gerakan kaum ibu yang pertama adalah *Mothers for Human Rights* dimulai pada tahun 1990. Tahun berikutnya, kelompok kedua dari front kaum ibu diorganisir. Kaum ibu di Sri Lanka menyatakan bahwa mereka akan menjadikan kelompok ibu di Amerika Latin sebagai model bagi kelompok mereka. Di Sri Lanka, para korban dan keluarganya menghadapi kesulitan yang sangat besar ketika mengupayakan ganti rugi. Tidak ada jalur hukum yang efektif untuk menelusuri seseorang yang telah dihilangkan. Ratusan keluarga mengajukan petisi atas haknya untuk diperiksa di pengadilan, dalam upaya menemukan para tahanan yang dihilangkan, tetapi prosedurnya terbukti lambat dan tidak efektif. Pada tahun 1989, para pengacara dan para saksi yang terlibat dalam kasus semacam itu mulai dibunuh atau diancam dengan kematian; cara lain untuk diperiksa di pengadilan dirintangi dalam waktu yang lama karena para pengacara enggan untuk mengambil risiko dalam kasus-kasus seperti ini.

Dr. Saravanamuttu, yang mewakili kaum ibu Sri Lanka di seluruh dunia dalam perjalanannya mengunjungi Belanda, menjelaskan bahwa komitmennya bagi gerakan hak asasi manusia Sri Lanka dimulai ketika anaknya dibunuh. “Ini merupakan pengalaman yang paling menghancurkan-luluhkan hati karena anak yang Anda miliki direnggut dari tangan Anda. Putra saya telah ‘dihilangkan’; 48 jam kemudian tubuhnya ditemukan dalam keadaan terpotong-potong. Sejak itu, saya menerima berbagai ancaman, surat kaleng, teror melalui telepon, dan saya juga yakin bahwa telepon saya telah disadap. Saya ingin melacak kasus anak saya. Teman-teman dan keluarga saya meminta saya untuk menghentikannya, dengan mengatakan ‘orang yang mencoba bertempur seharusnya tidak mengeluhkan luka-luka yang sedang dideritanya’, tetapi saya mengetahui bahwa ada puluhan ribu keluarga yang telah mengalami kekerasan. Saya tidak akan pernah mengatakan kepada para perempuan yang saya kenal untuk melupakannya; saya akan katakan pada mereka bahwa mereka harus berbicara dengan bebas mengenai permasalahan itu. Terdapat 20.000, mungkin 30.000 perempuan yang bergabung dengan saya dalam upayanya untuk menyelidiki nasib keluarga mereka.

Tetapi juga masih banyak yang tidak bergabung, karena ketakutan adanya tindakan balasan terhadap para anggota keluarga.”

Pada akhir tahun 1970-an dan selanjutnya, kelompok orang-orang yang telah diasingkan dari Maroko termasuk Sahrawis (dari bekas koloni Sahara-Spanyol yang kini diduduki oleh Maroko), telah bekerja di banyak negara, terutama di Eropa Barat, untuk pembebasan bagi mereka yang “dihilangkan”. Kelompok ini meliputi “The Association of Relatives and Friends of The Disappeared of Morocco”, dan “The Association for Families of Sahrawi Prisoners and Disappeared People”. Kedua organisasi ini telah mengumpulkan daftar dan informasi tentang orang yang dihilangkan. Keluarga dan organisasi non-pemerintah (termasuk Amnesty Internasional) telah menyajikan banyak kasus mengenai orang Maroko yang “dihilangkan” kepada Kelompok Kerja PBB untuk orang-orang yang dihilangkan; dan sejak saat itu beberapa di antaranya telah dibebaskan.

Sekali dalam sebulan, kantor serikat buruh di Rabat menerima para ibu dan istri dari para tahanan yang dihilangkan. Bukanlah suatu kebetulan apabila mereka disambut dengan ramah-tamah oleh serikat buruh. Kebanyakan dari orang Maroko yang “dihilangkan” adalah anggota dari serikat buruh, ataupun mereka yang aktif dalam memprotes kondisi pekerjaan yang buruk, kelaparan dan represi. Pertemuan publik para keluarga korban merupakan sebuah perkembangan baru; sebenarnya sampai saat ini masih dirasa tabu untuk membahas nasib para tahanan yang dihilangkan di Maroko. Tetapi sejak awal tahun 90-an telah terjadi banyak perubahan. Beberapa ratus tahanan telah dibebaskan; sebelumnya banyak yang tidak tahu tentang keadaan mereka, kadang-kadang selama dua puluh tahunan. Penjara rahasia yang paling tidak dikenal, Tazmamert, sebuah benteng tua di tengah gurun, telah dibongkar. Meskipun demikian, ratusan tahanan yang lain tetap tidak dapat dilacak. Sangatlah mungkin bahwa beberapa di antaranya masih hidup, dan bahwa pemerintah takut untuk membebaskan mereka karena mereka dalam keadaan yang buruk, dan kebanyakan mungkin telah meninggal. Para tahanan yang dibebaskan menceritakan kisah-kisah

yang mengerikan tentang penyiksaan, kelaparan, penyakit dan kegilaan yang menimpa teman-teman mereka dalam sel setiap minggu.

Pembebasan para tahanan yang ditambah kumpulan kisah baru, tiba-tiba memberi kekuatan bagi gerakan hak asasi manusia di Maroko yang sebelumnya perlu melakukan operasi dengan sangat hati-hati. Tiga puluh delapan komite keluarga telah didirikan di seluruh negeri itu. Mereka menunjukkan pembelaan mereka sebagai informasi untuk pemerintah Maroko, kelompok hak asasi manusia di luar negeri dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **Gerakan Kaum Ibu**

Meskipun komite keluarga korban menunjukkan karakteristik yang beragam, namun secara umum mereka tampil dengan ciri-ciri yang sama.

Kebanyakan keluarga yang saya wawancarai (di El Salvador, Guatemala, Filipina, Chili dan Argentina) mengungkapkan frustrasi mereka terhadap kenyataan bahwa pada umumnya para pelaku kejahatan pelanggaran hak asasi manusia tidak diperdikan (atau sebagaimana dalam kasus Argentina, telah dibebaskan jauh sebelum hukuman mereka ditetapkan).

Sebagian besar orang yang diwawancarai menyetujui bahwa rehabilitasi sosial, politik dan psikologis jauh lebih penting daripada kompensasi material. Di Chili, misalnya, ada monumen raksasa di Pemakaman Sentral Santiago yang mencantumkan nama-nama dari semua yang telah “dihilangkan” atau dibunuh; taman-taman dan jalan-jalan di sejumlah kota juga dinamai dengan nama korban.

Terkecuali satu kelompok kaum ibu di Argentina, semua komite keluarga korban memiliki hubungan yang kuat dengan jaringan NGO atau LSM, atau beroperasi di bawah perlindungan mereka. Jaringan LSM ini biasanya berbasis gereja; dan beberapa di antaranya adalah serikat buruh.



Sebagian besar komite keluarga tersebut di dukung oleh organisasi asing, seperti halnya kelompok solidaritas, perwakilan pemerintahan bagi kerja sama pembangunan, jaringan LSM berbasis gereja dan serikat buruh. Ketergantungan ini sepertinya akan terus berjalan, karena sedikitnya dana yang dapat dikumpulkan dari donatur dalam negeri.

Di negara-negara Barat, telah muncul berbagai inisiatif pribadi untuk mendukung komite-komite itu, misalnya Yayasan Belanda, *Steun aan Argentijnse Moeders* (SAAM = Dukungan untuk Kaum Ibu di Argentina) yang didirikan pada tahun 1979 menyusul sebuah kunjungan empat orang Ibu ke Belanda. Yayasan itu mengumpulkan uang setiap tahunnya dengan berbagai cara, seperti halnya periklanan mengenai Hari Ibu. Juga di Belanda, pada tahun 1995, di bawah pengawasan organisasi humanis untuk hak asasi manusia, sebuah pusat kegiatan didirikan untuk mendokumentasikan kegiatan dan kebutuhan komite keluarga, dan untuk menemukan beragam cara guna menghubungkan komite tersebut dengan kelompok-kelompok di negara lain.

Komite keluarga merupakan kelompok hak asasi manusia yang paling aktif di berbagai negara. Beberapa organisasi, seperti halnya Front Ibu di Sri Lanka dan organisasi para janda di Guatemala, CONAVIGUA memang sangat besar; keduanya memiliki puluhan ribu anggota dan pendukung. Tetapi sebagian besar dari komite tersebut kekurangan sumber daya, perhatian internasional dan kontak dengan komite lain. Mereka hanya memiliki cukup uang untuk mengorganisir beberapa kegiatan; dana yang diperlukan untuk menolong keluarga yang retak dengan membangun kembali sebetuk kehidupan yang layak. Sayangnya masih tidak mencukupi. Kekurangan dana membuat beberapa anggota sulit untuk mengadakan perjalanan ke luar negeri. Komite Filipina FIND, yang ciri-cirinya digambarkan dalam bab berikut, memang menyadari keberadaan komite keluarga korban di Amerika Latin; meskipun demikian, tak seorang pun dari para anggotanya mengadakan kunjungan ke organisasi lain untuk bertukar pengalaman personal. Memang cukup sulit bagi komite keluarga korban untuk tetap

menguasai perhatian internasional, karena ini mengharuskan mereka untuk menghadiri kegiatan-kegiatan internasional, seperti halnya sidang-sidang PBB di Jenewa.

Pekerjaan dari komite keluarga korban secara jelas menunjukkan bahwa pembunuhan politik atau penghilangan bukanlah suatu kejahatan yang terisolasi. Ini adalah perusakan yang telah menghancurkan kehidupan keluarga, atau meremukkan mereka selama bertahun-tahun; trauma peperangan dan penyiksaan dirasakan terus-menerus. Karena itu, kesedihan yang dialami keluarga korban memerlukan banyak perhatian dalam waktu yang lama setelah jatuhnya rezim yang represif.

## TEATER BAGI MEREKA YANG TELAH DIHILANGKAN

Suatu pagi di bulan Juli 1993, itulah saat pertama kali saya menjumpai orang-orang dari FIND. Kami sedang menuju ke kantor FIND di Manila, dengan diantarkan oleh seorang pekerja hak asasi manusia Belanda. Pembicaraan kami dengan kelompok itu merupakan satu hal yang penting. Selama perjalanan ia menjelaskan bahwa FIND adalah organisasi hak asasi manusia terkecil di Filipina, atau dalam tingkatan apa pun merupakan organisasi dengan pendanaan yang paling sedikit.

Kantornya yang berada di daerah pinggiran kota Manila, semakin mempertegas pernyataannya. Sebuah kamar, dengan ruang masuk yang kecil di mana kopi instan atau makanan dapat disediakan. Ada sebuah telepon yang tidak selalu berfungsi. Sebuah bola lampu yang terang bergantung di plafon; itupun tidak berfungsi penuh selama enam jam sehari, karena adanya pembatasan dengan melakukan pemotongan di stasiun tenaga listrik pusat untuk mengatur penjumlahan.

FIND, komite keluarga untuk para tahanan yang “dihilangkan”, didirikan pada tahun 1985, tahun ketika kasus “penghilangan-penghilangan” mencapai puncaknya. Delapan keluarga sebagai inti permulaan berdirinya. Kini, lebih dari 150 keluarga menjadi bagian dari komite ini. FIND memiliki sebuah cabang yang besar di Manila, dan beberapa cabang kecil di kota lain di Filipina, seperti halnya Cebu dan Baguio.

Pagi itu, lima perempuan, seorang anak laki-laki dan seorang laki-laki dewasa mendatangi kantor tersebut untuk menceritakan pengalaman mereka. Mereka menceritakannya dengan runtut, sebagaimana kebiasaan di Filipina. Saya

menceritakan kembali kisah-kisah mereka di bawah ini, dengan sedapat mungkin menggunakan kata-kata mereka sendiri, sesuai urutan peristiwanya.

Ayah Arnold adalah sekretaris jenderal tetap dari sebuah serikat buruh. Ia diculik pada tanggal 1 Mei 1989, ketika mengikuti demonstrasi di dekat kedutaan besar Amerika. Arnold mengatakan, kami mendengar penculikannya sehari kemudian, dan kami mulai mencarinya dengan bantuan FIND. Sebagai bagian dari kampanye kami, kami mengajukan protes piket di luar stasiun polisi distrik. Beberapa anggota piket ditahan. Kami mengorganisir piket lain di luar kantor seorang jenderal angkatan darat. Jenderal itu selanjutnya diminta untuk memberi kesaksian dalam pemeriksaan yang diadakan di Senat. Ibu dan adik laki-laki saya mengalami masa-masa yang sulit. Saya meninggalkan kuliah saya di poliklinik agar mendapatkan pekerjaan.

Ketika seorang perempuan bertanya apakah kami mengenalinya, Milleth pun tersenyum. Perempuan itu mengatakan bahwa Milleth sepertinya adalah seorang selebriti dari Belanda. Saya ingat penampilannya di TV untuk memperingati perayaan Amnesti Internasional. Di depan kamera, ia dirangkul oleh kelompok Amnesti yang menulis surat kepada pemerintah Filipina selama tiga tahun, dan memohon agar Milleth dan suaminya, Simplicio, dibebaskan dari tahanan. Keduanya dibebaskan pada tahun 1986. Dua tahun setelah perayaan ini, pada tanggal 26 Agustus 1988, Simplicio dihilangkan.

Menyusul pembebasan kami dari penjara, kata Milleth, kami memindahkan pekerjaan komunitas kami ke daerah di sekitar Pangkalan Udara Amerika di Luzon Tengah; kami yakin bahwa ini akan lebih aman. Simplicio secara terbuka terlibat dengan KMU, sebuah serikat buruh sayap kiri; ia sering diancam oleh kelompok siap siaga, yakni orang-orang yang mendapatkan senjata dari angkatan darat. Ia diculik oleh sembilan orang bersenjata, tanpa seragam ataupun tanda pengenal. Pada saat itu, terjadi pemogokan di dua pabrik. Seorang saksi mendengar orang-orang yang bersenjata itu berkata: “Ke Kamp Olivia, kami telah mendapatkan dua kurir NPA”. Kamp Olivia adalah pangkalan militer, dan NPA adalah gerakan gerilya komunis. Saksi lain melihat Simplicio berada di rumah perlindungan yang digunakan oleh kelompok siap-siaga.

Sebuah rumah perlindungan adalah sebuah tempat yang digunakan untuk penahanan rahasia dan penyiksaan. Anda harus tahu di mana mereka berada, sekalipun mereka sering berpindah-pindah. Saya pergi ke rumah perlindungan hari berikutnya; saya tidak menemukan sesuatu. Saya melakukan pencarian selama tiga bulan, bahkan mengunjungi perusahaan pemakaman, tetapi tidak berhasil juga.

Suami Shirley diculik dari rumahnya pada tanggal 7 April 1988. Ia aktif di antara kaum miskin perkotaan di desa nelayannya dan bergerak dalam serikat buruh sayap kiri KPNL, yang membantu mengorganisir barisan piket dalam protes melawan penahanan-penahanan ilegal dan tindakan malpraktek angkatan darat. Kaum muda dalam komunitas itu kadang-kadang ditangkap; orang-orang yang bertopeng kemudian menunjuk beberapa di antara mereka dan memberi perintah untuk “membawa mereka”. Alasan utama atas keresahan sosial pada saat penculikan adalah pembongkaran di daerah pemukiman untuk memperluas pelabuhan. Pada jam 5 sore, kata Shirley, suami saya sedang beristirahat di rumah ketika orang-orang bersenjata tiba dalam dua mobil dan mencoba untuk menariknya keluar. Dalam pergulatan yang berakhir kira-kira 20 menit, orang-orang itu menembakkan senjatanya untuk mencegah para tetangga untuk ikut campur. Saya kemudian menemukan kira-kira sepuluh lubang peluru di dinding rumah kami. Anak laki-laki saya masih mengalami mimpi buruk: ia menyesal tidak merebut pistol dan menembak salah seorang penyerang yang sedang menyergap ayahnya. Pada akhirnya, para penyerang memaksa suami saya masuk ke dalam mobil, dan mengendarainya menuju Manila. Saya ingin mengikuti mereka, tetapi tak seorang pun mau mengantar saya ketika saya berlumuran darah. Beberapa perwira polisi yang sedang mabuk bercerita bahwa penculikan tersebut telah direncanakan oleh Patroli Mobil – yakni unit polisi militer. Saya mengajukan kasus ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia tiga hari kemudian. Orang-orang asing mulai mengganggu saya, mereka selalu datang siang dan malam. Saya menitipkan anak-anak kepada ayah saya dan pindah ke tempat lain. Selama tiga tahun, saya hanya menengok anak saya dua kali dalam setahun. Saya mengajukan tuntutan untuk diperiksa di pengadilan. Tetapi di Filipina, hal itu hanya efektif jika seseorang mau memberikan

kesaksian bahwa mereka melihat orang yang “dihilangkan” dalam penahanan. Orang-orang terlalu takut untuk memberi kesaksian; mereka yang bersaksi bahkan terancam jiwanya. Dalam setiap komunitas selalu ada orang yang dipekerjakan oleh dinas keamanan. Mereka bahkan menaruh senjata atau granat tangan di rumah Anda, sehingga dapat berdalih untuk menangkap Anda.

Emily menceritakan pada kami bagaimana suaminya, Reynaldo, diculik pada tanggal 8 Maret 1987, pada jam 6 sore, ketika ia sedang berbelanja ke pasar di San Juan, Manila. Lima orang menariknya setelah pergumulan singkat. Ia aktif di CADENA, organisasi pemuda untuk demokrasi nasional. Ketika mencarinya, kata Emily, saya pergi ke kantor polisi, Satuan Tugas untuk Tahanan, Komite Presidensial untuk Hak Asasi Manusia. Saya juga pergi ke kamp tentara dengan surat dari Komite Presidensial, ke Biro Investigasi Nasional, hingga ke perusahaan pemakaman. Saya membaca tabloid dengan sungguh-sungguh, dengan harapan dapat menemukan rincian kejahatan yang berhubungan dengan nasib suami saya. Saya pergi ke rumah sakit ketika saya mendengar dari radio bahwa seseorang yang namanya sama dengan suami saya sedang dirawat di sana; sayangnya itu adalah orang lain. Saya mencarinya selama lebih dari setahun, dan bergabung dengan FIND pada tahun 1988. Meskipun banyak orang menyaksikan penculikan suami saya, namun tak seorang pun berani memberi kesaksian karena takut akan “keselamatan” mereka sendiri. Menyelamatkan adalah kata yang digunakan militer untuk menghilangkan Anda, membunuh Anda tanpa jejak. Mereka menceritakan bahwa pemerintah memiliki program perlindungan saksi resmi, tetapi saya tidak yakin bahwa mereka memberikan perlindungan pada saya. Korupsi di mana-mana; bahkan sampai di Mahkamah Agung semuanya telah disalahgunakan.

Aida datang dari tempat yang jauh untuk menemui kami. Ia berasal dari Jalla Punta, Propinsi Laguna, empat jam perjalanan dari Manila. Ongkos bisnya enam puluh pesos, setengah dari upah minimum resmi sehari. Sepuluh orang bersenjata telah menculik suaminya dari rumah mereka pada tanggal 16 Mei 1990, pada jam 1.15 malam. Ia adalah wakil ketua serikat petani dan nelayan, dan telah bekerja untuk komunitas itu selama 15 tahun. Seorang pemilik tanah yang luas, Torres, mulai

merampas tanah. Suami saya, kata Aida, mengorganisir komunitas itu untuk menentang keluarga Torres. Salah seorang anak laki-laki Torres adalah tentara, dan belum lama berselang banyak tentara dan anggota dinas para militer terlihat di lingkungan kami. Para penculik suami saya bertopeng. Banyak yang melihat pergulatan singkat itu, tetapi tidak seorang pun dapat mencampuri. Para penculik menarik suami saya ke dalam jip penumpang tanpa plat nomor. Pada jam 03.00 pagi saya melaporkan penculikan itu kepada polisi. Kemudian saya langsung pergi ke Manila untuk melaporkan kepada Satuan Tugas dan Komisi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, saya pergi ke Biro Investigasi Nasional, yaitu kantor polisi, ke seorang senator kongres, dan ke Kamp Crame untuk berbicara dengan Jenderal Masarena. Ia adalah kepala Angkatan Kepolisian Filipina. Sebelum jam 10.00 pagi pada hari itu saya sudah mengunjungi tiga kantor di Manila. Kemudian, saya mencari rumah sakit, rumah jenazah, perusahaan pemakaman dan “daerah pembunuhan”. Ini merupakan daerah yang terisolasi dengan rumput yang tinggi di mana kelompok bersenjata kadang-kadang membunuh mayat-mayat. Saya memiliki alasan yang kuat dan yakin bahwa para pelaku kejahatan adalah para anggota dari Batalyon Infantri 72. Unit itu telah diasramakan di daerah itu beberapa bulan sebelumnya. Seminggu setelah penculikan, masih ada yang mengawasi rumah saya. Saya kira mereka menghubungkan suami saya dengan kegiatan NPA. Jika tidak, mereka hanya ingin menghentikan kampanye mengenai isu tanah. Suami saya memiliki saudara sepupu yang tidak bekerja, dan adalah seorang informan bagi keluarga Torres dan militer. Saya titipkan tiga anak laki-laki saya kepada saudara perempuan saya dan bekerja sebagai tukang binatu di Manila. Saya mengatur untuk mengunjungi mereka sebulan sekali.

Edwin adalah seorang psikolog yang bekerja pada FIND. Ia menceritakan kepada kami bahwa hampir semua orang yang “dihilangkan” adalah dari kelas bawah. Ketika para suami mereka telah diculik, maka para isteri harus mencari penghasilan dengan pekerjaan yang bergaji rendah, seperti halnya menjahit atau binatu. Ada risiko yang serius mengenai perpecahan keluarga sebagai akibat dari kesulitan ekonomi. Jika keluarga itu tetap utuh, maka para anggotanya akan menjalani masa-masa sulit. Isteri

dan orang tua, dan juga anak-anak, ditinggalkan dengan perasaan bersalah. Memang tidak biasa bagi anak-anak Filipina untuk berbicara terus-terang dengan orang-orang tua mereka. Dan orang tua dari mereka yang “dihilangkan” sering berpegang teguh pada harapan palsu dengan meyangkal kematian anak-anak mereka. Mereka bahkan menggunakan pandangan politik yang radikal dari anak-anak mereka, karena mereka tidak ingin anak-anak mereka atau pekerjaannya dilupakan. Kami mencoba membuatnya lebih mudah untuk berbicara mengenai hal tersebut. Terapi formal hampir tidak dikenal di Filipina, tetapi kami mengorganisir pertemuan untuk “berbagi rasa”. Semua orang yang menderita ketika kehilangan orang-orang yang dicintai, akan mengalami tingkat kemarahan, penyangkalan, depresi dan kesedihan yang mendalam. Tetapi bagi keluarga dari orang-orang “dihilangkan” tidak akan ada tingkatan akhir: yakni rasa menerima. Bagaimana Anda dapat menerima apa yang tidak anda ketahui? Dan hukum dan masyarakat menegaskan hal itu pada para isteri untuk selama-lamanya. Pasangan dari orang yang hilang diisyaratkan oleh undang-undang untuk menunggu tujuh tahun sebelum mereka dapat kawin lagi. Dan sering kali mereka tidak melakukan hal itu: anak-anak sering mengidolakan ayah mereka dan tidak akan menerima ayah baru dalam kehidupan ibu mereka.

Aileen Bacalso adalah ketua FIND. Ia beruntung: suaminya adalah sedikit dari orang-orang yang “dihilangkan” namun dikembalikan setelah beberapa hari. Ini karena ia dapat menemukan informasi lebih cepat yang diberikan oleh orang yang baru saja dibebaskan dari tahanan. Ia melanjutkan ceritanya tentang organisasi. Ia menyatakan bahwa mantan presiden Cory Aquino berjanji untuk menolong keluarga dari orang-orang yang “dihilangkan”; pertolongan ini belum dilaksanakan. Ini adalah anjuran FIND, kata Aileen, sehingga Aquino mendirikan Komite Presidensial (kini dikenal sebagai Komisi Hak Asasi Manusia atau CHR). Beberapa aktivis hak asasi manusia yang terkenal telah menjadi anggota dari CHR. Tetapi mereka semua kecewa dan berhenti. Pemerintah telah memberikan 1,4 juta pesos kepada CHR untuk merehabilitasi keluarga dari orang-orang yang “dihilangkan”. Tetapi kami dari FIND tidak menerima satu *centavo* pun. Kami telah mengajukan banyak permohonan



mengenai uang dari anggaran ini, tetapi CHR menyatakan bahwa belum ada waktu untuk memproses permohonan kami.

Setahun kemudian, saya menemui para anggota FIND, di antaranya Arnold dan Edwin, untuk kedua kalinya, di pusat komunitas di Utrecht. Kelompok teater FIND sedang mengadakan perjalanan keliling Eropa; ini dimainkan sepenuhnya oleh anak-anak dari orang-orang “yang dihilangkan”. Edwin adalah sutradara – ia memang seorang aktor sekaligus psikolog. Di tengah pertunjukan itu, pada akhir perjalanan keliling, realitas kesedihan itu terlihat dalam penampilannya. Salah seorang dari anak-anak itu, yang dalam naskah diharuskan menangis, tidak dapat menghentikan cucuran air matanya. Dalam satu menit semua anak menangis keras. Pertunjukan itu terhenti. Orang-orang Amnesti Internasional yang menemani anak-anak itu dalam perjalanan tersebut, menghibur mereka di koridor.

Pertemuan saya untuk ketiga kalinya dengan keluarga-keluarga Filipina dari orang-orang yang “dihilangkan” adalah melalui sebuah film. Film tersebut dipersiapkan oleh Amnesti Internasional seksi Belanda. Film itu berkisah mengenai Monette (berusia berusia 17 tahun), seorang anggota dari FIND dan merupakan salah seorang anggota wanita dari kelompok teater yang saya lihat di Utrecht. Kekuatan dari film ini terletak dalam kenyataan bahwa tidak satu pun dari materi yang tampil dalam film itu pernah dipentaskan sebelumnya. Diiringi oleh kru filmnya, Monette menemukan orang-orang yang berpikir, salah atau benar, bahwa mereka dapat menolongnya. Kamera mengikutinya ketika ia mencari ayahnya, dengan mengunjungi berbagai organisasi, keluarga-keluarga dan para saksi mata. Di tengah-tengah dokumentasi itu, ia tiba-tiba mendapatkan petunjuk: tubuh ayahnya yang telah dipotong-potong itu mungkin telah dikuburkan di sebuah ladang di luar kota. Ia pergi ke tempat itu, tetapi tidak menemukan apa pun. Untuk beberapa menit yang menegangkan, wajah Monette di depan kamera menyingkapkan kekecewaannya akan realitas bahwa ia harus kehilangan harapannya untuk menemukan kembali ayahnya.

Pertemuan saya yang terakhir dengan FIND, hingga kini, adalah di Amsterdam, ketika salah seorang anggotanya, Agnes, berkunjung pada bulan Maret

1995, untuk mencari dukungan. Segalanya tidak berjalan dengan baik di FIND, katanya. Organisasi telah terpecah ke dalam dua kelompok, karena memiliki pandangan yang berbeda tentang garis politik dan para juru bicara dituduh oleh beberapa anggota bersifat angkuh. Saya teringat mengenai para ibu Plaza de Mayo, yang baru saja terpecah, ketika saya bertemu dengan mereka di Buenos Aires. Komite keluarga menghadapi kesulitan yang lebih banyak daripada organisasi hak asasi manusia biasa. Apa pun sukses yang mereka raih, rasa sakit dan kesedihan tidak akan pernah hilang. Tetapi Agnes memiliki berita yang penuh harapan pula. Pada tahun 1994, sebuah monumen didirikan sebagai kenangan atas mereka “yang dihilangkan”. Ada 1.600 nama yang terukir pada monumen itu: 759 terjadi pada rezim Marcos, 830 pada periode Aquino; ada 16 nama orang yang diculik sejak Fidel Ramos terpilih pada tahun 1992. Berita terakhir mengabarkan bahwa mereka baru saja meluncurkan proyek pencarian yang insentif, yang dipusatkan pada enam kasus terhadap orang yang “dihilangkan”, dimulai dari tahun 1980-an. Semua kasus ini memiliki petunjuk: para pembunuh telah teridentifikasi, dan FIND tahu di mana mayat-mayat itu berada. Jika ini digali, maka kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan. Tetapi bantuan dari luar memang diperlukan, salah satu dari kasus itu adalah mengenai pendeta “yang dihilangkan”, yang merupakan *high-profile* dan dapat menjadi sasaran dari kampanye internasional. Sedangkan kasus yang lain ditempatkan pada *low-profile*. Hal yang dibutuhkan dalam organisasi itu adalah jaminan mengenai suaka politik bagi para saksi dan keluarga. Orang-orang Filipina memang telah mencapai demokrasi, tetapi beberapa anggota militer masih berpegang teguh pada “jaringan anak-anak lama” dan tidak menyukai masa lalunya diungkap.

## **HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI KEPRIHATINAN TANPA UJUNG**

Bagaimana hak asasi manusia dapat dilindungi setelah periode represi masif atau peperangan? Sangatlah jelas bahwa perlindungan tersebut memang diperlukan – sebagaimana laporan yang dibuat oleh Amnesty Internasional mengenai negara-negara yang mengalami sebuah “transisi”. Dalam bab ini, saya akan memberikan beberapa contoh mengenai keprihatinan yang terus-menerus terhadap hak asasi manusia yang harus ditanggung – atau yang seharusnya demikian – oleh komunitas internasional, badan resmi di negara-negara itu sendiri, dan oleh organisasi non-pemerintah (LSM).

### **Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia memiliki berbagai prosedur untuk memantau dan menindak pelanggaran hak asasi manusia. Kekuasaan mereka untuk mengeksekusi sangatlah beragam. Pada level yang lebih rendah memang ada yang dikenal sebagai prosedur “1503”: prosedur pemeriksaan di balik pintu tertutup. Kemudian ada sanksi yang lebih berat dari kecaman publik dengan memberi resolusi di mana, sebagai misal, para pejabat ditunjuk untuk melaksanakan investigasi di sebuah negara. Ada perkembangan baru mengenai penempatan para pemantau hak asasi manusia di negara-negara transisional. Dan akhirnya, intervensi bersenjata diizinkan berdasarkan bab VII Piagam PBB, yang berkaitan dengan situasi-situasi yang membahayakan perdamaian dan keamanan umat manusia.

Pada awal tahun 1995, PBB memiliki “pelapor khusus” yang melakukan investigasi di 12 negara. Ada juga pelapor yang berurusan dengan tema tertentu. Pada tahun 1995, mereka menghadapi topik yang berhubungan dengan situasi darurat, independensi pengadilan, penyiksaan dan eksekusi cepat. Selanjutnya, ada pihak-pihak yang dikenal sebagai partai kerja, atau komisi para ahli: mereka memberikan laporan yang mencakup tentang “penghilangan secara paksa dan di luar kemauan”, penahanan yang sewenang-wenang dan “para pembela hak asasi manusia”. Akhirnya, ada para ahli independen dan delegasi dari Sekretaris Jenderal PBB. Mereka bekerja di negara-negara seperti Chad, Kamboja dan Guatemala – semua negara ini dianggap sebagai negara yang berada dalam masa transisi dari masa represi menuju kepastian hukum.

Apa yang sebenarnya dapat dicapai oleh para ahli dan komisi ini? Peningkatannya memang mengesankan – sekitar sepuluh tahun yang lalu, hampir tidak ada sesuatu pun di bidang ini. Tetapi implementasi dan situasi kerja yang sebenarnya lebih sering mengecewakan daripada menyenangkan.

Pada tahun 1994, seorang pelapor khusus PBB, Nigel Rodley, diundang oleh Federasi Rusia, untuk mengunjungi negara itu, dalam upayanya menghadapi masalah yang dimulai dari sebelum masa “transisi”. Dalam laporannya ia menulis: “Pelapor khusus harus memiliki kejeniusan puitik atau artistik dari Dante atau Bosch, ketika ia mereproduksi dengan cara yang memadai mengenai kondisi yang bagaikan neraka di sel-sel penjara ini.” Ia merekomendasikan bahwa 71.000 tahanan dalam penjara yang melampaui kapasitas resmi penjara, seharusnya dibebaskan. Laporannya mengenai Rusia ternyata menjadi salah satu dari sekian jumlah inisiatif yang dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia selama tahun itu, yang memberi optimisme. Sebagai contoh, pada sesi yang sama, tahun 1995, Indonesia tidak mematuhi salah satu dari rekomendasi yang dibuat oleh komisi dalam pernyataan sebelumnya, dalam hubungannya dengan peristiwa berdarah di Timor-Timur yang terjadi pada bulan November 1991. Dan tidak ada tindakan yang diambil sehubungan dengan Colombia, dengan ribuan pembunuhan politik pada tahun 1994, dan ratusan “penghilangan”; di

Turki, ribuan orang dibunuh dan disiksa dalam beberapa tahun sebelumnya; tidak juga di Aljazair, dengan 10.000 pembunuhan politik yang dilakukan oleh kedua partai, pengenalan kembali penyiksaan yang sistematis – merupakan praktek yang sebenarnya telah dihapuskan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan lain sebagainya.

Kelompok Kerja untuk Penghilangan tetap merupakan salah satu mekanisme yang paling efektif. Sehubungan dengan keprihatinan kemanusiaannya, maka kelompok itu menahan diri untuk menuduh pemerintah, yang justru mengadopsi pendekatan tanpa kepastian hukum, untuk mengamankan kerja sama pemerintah dalam menjernihkan fakta. Namun, kelompok itu tetap menyebutkan kontak dengan pemerintah, dan memberikan rincian mengenai kasus-kasus dalam laporannya kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Meskipun hanya memecahkan proporsi yang kecil dari kasus yang diajukan, namun kemampuannya untuk mengkombinasikan tindakan kemanusiaan dengan penyingkapan publik merupakan penghargaan bagi keterampilan dari kelompok kerja selama beberapa tahun. Ini menunjukkan apa yang dapat dicapai oleh badan PBB.

### **Masalah Hak Asasi Manusia Berkaitan Dengan Operasi-Operasi yang Ditujukan untuk Menjaga Perdamaian.**

Sebagian besar operasi untuk menjaga perdamaian dan aspek hak asasi manusia dikembangkan di kantor pusat PBB di New York. Mereka menampakkan kekurangan yang mencolok mengenai keterlibatannya, pembahasannya, atau kerja sama dengan organisasi hak asasi manusia mereka di PBB dan para ahli atau dengan Pusat Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Akibatnya, PBB kadang-kadang tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi konflik hak asasi manusia. Akan tetapi, di beberapa negara, PBB menempuh risiko demi melindungi hak asasi manusia dalam konteks transisional negara-negara tersebut.

Dari tahun 1991, perkembangan hak asasi manusia sebagai satuan yang komprehensif dalam operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pemerintahan Transisional di Kamboja (UNTAC) menunjukkan keuntungan tertentu. Ini berarti bahwa pemantauan hak asasi manusia disetujui semua pihak, dan telah mengizinkan spesialis hak asasi manusia untuk menarik bantuan dari komponen UNTAC lainnya, terutama polisi sipil PBB (CIVPOL) dan Militer PBB, termasuk para pengamat militer (UNMOS).

UNTAC memiliki kekuasaan untuk “mengontrol secara langsung” beragam aspek administrasi sipil, termasuk pengawasan terhadap polisi Kamboja, dan kemampuan untuk melakukan tindakan “korektif” yang ditujukan pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada pertengahan November 1992, “Komponen Hak Asasi Manusia” telah menerima lebih dari 300 keluhan di Phnom Penh, dan kira-kira dengan jumlah yang sama dari berbagai propinsinya. Program Sukarela Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebarkan 700 sukarelawan PBB di Kamboja, kebanyakan bekerja untuk mempublikasikan hak asasi manusia.

Sebagaimana disetujui dalam perjanjian perdamaian pada tahun 1992, bahwa Komisi Penasihat PBB di Mozambique (ONUMOZ) akan mengarahkan demobilisasi para tentara dan mengumpulkan senjata dari mantan aktivis gerilya. Hampir 80.000 tentara, yang seperempatnya merupakan anggota kelompok gerilya RENAMO, telah didemobilisasi. Pada awal tahun 1994, PBB memutuskan untuk memperbaiki perlindungan hak asasi manusia, dengan meningkatkan sejumlah pengamat PBB yang mengawasi unit polisi sipil (CIVPOL) dari 128 orang menjadi 1.100 orang. Merekalah yang mengawasi netralitas dari polisi Mozambique dan – dalam cara yang lebih umum – menjamin adanya penghargaan terhadap hak sipil dan politik serta kebebasan, khususnya selama kampanye pemilihan. Dalam bidang yang sebelumnya berada di bawah otoritas RENAMO, CIVPOL harus bekerja dalam kondisi yang sangat sulit, karena polisi Mozambique tidak dapat mendirikan kantor polisi di distrik ini.

Satu bulan setelah pembantaian besar-besaran, pada bulan Mei 1994, PBB mengutuk semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum kemanusiaan

internasional dan kekerasan di Rwanda. Organisasi itu menyatakan bahwa para pejabat atau orang lain yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, atau hukum kemanusiaan internasional akan dianggap “bertanggung jawab secara individual dan dapat dipertanggungjawabkan”, dan bahwa “komunitas internasional akan mengerahkan segala upaya untuk memperlakukan mereka”. Ketika Dewan Keamanan PBB, pada bulan Mei 1994, memutuskan untuk mengurangi pasukan perdamaian di Rwanda dari 2.000 menjadi 270, Amnesty Internasional segera meminta para pengamat polisi sipil dan para pengamat militer yang tidak bersenjata kembali ke Rwanda dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah sebelumnya. Kehadiran mereka sangat penting dan dapat mencegah terjadinya kekerasan; mereka juga mengeluarkan laporan sistematis mengenai pelanggaran yang ada. Bagaimanapun, masih ada beberapa bulan sebelum mereka dikirim keluar, bahkan setelah Dewan Keamanan memutuskan adanya sebuah pasukan yang berjumlah 1.500 orang.

Seorang pelapor khusus PBB untuk kebutuhan eksekusi yang cepat, Bruce Waly Ndiaye, pada tahun 1995 menunjukkan tidak cukup dilakukannya tindakan tertentu dalam laporan PBB tersebut. Dua tahun sebelumnya, ia telah menguraikan secara rinci skenario yang memungkinkan adanya pemusnahan suku bangsa Rwanda. Sayangnya, negara-negara anggota dari komisi tidak memberikan perhatiannya. Seandainya mereka memperhatikan, maka intervensi yang tepat dari PBB kemungkinan dapat mencegah adanya pertumpahan darah.

Kegagalan komunitas internasional di Rwanda tercermin dari kegagalan untuk mengantisipasi perkembangan paling serius yang terjadi di Burundi. Pada bulan Maret 1994, Sekretaris Jenderal PBB mengirimkan komisi penyelidikan untuk memeriksa pembunuhan massal yang dilakukan tahun sebelumnya, di mana sekitar 50.000 orang terbunuh. Tetapi temuan komisi tersebut, yang diserahkan kepada pemerintah Burundi pada bulan Desember, tidak dipublikasikan. Pada bulan Oktober, Majelis Umum PBB memberikan izin untuk menempatkan para pemantau hak asasi manusia di negeri itu, tetapi tidak seorang pun dikirim. Kemudian ditunjuklah sebuah komisi yang bertugas

memantau Organisasi untuk Persatuan Afrika (OAU), tetapi komisi ini tidak membuat laporan publik dari aktivitasnya.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, José Ayala Lasso, mulai memegang jabatan tersebut pada tanggal 5 April 1994, dua hari sebelum mulainya kejahatan genosida atau pemusnahan suku bangsa di Rwanda. Janji-janji yang disampaikan dalam pidato penutupannya untuk sub-komisi PBB pada bulan Agustus 1994 tampaknya sangat memberikan harapan, tetapi mungkin juga terasa tidak pada tempatnya: "Saya ingin mengingatkan bahwa menyusul himbauan yang diajukan kepada komunitas donor di Jenewa pada tanggal 25 Mei berkaitan dengan pemberian bantuan sebesar US\$ 1.200.000 untuk program awal kerja sama teknik di Burundi, lebih dari US\$ 2.000.000 telah dijanjikan untuk direalisasikan." Dana ini akan digunakan untuk "pelatihan dan kegiatan pendidikan (khususnya lembaga peradilan, polisi, *gendarmerie* dan militer), jasa penasihat dari para ahli hak asasi manusia, beasiswa untuk kegiatan hak asasi manusia dan dokumentasi, kegiatan promosi untuk kebudayaan hak asasi manusia, dukungan bagi pusat hak asasi manusia di ibu kota Bujumbura, bantuan bagi kegiatan promosi hak asasi manusia yang dilakukan oleh LSM hak asasi manusia nasional, seperti halnya bantuan kepada dua liga hak asasi manusia, dan untuk memperkuat kehadiran kami di kantor UNHCR di Bujumbura."

### **Organisasi Antar-Pemerintah Regional**

Sebelumnya, dalam bab 9 buku ini, saya telah menguraikan peran Komisi dan Pengadilan Antar-Amerika – misalnya kasus Velásquez Rodríguez.

Di Afrika, *Organization for African Unity* (OAU) tidak mencakup pengadilan regional. Berkaitan dengan pembunuhan massal yang berlangsung di Rwanda, Burundi, Aljazair, Angola, Liberia, Somalia, dan Sudan, OAU tidak memainkan peran yang signifikan untuk mempromosikan langkah-langkah dalam melindungi hak-hak asasi manusia sebagai unsur yang esensial dalam perjuangan menuju rekonsiliasi



nasional, perdamaian dan keadilan. Pada bulan April 1994, diangkat seorang pelapor khusus yang menangani masalah eksekusi-eksekusi ilegal oleh Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat.

*Organization for Security Cooperation in Europe* (OSCE, sebelumnya dinamakan CSCE) merangkul 53 negara yang menjangkau mulai dari Vancouver sampai Vladivostok. OSCE menganggap organisasi ini sebagai badan terkemuka yang menjamin bahwa konflik-konflik tidak akan menimbulkan perang dan untuk memecahkan krisis-krisis yang melanda negara-negara di Eropa. Mantan Menteri Urusan Luar Negeri Belanda, Max van der Stoep, menjabat Komisaris Tinggi OSCE yang ditugaskan untuk mengurus minoritas-minoritas nasional negara anggota. Meskipun lembaga yang dipimpinnya itu diberi tanggung jawab untuk mencegah konflik-konflik, namun ia menyatakan bahwa di atas segalanya, ia sangat berkeinginan untuk menjamin bahwa “prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan-kebebasan dasar” dapat dijamin. Metode kerjanya lebih dikarakterisasikan dengan melakukan diplomasi yang tidak bombastis, sebagaimana terbukti dengan apa yang telah ia capai di negara-negara Baltik, Eropa Tengah dan Balkan bagian selatan. Meskipun demikian, ia tidak diizinkan untuk berurusan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah kegiatan teroris terorganisir atau konflik bersenjata, seperti halnya dalam masalah perjuangan suku Kurdi-Turki.

### **Institusi-Institusi Hak Asasi Manusia Nasional**

“Komisi-Komisi Kebenaran” resmi yang diuraikan dalam bab 8 merupakan jenis badan nasional yang resmi, dan berperan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia. Namun, terdapat organisasi-organisasi serupa yang lain, misalnya:

- Sebuah badan permanen yang berurusan dengan hak-hak asasi manusia, yang dapat menangani pengaduan-pengaduan baik yang muncul saat ini maupun sebelumnya. Badan ini dapat berupa sebuah badan “*ombudsman*” ministerial atau departemental, seorang penuntut publik, seorang “pembela hak asasi manusia”, sebuah “komisi nasional”, atau badan-badan serupa.
- Sebuah komisi hak asasi manusia parlementer atau komisi investigasi.
- Sebuah komisi *ad hoc* untuk penyelidikan temporer, jangka pendek, atau sebuah badan fungsionaris untuk mengadakan investigasi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu.
- Seorang penuntut, hakim, komisaris atau yang sepadan lainnya untuk berurusan dengan kelompok-kelompok tertentu: misalnya, kelompok minoritas, anak-anak jalanan atau para tahanan.
- Sebuah badan nasional yang didirikan oleh sebuah organisasi internasional, seperti halnya komisi-komisi untuk hak asasi manusia yang merupakan bagian dari UNTAC di Kamboja, ONUSAL di El Salvador dan ONUMUZ di Mozambik.

Pada bulan Maret 1992, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyokong *Principles relating to the status of national institutions* (prinsip-prinsip berkaitan dengan masalah status institusi-institusi nasional). Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa sebuah komisi seharusnya bersikap independen dari pemerintah, dan undang-undang pembentukannya harus merefleksikan independensi ini. Sebuah komisi seharusnya dibentuk dengan berdasarkan hukum, atau lebih baik bila berdasarkan amandemen konstitusional. Kerja komisi tersebut harus transparan,

pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukannya biasanya terbuka bagi publik. Pemeriksaan-pemeriksaan pribadi seharusnya merupakan langkah luar biasa dan hanya terpaksa dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil investigasi-investigasi yang dilakukan komisi tersebut harus diserahkan kepada badan-badan yudisial yang tepat tanpa penundaan. Seseorang yang diduga keras oleh komisi sebagai pihak yang bertanggung jawab karena melakukan, memerintahkan, mendorong atau mengizinkan dilakukannya pelanggaran hak asasi manusia, seharusnya secara otomatis dibawa ke peradilan. Pemerintah seharusnya menjamin bahwa suatu penuntutan mengenai hak asasi manusia yang dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran, dilakukan oleh otoritas-otoritas yang jelas-jelas independen dari campur tangan pihak atau aparat keamanan, atau badan-badan lain yang diduga keras terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Komisi tersebut seharusnya mempertimbangkan kecenderungan dan opini-opini yang ada, seperti opini yang dilontarkan “organisasi-organisasi non-pemerintah, pemikiran filosofis atau religius, universitas-universitas dan ahli-ahli yang memenuhi syarat, parlemen dan departemen-departemen pemerintah”. Akan tetapi, jika yang belakangan dimasukkan, maka perwakilan-perwakilan ini seharusnya berpartisipasi dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam hanya dalam kapasitasnya sebagai penasihat.

Prinsip-prinsip itu menyatakan bahwa perhatian utama dari pekerjaan komisi tersebut seharusnya adalah untuk “mencari penyelesaian secara damai melalui konsiliasi, atau di dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, melalui keputusan-keputusan yang mengikat, atau bila perlu atas dasar konfidensialitas”.

Filipina adalah salah satu di antara beberapa negara yang sudah membentuk komisi nasional untuk hak asasi manusia. Institusi hak asasi manusia yang resmi telah berdiri sejak tahun 1986, ketika pemerintahan Aquino dibentuk. Institusi pertama yang didirikan adalah Komite Presidensial untuk Hak Asasi Manusia, dan memberikannya mandat yang luas untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Pada

akhir bulan April 1987, PCHR telah menerima ratusan keluhan termasuk 277 “kasus pemusnahan” (eksekusi secepatnya), 83 kasus penyiksaan, 34 pembantaian besar-besaran dan 20 insiden penangkapan dan penahanan ilegal, 47 pembakaran dan 2 pemboman. Komite ini kemudian digantikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia (CHR), sebuah badan pemerintah yang otonom dengan tugas antara lain untuk mengadakan investigasi, atas kehendaknya sendiri atau berdasarkan adanya pengaduan dari pihak pihak tertentu, semua bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melibatkan hak-hak sipil dan politik, dan untuk merekomendasikan penuntutan.

Ketika saya mengunjungi kantor komisi tersebut di Manila Metro pada tahun 1993, yang terlihat tidak lebih hanyalah beberapa mesin ketik tanpa seorang pengetik pun di belakangnya. Tidak ada kesibukan seperti yang biasanya saya lihat di kebanyakan kantor organisasi hak asasi manusia non-pemerintah di Filipina. Sesungguhnya CHR telah memiliki catatan yang jelek dalam menyelesaikan pengaduan-pengaduan pelanggaran hak asasi manusia dan dalam mendapatkan kepercayaan dari publik Filipina. Komite Pengacara Hak-Hak Asasi Manusia yang berpangkalan di Amerika Serikat dalam kunjungannya melaporkan: ”Dalam praktek, CHR menganggap bahwa sebenarnya setiap tindakan kriminal adalah merupakan pelanggaran “hak asasi manusia”. Di antara kasus-kasus yang telah diinvestigasi sejak tahun 1988, telah banyak yang dikeluhkan berkaitan dengan pengaduan-pengaduan mengenai berkurangnya pencerahan harapan dan pandangan, pelanggaran kontrak, pemfitnahan secara lisan, tuntutan-tuntutan asuransi, dan pencurian mobil. Beberapa kantor regional mencurahkan banyak waktunya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berkaitan dengan masalah tanah pribadi serta masalah-masalah perkawinan. Dan Amnesty Internasional melihat bahwa “prosedur-prosedur kuasi-yudisial yang digunakan oleh CHR cenderung membuat para saksi dan pihak yang melakukan pengaduan rentan untuk dikenai retribusi tanpa memberikan keuntungan pada mereka dengan menempuh cara yudisial yang seharusnya”.

Pada akhir tahun 1994 saya mengunjungi sebuah Badan Hak Asasi Manusia Nasional di Chili, yakni Korporasi Nasional untuk Rekonsiliasi dan Reparasi.

Direktornya, Alejandro Gonzales, sebelumnya bekerja untuk organisasi non-pemerintah, *Vicaria de la Solidaridad* dari tahun 1976 hingga 1992. Ada empat puluh orang yang bekerja pada korporasi tersebut, di dalamnya termasuk 25 pengacara, separuh dari mereka ini bertugas melaksanakan investigasi-investigasi dengan melakukan perjalanan yang lama dan luas di berbagai pelosok negeri. Tugas utama yang hampir sepenuhnya menyedot waktu yang tersedia sejak didirikannya pada bulan Agustus 1992 sampai awal tahun 1994 dari korporasi tersebut adalah untuk mengklarifikasi kasus-kasus yang tidak dapat diputuskan (624) oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, dan juga bertugas mengurus kasus-kasus baru (375). Kebanyakan dari kasus-kasus baru ini belum pernah dilaporkan sebelumnya karena adanya ketakutan; secara khusus kasus-kasus ini melibatkan mereka yang digambarkan oleh Gonzales sebagai orang-orang pinggiran – dan sangat miskin, *indigenas* (orang-orang Indian Pribumi), dan para penduduk dari tempat-tempat yang terpencil negeri itu. Setiap kali sebuah kasus diurus dan diselesaikan, Korporasi segera memberikan pensiun kepada keluarga itu.

Tugas yang kedua adalah untuk menemukan orang-orang yang telah “dihilangkan” – kira-kira 1.350 kasus. Dari jumlah ini, 31 persen kini telah berhasil diselesaikan, dan masih ada 900 yang sedang diinvestigasi. Gonzales menggambarkan rintangan-rintangan utama dalam investigasi ini: “kami memeriksa kuburan-kuburan. Tetapi mayat-mayat para korban ‘yang dihilangkan’ biasanya dikuburkan jauh dari tempat dilakukannya pembunuhan. Ada faktor kesempatan yang besar dalam mengungkap kasus-kasus ini. Kadang-kadang kami diberi sebuah petunjuk oleh orang-orang yang pada saat pembunuhan itu terjadi sedang bekerja di pemakaman. Dan kami juga berkonsultasi dengan para pelayanan medis. Hal ini menjadi penting ketika informasi pertama yang kami terima menyatakan bahwa tampaknya mayat akibat pembunuhan non-politik berusia kira-kira berusia dua puluh tahun – pada saat puncak represi berlangsung. Kami tidak memiliki unit forensik sendiri, tetapi memanfaatkan unit forensik lain dalam kasus-kasus semacam itu. Tahun ini, misalnya, kami mengidentifikasi kira-kira 70 mayat yang ditemukan dalam sebuah kuburan

massal yang berisi 140 mayat. Kami juga melacakinya melalui arsip-arsip pengadilan. Kami menemukan banyak sekali tuduhan yang telah dikenakan, tetapi saya harus mengatakan bahwa saya tidak terlalu mengharapkan akan adanya hasil-hasil yang mengejutkan.”

Tugas ketiga dari Korporasi tersebut adalah untuk memberikan dukungan legal dan sosial. Gonzales: “Kami membantu para korban represi militer yang hendak membuat permohonan bantuan medis kepada Menteri Kesehatan. Kami memberikan beasiswa dan pensiun kepada para anggota keluarga para tahanan yang telah dibunuh atau “dihilangkan”. Mengenai sisi legalnya, Komisi Kebenaran telah membuat sejumlah rekomendasi. Tetapi belum ada, misalnya, sebuah pusat dokumen para tahanan – meskipun setidaknya kini tidak ada lagi hukuman penjara.”

El Salvador sejak awal tahun 1990-an sudah memiliki berbagai jenis badan hak asasi manusia yang resmi. Pada tahun 1993, 102 pejabat militer dipecat, menyusul adanya rekomendasi-rekomendasi dari sebuah “komite penyelidikan *ad hoc*, mengenai pertanggungjawaban militer dalam pelanggaran hak asasi manusia”. Badan-badan tersebut telah didirikan sesuai dengan persetujuan-persetujuan perdamaian. Para pengamat PBB dari ONUSAL tetap berada di dalam negeri ini untuk menjamin bahwa persetujuan-persetujuan perdamaian itu dipertahankan. Sementara itu, Kantor Penuntut Publik Perlindungan Hak Asasi Manusia telah semakin aktif. Kantor ini didirikan berdasarkan syarat-syarat persetujuan perdamaian, dan didesain untuk mengambil alih tugas-tugas yang ditinggalkan ONUSAL. Tetapi secara umum, otoritas-otoritas legal, militer, dan polisi telah gagal untuk mengikuti saran-saran dari kantor ini.

Di Uganda pada tahun 1986 bukan hanya telah didirikan sebuah komisi untuk mengadakan investigasi tindakan-tindakan dari rezim sebelumnya, tetapi juga pada saat yang sama diangkat seorang inspektur jenderal untuk menjamin bahwa hak asasi manusia dilindungi di bawah rezim yang sekarang. Ia bertugas mengadakan investigasi terhadap penyalahgunaan-penyalahgunaan tersebut seperti halnya pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan dinas-dinas

keamanan. Beberapa tentara telah dihukum mati dan dieksekusi karena memerkosa dan menjarah.

Di Rusia, majelis terpilih, atau biasa disebut *Duma*, pada awal tahun 1994 mengangkat seorang mantan tahanan yang telah dinyatakan tak bersalah, Sergei Kovalyov, untuk menduduki pos yang baru dibentuk dalam *ombudsman* parlementer untuk urusan hak asasi manusia. Akan tetapi, pada akhir tahun 1994, undang-undang yang menggabungkan pembentukan pos ini belum disahkan, dan Sergei Kovalyov masih harus menjalankan fungsinya tersebut sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia yang berada di bawah kendali kepresidenan. Pada bulan April 1994, *Duma* membentuk sebuah komisi untuk mengadakan investigasi terhadap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang telah dimasukkan kembali ke penjara. Kovalyov memberikan sebuah laporan pada bulan Juli 1994. Di dalam laporan tersebut ia mengutuk perlakuan terhadap para tahanan dan sistem penjara. Ia mengatakan bahwa sering terjadi pelanggaran-pelanggaran mencolok terhadap hak asasi manusia. Menurut laporannya, pencambukan terhadap para tahanan merupakan perbuatan yang biasa. Ia mengatakan bahwa karena kurangnya supervisi, akibatnya tidak ada investigasi yang benar terhadap banyak pelanggaran, dan mereka yang bersalah sering tidak dibawa ke pengadilan. Pada bulan Maret 1995, Kovalyov dipecat dari posnya setelah ia memprotes berbagai pelanggaran yang dilakukan Rusia terhadap hak asasi manusia di Checnya. Meski demikian, ia tetap melanjutkan pekerjaannya, dengan atau tanpa mandat resmi yang jelas.

### **Pengamatan Terhadap Komisi-Komisi Resmi**

PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia memiliki seperangkat norma bagi kelompok hak asasi manusia yang resmi, tetapi itu tidak berarti bahwa kini telah terbentuk sebuah model yang bersifat internasional. Sebuah komisi dapat berurusan

dengan penyalahgunaan-penyalahgunaan yang terjadi di masa lalu, atau dapat membatasi dirinya pada isu-isu pada masa sekarang. Komisi hanya dapat menunjukkan apa yang sedang terjadi, atau membuat rekomendasi-rekomendasi, atau mengusulkan penuntutan. Komisi dapat dan bisa juga tidak memberikan rekomendasi atau memberikan kompensasi kepada para korban. Komisi dapat bersifat publik atau bisa juga tidak. Sebagaimana fenomena yang masih terjadi pada akhir-akhir ini, kita dapat berharap bahwa standar-standar yang diterima secara lebih internasional akan dicapai di masa depan yang tidak terlampau jauh.

Sebagian besar dari komisi-komisi resmi yang kini berfungsi di kira-kira enam puluh negara, dibentuk setelah tahun 1991. Khususnya tahun 1993 merupakan tahun menjamurnya pendirian komisi-komisi baru tersebut. Hal ini tidak dapat dihubungkan dengan fakta diselenggarakannya konferensi komisi-komisi nasional oleh PBB pada bulan Desember tahun yang sama, di mana berbagai pemerintah tentu saja sangat gembira bila dapat diwakili dalam konferensi tersebut.

Berkaitan dengan luasnya cakupan geografis komisi-komisi resmi tersebut, maka tampaknya bahwa jumlah yang paling besar dari komisi-komisi nasional masih berada di Amerika Latin. Pada permulaan tahun 1995, saya telah menghitung jumlah komisi hak asasi manusia yang resmi di 18 negara Amerika Latin; ada 14 di Asia, 11 di Afrika, 8 di Timur Tengah/Afrika Utara, dan 10 di Eropa dan republik-republik bekas Uni Soviet. Namun demikian, representasi jumlah yang lebih besar di Amerika Latin masih kurang mencolok dibandingkan beberapa tahun yang lalu, ketika komisi-komisi hak asasi manusia nasional masih langka di luar bagian kawasan ini.

Meningkatnya jumlah komisi nasional tersebut dapat digambarkan sebagai tanda adanya harapan atau paling tidak sebagai indikasi perlunya pemerintah-pemerintah kini tampil untuk mengikatkan diri pada norma-norma hak asasi manusia internasional. Meski demikian, seperti yang telah kita lihat, hasil-hasil dari sebagian besar komisi ini tidak banyak memberikan harapan. Sangat sedikit yang berhasil mengikuti contoh yang ditunjukkan oleh Korporasi di Chili, dengan melengkapi mayoritas kerja-kerja yang telah dilakukan korporasi di Chili tersebut.



Sebagian besar komisi tersebut harus berjuang menghadapi baik berupa perlawanan resmi maupun oposisi semu. Dan mereka sering kali harus memfungsikan diri sebagai tidak lebih dari sekadar pihak yang berupaya menyembunyikan sesuatu.

Meski demikian tidak berarti bahwa komisi nasional dianggap sebagai cara yang harus dipilih untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, kita sebaiknya lebih menganggap sebagai solusi terbaik kedua. Berdasarkan aturan hukum konstitusional, promosi hak asasi manusia dan prosedur penyelidikan serta prosedur-prosedur hukum yang menyertainya, seharusnya menjadi bagian yang normal dari jalannya sistem hukum sehari-hari.

### **LSM-LSM Dalam Proses Transisi**

Tidak mudah untuk memberi batasan mengenai organisasi-organisasi non-pemerintah atau sering disebut *NGO* atau LSM. Secara ideal sesuai dengan definisinya, organisasi-organisasi seperti itu bukan hanya menjadi kepanjangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, meskipun kebanyakan menerima pendanaan yang besar dari pemerintah. Mereka secara langsung dapat berperan memunculkan keadilan sosial, tetapi secara teknis, sebuah asosiasi olahraga pun bisa juga dikatakan sebagai sebuah LSM. Maka dari itu, ditinjau dari segi subjeknya, yang dimaksudkan dengan LSM dalam buku ini adalah LSM yang lebih berkaitan dengan keanekaragaman isu yang luas, isu yang berkaitan dengan: urusan kemanusiaan, hak asasi manusia, dukungan sosial, kepedulian sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pertolongan kepada para pengungsi dan korban peperangan sipil, informasi, pembangunan (infra) struktur komunitas, riset, isu yang berkaitan dengan masalah tanah dan properti, perwakilan legal dan litigasi.

Pola-pola perkembangan komunitas LSM yang berbeda bisa dilihat di berbagai negara yang berada dalam proses transisi. Pola perkembangan tersebut bisa berupa

*lenyapnya konsistensi LSM-LSM tersebut secara bertahap*: sebuah LSM yang kuat akhirnya melemah juga sebagai akibat dari transisi, khususnya transisi yang terjadi atas inisiatif swasta dan pemerintah, dan formasi dari partai-partai politik. Di Chili dan Argentina ada suatu perasaan bahwa banyak LSM telah tidak lagi bisa menjalankan fungsinya meskipun keberadaannya masih ada. Baik LSM untuk proyek-proyek pembangunan maupun organisasi hak asasi manusia, sebagian besar sudah tidak ada lagi atau jumlahnya berkurang secara drastis. LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia di negara-negara ini telah melakukan upaya-upaya, sebagian didorong oleh hilangnya pendanaan asing, dengan membangun posisi pasar yang lebih baik. Kini mereka berusaha menawarkan kursus-kursus pelatihan, atau dokumentasi dengan pertimbangan komersial; beberapa LSM dapat mentransformasikan diri mereka sendiri ke dalam pusat-pusat riset akademik atau memfungsikan diri sebagai pelayanan informasi atau publisitas bagi media.

Di negara-negara lain, kita menyaksikan kenyataan sebaliknya: adanya *pertumbuhan* yang kuat dari berbagai LSM yang ada. Hal ini berlaku bagi contoh yang ditunjukkan di bekas negara-negara komunis Eropa Tengah, di mana sebelumnya kelompok-kelompok sipil biasanya tidak diizinkan untuk membentuk LSM.

Pola perkembangan tersebut dapat juga berupa situasi *tidak adanya* LSM. Sebelum transisi, LSM-LSM tidak eksis pada skala yang signifikan dan tidak diharapkan untuk dapat memainkan peran yang penting dalam demokratisasi atau dalam membangun masyarakat sipil. Mereka mungkin “terlampau” dalam proses transisi yang cepat. Menurut beberapa penulis, inilah yang terjadi di Jepang setelah Perang Dunia II; ini juga dapat merupakan kasus yang menarik di negara-negara Afrika dan Asia Timur.

Pada akhirnya, pola perkembangan tersebut bisa merupakan terjadinya sebuah *integrasi* secara terus-menerus: LSM-LSM menjadi lebih kuat berkat kerja samanya dengan struktur-struktur pemerintah dan komersial. Secara umum bisa dikatakan bahwa ini merupakan proses historis yang telah terjadi di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Kanada.

Ketika menilai peran dari LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia dalam fase pasca-transisi atau fase penyesuaian kembali, kita bisa temukan semua pola perkembangan di atas. Di Ujung Selatan Amerika Latin dan di Filipina, LSM untuk hak asasi manusia sering harus berjuang terus-menerus menghadapi ancaman melemahnya peran mereka. Meski demikian, kelompok-kelompok ini kadang-kadang membangun benteng pertahanan dengan melakukan integrasi dan kerja sama dengan program-program pemerintah. Kelompok-kelompok di Eropa Timur bermunculan, setelah sebelumnya tidak ada – hal ini bisa terlihat pada munculnya *Memorial*, sebuah LSM Rusia, yang telah saya sebutkan dalam bab 6. Kurangnya LSM “pribumi” untuk hak asasi manusia masih merupakan kenyataan yang khas di kebanyakan negara Afrika (kecuali Afrika Selatan). Meskipun sebenarnya sejumlah kelompok kecil belakangan ini sudah muncul ke permukaan, sebagaimana akan kita lihat di bawah ini.

Di Buenos Aires, Argentina, saya telah berbicara dengan Patrick Rice, direktur *Ecumenical Movement for Human Rights*, yang didirikan pada tahun 1976 oleh gereja-gereja Protestan. Rice berasal dari Irlandia. Sebelumnya, ia adalah seorang pastor Katolik, dan sampai tahun 1987 menjadi presiden federasi komite-komite internasional anggota keluarga korban yang lebih dikenal dengan FEDEFAM.

“Kami sebelumnya lebih kuat dibandingkan sekarang. Pada awal bulan Juni 1983, kami berhasil mengumpulkan 260.000 tanda tangan sebagai protes melawan hukum amnesti bagi junta militer. Mengenai kegiatan kami yang sekarang, kami telah merancang disahkannya empat undang-undang berkenaan dengan hak asasi manusia: sebuah undang-undang yang dapat menyatakan bahwa anak-anak dari orang-orang “yang dihilangkan” tidak memiliki kewajiban untuk memasuki dinas militer, sebuah undang-undang mengenai pemberian kompensasi bagi para tahanan politik (meskipun ini belum bisa diterapkan bagi para tahanan yang tidak terdaftar dalam kamp-kamp konsentrasi, dan masih sedikit diaplikasikan bagi mereka yang mengalami ‘penghilangan sementara’), serta sebuah undang-undang yang memberi pengakuan bahwa seseorang tertentu adalah orang “yang dihilangkan”. Dua dari mantan

pembantu-pembanu kami kini menduduki pos-pos dalam departemen ministerial untuk urusan hak asasi manusia yang telah dibentuk oleh Presiden Alfonsin.”

Rice menunjukkan kepada saya guntingan-guntingan surat kabar yang memperjelas bahwa masalah hak asasi manusia di Argentina masih jauh dari memuaskan. Seorang pemimpin redaksi dari sebuah surat kabar progresif telah dipukul oleh polisi; kerusuhan di penjara ditumpas dengan menggunakan gas air mata dan peluru-peluru karet, dan beberapa orang menderita luka-luka; polisi memaksa sebuah sekolah di dekat Buenos Aires untuk memberikan informasi tentang latar belakang politik staf pengajar mereka. Setiap bulan ada prosesi-prosesi diam untuk mengenang tiga orang yang telah “dihilangkan” pada tahun 1992 – salah seorang dari mereka adalah seorang anak laki-laki muda. Di berbagai kota, pengaduan-pengaduan mengenai kematian-kematian dalam penjara diarsipkan.

Gerakan Ekumenis telah membuka kantor-kantor mereka di seluruh negeri. Organisasi ini mengadakan kunjungan ke penjara-penjara, menjalankan pusat dokumentasi hak asasi manusia, membantu kaum muda untuk mendirikan organisasi-organisasi pemuda yang bebas – yang sering dijalankan dengan cara yang menggemparkan – dan banyak mendukung kelompok kooperatif, tempat-tempat kerja dan kebun-kebun sayur di mana para mantan tahanan politik dan para anggota keluarga dari orang-orang yang “dihilangkan” dapat memanfaatkannya sebagai lahan untuk mendapatkan penghasilan.

Sebagian besar LSM hak asasi manusia di Chili mencoba untuk bertahan hidup dengan menawarkan pelayanan-pelayanan baru dalam masyarakat demokratik, atau melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah. Sebuah seksi nasional dari Amnesti Internasional adalah salah satu dari LSM yang dapat mempertahankan hidupnya sendiri, walaupun bukan tanpa kesulitan dan bantuan yang perlu dari organisasi pelindungnya. Direktur yang baru-baru ini diangkat, Claudia Fachinetti, mengatakan kepada saya pada bulan September 1994, bahwa terdapat 380 anggota yang tergabung di dalamnya. Beberapa tahun sebelumnya, jumlah itu mencapai 3.000 – setelah dilangsungkannya sebuah konser besar yang menampilkan artis-artis pop internasional.

Sekalipun demikian, dalam waktu yang singkat, banyak orang tidak tertarik lagi dengan Amnesty tersebut sejak organisasi itu tidak mengizinkan para anggotanya berkampanye menentang pelanggaran hak asasi manusia di negara mereka sendiri. Meskipun demikian, mereka masih dapat berkampanye mengenai perlunya pembaruan dalam sistem legal berkaitan dengan hak asasi manusia di negara mereka, khususnya mengenai isu hukuman mati. Kelompok-kelompok Amnesty di Chili kini anggotanya terutama terdiri dari para mahasiswa dan para akademisi dari cabang ilmu-ilmu hukum dan sosial.

Apakah yang dilakukan oleh seksi Amnesty di sebuah negara di mana akhir-akhir ini, hak asasi manusia secara mencolok telah dilanggar? Facinetti menjawab: “Sebagian besar pekerjaan kami ditujukan bagi kasus yang terjadi di negara-negara asing yang diajukan pada kami oleh Sekretariat Internasional. Mengenai situasi hak asasi manusia di Chili, kami melakukan lobi guna mencoba mengadakan persuasi dengan pemerintah Chili, guna mendukung dilakukannya inisiatif-inisiatif bagi konvensi-konvensi internasional baru – seperti halnya konvensi tentang orang-orang ‘yang dihilangkan’ yang diusulkan oleh Organisasi Negara-Negara Amerika. Kami menekan agar dapat dihapuskannya hukuman mati yang masih tercantum dalam peraturan hukum kriminal negara kami. Dalam prakteknya, apa yang telah terjadi pada kasus-kasus hukuman mati adalah bahwa presiden selalu memberikan pengampunan. Tetapi hal yang masih menyedihkan adalah bahwa enam puluh persen orang-orang Chili masih tetap ingin mempertahankan dilakukannya hukuman mati tersebut. Kami mencoba mempromosikan ide-ide tentang hak asasi manusia melalui sistem pendidikan. Pemerintahan sebelumnya telah membuat rencana-rencana agar masalah hak asasi manusia dapat tercakup di dalam mata pelajaran sekolah – tetapi hingga kini hal tersebut masih belum diajarkan.”

Seperti halnya para aktivis hak asasi manusia lainnya yang tinggal di negara-negara dengan sistem kediktatorannya yang masih belum sirna sama sekali, Facinetti menyadari masih terbatasnya perhatian yang diberikan terhadap hak asasi manusia. “Masyarakat dengan alasan tertentu tampaknya sudah lelah untuk

mendengarkan masalah hak asasi manusia. Hal itu mungkin merupakan reaksi terhadap kaitan yang ada antara masalah hak asasi manusia dengan kelompok-kelompok radikal selama berlangsungnya kediktatoran. Kini hampir tidak mungkin bagi kami untuk mendapatkan artikel-artikel di surat kabar atau tayangan mengenai hak asasi manusia di TV. Pada kenyataannya kami hanya dapat memperolehnya di surat kabar terbitan para mahasiswa dan kelompok sayap kiri, itu pun dengan sirkulasi yang kecil. Kami tetap berharap untuk meningkatkan minat tersebut sedikit demi sedikit.”

Saya telah berbicara mengenai masalah akibat buruk kekuasaan militer, dengan Veronica Reyna dari *Chilean Foundation for Social Assistance of the Christian Churches*, FASIC. Ia mengepalai sebuah tim yang terdiri dari sembilan pengacara yang mewakili para korban kediktatoran. “Dunia luar tampaknya telah melupakan bahwa masalah para tahanan politik yang kami hadapi belumlah selesai. Ketika kediktatoran berakhir, masih terdapat kira-kira 400 orang tahanan. Selama lima tahun yang lalu mereka telah dibebaskan satu demi satu. Tetapi sebagian besar dari mereka telah dibebaskan dengan syarat penangguhan hukuman, *indulto*. Syarat-syarat tersebut dipaksakan dalam pembebasan mereka – misalnya bahwa mereka harus hidup di luar Chili. Secara keseluruhan, kira-kira 2.000 mantan tahanan politik yang diasingkan masih dikenai cekal. Para mantan tahanan politik tetap tinggal di Chili dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan lain. Mereka memiliki catatan polisi “telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan teroris” dan karena itu tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.”

Satu masalah serius yang dihadapi banyak negara setelah jatuhnya suatu kediktatoran adalah kembalinya mereka yang telah dibuang. Dari tahun 1975, FASIC telah dilibatkan mengurus para pengungsi dari negara-negara tetangga dan dari dalam negeri Chili sendiri. Reyna mengatakan: “Sejumlah besar pengungsi telah kembali – ada kira-kira 100.000 *retornados* (istilah untuk pengungsi yang telah kembali). Mereka punya banyak persoalan karena mereka sering tidak diterima dengan senang hati. Di distrik-distrik yang lebih miskin tidak ada rumah-rumah penampungan dan tidak ada pekerjaan bagi mereka. Itulah sebabnya sebagian yang lain memilih tidak kembali ke

Chili. Ada 3.000 *retornados* yang datang dari Swedia – tetapi 30.000 orang lainnya masih memilih tinggal di Swedia.

Sebuah hasil yang konkret mengenai proses rekonsiliasi di Filipina adalah berupa pembentukan zona-zona perdamaian di beberapa tempat. Saya mengunjungi kota Naga di Luzon Selatan, di mana pada akhir tahun 1980-an sebuah zona perdamaian berhasil ditetapkan setelah mendapat tekanan yang cukup kuat dari kaum bisnis lokal, dan setelah adanya konsultasi-konsultasi dengan semua LSM-LSM terpercaya di daerah itu. Zona perdamaian berarti bahwa mantan para pejuang gerilya Tentara Rakyat Nasional (NPA) tidak akan ditangkap atau diusik oleh polisi di kota Naga, meskipun pengecualian bisa dibuat jika berkaitan dengan “seseorang tertentu yang sedang dicari karena melakukan kejahatan-kejahatan tertentu”. Banyak anggota NPA bergerak secara bebas di dalam atau di luar kota Naga, mengunjungi restoran-restoran, bioskop dan berbelanja – tanpa ada persoalan-persoalan yang perlu dikhawatirkan.

LSM-LSM merupakan kekuatan kunci dalam inisiatif-inisiatif bagi rekonsiliasi semacam itu. Tetapi kerja sama yang telah dilakukan antara pemerintah dan inisiatif swasta di Naga lebih merupakan suatu pengecualian daripada suatu keharusan. Banyak LSM Filipina masih cenderung segan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Salah satu alasannya adalah alasan politis: khususnya selama pemerintahan Marcos dan Aquino, sebuah LSM yang telah menyandang tanda “kuning” (bersimpati pada pemerintah) dapat mengundang datangnya ancaman dari golongan kiri radikal bagi para anggota LSM tersebut. Alasan kedua adalah bahwa pemerintah biasanya dianggap sangat korup. Sudah merupakan asumsi umum bahwa dari semua dana pemerintah yang dialokasikan untuk proyek tertentu, rata-rata 50% lenyap masuk ke dalam kantong-kantong para pejabat dan individu-individu lain yang terlibat. Alasan ketiga adalah bahwa undangan dari pemerintah yang sekarang agaknya sering bersifat semu. Misalnya, banyak LSM yang telah berpartisipasi dalam “konsultasi multi-sektoral” merasakan bahwa sebagian besar komentar dan saran yang mereka berikan ternyata

diabaikan begitu saja dalam praktek atau dikorbankan untuk kepentingan *Realpolitik* nasional maupun lokal.

Di Filipina, saya memperhatikan perubahan karakter yang terjadi pada organisasi-organisasi hak asasi manusia. Sebagaimana di Chili dan Argentina, sedikit banyak mereka telah menjadi lebih dekat dengan pemerintah dan dengan pihak-pihak yang mengarahkan program-programnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para korban individu. Hingga saat ini, penekanan mereka lebih dititik-beratkan pada penemuan fakta dan pengaduan terjadinya pelanggaran. Pencarian fakta kini menjadi lebih selektif dan mendalam. Perhatian semakin dicurahkan untuk mengadakan program rehabilitasi bagi para korban dan orang-orang yang terkait dengan korban, dan bagi pendidikan hak asasi manusia. Masalah pengungsi internal merupakan isu penting lainnya, meskipun baru-baru ini jumlah mereka sudah sangat berkurang.

Di Rwanda, belum ada LSM pribumi yang menangani masalah hak asasi manusia, dan kurangnya jumlah LSM di negeri tersebut dapat menjadi pertanda di masa depan, sebagaimana tampak dalam kecenderungan yang ada di kebanyakan negara Afrika. Meski demikian, sebuah organisasi seperti CLADHO menunjukkan sumbangan apa yang bisa diberikan oleh kerja di bidang hak asasi manusia. CLADHO adalah akronim Prancis untuk *Collective of Leagues and Associations for the Defence of Human Rights in Rwanda*; organisasi ini merupakan organisasi pelindung dari empat kelompok yang berafiliasi. Keempat kelompok yang berafiliasi tersebut didirikan antara tahun 1990 dan 1992. Salah satu dari kelompok tersebut diorganisir terutama oleh para dokter umum dan dokter hewan. Satu kelompok lainnya diorganisir oleh para pengacara, dan kelompok satunya lagi diorganisir oleh para jurnalis; tetapi belum lama ini, semua jenis kelompok profesional dan para individu telah berhimpun dalam tiap-tiap kelompok yang telah berafiliasi ke dalam CLADHO tersebut. Mereka sudah secara aktif bekerja untuk mengadakan rekonsiliasi selama beberapa tahun semenjak sebelum pecahnya pembunuhan-pembunuhan bercorak pemusnahan suku bangsa pada bulan April 1994. Konferensi diadakan pada setiap tanggal 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia Internasional, untuk membahas peluang-peluang dalam



membuat terobosan guna menjembatani rintangan-rintangan yang ada di masing-masing etnis. Dibentuk “jaringan siap-siaga” lokal, meskipun tidak mampu menghentikan pembunuhan-pembunuhan, namun paling tidak, diharapkan dapat mendokumentasikan apa yang sedang terjadi dan memberikan informasi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedutaan-kedutaan asing dan berbagai kelompok hak asasi manusia internasional. Penjara-penjara dikunjungi, dan bila memungkinkan, dilakukan pendidikan hak asasi manusia bagi komunitas-komunitas dan para pejabat lokal.

Setelah terjadinya pemusnahan suku bangsa atau genosida, CLADHO mencoba untuk meneruskan kegiatan-kegiatan ini dengan kondisi-kondisi yang jauh lebih sulit dibanding sebelumnya. Mereka bahkan berusaha untuk memperbaiki metode-metode kerja mereka. Setelah penyiaran masalah permusuhan etnis oleh stasiun-stasiun radio Rwanda dihentikan, organisasi-organisasi anggota CLADHO mulai melakukan penyiaran melalui Radio Hak Asasi Manusia. Pada awal tahun 1995, dengan modal yang sangat sederhana, mereka mengorganisir bantuan hukum bagi kelompok-kelompok yang telah sangat menderita akibat kejahatan genosida tersebut.

### **LSM-LSM Internasional: Tiga Pendekatan Terhadap Hak Asasi Manusia di Afrika**

Secara umum, jumlah LSM untuk hak asasi manusia lokal di Afrika telah menurun jauh di bawah tingkat jumlah yang ada di Amerika Latin serta di negara-negara Asia semacam India dan Filipina. Meskipun daftar terakhir mengenai LSM-LSM di Afrika yang diterbitkan oleh Internet Hak Asasi Manusia tersusun dalam jumlah halaman yang banyak, namun bila diamati dengan lebih cermat akan tersingkap bahwa sebagian besar masih merupakan organisasi-organisasi yang kecil, atau tampak tidak lebih dari

sekadar tumpuan-tumpuan kecil bagi LSM-LSM internasional. Jumlah yang besar hanya ditemukan di Afrika Selatan. Keberadaan yang kuat dari LSM-LSM ini telah terlihat oleh banyak orang sebagai daya pendorong yang besar dan jaminan kualitas bagi Komisi Kebenaran dan Komisi Hak Asasi Manusia yang resmi, yang seharusnya dibentuk setelah transisi ke demokrasi terjadi. Dampak apakah yang timbul akibat kurangnya LSM-LSM di negara-negara Afrika yang lain dan kegiatan-kegiatan yang agak selektif terhadap organisasi-organisasi asing dan internasional di benua itu.

Direktur *Human Rights Watch/Africa*, Abdullahi Ahmed An-Na'im, seorang pria kelahiran Sudan, menyangsikan efektivitas PBB dalam melakukan supervisi dan mempromosikan hak asasi manusia. Ia percaya bahwa organisasi-organisasi non-pemerintah seperti halnya Amnesty Internasional dan Human Rights Watch memiliki kemungkinan lebih efektif dalam hal advokasi hak asasi manusia. "Kedua organisasi ini memiliki kredibilitas yang secara umum lebih diakui dibandingkan dengan PBB. PBB dinilai terlalu lambat, tidak praktis dan terlampau mahal. Harapan bahwa PBB akan bisa efektif mempromosikan hak asasi manusia adalah luar biasa naif. PBB selamanya akan tetap menjadi organisasi antar-pemerintah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bukanlah merupakan kepentingan dari berbagai pemerintahan tertentu – justru merekalah (pemerintah-pemerintah itulah) yang telah menginjak-injak hak asasi manusia."

Ia menekankan pentingnya untuk berjaga-jaga baik secara lokal maupun regional. "Sebuah kelompok dari Uganda, misalnya, seharusnya bisa mengadakan investigasi terhadap kebijakan mengenai hak asasi manusia di Ethiopia. Ini dapat dilakukan berdasarkan pada keberatan yang dimiliki orang-orang Ethiopia, keberatan yang sebenarnya merupakan keberatan orang-orang Eropa yang telah mengatakan pada mereka apa yang mesti dilakukan. Kami seharusnya mencoba untuk mendasarkan diri pada kultur regional yang ada, dengan hak asasi manusia universal sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan.

Alex de Waal, dari organisasi *African Rights*, percaya bahwa hanya ada beberapa LSM internasional yang telah mampu memainkan peran signifikan di Afrika.

“Amnesti Internasional mempertaruhkan reputasinya pada kontinuitas usahanya sendiri, usaha penyelidikan selanjutnya. Amnesti internasional tidak pernah berhenti untuk menindaklanjuti temuan penyelidikan yang telah mereka lakukan. Daya tahan semacam ini kurang dimiliki oleh LSM-LSM lain.” Tetapi ia juga mendapati bahwa berbagai pemerintahan, tumbuh semakin bijak oleh tempaan pengalaman pahitnya, cenderung untuk menindak berbagai pelanggaran mereka dan mencoba menyesuaikan ke pemerintahannya sesuai dengan mandat Amnesti Internasional. “Begitu Amnesti mengarahkan keprihatinan mereka pada masalah kasus penghilangan, sejumlah pemerintah pun menggunakan metode-metode lain dalam menghadapi pihak-pihak oposisi.” Ia menyebutkan rumah-rumah hantu di Sudan, di mana para anggota oposisi telah ditahan untuk jangka waktu singkat agar dapat mengelak dari intervensi Amnesti Internasional. “Mereka sangat yakin bahwa dalam beberapa minggu, Amnesti akan menemukan di mana para tahanan disekap, jika mereka berada dalam penjara reguler.” De Waal melanjutkan dengan menyatakan bahwa LSM-LSM tidak dapat mencegah manuver-manuver ini. Yang dapat Anda lakukan hanyalah mencoba untuk menjadi pihak yang dapat melompat mendahului mereka. Pemerintah juga telah melakukan permainan yang sama seperti yang kami lakukan. Hanya saja, mereka melakukannya lebih baik, karena mereka tidak memiliki halangan-halangan. Hal ini tidak perlu ditanggapi dengan sikap sinis, namun agaknya perlu dilakukan pendekatan yang agak lebih intensif.

Di sebagian besar negara Afrika, menurut Peter van der Horst dari *Amnesty International* cabang Belanda, telah terjadi krisis yang nyata dalam hak asasi manusia selama beberapa tahun silam. “Setelah runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989, sebagian besar dunia tiba-tiba diliputi kekuatan-kekuatan besar yang mulai menciptakan kondisi-kondisi ke arah proses demokratisasi. Hal ini berakibat pada berkurangnya bantuan resmi, yang tanpa itu, banyak rezim Afrika tidak akan dapat menopang negara-bangsa mereka. Beberapa negara nyaris runtuh total, sementara kini di negara-negara lain Anda hampir tidak dapat berbicara mengenai infrastruktur. Amnesti Internasional biasanya, secara tradisional, lebih berkonsentrasi pada

pertanggungjawaban pemerintah pusat. Dalam banyak kasus, hal itu tidak akan lagi efektif.”

Meski demikian, Van der Horst juga melihat kecenderungan yang positif dalam perkembangan LSM: “Gelombang yang sedikit banyak telah memaksa timbulnya demokratisasi ini, telah memiliki hasil-hasil yang positif di sejumlah negara. Di beberapa wilayah, kami menemukan orang-orang yang, dengan cara-cara mereka yang mengejutkan, tengah mencari variasi-variasi demokrasi bagi masyarakat Afrika. Keprihatinan yang sedang dan terus tumbuh terhadap hak asasi manusia masih belum bisa diandalkan secara penuh, dan organisasi-organisasi yang terlibat di dalamnya masih kekurangan informasi dan pengalaman. Di sinilah, Amnesty Internasional, sebagai sebuah organisasi internasional yang terkenal untuk bidang hak asasi manusia, memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan untuk menunjukkan perannya, dan itu dapat dilakukannya tanpa harus dengan menjadi sebuah organisasi tipikal *western*, yang untuk kesekian kalinya mencoba mengatakan kepada orang-orang Afrika tentang bagaimana mereka seharusnya menjalankan kehidupan mereka.”

## KESIMPULAN

### **Kata Rekonsiliasi**

Salah satu tujuan saya dalam buku ini adalah – sebagaimana telah tersajikan dalam uraian di depan – untuk memberikan gambaran skematik mengenai aspek-aspek tertentu dari proses rekonsiliasi. Hal ini dilakukan sebagai akibat dari kurangnya definisi atau analisis terhadap beberapa subjek dalam kepustakaan yang sudah saya pelajari, meskipun ternyata bahwa, dalam dunia perjuangan hak asasi manusia, penekanan sering diletakkan pada perlunya definisi dan suatu pendekatan sistematis. Keinginan untuk mendapatkan pengertian istilah secara tepat, pada dasarnya bukan hanya merupakan refleksi dari satu cara pemikiran legalistik tertentu yang berlaku umum bagi kebanyakan aktivis hak asasi manusia, dalam hal ini aktivis yang profesional. Agaknya hal ini lebih bersumber dari suatu kesadaran bahwa tanpa adanya definisi-definisi dan kerangka umum, akan terasa sangatlah sukar untuk melakukan komunikasi. Setiap kelompok yang resmi atau LSM yang mencoba untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang terjadi di bebukitan dan gunung-gemunung Filipina, di padang membentang (*veld*) nan luas Afrika Selatan, ataupun di lorong-lorong ruang bawah tanah KGB Moskow, harus menemukan kerangka yang aman berkaitan dengan terminologi dan metodologi yang dapat diakui secara internasional. Tanpa hal ini, maka hasil-hasil dari investigasi mereka akan jauh kurang memungkinkan untuk bisa dibahas oleh, misalnya, komisi PBB atau organisasi hak-hak asasi manusia internasional. Selain itu terdapat juga sebuah risiko yang sangat nyata bahwa dokumentasi itu mungkin tidak cukup konsisten untuk dapat berhasil

membawa para pelaku kejahatan ke pemeriksaan pengadilan. Dengan pikiran ini, saya juga telah meninjau lebih dekat pada beberapa istilah umum dari “kosa kata mengenai rekonsiliasi” yang ada, yang mencoba untuk membuat definisi dan deskripsi yang lebih khusus. Saya sama sekali tidak mengklaim telah menciptakan definisi-definisi yang cukup pasti untuk memuaskan pengacara internasional. Tujuan saya di sini semata-mata bersifat praktis: untuk memperluas pasokan kita mengenai “definisi yang bisa digunakan”.

Dalam bab terakhir ini, saya akan meneruskan pendekatan ini, yaitu menyajikan kesimpulan-kesimpulan saya dalam bentuk definisi-definisi yang bisa digunakan, dan juga, dalam tingkat tertentu, “rekomendasi-rekomendasi yang bisa diberikan”.

Selama dasawarsa terakhir telah menjadi semakin jelas bahwa proses pertanggungjawaban pembunuhan politik secara sistematis yang dilaksanakan di bawah rezim sebelumnya memang merupakan beban berat bagi suatu masyarakat. Orang-orang telah dianiaya, disiksa, “dihilangkan” dan dibunuh – biasanya oleh mesin negara, meskipun kelompok-kelompok oposisi mestinya juga ikut bertanggung jawab. Jari dapat menunjuk individu-individu tertentu, sebagai penyiksa dan pembunuh. Memang ada orang lain yang memberi perintah pada mereka, yang berurat berakar dalam otoritas-otoritas sipil dan militer – kadang-kadang merupakan figur-figur bayangan di balik regu kematian atau anggota-anggota siap siaga. Ada kategori lain mengenai orang-orang yang membantu memfasilitasi kejahatan-kejahatan atau pembunuhan-pembunuhan, atau yang kemakmuran dan pengaruhnya dibangun atas dasar represi: kaum birokrat, kaum industrialis, para anggota dari sistem hukum yang ada, para dokter, para jurnalis. Dan tentu saja, pada akhirnya, ada sejumlah besar masyarakat yang tidak melakukan protes dan tidak mengambil risiko dengan melakukan perlawanan. Ada kemungkinan bahwa mereka sebenarnya menyambut baik adanya pengambilalihan militer, sekalipun hanya pada awalnya, dengan harapan bahwa hukum dan ketertiban dapat ditegakkan kembali. Orang-orang asing yang tinggal di negara itu, atau yang terlibat dalam hubungan-hubungan politik atau

ekonomi dari luar negeri, harus juga memikul tanggung jawab, paling tidak, karena telah menutup mata, atau begitu mudahnya menerima versi-versi resmi tapi palsu mengenai berbagai peristiwa yang terjadi.

### **Keadilan dan Akuntabilitas**

Dalam situasi yang ideal, mereka yang bertanggung jawab atas berbagai tindak kejahatan represi akan dibawa ke pemeriksaan pengadilan, sekalipun hal itu hanya mungkin dilakukan setelah rezim mereka tumbang. Jauh di masa lampau, kesempatan ini dapat terjadi melalui intervensi dari pemerintah asing, seperti halnya dalam pengadilan militer di Nuremberg dan Tokyo. Akhir-akhir ini, dalam beberapa kasus, sebuah pemerintahan yang baru mendapatkan kemungkinan untuk melakukan penuntutan sebagaimana dengan kasus yang terjadi di Argentina setelah jatuhnya rezim militer. Namun demikian, pada akhirnya, bahkan dalam contoh-contoh kasus serupa, saat penuntutan tersebut ternyata berubah menjadi hanya sebuah kompromi. Laporan-laporan yang komprehensif dan resmi pun muncul, dan penghukuman-penghukuman telah dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan mulai dari para anggota pemerintahan hingga para prajurit berpangkat rendah atau pegawai rendahan. Namun demikian, ini sering diikuti, sebagaimana kita lihat, dengan pemberian amnesti, pembebasan awal, atau paling tidak, penundaan bagi penuntutan-penuntutan lebih lanjut.

Jika kemudian, ideal itu tidak mungkin dicapai, maka sejauh manakah hal itu bisa dicapai oleh sejumlah pemerintah yang sedang mencoba suatu tingkat rekonsiliasi? Pertanyaan ini tidak hanya penting bagi pemerintah dari negara yang bersangkutan. Jika negara-negara lain secara diam-diam menyetujui dilakukannya penyapuan menyeluruh terhadap pembunuhan massal, maka sebagai konsekuensinya, pemerintah-pemerintah itu tidak memiliki pilihan lain kecuali berurusan dengan pemerintah-pemerintah yang tangannya berlumuran darah, dan yang dalam

terminologi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat merupakan ancaman yang serius bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Rekonsiliasi memang sama relevannya baik bagi komunitas internasional maupun bagi bangsa itu sendiri. Salah satu dari ciri-ciri politik internasional yang paling mengguncangkan adalah bahwa beberapa pemerintahan tidak pernah merasa bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan berskala massal, bahkan pemerintahan tersebut kemudian tetap memegang kekuasaan yang lama. Indonesia dalam hal ini merupakan contoh yang jelas. Pemerintahan Suharto, yang telah menerima bantuan miliaran dolar setiap tahunnya, tidak pernah dipaksa selama tiga puluh tahun kekuasaannya, untuk mempertanggungjawabkan pembunuhan-pembunuhan terhadap 500.000 orang pada tahun 1965-1966. Pemerintah-pemerintah Cina, Iran, Irak (sebelum invasi Kuwait) dan Siria, sekadar menyebutkan beberapa contoh, telah membunuh ribuan atau ratusan ribu warga negara mereka sendiri demi konsekuensi yang kecil bagi urusan-urusan internasional mereka.

## **Kebenaran**

Masalah pokok bagi proses rekonsiliasi, dan sesungguhnya bagi semua kerja hak asasi manusia, tidak lain adalah kebutuhan akan penegakan kebenaran. Tanpa kebenaran, tidak ada keadilan yang dapat dicapai, tidak ada mediasi yang dapat membawa hasil, dan langkah-langkah kompensasi akan kurang memberikan arti yang nyata. Tetapi apakah sesungguhnya kebenaran itu?

Di negara-negara dengan keharusan untuk melepas beban masa lampau yang kejam, maka tentunya persoalan ini tidak semata-mata merupakan persoalan akademik yang mesti diserahkan kepada para filosof. Tetapi para filosof sebenarnya dapat membantu kita dalam memberikan definisi-definisi yang berguna.

Filosof Jerman Jürgen Habermas, dalam bukunya *Theory of Communicative Action*, mengemukakan sebuah teori tentang “kebenaran” yang terdiri dari tiga unsur.



*Pertama*, sebuah komunikasi yang bermaksud untuk menyampaikan kebenaran harus berhubungan dengan fakta-fakta. *Kedua*, hal itu harus tunduk pada sebuah sistem normatif. Di dalam sistem normatif itulah baik pihak yang membuat pernyataan maupun yang menerima pernyataan dapat membuat keputusan-keputusan. Dan *ketiga*, unsur yang paling menarik dan yang paling sulit untuk ditentukan adalah bahwa pernyataan yang benar seharusnya sungguh-sungguh, misalnya “sesuai dengan kenyataan”.

Dalam hal ini, situasi kamar konsultasi seorang dokter dapat digunakan sebagai contoh. Ketika saya mengunjungi dokter, saya ingin mengetahui fakta-fakta. Saya ingin mendengarkan fakta-fakta itu dalam bentuk yang dapat saya mengerti; saya ingin mendengarkan fakta-fakta itu dalam cara yang sedemikian rupa sehingga saya bisa yakin akan kebenaran fakta-fakta itu, dan dari orang yang memiliki integritas – seseorang yang menyajikan cerita kebenaran yang dapat menimbulkan daya tarik di hati saya. Definisi tiga tingkat mengenai kebenaran dari Habermas ini sangat berguna untuk diterapkan dalam bidang politik, meskipun ternyata bahwa setiap “kebenaran” perlu dikondisikan dengan tuntutan-tuntutan milik sebagian besar audiens dan mengkompromikannya dengan berbagai kepentingan-kepentingan dan kelompok-kelompok kekuasaan.

Apa yang kita harapkan dari sebuah “komisi kebenaran”, sebuah badan penyelidikan, atau mekanisme resmi apa pun untuk mempertanggungjawabkan masa lampau adalah *pertama* sekali soal fakta-fakta yang benar: deskripsi-deskripsi aktual mengenai kasus-kasus yang terjadi, suatu sumbangan yang akurat mengenai latar belakang dan mekanisme-mekanisme.

*Kedua*, kebenaran mengenai suatu investigasi atau laporan yang resmi mana pun juga terletak pada cara-cara normatif – dengan cara itulah investigasi dilakukan dan disajikan – sehingga diakui “cukup” memenuhi standar-standar internasional dan sesuai dengan pandangan masyarakat tentang “cara yang benar untuk sesuatu”. Misalnya, dikatakan lebih “benar”, tidak semata-mata berarti lebih bijaksana, jika kita mengungkapkan sebuah laporan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh sebagian

besar masyarakat dibandingkan dengan kalau diungkapkan dalam sebuah bentuk legal yang sangat bersifat teknis. Suatu pertimbangan hukum yang mendalam adalah sesuatu yang bersifat perlu bagi masyarakat hukum untuk memenuhi kewajibannya dalam mencari keadilan, tetapi menurut model Habermas ternyata hal tersebut dapat menjadi kurang “benar”. Aspek-aspek seremonial dari penyajian suatu investigasi juga merupakan bagian dari bidang normatif, karena aspek-aspek itu juga harus memenuhi kriteria norma-norma yang diterapkan dalam dan bagi peristiwa-peristiwa yang penting dan signifikan.

*Ketiga*, keadaan yang sebenarnya mengenai perbuatan tersebut harus tercermin dalam komitmen personal, bukti ketulusan hati dan kehadiran secara fisik di hadapan publik yaitu kehadiran dari mereka yang bertanggung jawab dalam investigasi tersebut, dan sejauh dapat dilakukan, mereka yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengimplementasikan temuan-temuannya.

### **Pendekatan-Pendekatan Terhadap Rekonsiliasi**

Saya yakin bahwa kita dapat membedakan tiga pendekatan terhadap rekonsiliasi yang berbeda yang telah digunakan oleh berbagai negara yang sedang dalam transisi di seluruh dunia.

Pendekatan pertama adalah *laporan komprehensif yang resmi*. Laporan-laporan dari komisi-komisi investigasi di Argentina dan khususnya di Chili merupakan contoh-contohnya. Laporan-laporan itu tidak hanya menyajikan fakta-fakta, tetapi juga menggunakan pertimbangan mengenai aspek-aspek “kebenaran” yang lain. Kedua laporan tersebut disesuaikan dengan norma-norma yang relevan, yang tidak hanya memenuhi standar nasional dan internasional, tetapi juga dengan menekankan pada tuntutan norma-norma susila yang umum dan norma kemanusiaan, serta membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mengembalikan ideal-ideal ini ke tempatnya yang

semestinya (misalnya, melalui pemberian kompensasi bagi keluarga-keluarga dari para korban, dan mendirikan taman atau tugu peringatan).

Aspek ketiga mengenai kebenaran, yakni integritas, ditegakkan melalui prestise serta perilaku para anggota komisi. Komisi Argentina, dipimpin oleh salah seorang pengarang terbaik negara ini, Ernesto Sabato, umumnya dipandang sebagai sebuah komisi yang anggotanya terdiri dari para anggota elite nasional paling handal dan hanya sedikit dari mereka yang tercemar secara politik. Hal yang sama juga berlaku bagi para anggota dari komisi Chili, yang selanjutnya mengadakan perjalanan secara luas ke berbagai pelosok negeri baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya laporan, agar dapat memberitahukan kepada penduduk mengenai apa yang sedang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya.

Pendekatan kedua adalah *penyingkapan secara individual*. Kita menemukan pendekatan ini terutama dalam “lustrasi” dan inisiatif-inisiatif serupa di Eropa Timur. Tidak ada laporan komprehensif yang dihasilkan oleh pemerintah – sejumlah pemerintah telah menyatakan bahwa hal itu tidak perlu, karena setiap orang sudah mengetahui kebenarannya. Namun demikian, setiap individu terkait diberi akses untuk mengetahui dokumentasi mengenai penganiayaan di masa lampau mereka, dan dokumentasi tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan kompensasi. Stasi dari Jerman Timur telah meninggalkan dokumen-dokumen yang tumpukannya kalau dipanjangkan bisa mencapai 180 kilometer, terdiri dari miliaran halaman; setiap orang dapat membaca catatan atau dokumen pribadinya sendiri. Di Republik Cehnya, pemerintah baru telah mendistribusikan sertifikat-sertifikat yang dapat digunakan secara formal untuk menyatakan bahwa orang itu *tidak* pernah bekerja untuk dinas rahasia. Sekitar 200.000 sertifikat ini telah diisi dan dikembalikan. Di Estonia, kira-kira 20.000 orang telah mengajukan permintaan untuk melihat catatan-catatan dokumen mereka, dan sebuah undang-undang yang didesain untuk mencegah penghancuran arsip-arsip itu telah disahkan (di Polandia sebagian besar telah dihancurkan). Penyingkapan individu ini biasanya telah disertai dengan keputusan

hakim individu: kepala Stasi dan penjaga-penjaga perbatasan di Jerman Timur, Presiden Zhikov di Bulgaria.

Pendekatan ini dapat, secara teknis, memenuhi ketiga kriteria kebenaran tersebut, tetapi masyarakat sering tidak merasa demikian. Para korban diberikan hak (individu) mereka dengan adanya sebuah kebenaran faktual, dan sedikit banyak dapat dipuaskan dengan pemenuhan norma-norma legal; tetapi kesan adanya “integritas” di dalamnya kadang-kadang terasa kurang. Karena tidak ada proses laporan secara kolektif, maka atmosfir kecurigaan tetap ada. Apakah mereka (tetangga, guru atau pegawai negeri) yang pernah bekerja untuk dinas rahasia dengan mudahnya akan melakukan kembali hal yang sama ketika peluang itu ada? Pada akhirnya, kecurigaan umum ini pun akan merebak menyelimuti negara yang melakukan pendekatan tersebut.

Pendekatan ketiga adalah *rekonsiliasi nasional*, sebuah bentuk rekonsiliasi yang terutama dapat dilihat di Afrika. Pada bulan Februari 1990, sebuah “konferensi nasional” di Benin, dalam tempo kurang dari sepuluh hari telah menyelesaikan sebuah transisi dari kediktatoran kaum Marxis ke negara dengan sistem multi-partai. Proses transisi tersebut sekaligus berarti ditutupnya buku daftar pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau. Selama berlangsungnya sebuah konferensi rekonsiliasi di Kongo tahun 1991, presiden negara itu meminta sebuah amnesti umum bagi lebih dari 3.000 pelaku pembunuhan politik yang dilakukan sejak tahun 1960. Uganda mulai mengerjakan laporan yang resmi pada tahun 1986; Namun demikian, laporan itu baru diterbitkan sembilan tahun kemudian, dan upaya-upaya terhadap konsiliasi nasional ternyata berujung pada pemberlakuan amnesti. Dari sudut pandang legal murni, hal ini merupakan mimpi buruk. Fakta-fakta yang benar tidak pernah terungkap secara telanjang, dan tidak ada jaminan bahwa norma-norma hukum dan sosial akan dipertahankan di masa depan. Namun demikian, rakyat sering menghargai “integritas” proses ini. Pemerintah-pemerintah yang mengikuti pendekatan ini sering tampak memiliki citra yang positif, baik oleh sebagian besar rakyat mereka sendiri maupun oleh opini publik di luar negeri, karena mampu melupakan atau mengurangi masa lampau mereka agar dapat menahan friksi etnik – sumber kekerasan politik yang paling

berbahaya. Di Mozambik dan Kamboja, misalnya, tampaknya tidak ada keinginan yang populer untuk melembagakan sebuah komisi kebenaran pada saat ini.

## **Ringkasan**

Sebuah ringkasan mengenai apa yang telah saya coba tunjukkan dalam buku ini tidak akan lengkap tanpa menyebutkan sejumlah besar wawancara dan pembicaraan dengan orang-orang yang paling terlibat secara dekat selama proses penulisan buku ini.

Di Johannesburg seorang yang bermata agak muram, Charles Nupen dari IMSSA, sebuah LSM yang mengkhususkan diri dalam konsiliasi, menyambut saya dengan “segar” setelah menikmati istirahat siang yang lelap – sesuatu yang sepantasnya diperoleh bagi seseorang yang secara reguler harus bekerja siang malam. Tugas-tugasnya membentang mulai dari menengahi konflik-konflik yang terjadi antara para majikan dan pegawai, atau antara kerumunan orang-orang yang sedang marah yang saling berhadapan satu sama lain di jalan-jalan kota, hingga mensupervisi pelaksanaan pemilihan umum. LSM-nya telah mendapatkan sukses yang besar: selama lebih dari sepuluh tahun lembaga itu telah menjadi sepuluh kali lebih besar. “Konsiliasi secara pasti merupakan sebuah pasar yang tumbuh di Afrika Selatan ....” katanya dengan senyum malu-malu.

Di sebuah kantor kecil di Buenos Aires, saya menemui Julio Strassera, seorang penuntut dalam pemeriksaan pengadilan yang dilakukan terhadap Junta. Hari-harinya dengan staf yang besar dan sekretaris yang banyak itu telah lama berlalu. Ia dapat menerima keputusan Presiden Alfonsin untuk menghentikan pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan selanjutnya – pada waktu itu telah terjadi tiga pemberontakan yang dilakukan oleh unit-unit militer; dengan adanya ancaman terhadap Anda, maka tidak ada yang lebih banyak dapat Anda lakukan pada saat itu. Tetapi ketika presiden baru, Menem, membebaskan para jenderal dari penjara – tidak, tindakan itu terasa keterlaluannya baginya. Strassera segera diberhentikan dari jabatannya

pada saat itu, yaitu sebagai wakil Argentina pada Komisi PBB untuk Hak- Asasi Manusia di Jenewa. Kini ia dengan tenang menjalankan praktek hukumnya.

Di Jenewa, Charles Harper juga berkantor di sebuah ruangan yang kecil, di salah satu ruangan sebuah bangunan kantor yang besar milik Dewan Gereja-Gereja Dunia. Sebagaimana dikatakannya sendiri, setelah tiga puluh tahun bekerja untuk hak asasi manusia, ia kini berenana untuk mengunduran diri. Sekalipun demikian, ia masih tampak bersemangat ketika ia menunjukkan hasil-hasil dari salah satu “kegiatan”-nya: sebuah buku yang paling asing yang pernah saya lihat. Sampul penutupnya putih, dan memuat judul yang kira-kira berbunyi “Instruksi-Instruksi Bagi Para Subkontraktor Dalam Industri Otomobil”. Bila sampul itu dibuka akan terlihat 400 halaman buku panjang, dengan *semua* informasi yang dapat dihimpun oleh berbagai gereja, mengenai *semua* personil militer di Columbia yang telah bersalah karena melakukan pelanggaran yang kejam: rincian-rincian karier mereka, pangkat, pos terakhir yang diketahui, di mana mereka berada selama pembunuhan massal ini atau itu, sebagian besar disertai dengan sebuah foto. “Kebenaran” terbentang di antara kami di atas meja.

Patricia Valdez kini telah kembali ke Buenos Aires setelah setahun di San Salvador, tempat ia sehari-hari bertugas untuk menjalankan Komisi Kebenaran. Laporan yang tebal penuh dengan tuduhan-tuduhan tertentu yang telah mendorong parlemen untuk menyatakan amnesti umum secepatnya. Meskipun demikian, ia yakin bahwa Komisi itu bermanfaat. Ia menunjukkan kepada saya hasil-hasil dari sebuah jajak pendapat di El Salvador selama bulan Juni 1993. Empat puluh lima persen dari populasi menyetujui laporan itu, 27 persen tidak menyetujui, dan 27 persen tidak berpendapat. Yang lebih penting, jika hasil-hasil tersebut dianalisis berdasarkan pada kelas sosial, maka persetujuan yang kuat khususnya berasal dari kalangan kelas pekerja.

Aileen Bacalso telah bekerja tanpa kenal lelah di kantornya yang jorok di Manila, dengan sebuah komputer dan sebuah telpon – keduanya secara reguler sering rusak. Ia menceritakan kepada saya bagaimana dukungan asing telah memungkinkannya untuk bisa menghadiri Konferensi Dunia PBB Tentang Hak Asasi

Manusia di Wina dalam musim panas tahun 1993. Dalam konferensi itulah ia bertanya kepada delegasi Filipina, kapan mereka merencanakan untuk menandatangani deklarasi PBB yang baru mengenai kasus-kasus penghilangan. Apakah mereka harus melakukan hal itu, balas pemimpin delegasi tersebut – bagaimanapun juga, deklarasi tersebut tidak mengikat. Namun demikian, mengikat atau tidak, deklarasi itu merupakan faktor yang pada akhirnya telah menggoyahkan pemerintah, setelah bertahun-tahun menunggu, untuk menggalang dana agar dapat memberikan kompensasi bagi keluarga-keluarga dari para tahanan “yang dihilangkan”.

Dengan ide dan pengalaman ini, serta pikiran dari banyak orang lain, dan dengan mengingat akan perbedaan-perbedaan yang sangat besar yang ada antara tradisi nasional, keadaan-keadaan material dan kebebasan opsi-opsi politik, maka saya akan mencoba menyaring beberapa kesimpulan dari bab-bab terdahulu.

Jelas, kesimpulan yang paling penting adalah bahwa tampaknya tidak ada model proses rekonsiliasi yang dapat diterapkan untuk semua atau sebagian besar negara. Tidak ada negara yang telah mengembangkan pendekatan yang, dalam cara apa pun, bisa diklaim bersifat universal. Begitu banyak perbedaan dalam karakter fase genesis atau pembentukan dan transformasi sebagaimana telah saya gambarkan dalam bab 2. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi bentuk, kandungan, kecepatan, dan jangkauan dari proses itu. Faktor-faktor ini mencakup pola represi dan kekerasan sebelumnya, latar belakang kultural, sistem hukum, jenis transisi, keadaan-keadaan sosio-ekonomi, posisi negara dalam tatanan orde dunia, dan akhirnya, mungkin faktor yang paling menentukan: posisi dan tingkat pengaruh yang dicoba untuk dimasukkan ke dalam situasi yang baru oleh angkatan bersenjata dan dinas keamanan.

Oleh karena itu, mungkin tidak ada model yang tepat, namun demikian terdapat persyaratan-persyaratan minimum tertentu.

- \* Persyaratan pertama – komponen esensial dari rekonsiliasi – adalah penegakkan kebenaran. Kebenaran ini harus benar secara faktual, harus disajikan menurut norma-norma yang diterima, dan disertai integritas yang

perlu bagi “transparansi”. Tidak ada masyarakat yang dapat berdamai dengan masa lalu, kecuali secara umum telah dilakukan pengakuan mengenai apa yang telah benar-benar terjadi. Orang yang mati harus dihitung dan dimakamkan, kisah dan kesaksian para korban harus dicatat, diceritakan dan diceritakan kembali, sampai seluruh kebenaran itu terungkap. Rekonsiliasi antar kelas-kelas atau kelompok-kelompok lain yang bertentangan dapat direalisasikan, hanya jika fakta-fakta, latar belakang, motif-motif dan emosi-emosi telah dikenali dan diakui oleh kedua belah pihak.

- \* Persyaratan kedua adalah bahwa rekonsiliasi harus memberikan kontribusi untuk memperkuat supremasi hukum, dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum internasional dan keadilan sosial. Semua langkah yang diperkenalkan dalam konteks rekonsiliasi harus memberikan kontribusi bagi perlindungan yang lebih baik kepada para warga negara dalam menghadapi kekerasan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok-kelompok kekuasaan yang lain. Lebih lanjut, prinsip-prinsip mengenai keadilan sosial menuntut bahwa secara khusus, mereka yang telah menderita paling banyak di bawah kekerasan dan represi, atau yang paling rentan terhadap hal itu di masa depan, seharusnya mendapatkan keuntungan dari rekonsiliasi.
- \* Persyaratan ketiga adalah bahwa rekonsiliasi bersifat demokratis, melalui proses yang dapat diverifikasi. Rekonsiliasi harus dibangun di atas landasan partisipasi maksimum dari sebanyak mungkin kelompok penduduk – khususnya mereka yang menjadi korban dari represi. Proses itu sendiri harus transparan atau visibel, dan terbuka bagi penelitian secara cermat oleh komunitas-komunitas nasional maupun internasional.
- \* Persyaratan keempat adalah bahwa para korban diberikan hak untuk mendapatkan kompensasi dan pemulihan, paling tidak, secara moral, dan bila



mungkin secara material. Hal ini tidak berarti bahwa sebuah kelompok yang telah dikorbankan di bawah pola-pola represi masa lampau, dengan sendirinya, dapat menuntut adanya superioritas moral melebihi kelompok-kelompok yang lain. Dasar bagi keputusan yang dapat diperkenankan terhadap penyalahgunaan-penyalahgunaan masa lampau adalah dasar untuk keputusan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip mengenai hak asasi manusia dan pelanggaran-pelanggarannya.

Di sini saya telah memfokuskan sajian buku ini pada negara-negara yang terlibat; tetapi ini tidak berarti bahwa tanggung jawab rekonsiliasi hanya berada di “perbatasan” tersebut. Ini merupakan kewajiban internasional. Karena tidak ada pemerintah yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memperhatikan “hak asasi manusia internasional yang tidak dapat dikurangi” (*non-derogable rights*), maka juga tidak ada pemerintah yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk mengambil langkah-langkah progresif guna membantu memperbaiki situasi yang diakibatkan pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau. Ini berarti bahwa komunitas internasional harus ikut memikul tanggung jawab atas masalah hak asasi dan pelanggaran terhadapnya. Promosi rekonsiliasi seharusnya menjadi aspirasi umum dan sebuah kriteria ketika berurusan dengan pemerintah-pemerintah lain serta badan-badan internasional dengan pemerintah yang bersangkutan. Isu yang barangkali telah membangkitkan tanggapan yang paling banyak dari publik umum adalah isu mengenai pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan terhadap para pelaku kejahatan; di mana ada kejahatan, di situ ada hukuman. Tetapi pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan semacam itu jarang berlangsung, dan walaupun ada, pemeriksaan semacam itu hanyalah dikenakan pada sebagian kecil dari begitu banyak pelaku kejahatan, dan sering bersifat tidak konklusif. Mereka yang berada di puncak hierarki jarang diikutsertakan, karena sebenarnya tidak mungkin untuk mengadili para pembunuh dari kelas tingkat tinggi negara tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan politik yang mendukung untuk itu. Lebih jauh, di bawah rezim yang represif mana pun, sejumlah besar orang memberikan kontribusi bagi

terjadinya represi, jumlah yang tentu saja terlalu banyak untuk dimintai keterangan. Hal ini seharusnya sama sekali tidak mengurangi aspirasi-aspirasi kita mengenai aturan hukum internasional, yang mencakup pengadilan kriminal internasional. Juga seharusnya tidak merusak keyakinan kita bahwa kejahatan memang pantas mendapatkan hukuman. Meski demikian, melakukan penuntutan atau tidak, selalu ada risiko yaitu berakhir pada kesia-siaan.

Keadilan memang esensial, tetapi hukum internasional tidak menuntut hukuman tanpa syarat untuk semua kasus; ia juga memberikan opsi amnesti. Sekalipun demikian, saya dapat menyatakan bahwa tidak mungkin ada rekonsiliasi yang sesungguhnya, kecuali bila paling tidak ada kesempatan untuk membawa para pelanggar yang paling buruk tersebut ke peradilan. Saya pikir bahwa ini telah ditunjukkan oleh pengalaman banyak negara sejak Perang Dunia II. Amnesti Internasional menyatakan posisi semacam bahkan dengan cara seperti memaksa: amnesti hanya dapat diterima *setelah* proses hukum yang semestinya telah diselesaikan secara layak.

Ada dua pertimbangan final mengenai subjek peradilan formal yang saya rasa harus ditekankan.

Pertama adalah bahwa sangatlah krusial bila pemerintah tidak, misalnya, menyebutkan “rekonsiliasi” sebagai alasan, untuk kembali pada keputusan-keputusan sebelumnya, untuk membatalkan langkah-langkah sebelumnya, atau untuk memutarbalikkan putusan-putusan pengadilan. Dilaksanakannya pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan adalah lebih baik dibandingkan dengan tidak dilangsungkannya pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan tersebut, tetapi proses-proses legal atau hukuman yang tidak adil, yang kemudian dicabut, dapat menimbulkan kerusakan dan malapetaka bagi kepercayaan publik baik terhadap pemerintah maupun pengadilan

Pertimbangan kedua adalah bahwa badan investigasi, semacam komisi kebenaran, semestinya tidak ditugaskan atau diberikan otorisasi untuk menangani pertanggungjawaban kriminal bagi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia,

namun badan itu seharusnya tidak secara publik menyatakan nama-nama para pelanggar. Nama-nama seharusnya hanya disebutkan dalam situasi di mana tertuduh memiliki peluang untuk membela diri mereka sendiri. Argumen yang menyatakan bahwa penerbitan identitas-identitas tersebut dapat dibenarkan sebagai cara penghukuman publik ketika penuntutan kriminal dipandang tidak mungkin dilakukan, tak dapat dipertahankan oleh standar-standar internasional.

Pada akhirnya, hemat saya, kita harus menyadari bahwa rekonsiliasi merupakan proses yang tak berujung. Tidak ada versi “resmi” mengenai kebenaran, bagaimanapun sempurnanya ia pada suatu saat tertentu, yang pernah dibiarkan untuk menjadi rintangan bagi interpretasi akademik yang *legitimate* di masa depan, bagi tuntutan-tuntutan hukum, pembahasan publik, dan bagi proses untuk memecahkan emosi-emosi yang sangat kuat. Fase penyesuaian kembali dapat berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selama periode itu, sejarah harus ditulis kembali, sebagai landasan psikologis dan material bagi masyarakat baru yang sedang secara gradual mengambil bentuk.

Pada tahun 1993, Presiden Havel dari Republik Cehnya berkata: “Adalah sungguh-sungguh mengherankan untuk menemukan bagaimana bisa, setelah beberapa dasawarsa sejarah dipalsukan dan terjadi manipulasi ideologis, tidak ada sesuatu pun yang terlupakan.” Perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia kemungkinan besar merupakan perjuangan untuk menentang tindakan melupakan kebenaran. Dalam perjuangan itu, rekonsiliasi tidak dapat menjadi sebuah akhir, tetapi memang paling tidak sebagai permulaan dari akhir.

## BIBLIOGRAFI

- Abakar, Mahamat Hassan, *Les Assassinats politiques sous le regime de Hissein Habré*, Naskah untuk Amnesti Internasional, Amsterdam, 1992
- Abuelas de Plaza de Mayo, *Niños desaparecidos por motivos políticos en la República Argentina (1976-1983) y la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo*, Naskah untuk Amnesti Internasional, Amsterdam, 1992
- Acuna, Carlos H. & Catalina Smulovitz, *Human Rights and Civil-Military Tensions in Argentine Transito*, Naskah untuk CEDES, Buenos Aires, 1993
- Adler, Nanci, *Victims of Soviet Terror: The Story of the Memorial Movement*. Praeger, London, 1993
- African Rights, *Letter to President Bizimungu of Rwanda*, 24 Juli 1994
- Albon, Mary, *The Project on Justice in Times of Transition*, New York: The Foundation for a Civil Society, 1994
- Amnesty International, *Annual Reports*
- Amnesty International Seksi Belanda, *Wordt vervolgd*, Majalah bulanan
- Amnesty International, *Paraguay – Investigations into Past Human Rights Violations*, 1990
- Amnesty International Seksi Belanda, *Political Killings and “Disappearances”. A Handbook for Action*. Amsterdam, 1993
- Amnesty International, *Political Killings and “Disappearances” in the 1990s*, 1993
- Amnesty International, *“Disappearances” and Political Killings. Human Rights Crisis of the 1990s. A Manual for Action*, 1994
- Arendt, Hannah, *The Human Condition*, New York, 1958
- Asmal, Kader, *Speech at the IDASA Conference “Dealing with the Past”*, Cape Town, 29 Juli 1994

- Asmal, Kader, *Victims, Survivors and Citizens – Human Rights, Reparations and Reconciliation*. Pidato Inaugurasi, Universitas Western Cape, Rangkaian Publikasi Seri A No.64, 1992
- Barcroft, Peter A., “The Presidential Pardon – A Flawed Solution”, *Human Rights Law Journal*, 14/11-12 (1993) hlm. 361-394
- Bassiouni, Cherif, “Introduction to the Draft Statute of an International Criminal Tribunal”, *9 Nouvelles Etudes Pénales*, 1992
- Bertschi, C. Charles, “Lustration and the Transition to Democracy. The Cases of Poland and Bulgaria” *East European Quarterly*, 2/4 (1995) hlm. 435-451
- Bianchi, Herman, *Gerechtigheid als vrijplaats*, Baarn, 1985
- Boraine, Alex dan Janet Levy (eds.), *Dealing with the Past*, , Cape Town: IDASA Institute, 1994
- Boraine, Alex dan Janet Levy (eds.), *The Healing of a Nation?*, Cape Town: Institute for Justice in Transisition, 1995
- Bren, Paulina, “Lustrition in the Czech and Slovak Reppublics” *RFE/RL Research Reports*, 2/29 (16 Juli 1993)
- Bronkhorst, Daan, *Conciliation in the Aftermath of Political Killings*, Naskah untuk Amnesti Internasional, Amsterdam, 1992
- Bronkhorst, Daan, *Observations on NGOs in the Philippines. Notes of a Field Study*, Utrecht: Naskah Bantuan Antar-Gereja Belanda,Utrech,1993
- Bronkhorst, Daan, *The Role of NGOs in Transition*, Naskah untuk Bantuan Antar-Gereja Belanda, Utrcht, 1994
- Brysk, Allison, “The Politics of Measurement. The Contested Count of the Dissappeared in Argentina” *Human Rights Quarterly*, 16/4 (1994) hal. 676-692
- Buijtenhijis, Rob & Elly Rijnierse, *Domocratization in Sub-Saharan Africa. An Overview of the Literature*, Leiden: Pusat Studi-Studi Afrika, 1993

- Carter Center of Emory University, *Investigating Abuses and Introducing Safeguards in the Democratization Process*. Konferensi bersidang pada tanggal 6-7 Juli 1992. Rangkaian Laporan Konferensi 6:1
- Carver, Richard, *Called to Account. How African Governments Investigate Human Rights Violations*, New York: Human Rights Watch/Afrika, 1991
- Center for Constitutional Rights, New York: *Dockets*, 1989
- Chilean National Commission on Truth and Reconciliation Report.*, Universitas Notre Dame: Pusat untuk Hak-hak sipil dan Hak-hak Asasi Manusia 1993
- Crawford, Kathryn Lee, "Due Obedience and the Rights of Victims", *Human Rights Quarterly*, 12/1 (1990) hlm. 17-52
- Crelinsten, Ronald D., "After th Fall. Prosecuting Perpetrators of Gross Human Rights Violations", *PIOOM Report*, Universitas Leiden, Musim Panas 1993
- Duggy, Terence, "Toward a Culture of Human Rights in Cambodia", *Human Rights Quarterly*, 16/1(1994) hlm. 82-103
- Dworkin, Richard, *Taking Rights Seriously*, Harvard, 1977
- Edelenbosch, Carla, "Human Rights Violations – A Duty to Prosecute?", *Leiden Journal of International Law*, 7/2 (1994), hlm. 5-22
- Encyclopedia of Social Sciences*, New York, 1968
- Escobar, Arturo dan Sonia Alvarez (eds.), *The Making of Social Movements in Latin America. Identity, Strategy, and Democracy*, Westview Press, 1992
- Fowler, Alan, "The role of NGOs in Changing State-Society Relations. Perspective from Eastern and Southern Africa", *Development Policy Review*, 9(1) hlm.53-84
- Garcia, Ed, *A Distant Peace. Human Rights and People's Participation in Conflict Resolution*, Manila, 1991
- Gauding, Anna-Karin, *Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad*, Santiago de Chile: Diakonia, 1991
- Goldman, Robert Kogod, "International Law and Amnesty Laws", *Human Rights Internet Reporter*, 12/2 (1988) hlm. 9-11.

- Green, Robin, *A Step too Far. Explorations into Reconciliation*, London, 1990.
- Guest, Ian, "On Trial", *Series of the Open Society Institute*, Washington D.C., Januari 1995.
- Habermas, Jürgen, *The Theory of Communicative Action*, London, 1984.
- Havel, Vaclav, "The Post Communist Nightmare", *New York Review of Books*, 27 Mei 1993.
- Hayner, Prinsilla B, "Fifteen Truth Commissions – 1974 to 1994, Acomparative Study", *Human Rights Quarterly*, 16/4 (1994) hlm. 597-655
- Hebel, Herman von, "An International Tribunal for the Former Yugoslavia", *Netherlands Quarterly on Human Rights*, 1993/11.
- Heinz, Wolfgang, "Motives for 'Disappearances' in Argentina, Chile and Uruguay in the 1970s", *Netherlands Quarterly on Human Rights*, 1995/1, hlm. 51 – 64.
- Herman, Judith Lewis, *Trauma and Recovery*, New York, 1992
- Herz, John (ed.), *From Dictatorship to Democracy*, London, 1992
- Hojman, David E., *Chile: The Political Economy of Development and Democracy in the 1990s*, Universitas Pittsburg Press, 1993.
- Holiday, David, "Building the Peace: Preliminary Lessons from El Salvador", *Journal of International Affairs*, Columbia University, New York, 46/2 (1993) hlm. 415-438
- "Holocausts and human rights law", *Boston College Third World Law Journal*, 12/23, hlm. 241-267
- Human Rights in Developing Countries Yearbooks*, Kehl, 1989
- Human Rights Watch/Americas, *Challenging Impunity. The "Ley de Caducidad" and the Referendum in Uruguay*, Maret 1989
- Human Rights Watch/Americas, *Human Rights and the "Politics of Agreements", Chile During President Aylwin's First Year*, Juli 1991
- Human Rigths Watch/Americas, *Truth and Partial Justice in Argentina. An Update*, April 1991.

- Human Rights Watch/Americas, *Chile-The Struggle for Truth and Justice for Past Human Rights Violations*, Juli 1992
- Human Rights Watch/Americas, *El Salvador – Peace and Human Rights Successes and Shortcomings of the United Nations Observer Mission in El Salvador*, September 1992
- Human Rights Watch/Africa, *South Africa – Accounting for the Past, The Lessons for South Africa from Latin America*, Oktober 1992
- Human Rights Watch/Americas, *Bolivia – The Trial of Responsibilities*, September 1993
- Human Rights Watch/Americas, *Chile-Unsettled Business. Human Rights in Chile at the Start of the Frei Presidency*, Mei 1994
- Huyse, L, *Dansen op het slappe koord. Hoe jonge democratieën omgaan met de last van het verleden*, Tweede Daalderlezing, Rijksuniversiteit Liden, 18 Maret 1995
- International Commission of Jurists, *Justice not Impunity. International Meeting on Impunity of Perpetrators of Gross Human Rights Violations*, Jenewa, 1992
- Jong, Loe de, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog*, Bagian 12a (Bijzondere rechts-pleging), Staatsuitgeverij, 1988
- Justitia et Pax/CEBEMO, *Oegstgeest Colloquium. Human Rights, Democratization and Development – The Role of NGOs in the Advancement of Civil Society*, September 1993
- KAIROS, *Mensenrechten en verzoening in Zuid-Afrika*, Utrecht, 1995
- Kerkvliet, Benedict & Resil Mojares (eds.), *From Marcos to Aquino*, Ateneo de Manila University Press, 1992
- Lawyers Committee for Human Rights, *Impunity – Prosecutions of Human Rights Violations in the Philippines*, New York, 1991
- Laqueur, Walter & Barry Rubin (eds.), *The Human Rights Reader*, New York, 1989
- Malamud-Goti, Jaime, “Transitional Government in the Breach. Why Punish State Criminals?”, *Human Rights Quarterly*, 12/1 (1990) hlm. 1-16



- Malin, Andrea, "Mothers Who Won't Disappear", *Human Rights Quarterly*, 16/2 (1994) hlm. 187-213
- McKinstry & Lindsnaes, *The Role of Voluntary Organizations in Emerging Democracies. Experience and Strategies in Eastern and Central Europe and in South Africa*, Danish Center for Human Rights, 1993
- Mensen, Bernhard, *Schuld und Versöhnung in verschiedenen Religionen*, Sankt Augustin, 1986
- Mignone, Emilio, *Derechos humanos y sociedad. El caso argentino*, CELS, Buenos Aires, 1991
- Neier, Aryeh, "What Should Be Done About the Guilty?", *New York Review of Books*, 1 Februari 1990, hlm. 34
- Netherlands Institute of Human Rights, "Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms", *Netherlands Quarterly on Human Rights*, Isu Khusus, 1993
- Nunca más, A Report by Argentina's National Commission on Disappeared People*, London, 1986
- Offe, Charles, "Coming to terms with past injustices", *Archives Européennes de Sociologie*, 33 (1992)
- Orentlicher, Diane F, "Settling Accounts, The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime", *Yale Law Review*, 100/8 (1991) hlm. 2537-2615
- Permanent People's Tribunal, *Proceedings on Impunity for Crimes against Humanity in Latin America*, Bogota, 1991
- Philippines Commission on Human Rights, *Performance Report on CHR Operations*, Manila, 1991
- Pion-Berlin, David, "To Prosecute or to Pardon? Human Rights Decisions in the Latin American Southern Cone", *Human Rights Quarterly*, 16/1 (1990) hlm. 105-120

- Plutarch, *The Rise and Fall of Athens*, diterjemahkan oleh Ian Scott-Kilvert, Penguin, 1960
- Popp, Gregor, *Die Grossen der Menschenrechte*, Wurzburg, 1988
- Quaritsch, Helmut, “Ueber Bürgerkriegs – und Feind-Amnestien.Rudolf Morsey zum 65. Geburtstag am 16. Oktober 1992”, *Der Staat* (Berlin), hlm. 389-418
- Rodley, Nigel, *The Treatment of Prisoners under International Law*, Oxford University Press, 1987.
- Roth-Arriaza, Naomi, “State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law”, *California Law Review*, 78 (1990) hlm. 451-513
- Rorty, Richard, *Contingency, Irony and Solidarity*, Cambridge (Mass.), 1989
- Rosenberg, Tina, “Overcoming the Legacies of Dictatorship”, *Foreign Affairs*, 74/3 (1995) hlm. 134-153
- Rosenberg, Tina, *The Haunted Land. Facing Europe’s Ghost after Communism*, Random House, 1995
- Schreiter, Robert, *Reconciliation. Mission and Ministry in a Changing Social Order*, Maryknoll, 1992
- Schwartz, Herman, “Lustration in Eastern Europe”, *Parker School Journal of East European Law*, ½ (1994) hlm. 141-170-1
- Silva, Patricio, “State, Politics and the Idea of Social Justice in Chile”, *Development and Change*, 24 (1993) hlm. 465-486
- Simpson, Graeme, *Proposed Legislation on Amnesty/Indemnity and the Establishment of a Truth and Reconciliation Commission*, Centre for the Study of Violence and Reconciliation, Johannesburg, 1994
- Simpson, John & Jana Bennet, *The Disappeared*, Sphere Books, 1986
- Sparks, Allister, *Tomorrow is Another Country*, Sandton, 1994
- Stalker, John, *Ireland – “Shoot to Kill” and the “Affair”*, Penguin, 1988
- Stover, Leon, *The Cultural Ecology of Chinese Civilization*, New York, 1974
- Timerman, Jacobo, *Chile*, Picador, 1987

- United Nations, *El Salvador – From Madness to Hope*, New York, 1993
- United Nations Commission on Human Rights, *Study Concerning the Right to Restitution, and Fundamental Freedoms*, Laporan Final oleh Mr. Theo van Boven, Jenewa, 1993
- United Nations Economic and Social Council, *Study on Amnesty Laws and Their Role in the Safeguard and Promotion of Human Rights*, Laporan Pendahuluan oleh Mr. Louis Joinet, Jenewa, 1985
- US Government, Washington, *Transitional Justice. How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes*, (draft dari pekerjaan yang sedang berjalan.) 1994
- Versöhnung, aktuelle Aspekte eines biblischen Themas*. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft, Berlin, 1990
- Walker, David, *The Oxford Companion to Law*, Oxford, 1980
- Wals, James, “Can Justice Even Be Done?”, *Time Magazine*, 22 Mei 1995
- Weschler, Lawrence, *A Miracle a Universe: Settling Accounts with Tortures*, New York, 1980
- Weschler, Lawrence, “The Velvet Purge. The Trial of Jan Kavan”, *The New Yorker*, 19 Oktober 1992, hlm. 66-96.
- Zalaquett, Jose, “Menghadapi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh mantan pemerintah-pemerintah: prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dan pengekangan-pengekangan politik”, *State Crimes, Punishment or Pardom?*, Aspen Institute, 1989
- Zalaquett, Jose, “Balancing Ethical Imperatives and Political Restraints”, Ceramah Memorial untuk The Mathew O. Tobriner, *Hastings Law Journal*, 43/6 (1992) hlm. 1425 – 1438.

Dapatkah kita bersikap pura-pura tidak tahu atau bahkan sengaja tidak mau tahu dan dengan demikian tidak mau peduli terhadap ceceran darah, cabikan daging dan kulit, serakan tulang-belulang, erangan megap-megap asal terdalam jiwa nan traumatis dari setiap anak negeri yang menjadi korban praktek ketidakadilan dan kekerasan rezim otoriter di masa lalu? Merenangi masa sekarang dan menjelangi masa depan tanpa sempat merefleksikan dan bahkan menggugat masa lalu adalah suatu kenaifan. Lebih lagi, itu merupakan pengkhianatan terhadap masa depan itu sendiri. Maka, tidak bisa tidak, harus ada jalan keluar. Harus ada jalan keluar untuk menyikapi sejarah kelam kekerasan, ketidakadilan, dan kejahatan masa lalu di negeri ini.

Adalah ide dan konsep tentang komisi “kebenaran dan rekonsiliasi” yang bisa kita harapkan untuk membawa kita keluar dari kemelut menipu sejarah. Barangkali bukan satu-satunya, memang. Namun, sebagai alternatif, mengapa tidak dicoba.

Buku ini ditulis oleh Daan Bronkhorst, seorang mantan Direktur Badan Amnesti Internasional yang telah menggeluti masalah hak asasi manusia selama belasan tahun. Dalam buku ini Bronkhorst mengajak kita untuk menyadari bahwa kita tidak harus berjalan membungkuk gara-gara beratnya beban masa lalu. Untuk itu, ide tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagai salah satu alternatif perlu didiseminasikan dan disosialisasikan. Tentang apa dan bagaimanakah komisi kebenaran itu, mengapa diperlukan, bagaimana pengalaman negara-negara lain dengan penyelesaian kekerasan masa lalu dengan menggunakan institusi tersebut beserta catatan kesuksesan dan kegagalannya, Bronkhorst menyajikannya dengan cermat dan jenius berdasarkan keluasan wawasan dan kedalaman pengetahuannya. Jauh di luar itu, buku ini sangat pas dari segi waktu dan permasalahan. Bagi para pejuang keadilan dan hak asasi manusia di negeri kita, buku ini bisa menjadi salah satu “teman seperjalanan”.